



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 53 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan yang memerlukan penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka meningkatkan pendapatan dan mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin serta pemenuhan hak-hak dasar masyarakat secara layak melalui pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan untuk untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka menciptakan sinergitas dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sukoharjo diperlukan langkah dengan menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan arah kebijakan, program dan kegiatan untuk menurunkan angka kemiskinan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah dan rencana aksi Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kemiskinan adalah kondisi ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan.
6. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
7. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD adalah rencana kebijakan pembangunan Daerah di bidang penanggulangan Kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan lintas sektor dalam Penanggulangan Kemiskinan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menggambarkan kondisi kemiskinan saat ini dan kondisi kemiskinan di Daerah yang ingin dicapai 5 (lima) tahun kedepan;
- b. menegaskan komitmen dan mendorong sinergi berbagai upaya Penanggulangan Kemiskinan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah untuk mengatasi kemiskinan di Daerah; dan
- c. menjadi salah satu tolok ukur dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan.

BAB II

RKPD

Pasal 4

RPKD Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman upaya percepatan Penanggulangan Kemiskinan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan Daerah pada tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 yang memuat bentuk arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan beserta indikatif penganggarnya.

Pasal 5

- (1) RPKD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. bab I : pendahuluan;
 - b. bab II : kondisi umum Daerah;
 - c. bab III : profil Kemiskinan Daerah;
 - d. bab IV : prioritas program;
 - e. bab V : lokasi prioritas; dan
 - f. bab VI : penutup;
- (2) RPKD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

RPKD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan dalam upaya percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah.

BAB III PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPKD Tahun 2025-2029.
- (2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPKD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keanggotaan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- (4) Susunan keanggotaan Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. penanggungjawab : Bupati;
 - b. ketua : Wakil Bupati;
 - c. wakil ketua : Sekretaris Daerah;
 - d. sekretaris : kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan;
 - e. wakil sekretaris :
 1. kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang sosial;
 2. kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 3. kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - f. kelompok pengelola program:
 1. koordinator kelompok pengelola program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu yaitu asisten yang membidangi pemerintahan dan/atau kesejahteraan rakyat; dan
 2. koordinator kelompok pengelola program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil yaitu asisten yang membidangi perekonomian dan pembangunan;
 - g. anggota :
 1. kepala dan unsur Perangkat Daerah yang berkaitan dengan Penanggulangan Kemiskinan;
 2. perwakilan masyarakat;
 3. perwakilan dunia usaha; dan
 4. pemangku kepentingan yang berkaitan dengan Penanggulangan Kemiskinan.

- (5) Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPKD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan RPKD Tahun 2025-2029 dibebankan pada:

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Dalam hal Peraturan Bupati tentang RPKD Tahun 2025-2029 belum diundangkan, maka penyusunan rencana aksi tahunan dan penyusunan laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan tahun 2025 masih berpedoman pada RPKD 2022-2026.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2022 tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2022-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 92), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 15 Desember 2025

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 15 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

ABDUL HARIS WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2025 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

TEGUH PRAMONO,SH,MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19710429 199803 1 003

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
 NOMOR 53 TAHUN 2025
 TENTANG
 RENCANA PENANGGULANGAN
 KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN
 SUKOHARJO TAHUN 2025-2029

RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

BAB I
 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan permasalahan multidimensional yang tidak hanya terkait dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga dengan keterbatasan akses terhadap layanan dasar, pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak, infrastruktur, pangan, dan jaminan sosial. Dalam konteks pembangunan daerah, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan individu untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup secara bermartabat dan berkelanjutan (Todaro et al., 2015). Teori *multidimensional poverty* menegaskan bahwa dimensi deprivasi yang dialami masyarakat miskin saling berhubungan dan memperkuat satu sama lain, sehingga pendekatan sektoral semata tidak memadai (Alkire et al., 2011b). Sementara dari perspektif *capability approach* (Sen 2006), kemiskinan bukan sekadar kekurangan sumber daya, melainkan keterbatasan kapabilitas seseorang untuk menjalani kehidupan yang bernilai.

Kabupaten Sukoharjo, sebagai bagian dari wilayah strategis Subosukowonosraten, telah menunjukkan kemajuan ekonomi yang relatif baik dengan laju pertumbuhan ekonomi rata-rata di atas 5 persen selama periode 2020–2024. Namun, masih terdapat tantangan signifikan dalam mengatasi kemiskinan, terutama pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah dan rentan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS, 2025), Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS, 2025), persentase penduduk miskin Kabupaten Sukoharjo menurun dari 8,23 (delapan koma dua puluh tiga persen) pada 2021 menjadi 6,83 (enam koma delapan puluh tiga persen) pada 2025, atau turun sekitar 1,4 (satu koma empat) poin persentase dalam lima tahun terakhir. Capaian ini lebih baik dibandingkan rata-rata Jawa Tengah 9,48 (Sembilan koma empat delapan persen) dan nasional 8,47 (delapan koma empat tujuh persen) pada tahun yang sama. Dalam konteks regional, Sukoharjo menempati peringkat ke-10 dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah dengan tingkat kemiskinan terendah, menunjukkan arah penurunan yang konsisten dan terukur.

Secara absolut, jumlah penduduk miskin menurun signifikan dari 73,84 (tujuh puluh tiga koma delapan puluh empat) ribu jiwa pada 2021 menjadi 62,66 (enam puluh dua koma delapan belas) ribu jiwa pada 2025, atau berkurang sekitar 11,18 (sebelas koma delapan belas) ribu jiwa. Penurunan ini memperlihatkan bahwa kebijakan daerah mulai efektif menjangkau kelompok miskin ekstrem dan rumah tangga hampir miskin.

Lebih lanjut, indikator Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Sukoharjo juga membaik, dari 0,91 (nol koma Sembilan puluh satu) pada 2021 menjadi 0,62 (nol koma enam puluh dua) pada 2025, yang berarti jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin kecil. Demikian pula Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menurun dari 0,21 (nol koma dua puluh satu) pada 2021 menjadi 0,10 (nol koma sepuluh) pada 2025, menandakan bahwa kesenjangan antarpenduduk miskin di wilayah ini semakin sempit. Capaian ini diperkuat oleh data kemiskinan ekstrem, yang menunjukkan penurunan drastis dari 2,52 (dua koma lima puluh dua) persen pada 2020 menjadi hanya 0,42 (nol koma empat puluh dua) persen pada 2024, jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata Jawa Tengah (0,33 persen) dan mendekati kondisi ideal penghapusan kemiskinan ekstrem di bawah 1(satu) persen sebagaimana target RPJMN 2025–2029. Secara empiris, tren penurunan ini memperlihatkan bahwa kebijakan daerah mulai efektif menjangkau kelompok miskin ekstrem dan rumah tangga hampir miskin. Meskipun demikian, kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat belum memperoleh manfaat optimal dari pembangunan yang telah dilakukan, selaras dengan teori *trickle-down effect* yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak secara otomatis menurunkan kemiskinan tanpa kebijakan redistributif dan intervensi sosial yang terarah (Ravallion, 2018).

Isu penurunan angka kemiskinan merupakan isu yang berlaku universal baik secara Global, Nasional, Provinsi maupun Kabupaten Kota. Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable Development Goals (SDGs) bahwa Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional. Secara nasional, penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. arah kebijakan penanggulangan kemiskinan diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024 tentang Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) yang menegaskan perlunya koordinasi lintas sektor dalam mempercepat pengentasan kemiskinan secara terpadu. Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan berperan sebagai lembaga nonstruktural di bawah Presiden yang mengoordinasikan, menyelaraskan, serta mengendalikan efektivitas kebijakan nasional pengentasan kemiskinan. Badan Percepatan

Pengentasan Kemiskinan telah mengembangkan Rencana Induk Percepatan Pengentasan Kemiskinan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan 2025–2029, yang mengusung lima pilar strategis: (1) sistem penargetan nasional berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), (2) perlindungan sosial yang komprehensif, inklusif, dan adaptif, (3) strategi graduasi kemiskinan menuju kemandirian, (4) pemberdayaan ekonomi melalui pendekatan *semi closed-loop supply chain*, serta (5) integrasi pembiayaan melalui Satu Dana Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Di tingkat daerah, pelaksanaan koordinasi lintas sektor diatur melalui Permendagri Nomor 53 Tahun 2020 yang mewajibkan pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) untuk menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) dan Rencana Aksi Tahunan (RAT) sebagai instrumen perencanaan lima tahunan dan tahunan di bidang penanggulangan kemiskinan.

Kedua regulasi tersebut menjadi dasar hukum penyusunan RPKD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025–2029 menjadi instrumen strategis untuk mengoordinasikan program lintas bidang yang mendukung penurunan kemiskinan secara signifikan dan berkelanjutan, serta merupakan dokumen turunan dari Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029. Selain itu, RPKD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025–2029 perlu memperhatikan arah kebijakan dalam Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional. Dokumen ini diarahkan untuk mengintegrasikan kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah dengan target nasional.

Pendekatan yang digunakan dalam penanggulangan kemiskinan daerah bersifat multidimensi dan lintas bidang. Bidang-bidang tersebut meliputi:

1) Bidang Pendidikan

Pendidikan merupakan investasi modal manusia (*human capital investment*) yang berperan besar dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan peluang mobilitas sosial vertikal (Becker 1995). Pendidikan merupakan faktor kunci dalam mengurangi kemiskinan dengan meningkatkan produktivitas individu dan potensi pendapatan. Studi menunjukkan bahwa pendidikan secara signifikan berdampak pada variasi pendapatan dan dapat mematahkan jebakan kemiskinan antar generasi (Pohan dan Vitale, 2016; Wilantari, 2021). Oleh karena itu, peningkatan kualitas pendidikan dasar, vokasi, dan literasi finansial menjadi kunci dalam mengurangi kemiskinan jangka panjang.

2) Bidang Kesehatan

Kesehatan yang buruk menurunkan kemampuan produktif rumah tangga dan meningkatkan risiko kemiskinan melalui beban biaya pengobatan (Grossman, 1972). Rumah tangga dengan anggota keluarga

yang sakit kronis menghadapi risiko kemiskinan yang tinggi, karena penyakit kronis sering menyebabkan biaya pengobatan yang signifikan dan pendapatan berkurang karena ketidakmampuan untuk bekerja (Jayathilaka et al., 2020). Di daerah pedesaan, prevalensi kemiskinan lebih tinggi di antara keluarga dengan anggota lanjut usia yang menderita penyakit kronis, menyoroti perlunya intervensi kesehatan yang ditargetkan (Ma et al., 2022). Oleh karena itu, intervensi dalam bidang kesehatan diarahkan pada perluasan akses layanan kesehatan dasar, peningkatan cakupan JKN, dan pencegahan stunting.

- 3) Bidang Ketenagakerjaan dan Pemberdayaan Ekonomi
Ketidakstabilan pekerjaan dan rendahnya kualitas kerja menjadi penyebab langsung kemiskinan (Fields, 2012). Peningkatan keterampilan tenaga kerja, pengembangan kewirausahaan, serta penciptaan lapangan kerja hijau dan padat karya menjadi menjadi pendorong utama peningkatan pendapatan dan pengurangan kemiskinan (Cho, 2015; Silva et al., 2015). BP Taskin menekankan pentingnya ekosistem *semi closed-loop supply chain* untuk mengintegrasikan UMKM lokal dalam rantai nilai ekonomi nasional.
- 4) Bidang Infrastruktur Dasar
Akses terhadap infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, dan perumahan layak merupakan faktor penting dalam pengurangan kemiskinan (Liu et al., 2023; Modebe et al., 2012). Menurut data RPJMD Kabupaten Sukoharjo 2025–2029, sekitar 12 persen rumah tangga di wilayah pedesaan masih belum memiliki akses sanitasi aman dan air minum layak. Penyediaan infrastruktur dasar yang merata akan memperkuat konektivitas ekonomi dan menurunkan biaya sosial masyarakat miskin.
- 5) Bidang Ketahanan Pangan
Ketahanan pangan berkorelasi langsung dengan kesejahteraan rumah tangga. Menurut FAO (2022), penurunan ketersediaan pangan bergizi berdampak pada meningkatnya kerentanan kemiskinan jangka panjang. Peningkatan produktivitas pertanian kecil dan penguatan sistem distribusi pangan berperan signifikan dalam menurunkan tingkat kemiskinan pedesaan (Abraham and Pingali 2020).
- 6) Bidang Sosial
Perlindungan sosial adaptif berfungsi sebagai jaring pengaman ekonomi bagi masyarakat rentan, terutama pada kondisi krisis dan bencana (Bowen et al., 2020; Davies et al., 2013). *Rencana Induk BP Taskin 2025–2029* menegaskan pentingnya integrasi program bantuan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan berbasis komunitas dalam memperkuat daya tahan sosial masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan teori *social resilience* yang menekankan kemampuan masyarakat untuk pulih dari guncangan ekonomi dan sosial (Adger, 2000).

Dengan demikian, RPKD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025–2029 menjadi instrumen utama dalam mengintegrasikan kebijakan dan program lintas bidang tersebut. Dokumen ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teknokratis, tetapi juga sebagai komitmen daerah terhadap pencapaian target nasional pengentasan kemiskinan ekstrem di bawah 1 persen pada tahun 2026 dan kemiskinan relatif 4,5–5 (empat koma lima – lima) persen pada tahun 2029 sesuai dengan arahan BP Taskin dan RPJMN 2025–2029. Keberadaan RPKD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2029 menjadi penting sebagai acuan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan daerah dalam rangka penanggulangan kemiskinan bagi seluruh pemangku kepentingan, terutama perangkat daerah lingkup Pemerintahan Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2026-2030.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 – 2029 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 Tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
10. Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024 tentang Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 359);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
12. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional;
13. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 323);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 333); dan
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari tersusunnya Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 – 2029 sebagai acuan lintas sektor dalam penanggulangan kemiskinan.

Adapun tujuan dari tersusunnya Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 – 2029 ini adalah:

1. Menggambarkan kondisi kemiskinan Kabupaten Sukoharjo saat ini dan kondisi kemiskinan Kabupaten Sukoharjo yang ingin dicapai 5 (lima) tahun kedepan;

2. Menegaskan komitmen dan mendorong sinergi berbagai upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Sukoharjo untuk mengatasi kemiskinan di Kabupaten Sukoharjo;
3. Menjadi salah satu tolok ukur dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

1.4. Sistematika

Sistematika Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 – 2029, yaitu:

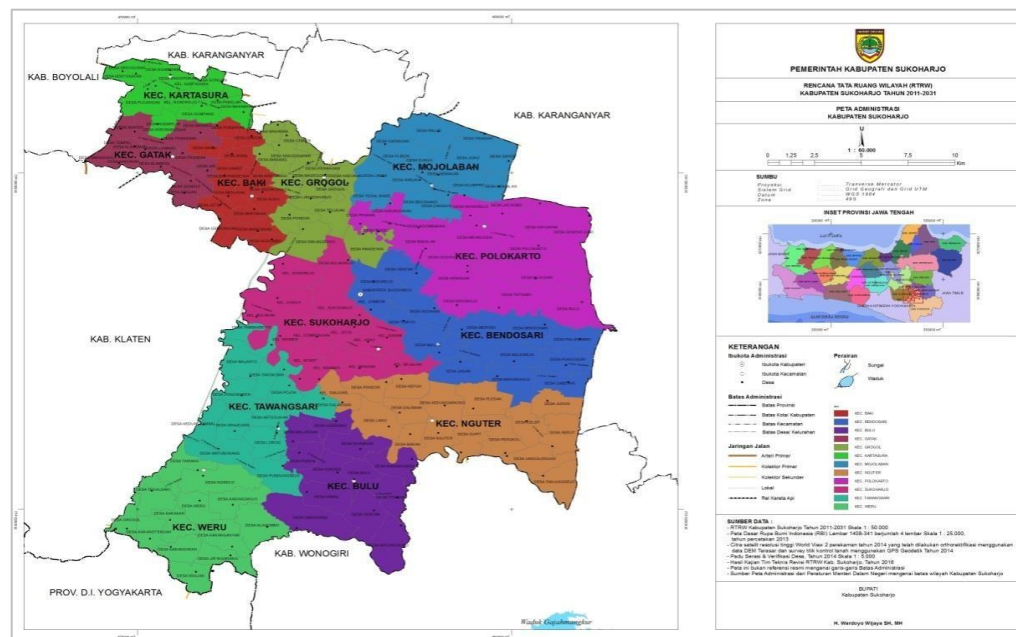
- BAB I. Pendahuluan, memuat latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum, ruang lingkup dan sistematika.
- BAB II. Kondisi Umum Daerah, memuat aspek geografi, aspek demografi dan aspek kesejahteraan masyarakat.
- BAB III. Profil Kemiskinan Daerah, memuat kondisi kemiskinan konsumsi, kondisi kemiskinan non konsumsi, determinan kemiskinan dan isu strategis.
- BAB IV. Prioritas Program, memuat kebijakan penanggulangan kemiskinan, strategi dan arah kebijakan, serta rencana aksi daerah penanggulangan kemiskinan 2026-2030.
- BAB V. Lokasi Prioritas, memuat desa/kelurahan prioritas untuk percepatan penurunan kemiskinan tahun 2026-2030.
- BAB VI. Penutup, memuat sistem pemantauan dan evaluasi.

BAB II KONDISI UMUM DAERAH

2.1. Aspek Geografi

2.1.1. Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang terletak di bagian selatan provinsi, berbatasan langsung dengan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Posisi geografis ini menjadikan Sukoharjo sebagai bagian penting dari koridor ekonomi Solo–Yogyakarta–Semarang, yang berfungsi sebagai simpul konektivitas antara pusat pertumbuhan regional Jawa bagian tengah dan selatan. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Revisi RTRW Kabupaten Sukoharjo, wilayah ini terbagi menjadi 12 (dua belas) kecamatan dan 150 (seratus lima puluh) desa/kelurahan, dengan luas wilayah ±49.323 hektare atau sekitar 1,5 (satu koma lima) persen dari total luas Jawa Tengah.



Sumber: Perda No. 1 Tahun 2018 tentang Revisi RTRW Kabupaten Sukoharjo

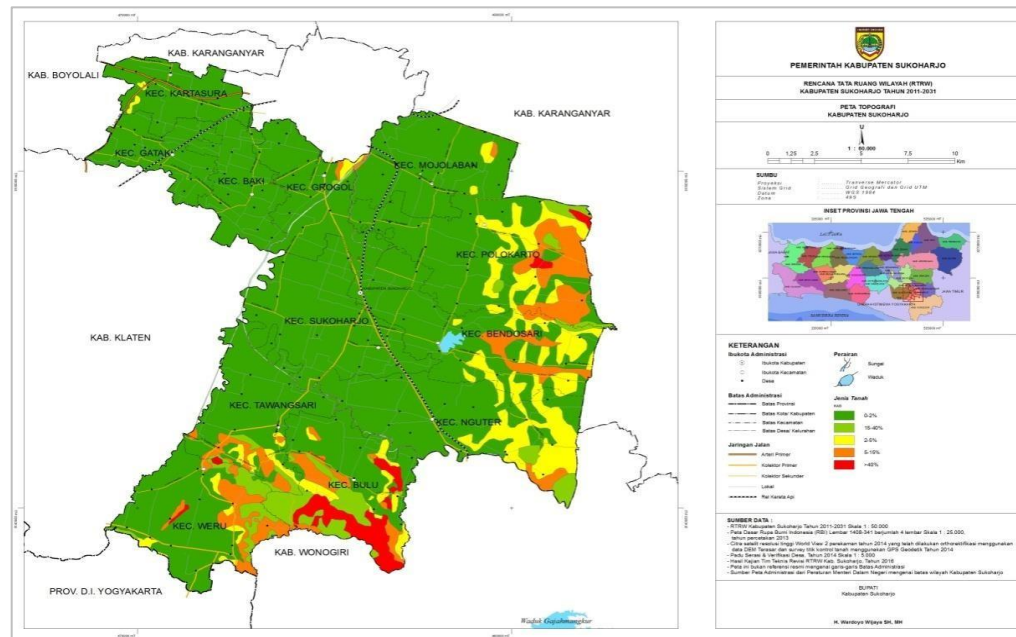
Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Sukoharjo

Secara astronomis, Sukoharjo berada di antara $110^{\circ}57'33,70''$ – $110^{\circ}42'6,79''$ BT dan $7^{\circ}32'42,00''$ LS, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Sukoharjo, yang menegaskan posisi strategis wilayah ini sebagai hinterland Kota Surakarta di utara serta daerah perlintasan utama menuju Provinsi DIY di selatan. Letak geografis ini memberikan keunggulan aglomerasi, di mana aktivitas ekonomi, perdagangan, dan transportasi tumbuh pesat di kawasan

perkotaan seperti Kartasura, Grogol, Sukoharjo, dan Baki, sementara wilayah selatan seperti Weru dan Nguter berkembang sebagai zona pertanian dan konservasi. Kondisi ini menggambarkan pola *core-periphery* sebagaimana dijelaskan Krugman (1991), di mana pusat pertumbuhan ekonomi mendorong migrasi tenaga kerja dan kapital menuju kawasan inti, tetapi juga menimbulkan ketimpangan spasial dan risiko kemiskinan di wilayah pinggiran.

2.1.2. Morfologi dan Topografi Wilayah

Dari sisi morfologi, Sukoharjo memiliki dua tipe utama, yaitu wilayah dataran dan perbukitan, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.2 Peta Topografi Kabupaten Sukoharjo. Wilayah dataran yang meliputi kecamatan Kartasura, Gatak, Baki, Grogol, Sukoharjo, dan Mojolaban memiliki kemiringan lereng 0–8 (nol-delapan) persen dengan elevasi 80–125 (delapan puluh – seratus dua puluh lima) meter di atas permukaan laut (mdpl), menjadikannya kawasan potensial untuk pengembangan permukiman dan industri. Sebaliknya, kecamatan Polokarto, Nguter, Weru, dan Tawangsari memiliki topografi agak curam 8–15 (delapan-lima belas) persen yang menuntut kebijakan konservasi lahan dan pengendalian erosi. Kondisi tersebut berimplikasi terhadap produktivitas lahan dan distribusi pendapatan antarwilayah. Menurut Sukwika (2018) dan Zhang et al. (2019), perbedaan topografi secara signifikan mempengaruhi ketidaksetaraan ekonomi, karena daerah dengan medan datar biasanya menikmati akses yang lebih baik ke infrastruktur dan pasar dibandingkan dengan daerah perbukitan.



Sumber : Perda No. 1 Tahun 2018 tentang Revisi RTRW Kabupaten Sukoharjo
Gambar 2.2 Peta Topografi Kabupaten Sukoharjo

2.1.3. Penggunaan Lahan dan Tata Ruang

Selanjutnya, struktur penggunaan lahan di Sukoharjo sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.1 dan 2.2 menunjukkan bahwa dari total luas ±49.323 (empat puluh Sembilan ribu tiga ratus dua puluh tiga) hektare, sebagian besar digunakan untuk pertanian lahan basah 23.502 (dua puluh tiga ribu lima ratus dua) ha atau 47,7% (empat puluh tujuh koma tujuh persen), disusul oleh permukiman (15.092 ha atau 30,6%), hutan rakyat 3.500 (tiga ribu lima ratus) ha, dan industri 2.352 (dua ribu tiga ratus lima puluh dua) ha. Sementara kawasan lindung seperti hutan lindung 297 (dua ratus Sembilan puluh tujuh) ha dan hutan produksi 70 (tujuh puluh) ha., masih sangat terbatas. Komposisi ini menunjukkan tekanan yang kuat terhadap konversi lahan pertanian akibat ekspansi industri dan urbanisasi, terutama di kawasan peri-urban yang berbatasan langsung dengan Kota Surakarta. Fenomena ini konsisten dengan teori Lewis (1954) tentang transformasi struktural, di mana proses industrialisasi tanpa pengendalian tata ruang dapat memperdalam ketimpangan pendapatan antar sektor dan memperbesar kemiskinan relatif di wilayah pertanian. Kecenderungan tersebut juga diamati oleh Ravallion et al. (2002) yang menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi hanya akan bersifat pro-poor apabila pertumbuhan di sektor nonpertanian diikuti peningkatan produktivitas dan akses terhadap sumber daya di sektor pertanian. Oleh karena itu, pengelolaan lahan di Sukoharjo tidak hanya memiliki dimensi ekologis, tetapi juga sosial-ekonomi, di mana keberlanjutan penggunaan tanah menjadi kunci dalam menekan risiko kemiskinan struktural dan mempertahankan daya dukung lingkungan daerah.

Berikut tabel peruntukan lahan di Kabupaten Sukoharjo.

Tabel 2.1 Peruntukan Lahan Kabupaten Sukoharjo

No	Peruntukan Lahan	Luas (ha)
1	Hutan Lindung	297,00
2	Hutan Produksi	70,00
3	Hutan Rakyat	3.500,00
4	Pertanian Lahan Basah	23.502,00
5	Pertanian Lahan Kering	3.362,00
6	Perkebunan	708,00
7	Peternakan	138,00
8	Pertambangan	166,00
9	Industri	2.352,00
10	Pariwisata	9,00
11	Permukiman	15.092,00
12	Lainnya	127,00
Jumlah		49.323,00

Sumber: Perda No. 1 Tahun 2018 tentang Revisi RTRW Kabupaten Sukoharjo

Berikut tabel potensi sumberdaya lahan di Kabupaten Sukoharjo.

Tabel 2.2 Potensi Sumber Daya Lahan

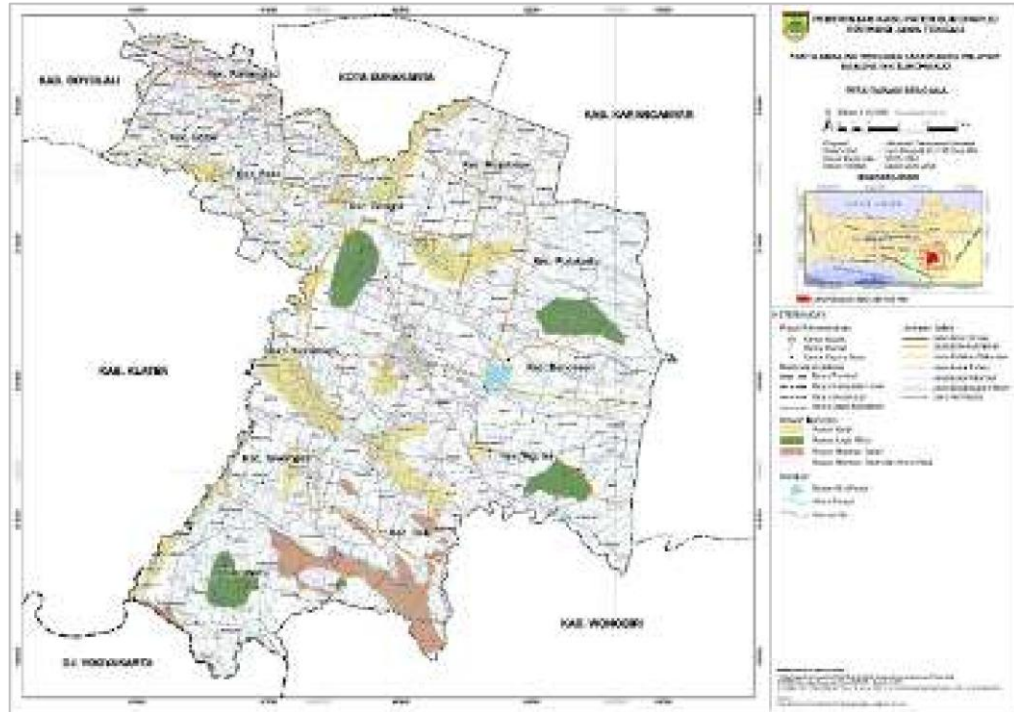
No	Uraian	Luas (Ha)
1	Kawasan Peruntukan Hutan Produksi	70
2	Kawasan Hutan Rakyat	3.500
3	Kawasan Pertanian lahan basah	23.502
4	Kawasan Pertanian lahan kering	3.362
5	Kawasan peruntukan perkebunan	708
6	Kawasan peruntukan peternakan	138
Jumlah		31.280

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Sukoharjo

2.1.4. Kondisi Risiko Bencana Alam

Kabupaten Sukoharjo memiliki tingkat risiko bencana yang kompleks dengan enam jenis bencana utama, yaitu banjir, cuaca ekstrem, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, dan tanah longsor. Kondisi geografis yang terdiri atas dataran rendah dan perbukitan menyebabkan variasi intensitas bencana antar wilayah. Berdasarkan hasil pemetaan dalam Gambar 2.3 Peta Rawan Bencana Kabupaten Sukoharjo dan Tabel 2.3 Lokasi Rawan Bencana, kecamatan dengan potensi bencana tertinggi meliputi Baki, Grogol, Sukoharjo, Polokarto, Weru, dan Tawang Sari untuk ancaman banjir dan cuaca ekstrem; sedangkan wilayah perbukitan di selatan seperti Bulu, Nguter, dan Tawang Sari rawan terhadap tanah longsor, kekeringan, serta kebakaran hutan dan lahan.

Berikut gambar peta rawan bencana di Kabupaten Sukoharjo berdasarkan RTRW Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024-2044.



Sumber: RTRW Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024-2044

Gambar 2.3 Peta Rawan Bencana Kabupaten Sukoharjo

Berikut tabel lokasi rawan bencana di Kabupaten Sukoharjo berdasarkan RTRW Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024-2044.

Tabel 2.3 Lokasi Rawan Bencana Kabupaten Sukoharjo

No.	Jenis Bencana	Lokasi
1	Longsor	Bulu, Tawang Sari, Weru
2	Banjir	Baki, Bendosari, Gatak, Grogol, Kartasura, Mojolaban, Nguter, Polokarto, Sukoharjo, Weru, Tawang Sari
3	Cuaca Ekstrem	Bendosari, Baki, Gatak, Grogol, Kartasura, Mojolaban, Nguter, Polokarto, Sukoharjo, Tawang Sari, Bulu, Weru
4	Kekeringan	Weru
5	Gempa Bumi	Gatak, Nguter, Tawang Sari, Weru
6	Kebakaran Hutan dan Lahan	Bulu, Mojolaban, Nguter, Sukoharjo, Tawang Sari, Weru
7	Wabah	Seluruh Kecamatan

Sumber : RTRW Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024-2044

Dimana bencana banjir, total luas bahaya tertinggi mencapai 32.608 (tiga puluh dua ribu enam ratus delapan) ha, di mana Kecamatan Bendosari 5.580 (lima ribu lima ratus delapan puluh) ha, Sukoharjo 4.666 (empat ribu enam ratus enam puluh enam) ha, dan Polokarto 3.761 (tiga ribu tujuh ratus enam puluh satu) ha, termasuk kategori tinggi. Sementara itu, potensi tanah longsor paling signifikan terjadi di Bulu 2.511 (dua ribu lima ratus sebelas) ha. dan Nguter 734 (tujuh ratus tiga puluh empat) ha. Cuaca ekstrem, seperti hujan deras disertai

angin kencang (puting beliung), banyak terjadi di wilayah Sukoharjo, Mojolaban, dan Bulu.

Kondisi ini menggambarkan bahwa Sukoharjo menghadapi ancaman multi-bencana (*multi-hazard landscape*). Berdasarkan teori resiliensi wilayah (Adger, 2000; Cutter, 2012), daerah dengan intensitas bencana tinggi dan kapasitas adaptasi rendah cenderung memiliki risiko sosial-ekonomi lebih besar, termasuk kehilangan aset produktif dan meningkatnya kemiskinan ekologis.

2.2. Aspek Demografi

2.2.1. Struktur dan Komposisi Penduduk

Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2024 memiliki jumlah penduduk sebanyak 916.472 (Sembilan ratus enam belas ribu empat ratus tujuh puluh dua) jiwa, terdiri atas 458.337 (empat ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tujuh) laki-laki dan 458.135 (empat ratus lima puluh delapan ribu seratus tiga puluh lima) perempuan, menunjukkan komposisi gender yang seimbang dengan rasio jenis kelamin 99,9 (Sembilan puluh Sembilan koma Sembilan) persen. Keseimbangan ini menggambarkan stabilitas demografis yang baik untuk mendukung keseimbangan sosial-ekonomi wilayah. Struktur umur penduduk menunjukkan dominasi kelompok usia produktif (15–64 tahun) yang mencapai 638.161 (enam ratus tiga puluh delapan ribu seratus enam puluh satu) jiwa atau 69,63 (enam puluh Sembilan koma enam puluh tiga) persen dari total penduduk, sedangkan kelompok usia nonproduktif (0–14 tahun dan ≥65 tahun) berjumlah 278.311 (dua ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus sebelas) jiwa atau 30,37 (tiga puluh koma tiga puluh tujuh) persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa Sukoharjo sedang berada pada fase bonus demografi, di mana sebagian besar penduduk berada dalam usia kerja dan memiliki potensi untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi.

Namun, potensi bonus demografi hanya dapat dioptimalkan apabila diiringi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), terutama dalam aspek keterampilan, produktivitas tenaga kerja, dan akses terhadap lapangan pekerjaan. Sebagaimana dijelaskan oleh Bloom et al. (2003), keberhasilan transformasi bonus demografi menjadi pertumbuhan ekonomi bergantung pada tiga faktor utama, yakni (1) tingkat partisipasi tenaga kerja, (2) investasi pada pendidikan dan kesehatan, dan (3) stabilitas institusional dalam pasar kerja. Dalam konteks Sukoharjo, dominasi penduduk usia produktif berimplikasi pada meningkatnya kebutuhan terhadap penyediaan lapangan kerja formal dan pelatihan vokasional, terutama bagi sektor industri pengolahan dan jasa modern yang terus tumbuh di kawasan peri-urban seperti Grogol, Baki, dan Kartasura.

Berdasarkan hasil perhitungan dependency ratio, setiap 100 (seratus) orang usia produktif menanggung sekitar 44 (empat puluh empat) orang usia nonproduktif, dengan rasio ketergantungan sebesar 43,61 (empat

puluh tiga koma enam puluh satu) persen. Rasio ini menunjukkan beban tanggungan yang relatif moderat dan lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi Jawa Tengah sekitar 47 (empat puluh tujuh) persen. Kondisi ini menandakan bahwa secara demografis, Sukoharjo berada dalam posisi strategis untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi berbasis tenaga kerja lokal, asalkan disertai dengan pemerataan kesempatan ekonomi dan penguatan kapasitas produktif rumah tangga berpendapatan rendah (Ananta & Arifin, 2021) (Arifin et al., 2013; Sari, 2021; Yusmarni, 2016).

Tabel 2.4 Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
0-4	28.122	26.721	54.843
5-9	34.373	32.211	66.584
10-14	36.035	34.334	70.369
15-19	36.461	34.049	70.510
20-24	35.410	33.939	69.349
25-29	33.611	32.496	66.107
30-34	32.047	31.444	63.491
35-39	30.800	30.534	61.334
40-44	36.426	35.823	72.249
45-49	34.477	34.677	69.154
50-54	29.821	31.034	60.855
55-59	27.773	29.933	57.706
60-64	22.508	24.898	47.406
65-69	17.141	18.051	35.192
70-74	11.553	11.877	23.430
75+	11.779	16.114	27.893
Jumlah Usia 0-14	98.530	93.266	191.796
Jumlah Usia 15-64	319.334	318.827	638.161
Jumlah Usia 65 ke Atas	40.473	46.042	86.515
Dependency Ratio (%)			43,61
Kabupaten Sukoharjo	458.377	458.135	916.472

Sumber: BPS (Diolah)

2.2.2. Sebaran dan Kepadatan Penduduk

Sebaran penduduk di Kabupaten Sukoharjo masih menunjukkan ketimpangan spasial yang cukup nyata antar wilayah. Berdasarkan data BPS 2024, kecamatan dengan kepadatan tertinggi adalah Kartasura 5.361 (lima ribu tiga ratus enam puluh satu) jiwa/km², diikuti oleh Grogol 4.089 (empat ribu delapan puluh Sembilan) jiwa/km² dan Baki 3.367,86 (tiga ribu tiga ratus enam puluh tujuh koma delapan puluh enam) jiwa/km². Sebaliknya, wilayah dengan kepadatan terendah adalah Bulu 794 (tujuh ratus Sembilan puluh empat) jiwa/km² dan Nguter 982 (Sembilan ratus delapan puluh dua) jiwa/km². Perbedaan ini dapat dijelaskan oleh struktur ekonomi dan morfologi wilayah. Kecamatan Kartasura, yang berperan sebagai simpul pertumbuhan utama dan pintu gerbang ke Kota Surakarta, menjadi pusat kegiatan

perdagangan, pendidikan, dan jasa, sehingga menarik arus migrasi dari kecamatan lain. Sementara itu, kecamatan selatan seperti Bulu dan Weru didominasi kegiatan pertanian dan hutan rakyat, dengan akses infrastruktur yang lebih terbatas).

Kepadatan penduduk yang tinggi di wilayah perkotaan menimbulkan tekanan terhadap ketersediaan lahan, air bersih, dan fasilitas publik. Berdasarkan teori Malthusian dan Neo-Malthusian, pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan pertumbuhan produktivitas lahan dan sektor ekonomi akan meningkatkan risiko kemiskinan struktural di kawasan urban (Todaro et al., 2015). Oleh sebab itu, pemerintah daerah perlu memperkuat strategi redistribusi penduduk melalui pengembangan pusat pertumbuhan baru di wilayah selatan, seperti Nguter dan Tawang Sari, untuk menciptakan keseimbangan pembangunan antarkawasan.

2.2.3. Pertumbuhan dan Dinamika Penduduk

Tingkat pertumbuhan penduduk Kabupaten Sukoharjo selama satu dekade terakhir menunjukkan tren yang relatif stabil. Laju pertumbuhan tahunan 2020–2023 tercatat 0,99 (nol koma Sembilan) persen, dan khusus tahun 2024 sebesar 0,96 (nol koma Sembilan puluh enam) persen, yang mengindikasikan laju pertumbuhan moderat dan terkendali. Pola ini menguntungkan dalam konteks pengendalian urbanisasi, karena tidak menimbulkan tekanan besar terhadap daya dukung lingkungan dan pelayanan publik. Menurut Todaro dan Smith (2015), laju pertumbuhan penduduk di bawah 1 persen per tahun merupakan kondisi ideal untuk daerah semi-urban, karena memungkinkan peningkatan kesejahteraan tanpa mengorbankan keberlanjutan sumber daya alam.

Pertumbuhan penduduk tertinggi terjadi di Kecamatan Nguter dan Bulu, masing-masing sebesar 2,12 (dua koma dua belas) persen dan 1,98 persen, sejalan dengan pertumbuhan sektor industri dan perumahan di kawasan tersebut. Sebaliknya, pertumbuhan terendah terjadi di Kecamatan Grogol dan Kartasura, masing-masing hanya 0,04 (nol koma nol empat) persen dan 0,01 (nol koma nol satu) persen. Fenomena ini menunjukkan adanya pola *urban concentration*, di mana wilayah yang memiliki fasilitas publik dan konektivitas transportasi lebih baik akan menjadi magnet migrasi tenaga kerja. Kondisi ini harus diantisipasi melalui kebijakan tata ruang yang adaptif dan berbasis keseimbangan regional agar tidak terjadi overurbanisasi (Rusdiana, 2023; Wibowo et al., 2019). Sementara konsentrasi perkotaan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, itu juga menimbulkan tantangan seperti degradasi lingkungan dan ketidaksetaraan sosial. Oleh karena itu, pendekatan seimbang yang mencakup investasi di daerah pedesaan dan distribusi sumber daya yang adil sangat penting untuk mempertahankan pembangunan perkotaan jangka panjang (Indrayati et al., 2024; Simanjuntak et al., 2024).

2.2.4. Implikasi Demografi terhadap Pembangunan dan Kemiskinan

Struktur penduduk yang didominasi usia produktif membawa dua sisi konsekuensi: potensi akselerasi ekonomi di satu sisi, dan risiko beban sosial di sisi lain apabila tidak diimbangi oleh penciptaan lapangan kerja produktif. Menurut D. E. Bloom et al. (2017), transisi demografi yang tidak diiringi kebijakan ketenagakerjaan dan pendidikan yang tepat dapat menimbulkan demographic trap, di mana surplus tenaga kerja tidak terserap sehingga meningkatkan pengangguran dan kemiskinan. Dalam konteks Sukoharjo, ketimpangan antara wilayah dengan kepadatan tinggi (Kartasura, Grogol, Baki) dan wilayah agraris (Bulu, Weru) berpotensi menciptakan disparitas kesejahteraan jika tidak diimbangi dengan pemerataan kesempatan ekonomi. Oleh karena itu, arah kebijakan pembangunan demografi Sukoharjo perlu difokuskan pada tiga strategi utama: (1) Penguatan kualitas SDM usia produktif melalui pendidikan vokasional dan pelatihan kerja berbasis industri daerah; (2) Pengembangan pusat pertumbuhan baru di wilayah selatan untuk redistribusi penduduk dan pengurangan tekanan urbanisasi; dan (3) Integrasi kebijakan kependudukan dengan pengentasan kemiskinan, khususnya melalui penyediaan lapangan kerja inklusif bagi rumah tangga miskin dan rentan. Dengan pendekatan tersebut, dinamika demografi Sukoharjo dapat menjadi kekuatan pendorong bagi pembangunan ekonomi daerah yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan sesuai visi “Sukoharjo Lebih Maju, Adil, dan Bermartabat.”

Tabel 2.5 Perbandingan Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Sukoharjo, 2023 dan 2024

Kecamatan	Penduduk (jiwa)		Laju Pertumbuhan Penduduk 2019*-2020 (%)			Distribusi Penduduk (%)		Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)		Rasio Jenis Kelamin (%)	
	2023	2024	2010-2020	2020-2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
010 Weru	56.468	57.059	0,48	1,08	1,05	6,03	6,06	1.238,33	1.251	99,49	99,5
020 Bulu	36.129	36.845	1,54	2,02	1,98	3,82	3,91	778,64	794	101,42	100,9
030 Tawang Sari	53.921	54.412	0,32	0,94	0,91	5,76	5,78	1.371,34	1.384	100,38	100,2
040 Sukoharjo	99.642	100.572	0,35	0,97	0,93	10,65	10,68	2.128,19	2.148	100,69	100,8
050 Nguter	55.644	56.825	1,43	2,16	2,12	5,85	6,03	961,87	982	101,65	101,7
060 Bendosari	64.579	65.644	1,16	1,68	1,65	6,85	6,97	1.158,99	1.178	99,56	99,5
070 Polokarto	86.932	88.055	0,75	1,33	1,29	9,26	9,35	1.299,63	1.316	100,43	100,4
080 Mojolaban	99.662	100.768	0,55	1,14	1,11	10,63	10,70	2.602,82	2.632	99,26	99,1
090 Grogol	128.089	128.105	0,07	0,05	0,01	14,00	13,60	4.088,38	4.089	100,13	100,1
100 Baki	78.808	79.651	0,50	1,10	1,07	8,41	8,46	3.367,86	3.404	100,72	100,7
110 Gatak	56.740	57.597	1,00	1,54	1,51	6,03	6,12	2.844,11	2.887	100,57	100,7
120 Kartasura	116.066	116.117	0,18	0,08	0,04	12,71	12,33	5.358,54	5.361	97,54	97,3
Kabupaten Sukoharjo	932.680	941.650	0,57	0,99	0,96	100,00	100,00	1.890,96	1.909	99,95	99,9

Sumber : BPS (Diolah)

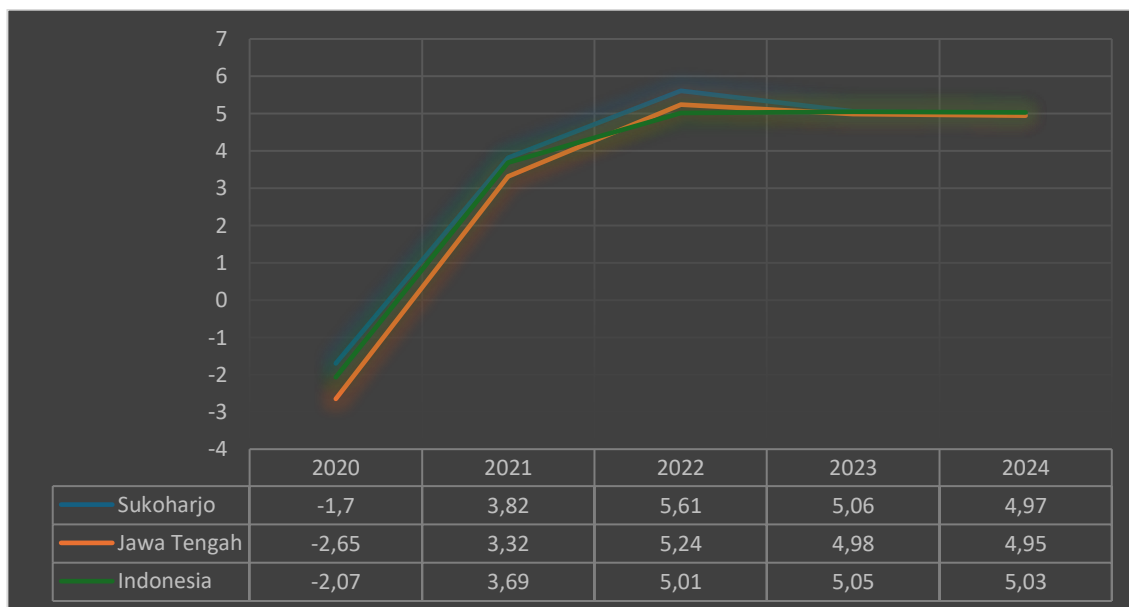
Catatan:

1. Hasil Sensus Penduduk (SP) 2020 (September)
2. Hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020–2024 (Pertengahan tahun/ Juni)
3. Laju pertumbuhan penduduk dihitung berdasarkan penduduk tahun 2010 (Mei) dibandingkan dengan penduduk tahun 2020 (September)
4. Laju pertumbuhan penduduk dihitung berdasarkan penduduk tahun 2020 (September) dibandingkan dengan penduduk tahun 2021 (Juni)
5. Luas provinsi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tanggal 25 Oktober 2019

2.3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.3.1. Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Selama periode 2020–2024, perekonomian Kabupaten Sukoharjo menunjukkan tren yang positif dan relatif stabil, meskipun sempat mengalami kontraksi akibat pandemi COVID-19. Berdasarkan data BPS (2024), laju pertumbuhan ekonomi Sukoharjo tercatat -1,70 persen pada 2020, lebih baik dibandingkan Jawa Tengah (-2,65 persen) dan nasional (-2,07 persen). Setelah itu, ekonomi Sukoharjo pulih cepat dengan pertumbuhan 3,82 persen pada 2021, mencapai puncaknya 5,61 persen pada 2022, lalu menurun tipis menjadi 5,06 persen (2023) dan 4,97 persen (2024). Kinerja ini menandakan kemampuan adaptasi ekonomi daerah terhadap tekanan global, terutama gangguan rantai pasok dan inflasi energi.



Sumber: BPS (data diolah)

Gambar 2.4 **Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 (%)**

Secara regional, Sukoharjo menempati posisi kompetitif di kawasan Subosukawonosraten, dengan pertumbuhan 2024 sebesar 4,97 (empat koma Sembilan puluh tujuh) persen, di atas Boyolali 4,64 (empat koma enam puluh empat) persen dan Klaten 4,93 (empat koma Sembilan puluh tiga) persen, meski masih di bawah Karanganyar 5,39 (lima koma tiga puluh Sembilan) persen dan Surakarta 5,61 (lima koma enam puluh satu) persen (Tabel 2.12). Temuan ini sejalan dengan teori *regional growth pole* oleh Perroux (1955) yang menekankan bahwa

wilayah dengan keterkaitan spasial tinggi dengan pusat pertumbuhan akan mengalami difusi ekonomi positif melalui arus investasi dan mobilitas tenaga kerja (Pratiwi et al., 2016). Dengan demikian, Sukoharjo memiliki peran strategis sebagai wilayah penyangga industri dan jasa bagi kawasan Subosukowonosraten.

Tabel 2.6 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Subosukawonosraten Tahun 2020-2024 (%)

Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Ekonomi (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Boyolali	-1,2	4,63	6,33	5,63	4,64
Kabupaten Klaten	-1,17	3,82	5,90	5,70	4,93
Kabupaten Sukoharjo	-1,7	3,82	5,61	5,06	4,97
Kabupaten Wonogiri	-1,41	3,35	5,63	4,98	5,11
Kabupaten Karanganyar	-1,87	3,57	5,87	5,53	5,39
Kabupaten Sragen	-1,81	3,75	5,76	5,23	5,54
Kota Surakarta	-1,76	4,01	6,25	5,57	5,61

Sumber: BPS (data diolah)

2.3.2. Struktur Ekonomi dan PDRB Sektoral

Perekonomian Sukoharjo ditopang oleh struktur sektor yang dinamis dan berorientasi pada industri manufaktur serta jasa. Berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010, laju pertumbuhan tertinggi tahun 2024 dicapai oleh sektor Jasa Perusahaan 10,76 (sepuluh koma tujuh puluh enam) persen, Informasi dan Komunikasi 9,24 (sembilan koma dua puluh empat) persen, dan Konstruksi 7,41 (tujuh koma empat satu) persen, sedangkan sektor Perdagangan Besar dan Eceran tumbuh stabil sebesar 5,25 (lima koma dua lima) persen.

Tabel 2.7 Perkembangan Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Sukoharjo (persen), 2020–2024

Kode	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023*	2024**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,94	3,58	0,89	2,68	1,34
B	Pertambangan dan Penggalian	-0,21	1,56	-4,91	-5,41	5,89
C	Industri Pengolahan	-2,75	2,63	4,44	3,23	3,63
D	Pengadaan Listrik dan Gas	-2,38	4,66	4,40	5,49	5,31
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	2,35	3,65	1,65	5,80	6,14

Kode	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023*	2024**
F	Konstruksi	-2,86	4,22	1,76	6,19	7,41
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-3,50	5,70	4,13	5,01	5,25
H	Transportasi dan Pergudangan	-31,75	3,83	66,99	6,34	5,35
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-7,27	5,07	14,74	10,65	8,11
J	Informasi dan Komunikasi	25,75	9,64	2,10	11,24	9,24
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,30	1,67	2,03	3,20	2,49
L	Real Estat	0,08	2,02	4,43	6,81	4,73
M,N	Jasa Perusahaan	-1,67	3,35	4,88	6,55	10,76
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-2,41	-0,80	2,15	5,05	8,20
P	Jasa Pendidikan	-2,64	1,49	2,38	5,70	5,32
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	11,27	0,06	1,23	5,27	6,10
R,S, T,U	Jasa Lainnya	-3,01	1,10	14,13	7,82	6,51
	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK	-1,70	3,82	5,61	5,06	4,97

Catatan : *Angka Sementara, **Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS, berbagai sensus, survei dan sumber lain

Dari sisi kontribusi, sektor Industri Pengolahan masih mendominasi struktur PDRB dengan pangsa 38,15 (tiga puluh delapan koma lima belas) persen terhadap total PDRB, diikuti oleh Perdagangan Besar dan Eceran 17,22 (tujuh belas koma dua puluh dua) persen dan Konstruksi 6,97 (enam koma Sembilan puluh tujuh) persen (Tabel 2.14).

Tabel 2.8 Perkembangan Distribusi/Kontribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020–2024 (%)

Kode	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023*	2024**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8,75	8,65	8,31	8,30	8,14
B	Pertambangan dan Penggalian	0,43	0,42	0,38	0,34	0,33
C	Industri Pengolahan	39,10	38,98	38,74	38,32	38,15
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,04	0,04	0,03	0,03	0,04
F	Konstruksi	6,71	6,86	6,77	6,89	6,97

Kode	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023*	2024**
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17,01	17,28	17,11	17,14	17,22
H	Transportasi dan Pergudangan	2,37	2,39	3,85	4,07	4,05
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,55	3,59	3,91	3,94	4,05
J	Informasi dan Komunikasi	6,03	6,26	5,83	5,98	6,11
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,87	3,85	3,84	3,37	3,60
L	Real Estat	2,28	2,22	2,15	2,14	2,10
M,N	Jasa Perusahaan	0,44	0,43	0,43	0,44	0,47
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	2,23	2,08	1,98	1,96	2,03
P	Jasa Pendidikan	4,52	4,38	4,122	4,04	4,03
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,15	1,10	1,03	1,02	1,02
R,S, T,U	Jasa Lainnya	1,43	1,38	1,50	1,56	1,59
	Total Distribusi/ Kontribusi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Nilai PDRB ADHB	36.890,53	38.990,46	42.819,99	46.821,25	49.987,03

Catatan : *Angka Sementara, **Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS (Diolah)

Peningkatan peran sektor informasi dan jasa pendidikan pascapandemi menunjukkan pergeseran menuju *knowledge-based economy*. Menurut Todaro dan Smith (2015), diversifikasi sektor ke arah industri jasa menandakan transformasi struktural menuju tahap pembangunan menengah, di mana kontribusi sektor non-pertanian meningkat secara progresif. Dengan struktur ini, Sukoharjo memiliki basis ekonomi yang relatif tahan terhadap guncangan eksternal karena proporsi sektor tersier yang semakin kuat.

2.3.3. PDRB dan Pendapatan Masyarakat

Secara nominal, total PDRB Sukoharjo tahun 2024 mencapai Rp 49,987 (empat puluh Sembilan koma Sembilan ratus delapan puluh tujuh) triliun, naik dari Rp46,82 (empat puluh enam koma delapan puluh dua) triliun pada 2023, menunjukkan pemulihan konsumsi dan investasi. Berdasarkan pendekatan pengeluaran, komponen terbesar berasal dari Konsumsi Rumah Tangga Rp33,68 (tiga puluh tiga koma enam puluh delapan) triliun dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar Rp11,21 (sebelas koma dua puluh satu) triliun.

Tabel 2.9 Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024 (Milyar Rupiah)

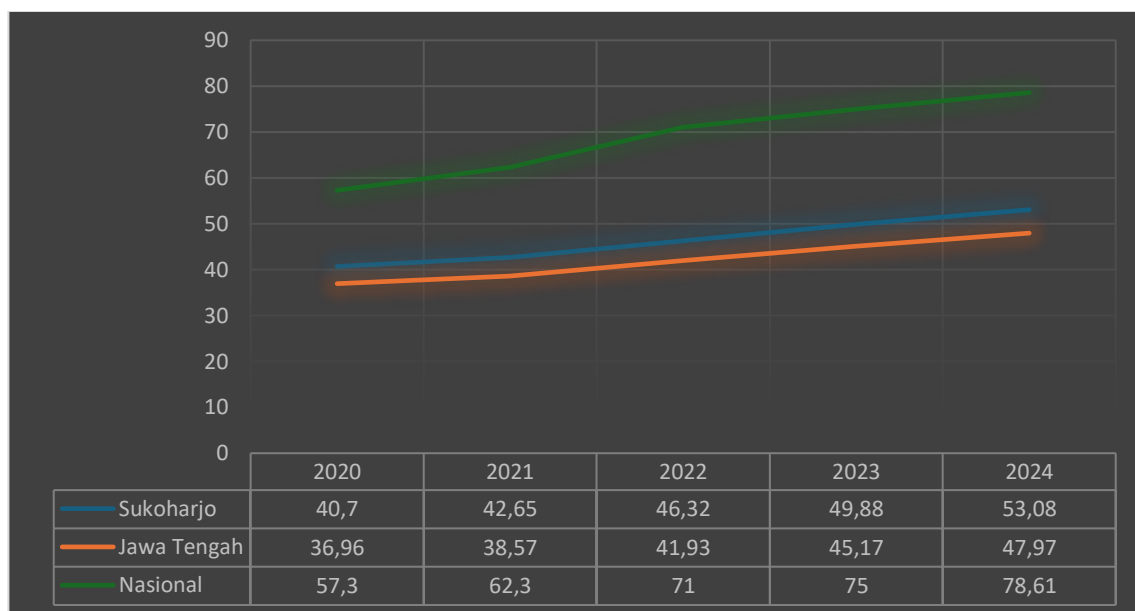
Jenis Pengeluaran	2020	2021	2022	2023*	2024**
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	25.431,00	26.339,52	29.021,65	31.519,50	33.683,08
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	435,38	457,82	523,32	577,80	696,84
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.971,59	1.974,51	2.027,18	2.141,85	2.186,59
Pembentukan Modal Tetap Bruto	8.684,87	9.224,99	9.744,97	10.388,89	11.209,88
Perubahan Inventori	102,49	116,17	135,86	148,35	110,06
Net Ekspor Barang dan Jasa	265,20	877,46	1.327,65	1.744,86	2.100,58
PDRB / GRDP	36.890,53	38.990,46	42.780,63	46.520,85	49.987,03

Catatan: *Angka Sementara, **Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS (Diolah)

Dari sisi kesejahteraan, PDRB per kapita (ADHB) meningkat dari Rp40,70 (empat puluh koma tujuh puluh) juta tahun 2020 menjadi Rp53,08 (lima puluh tiga koma nol delapan) juta tahun 2024, tumbuh rata-rata 7,1 (tujuh koma satu) persen per tahun. Meskipun masih di bawah rata-rata nasional Rp78,61 (tujuh puluh delapan koma enam puluh satu) juta, capaian ini lebih tinggi dari Provinsi Jawa Tengah Rp47,97 (empat puluh tujuh koma Sembilan puluh tujuh) juta, dan menempatkan Sukoharjo di posisi ketiga tertinggi di Subosukawonosraten setelah Surakarta Rp122,53 (seratus dua puluh dua koma lima puluh tiga) juta dan Karanganyar Rp53,36 (lima puluh tiga koma tiga puluh enam) juta.

Kenaikan pendapatan ini menunjukkan meningkatnya daya beli masyarakat, sejalan dengan pendekatan *welfare economics* oleh Pigou (2017) yang menilai kesejahteraan sosial meningkat ketika rata-rata utilitas masyarakat naik tanpa memperlebar ketimpangan.



Sumber: BPS (Diolah)

Gambar 2.5 Perkembangan PDRB Perkapita ADHB Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 – 2024 (Juta Rupiah)

Berikut tabel PDRB Per Kapita ADHB Subosukawonosraten Tahun 2020-2024.

Tabel 2.10 PDRB Per Kapita ADHB Subosukawonosraten Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah)

Kabupaten/Kota	PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Boyolali	30,84	32,62	35,94	39,20	41,69
Kabupaten Klaten	31,74	33,38	36,54	39,92	42,74
Kabupaten Sukoharjo	40,7	42,77	46,71	49,87	53,08
Kabupaten Wonogiri	28,01	29,14	31,88	35,14	37,72
Kabupaten Karanganyar	39,82	41,71	45,50	49,42	53,36
Kabupaten Sragen	38,83	40,75	44,63	48,69	52,19
Kota Surakarta	91,17	96,36	107,01	114,80	122,53

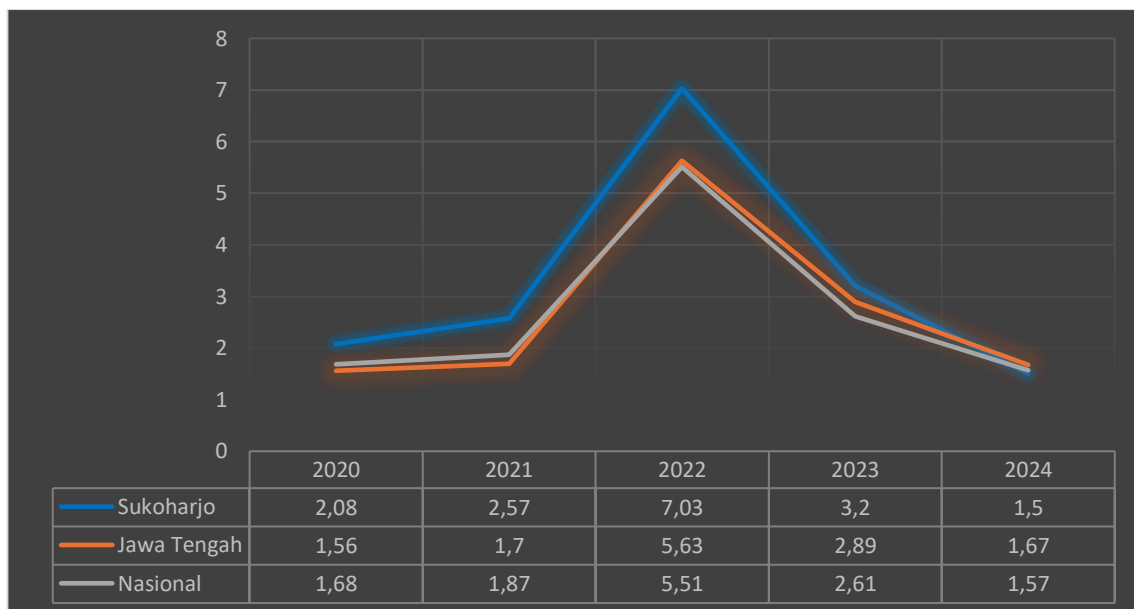
Sumber: BPS (Diolah)

2.3.4. Inflasi dan Stabilitas Harga

Selama periode 2020–2024, inflasi Kabupaten Sukoharjo secara umum terkendali dengan baik, dengan kisaran 1,5–3,2 (satu koma lima – tiga koma dua) persen per tahun, kecuali lonjakan pada 2022 sebesar 7,03 (tujuh koma nol tiga) persen akibat pemulihan ekonomi pascapandemi dan kenaikan harga energi global. Tahun 2024 inflasi berhasil ditekan ke 1,5 (satu koma lima) persen, di bawah rata-rata provinsi 1,67 (satu

koma enam puluh tujuh) persen dan nasional 1,57 (satu koma lima puluh tujuh) persen.

Kondisi ini mencerminkan efektivitas kebijakan fiskal dan stabilitas pasokan barang, khususnya melalui koordinasi TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah) dan peningkatan produksi pertanian lokal. Dalam teori Phillips Curve (Kuznets, 1955), stabilitas inflasi rendah berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan karena menjaga daya beli kelompok berpendapatan rendah dan memperkuat konsumsi domestik sebagai motor pertumbuhan ekonomi daerah.

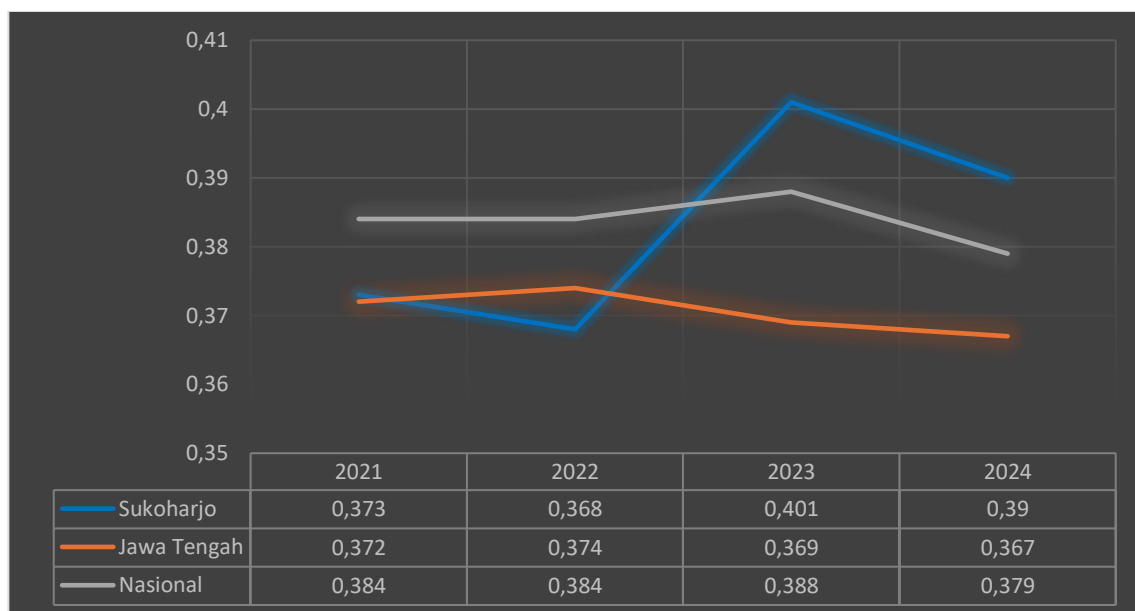


Sumber: BPS (Diolah)

Gambar 2.6 Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024 (%)

2.3.5. Ketimpangan dan Distribusi Pendapatan

Kesejahteraan ekonomi tidak hanya diukur dari pertumbuhan, tetapi juga pemerataan. Berdasarkan Indeks Gini, ketimpangan pendapatan di Sukoharjo mengalami fluktuasi selama 2021–2024. Indeks Gini menurun dari 0,373 (nol koma tiga ratus tujuh puluh tiga) tahun 2021 menjadi 0,368 (nol koma tiga ratus enam puluh delapan) tahun 2022, menandakan perbaikan pemerataan, namun sempat meningkat menjadi 0,401 (nol koma empat ratus satu) tahun 2023 sebelum turun kembali ke 0,390 (nol koma tiga ratus sembilan puluh) tahun 2024. Nilai ini masih di atas rata-rata Jawa Tengah 0,367 (nol koma tiga ratus enam puluh tujuh) dan nasional 0,379 (nol koma tiga ratus tujuh puluh Sembilan), menunjukkan bahwa meskipun terjadi perbaikan, distribusi pendapatan belum sepenuhnya merata.



Sumber: BPS (Diolah)

Gambar 2.7 Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2021-2024 (Indeks)

Dibandingkan wilayah lain di Subosukawonosraten, ketimpangan Sukoharjo lebih tinggi dibanding Sragen 0,309 (nol koma tiga ratus Sembilan) dan Karanganyar 0,352 (nol koma tiga ratus lima puluh dua), tetapi lebih rendah dari Klaten 0,437 (nol koma empat ratus tiga puluh tujuh) dan Surakarta 0,380 (nol koma tiga ratus delapan puluh). Hal ini menunjukkan adanya tekanan ketimpangan perkotaan di daerah padat industri, yang selaras dengan teori Kuznets (1955), yaitu pada tahap awal industrialisasi, ketimpangan cenderung meningkat sebelum akhirnya menurun seiring pemerataan pembangunan.

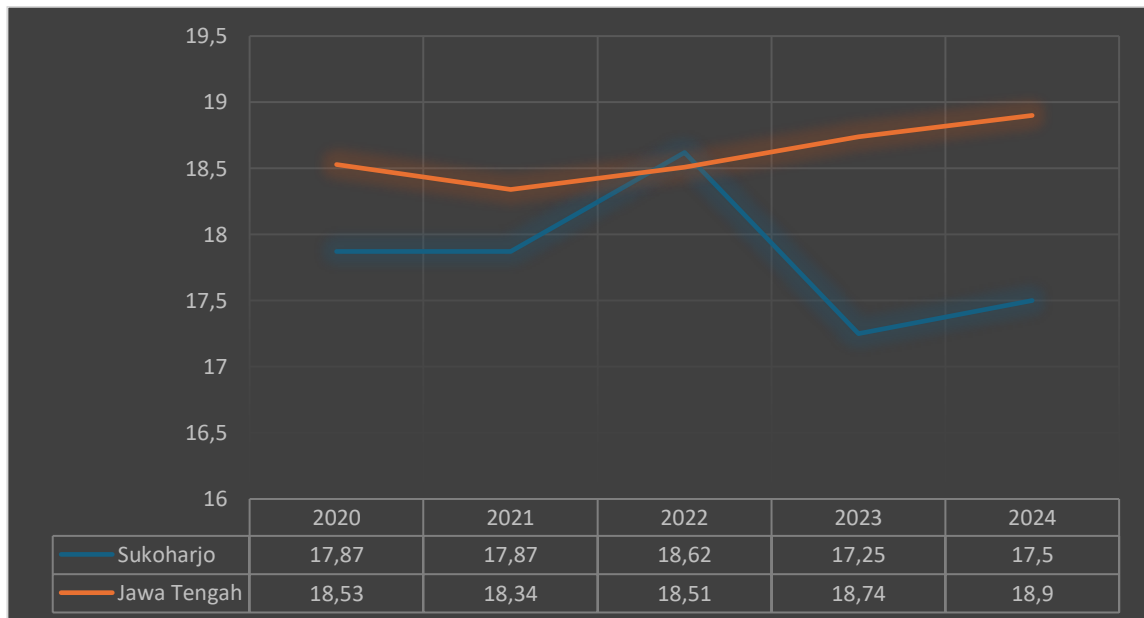
Tabel 2.11 Perbandingan Indeks Gini Subosukawonosraten Tahun 2021-2024 (Indeks)

Kabupaten/Kota	Indeks Gini (indeks)			
	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Boyolali	0,364	0,366	0,365	0,339
Kabupaten Klaten	0,351	0,364	0,406	0,437
Kabupaten Sukoharjo	0,373	0,368	0,401	0,390
Kabupaten Wonogiri	0,356	0,348	0,351	0,392
Kabupaten Karanganyar	0,387	0,360	0,389	0,352
Kabupaten Sragen	0,313	0,349	0,336	0,309
Kota Surakarta	0,379	0,419	0,383	0,380

Sumber: BPS (Diolah)

2.3.6. Distribusi Pengeluaran dan Kesejahteraan Kelompok Rendah

Berdasarkan data BPS (2024), distribusi pengeluaran 40 (empat puluh) persen penduduk berpenghasilan terendah di Sukoharjo menunjukkan pola fluktuatif selama 2020–2024 (Gambar 2.32). Proporsi pengeluaran kelompok ini meningkat dari 17,87 (tujuh belas koma delapan puluh tujuh) persen (2020–2021) menjadi 18,62 (delapan belas koma enam puluh dua) persen (2022), kemudian menurun ke 17,25 (tujuh belas koma dua puluh lima) persen (2023) dan naik kembali 17,50 (tujuh belas koma lima puluh) persen (2024). Nilai ini sedikit di bawah rata-rata provinsi 18,90 (delapan belas koma Sembilan puluh) persen, menandakan masih adanya ketimpangan akses ekonomi antarkelompok pendapatan.



Sumber: BPS (Diolah)

Gambar 2.8 Perkembangan Distribusi Pengeluaran Penduduk (40 persen penduduk berpenghasilan rendah) Menurut Kriteria Bank Dunia Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2021-2024 (%)

Secara regional (Tabel 2.18), Sukoharjo menempati posisi ke-3 tertinggi setelah Boyolali (20,55 persen) dan Sragen (21,12 persen), namun lebih baik dibanding Klaten (17,48 persen) dan Surakarta (17,85 persen). Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan pengentasan kemiskinan telah mendorong peningkatan daya beli rumah tangga miskin, meskipun belum sepenuhnya mengatasi ketimpangan struktural di sektor industri dan jasa.

Menurut Sen (2006) dalam teori *capability approach*, kesejahteraan tidak semata diukur dari pendapatan, tetapi dari kemampuan

masyarakat untuk mengakses pendidikan, kesehatan, dan partisipasi sosial. Dengan demikian, perbaikan distribusi pengeluaran di Sukoharjo menjadi sinyal positif menuju *inclusive development*.

Tabel 2.12 Perbandingan Distribusi Pengeluaran Penduduk (40 persen penduduk berpenghasilan rendah) Menurut Kriteria Bank Dunia Subosukawonosraten Tahun 2021-2024 (%)

Kabupaten/Kota	Distribusi Pengeluaran Penduduk (40 persen penduduk berpenghasilan rendah) Menurut Kriteria Bank Dunia (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Boyolali	19,29	18,69	19,19	18,92	20,55
Kabupaten Klaten	20,13	19,59	19,17	17,44	16,15
Kabupaten Sukoharjo	17,87	17,87	18,62	17,25	17,5
Kabupaten Wonogiri	18,09	18,74	19,76	19,08	18
Kabupaten Karanganyar	20,03	18,06	19,24	18,48	19,14
Kabupaten Sragen	19,87	21,05	19,47	20,13	21,12
Kota Surakarta	17,23	17,22	15,5	18,34	17,85

Sumber: BPS (Diolah)

BAB III

PROFIL KEMISKINAN DAERAH

3.1. Konsep Kemiskinan

Secara umum kemiskinan dipandang sebagai kondisi dimana seseorang atau suatu keluarga berada dalam keadaan kekurangan dan atau ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak, ketidakmampuan atau kekurangan akses dalam memperoleh pelayanan minimal dalam berbagai bidang kehidupan, serta sulit atau kurang memperoleh akses dalam proses-proses pengambilan kebijakan.

Secara umum, kemiskinan dipandang sebagai kondisi di mana seseorang atau suatu rumah tangga berada dalam keadaan kekurangan dan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun akses terhadap layanan dasar publik. Kemiskinan juga dapat dipahami sebagai bentuk ketidakmampuan atau kekurangan akses dalam memperoleh pelayanan minimal di berbagai bidang kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan infrastruktur dasar, serta keterbatasan dalam berpartisipasi pada proses pengambilan keputusan publik (Alkire et al., 2011; Sen 2006). Oleh karena itu, kemiskinan bersifat multidimensi dan kompleks, tidak hanya mencakup aspek pendapatan, tetapi juga dimensi kapabilitas, ketimpangan struktural, dan eksklusi sosial.

Dalam dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Sukoharjo 2025–2029, konsep kemiskinan yang digunakan mengacu pada definisi operasional Badan Pusat Statistik (BPS). Menurut BPS (2003), kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan, yang diukur melalui pendekatan pengeluaran dengan menggunakan konsep garis kemiskinan (GK). Dalam kerangka kemiskinan berbasis konsumsi, rumah tangga dikategorikan miskin jika pengeluaran per kapitanya berada di bawah garis kemiskinan (GK), yaitu nilai moneter minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non-makanan (Deaton, 1997; Ravallion, 2018). Menurut BPS (1984), penduduk dikategorikan miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan. GK merupakan representasi jumlah rupiah minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan dasar bukan makanan seperti perumahan, sandang, pendidikan, serta kesehatan.

BPS membagi garis kemiskinan menjadi dua komponen utama, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Komponen GKM mencakup 52 jenis komoditas yang paling banyak dikonsumsi oleh rumah tangga miskin, sedangkan GKNM terdiri atas 51

jenis komoditas di wilayah perkotaan dan 47 jenis di wilayah perdesaan. Total garis kemiskinan merupakan penjumlahan dari GKM dan GKNM, yang secara bersama menggambarkan tingkat kesejahteraan minimum untuk mempertahankan hidup layak pada suatu periode dan wilayah tertentu.

Kedalaman dan keparahan kemiskinan diukur dengan indeks *Foster-Greer-Thorbecke* (FGT), yaitu Indeks Kedalaman Kemiskinan/P1 (rata-rata kesenjangan terhadap GK) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan/P2 (ketimpangan di antara penduduk miskin) (Foster et al., 1984). Sementara kemiskinan ekstrem merefleksikan proporsi penduduk yang konsumsi minimumnya sangat jauh di bawah ambang dasar, sebagai indikator deprivation paling akut (Alkire et al., 2011; Ferreira et al., 2013). BPS (2022), bahwa kemiskinan ekstrem diukur menggunakan metode “*absolute poverty measure*,” yang konsisten baik antar negara maupun antar waktu. Kondisi ini didefinisikan sebagai keadaan di mana tingkat kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan ekstrem, yaitu setara dengan 1,9 dolar Amerika PPP (*purchasing power parity*) per hari.

Untuk menggambarkan dimensi konsumsi, BPS menggunakan tiga indikator utama yang saling melengkapi: persentase penduduk miskin (P0), indeks kedalaman kemiskinan (P1), dan indeks keparahan kemiskinan (P2).

- Persentase Penduduk Miskin/P0 (*Headcount Index*) menunjukkan proporsi penduduk dengan pengeluaran di bawah garis kemiskinan, atau sering disebut tingkat kemiskinan absolut.
- Indeks Kedalaman Kemiskinan/P1 (*Poverty Gap Index*) menggambarkan rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai P1, semakin jauh pengeluaran kelompok miskin dari garis kemiskinan, sehingga semakin besar biaya yang dibutuhkan untuk mengentaskan mereka dari kemiskinan (BPS, 2003).
- Indeks Keparahannya Kemiskinan/P2 (*Poverty Severity Index*) mengukur ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin itu sendiri, sehingga mencerminkan tingkat heterogenitas atau disparitas dalam kelompok miskin.

Ketiga indikator tersebut penting karena memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai situasi kemiskinan. Pendekatan ini menegaskan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan tidak cukup berfokus pada pengurangan jumlah penduduk miskin (P0) semata, tetapi juga harus mempertimbangkan kedalaman (P1) dan ketimpangan (P2) kemiskinan (Alkire et al., 2011b; UNDP 2022).

Dalam kerangka teori ekonomi, konsep kemiskinan BPS yang berbasis pengeluaran dan konsumsi sejalan dengan teori kemiskinan absolut (*absolute poverty theory*), di mana kemiskinan diukur melalui

ketidakmampuan individu memenuhi kebutuhan minimum untuk bertahan hidup (Rowntree, 1901). Namun, teori ini perlu dipadukan dengan sejumlah teori ekonomi pembangunan untuk memahami akar penyebab dan dinamika kemiskinan yang lebih luas.

Pertama, Teori Lingkaran Setan Kemiskinan (*Vicious Circle of Poverty*) oleh Ragnar Nurkse (1953) menjelaskan bahwa kemiskinan bersifat saling memperkuat antara sisi permintaan dan penawaran. Pendapatan rendah menyebabkan rendahnya tabungan dan investasi, yang menurunkan produktivitas tenaga kerja dan mempertahankan kemiskinan secara turun-temurun. Hal ini sesuai dengan temuan empiris di berbagai daerah berkembang bahwa masyarakat berpenghasilan rendah sering kali terjebak dalam perangkap kemiskinan karena tidak mampu meningkatkan modal manusia dan fisik secara simultan (BPS, 2023).

Kedua, Teori Modal Manusia (*Human Capital Theory*) yang dikemukakan oleh Becker (1995) dan Schultz (1961) menekankan bahwa kemiskinan muncul karena keterbatasan investasi pada pendidikan dan kesehatan. Rendahnya mutu pendidikan menghambat produktivitas tenaga kerja, sementara kondisi kesehatan yang buruk menurunkan kapasitas kerja dan produktivitas ekonomi. Dengan demikian, investasi pada manusia menjadi instrumen utama untuk mengatasi kemiskinan secara berkelanjutan.

Ketiga, Pendekatan Kapabilitas (*Capability Approach*) dari Amartya Sen (1999) memperluas pemahaman kemiskinan tidak hanya sebagai kekurangan pendapatan, tetapi sebagai ketidakmampuan untuk menjalani kehidupan yang bernilai (*valuable life*). Dalam kerangka ini, kemiskinan dipandang sebagai keterbatasan *freedom of choice* akibat minimnya akses terhadap sumber daya, pendidikan, kesehatan, dan partisipasi sosial. Teori ini menjadi dasar bagi pengembangan Indeks Kemiskinan Multidimensi (MPI) oleh Alkire dan Foster (2011), yang menilai kemiskinan berdasarkan deprivasi pada beberapa dimensi non-ekonomi.

Keempat, Teori Ketimpangan Struktural dan Ketergantungan (*Structural and Dependency Theory*) yang dikembangkan oleh Frank (1967) serta diperkuat oleh Todaro dan Smith (2015), menyoroti kemiskinan sebagai konsekuensi dari ketimpangan dalam distribusi sumber daya dan akses ekonomi. Struktur ekonomi yang timpang memperlemah kemampuan masyarakat miskin untuk menikmati hasil pertumbuhan ekonomi, terutama bila orientasi pembangunan lebih menguntungkan sektor kapital-intensif dan kelompok berpendapatan tinggi.

Dengan demikian, teori-teori tersebut memperluas konsep kemiskinan BPS yang berbasis pengeluaran menjadi kerangka yang lebih komprehensif, mencakup aspek struktural, sosial, dan institusional. Kemiskinan di Kabupaten Sukoharjo tidak hanya harus dipahami dari rendahnya pengeluaran rumah tangga di bawah garis kemiskinan, tetapi juga dari

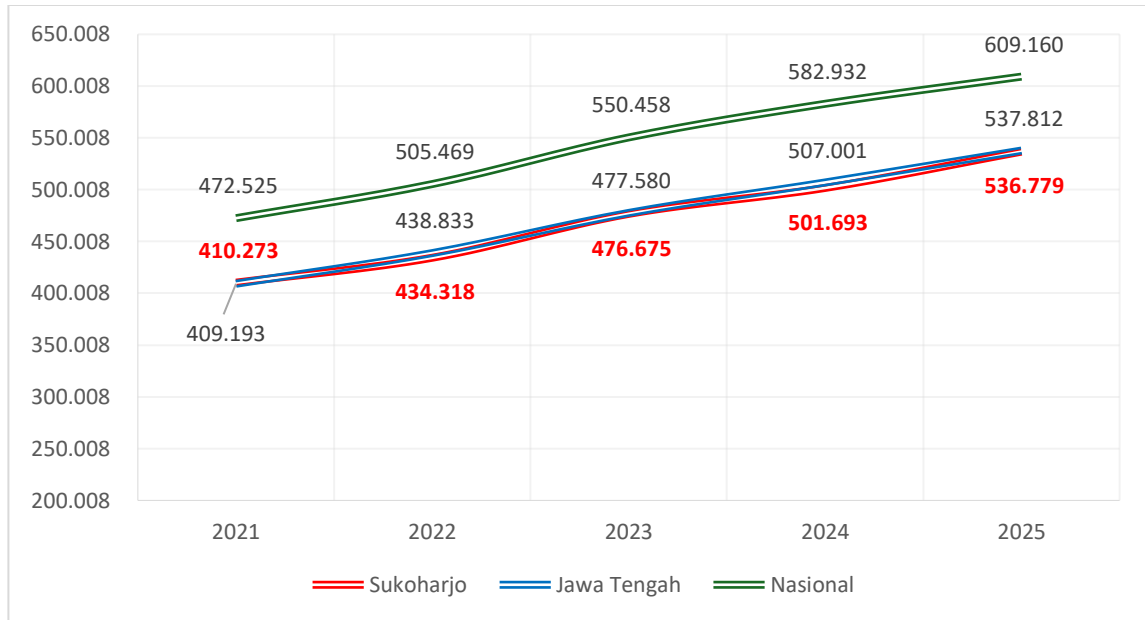
keterbatasan dalam mengakses peluang pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, infrastruktur dasar, serta perlindungan sosial.

Pendekatan integratif ini sejalan dengan teori pertumbuhan inklusif (*inclusive growth theory*) yang dikemukakan oleh Klasen (2010) dan agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs) poin 1, yaitu mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di mana pun. Dengan demikian, kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah perlu mengombinasikan pendekatan ekonometrik berbasis indikator BPS (P0, P1, P2) dengan pendekatan kapabilitas dan pembangunan manusia agar strategi yang dihasilkan tidak hanya menurunkan angka kemiskinan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian masyarakat secara berkelanjutan.

3.2. Kondisi Kemiskinan Konsumsi

3.1.1. Garis kemiskinan (GK)

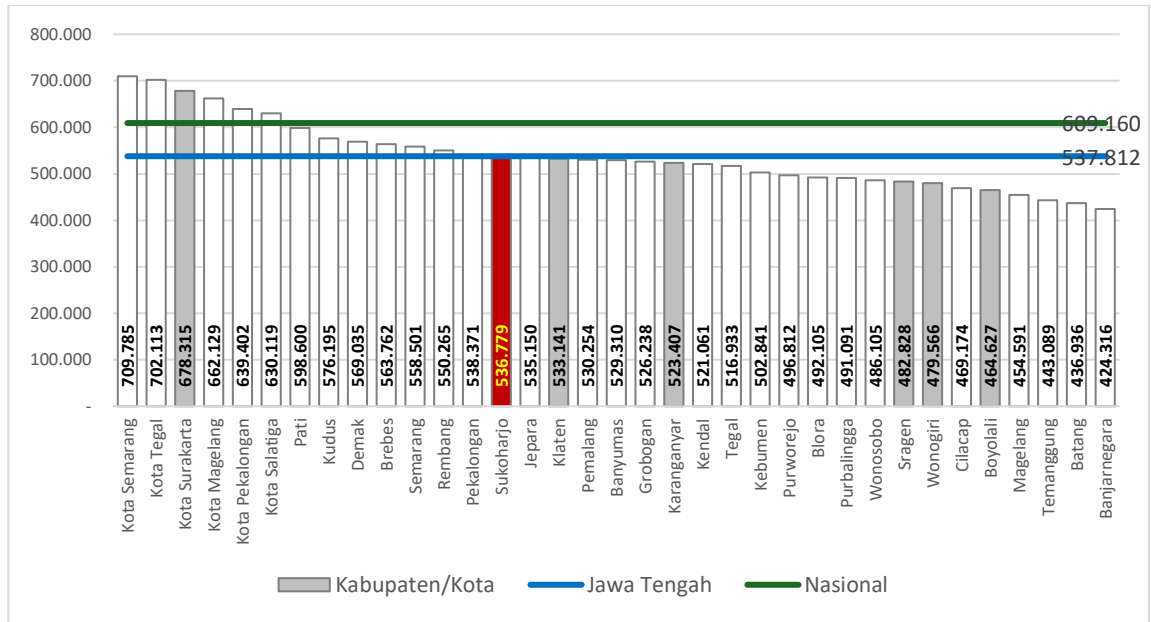
Selama 2019–2025, Garis Kemiskinan (GK) Kabupaten Sukoharjo meningkat konsisten, mencerminkan kenaikan biaya hidup dan penyesuaian harga kebutuhan dasar. Nilai GK naik dari Rp410.273 (empat ratus sepuluh ribu dua ratus tujuh puluh tiga) tahun 2021 menjadi Rp501.693 (lima ratus satu ribu enam ratus Sembilan puluh tiga) tahun 2024 dan kembali naik menjadi Rp536.779 (lima ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh Sembilan) tahun 2025. Meski tren naik ini juga terjadi di level provinsi dan nasional, posisi Sukoharjo pada 2025 relatif berdekatan dengan rata-rata Jawa Tengah dan sedikit di bawah rata-rata nasional. Secara ekonomi, kenaikan GK yang disertai penurunan indikator kemiskinan menunjukkan daya beli kelompok rentan pulih lebih cepat dibanding kenaikan harga kebutuhan dasar, merupakan sebuah sinyal perbaikan kesejahteraan konsumsi (Pigou, 2017; Sen, 2006).



Sumber: BPS (Diolah)

Gambar 3.1 Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2021-2025 (Rupiah/Kapita/Bulan)

Berdasarkan perbandingan antar kabupaten/kota dalam wilayah Subosukawonosraten, Kabupaten Sukoharjo berada di urutan kedua tertinggi setelah Kota Surakarta Rp678.315 (enam ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus lima belas), mencerminkan biaya hidup yang relatif tinggi. Kontribusi terbesar terhadap garis kemiskinan berdasarkan BPS (2024), masih berasal dari komoditas makanan (75,33% di kota dan 75,44% di desa), dengan beras sebagai komoditas utama (22,62% di kota dan 23,94% di desa), menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk miskin dalam pengeluaran kebutuhan dasar pangan. Adapun kontribusi rokok kretek filter yang mencapai 7,18% di kota dan 5,80% di desa menjadi catatan penting karena menunjukkan adanya beban konsumsi non-esensial yang tinggi di kelompok rentan. Sebaliknya, kontribusi pengeluaran untuk sektor non-makanan seperti perumahan, bensin, dan listrik menunjukkan pola konsumsi dasar yang cukup merata antara perkotaan dan perdesaan, meskipun perumahan di desa (8,08%) sedikit lebih tinggi dibanding kota (6,58%).

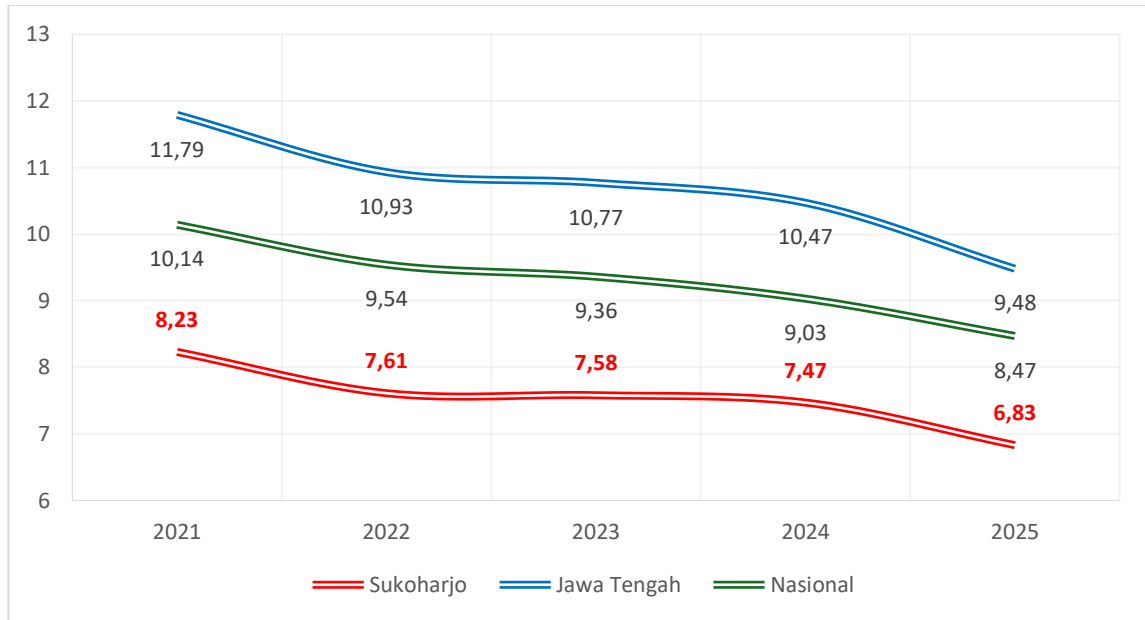


Sumber: BPS (Diolah)

Gambar 3.2 Posisi Relatif Garis Kemiskinan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 (Rupiah/Kapita/ Bulan)

3.1.2. Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin

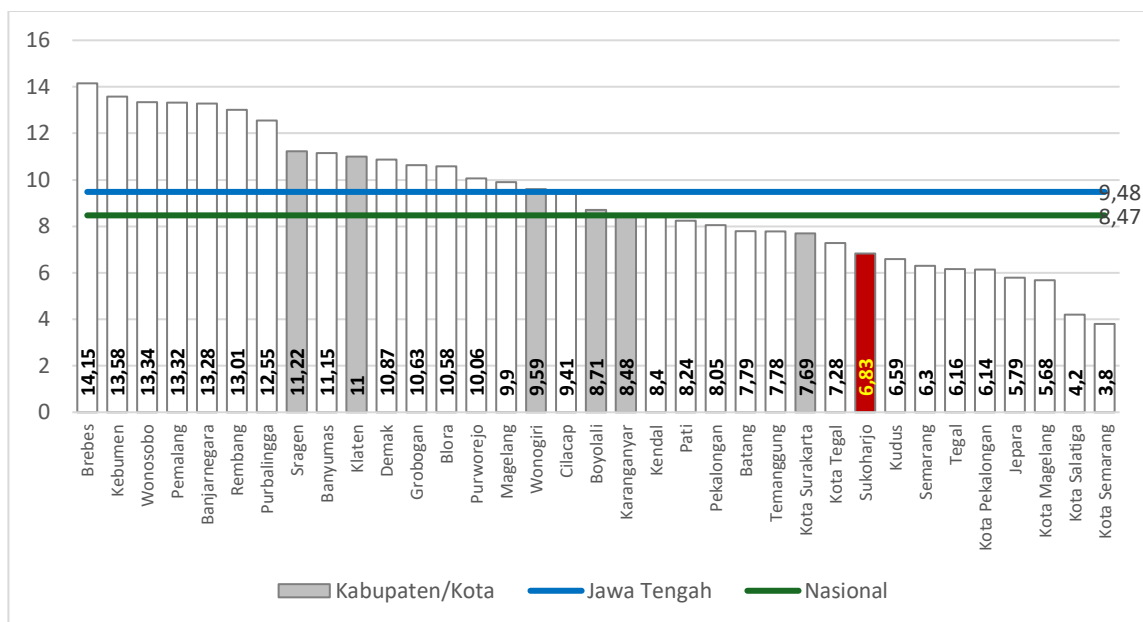
Kinerja penurunan kemiskinan konsumsi Sukoharjo tergolong konsisten dan sejalan target provinsi. Persentase penduduk miskin turun dari 8,23% (delapan koma dua puluh tiga persen) tahun 202) menjadi 7,61% (tujuh koma enam puluh satu persen) tahun 2022, 7,58% (tujuh koma lima puluh delapan persen) tahun 2023, 7,47% (tujuh koma empat puluh tujuh persen) tahun 2024, dan 6,83% (enam koma delapan puluh tiga) tahun 2025. Penurunan ini menempatkan Sukoharjo lebih baik dari rerata Jawa Tengah 9,48% (sembilan koma empat puluh delapan persen) dan nasional 8,47% (delapan koma empat puluh tujuh persen) pada tahun 2025.



Sumber: BPS (Diolah)

Gambar 3.3 Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2021-2025 (%)

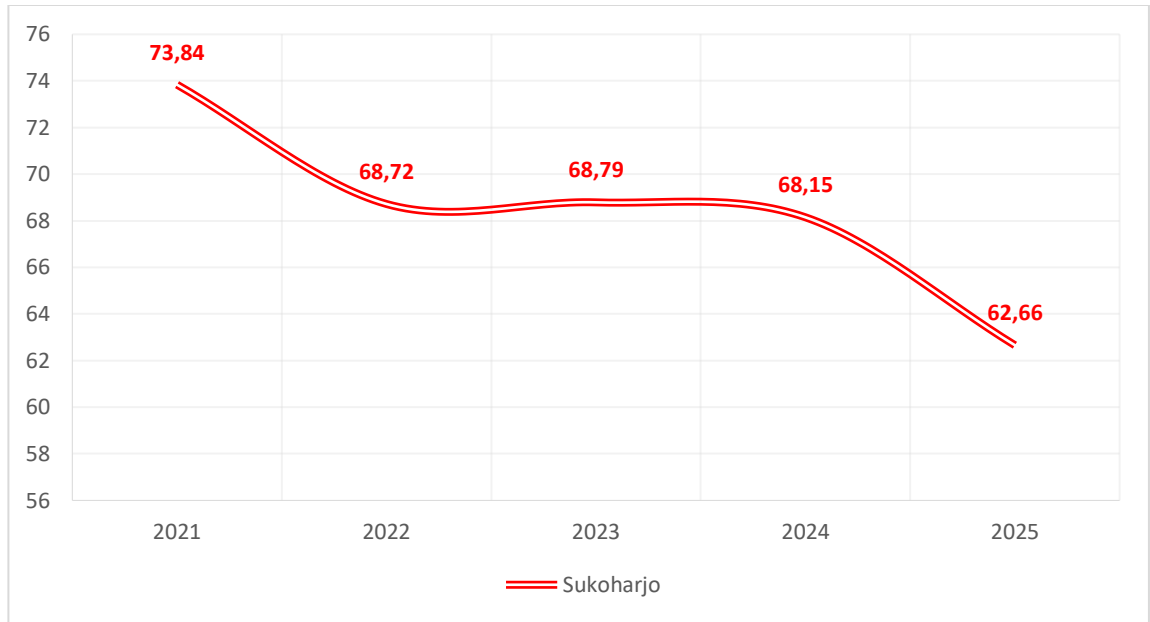
Berdasarkan data tahun 2024, posisi relatif persentase penduduk miskin Kabupaten Sukoharjo menempati posisi paling rendah di wilayah Subosukawonosraten, dengan angka sebesar 6,83% (enam koma delapan puluh tiga persen), jauh di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah 9,48% (sembilan koma empat puluh delapan persen) maupun Nasional 8,47% (delapan koma empat puluh tujuh persen). Angka ini mencerminkan keberhasilan relatif Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam menekan angka kemiskinan dibandingkan enam kabupaten/kota lainnya di wilayah Subosukawonosraten. Dimana, persentase penduduk miskin Kabupaten Sragen tertinggi sebesar 11,22% (sebelas koma dua puluh dua persen), diikuti Kabupaten Klaten sebesar 11% (sebelas persen), Wonogiri 9,59% (sembilan, lima puluh Sembilan persen), Boyolali (delapan koma tujuh puluh satu persen) 8,71% (delapan koma tujuh puluh satu persen), Karanganyar 8,48% (delapan koma empat puluh delapan persen), dan Kota Surakarta 7,69% (tujuh koma enam puluh Sembilan persen). Perbedaan ini mengindikasikan ketimpangan capaian pembangunan antarwilayah, khususnya dalam dimensi kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat.



Sumber: BPS (Diolah)

Gambar 3.4 Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 (%)

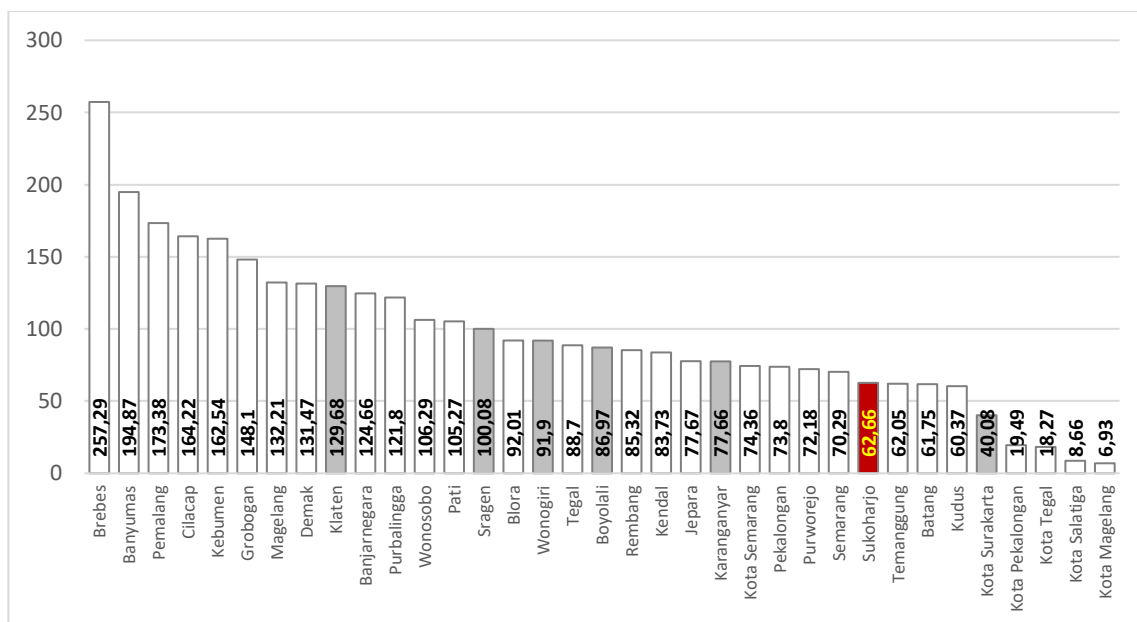
Secara absolut, jumlah penduduk miskin menurun dari 63,6 (enam puluh tiga koma enam) ribu jiwa tahun 2019 menjadi 62,66 (enam puluh dua koma enam puluh enam) ribu jiwa tahun 2025, dengan tren menurun paling tajam pascapandemi (2021–2024). Secara teori, kombinasi pertumbuhan PDRB yang pulih dan inflasi yang terkendali memperbaiki kesejahteraan rumah tangga dekat-garis (*near-poor*) sehingga proporsi miskin berangsur turun (Kuznets, 1955; Todaro & Smith, 2020) (Kuznets, 1955; Todaro at al., 2015).



Sumber: BPS (Diolah)

Gambar 3.5 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2025 (Ribu Jiwa)

Posisi relatif jumlah penduduk miskin Kabupaten Sukoharjo menempati posisi kedua terendah di wilayah Subosukawonosraten, dengan angka sebesar 62,66 (enam puluh dua koma enam puluh enam) ribu jiwa, setelah Kota Surakarta 40,08 (empat puluh koma nol delapan) ribu jiwa. Secara absolut, Kabupaten Sukoharjo juga lebih rendah dibandingkan Kabupaten Klaten, Sragen, Wonogiri, Boyolali, dan Karanganyar.

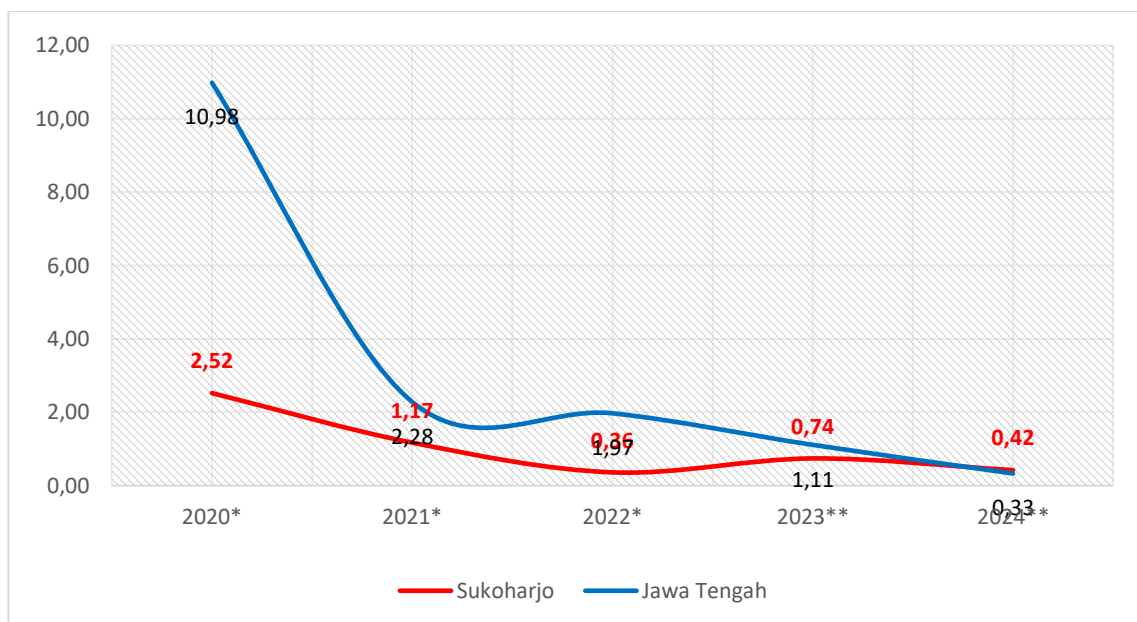


Sumber: BPS (Diolah)

Gambar 3.6 Posisi Relatif Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 (Ribuan Jiwa)

3.1.3. Tingkat Kemiskinan Ekstrem

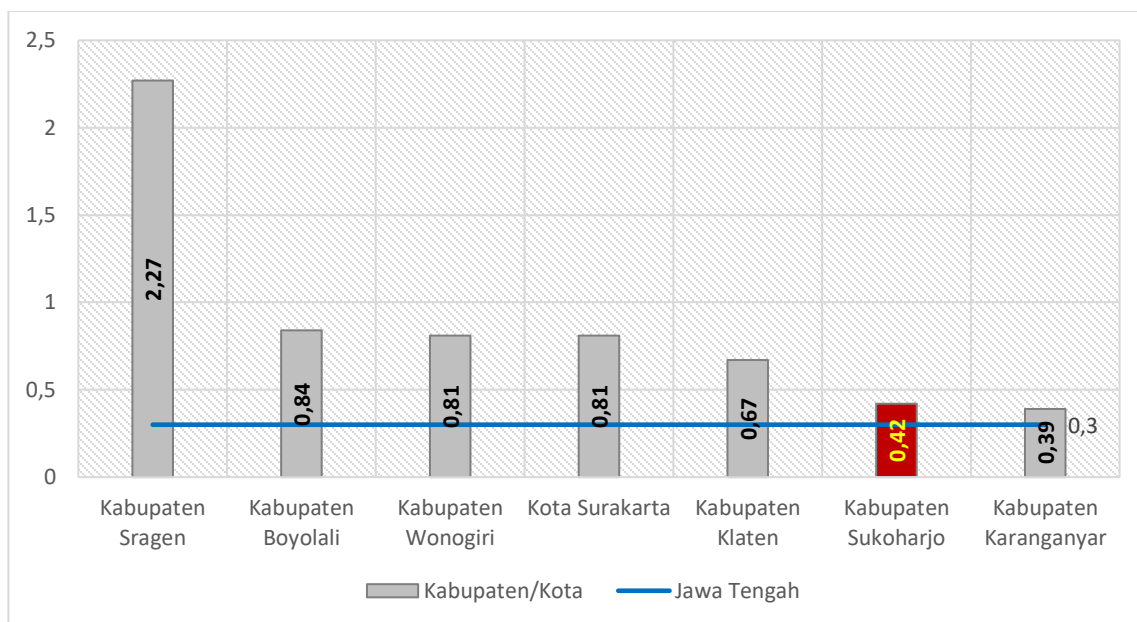
Indikator deprivasi terdalam menunjukkan perbaikan drastis: dari 2,52% (2020) ke 1,17% (2021), 0,36% (2022), 0,74% (2023), dan kembali turun 0,42% (2024), berada di bawah 1% dan jauh lebih baik dari rerata provinsi. Capaian ini mengindikasikan bahwa kebijakan bantuan sosial yang ditargetkan, perluasan kesempatan kerja formal, dan pengendalian harga pangan pokok secara kolektif telah berkontribusi untuk mengurangi kemiskinan ekstrim di kalangan kelompok termiskin. Strategi ini telah terbukti secara signifikan mengurangi tingkat kemiskinan dari kelompok termiskin dari deprivasi ekstrem, terutama melalui program bantuan sosial yang efektif dan inisiatif penciptaan lapangan kerja (Adji et al., 2018; Samputra et al., 2019; Suryahadi et al., 2012).



Sumber: BPS (Diolah)

Gambar 3.7 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Sukoharjo dan Jawa Tengah Tahun 2021-2025 (Orang)

Kabupaten Sukoharjo mencatat tingkat kemiskinan ekstrem sebesar 0,42% (nol koma empat puluh dua persen) pada tahun 2024, yang berada sedikit di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen), namun masih tergolong rendah dibandingkan kabupaten/kota lain di wilayah Subosukowonosraten, yaitu Kabupaten Sragen 2,27% (dua koma dua puluh tujuh persen), Boyolali 0,84% (nol koma delapan puluh empat persen), Wonogiri 0,81% (nol koma delapan puluh satu persen), dan Kota Surakarta 0,81% (nol koma delapan puluh satu persen), serta lebih baik daripada Kabupaten Klaten 0,67% (nol koma enam puluh tujuh persen). Meskipun sedikit lebih tinggi dari Kabupaten Karanganyar 0,39% (nol koma tiga puluh Sembilan persen), namun masih di atas target nasional yang menargetkan nol persen, sehingga menunjukkan upaya lanjutan dalam menurunkan angka tersebut, terutama melalui integrasi program penanggulangan kemiskinan ekstrem yang adaptif dan berbasis data mikro sasaran.



Sumber: Kemenko PMK, Surat No. B-464/33/D-I/KPS.01.00/02/2024 (Diolah)

Keterangan:

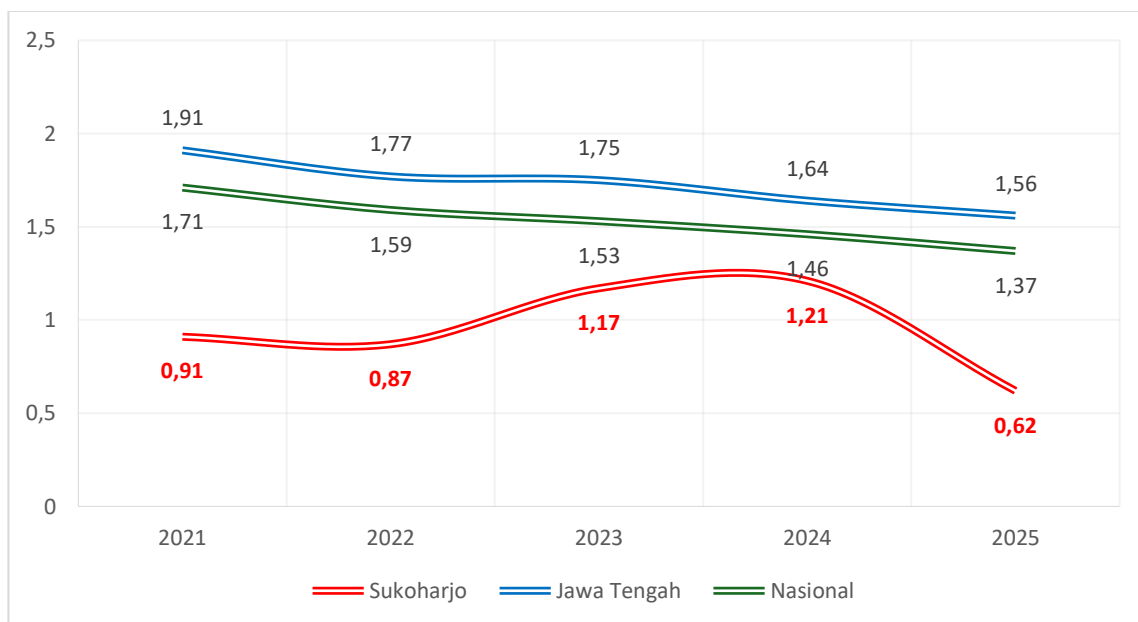
*) Estimasi dihitung oleh Badan Pusat Statistik (BPS)

**) Estimasi dihitung oleh Satgas data P3KE

Gambar 3.8 Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Sukoharjo di Wilayah Subosukowonosraten Tahun 2024** (%)

3.1.4. Indeks Kedalaman kemiskinan (P1)

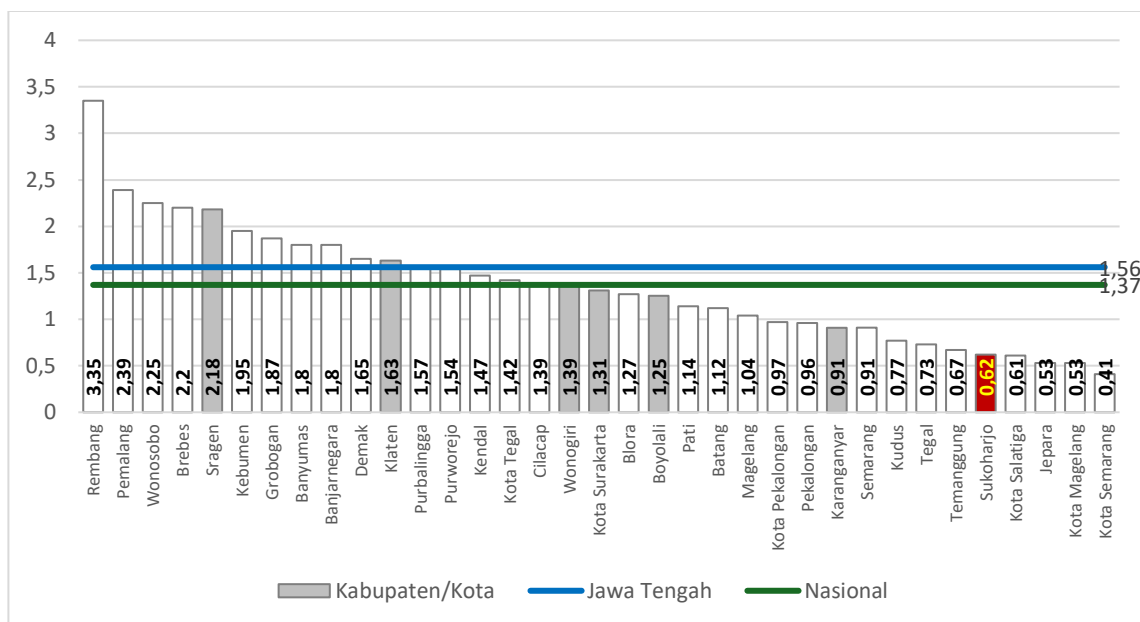
Indeks P1 Sukoharjo menurun tajam dari 1,21 (satu koma dua puluh satu) tahun 2024 menjadi 0,62 (nol koma enam puluh dua) tahun 2025 setelah sebelumnya sempat naik dari 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) tahun 2022 ke 1,17 (satu koma tujuh belas) tahun 2023. P1 Sukoharjo 2025 mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin makin mendekati garis kemiskinan (kesenjangan menurun). P1 Sukoharjo yang lebih rendah dibanding provinsi dan nasional selama kurun waktu lima tahun, serta nilai 2025 menandakan gap rata-rata pengeluaran terhadap GK mengecil secara signifikan. Secara kebijakan, P1 yang turun lebih cepat dari persentase kemiskinan berarti yang paling miskin semakin dekat ke GK, memerlukan dorongan pendapatan marginal (padat karya/UMKM) agar segera menembus garis (Fields, 2012; Ravallion, 2018).



Sumber: BPS (Diolah)

Gambar 3.9 Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2021-2025 (%)

Posisi relatif P1 lebih rendah dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Tengah 1,56 (satu koma lima puluh enam) dan Nasional 1,37 (satu koma tiga puluh tujuh). Di wilayah Subosukawonosraten, Sukoharjo menempati posisi terendah di bawah Kota Surakarta 1,14 (satu koma empat belas). Sementara itu, Kabupaten Sragen dengan P1 tertinggi yaitu 2,18 (dua koma delapan belas).

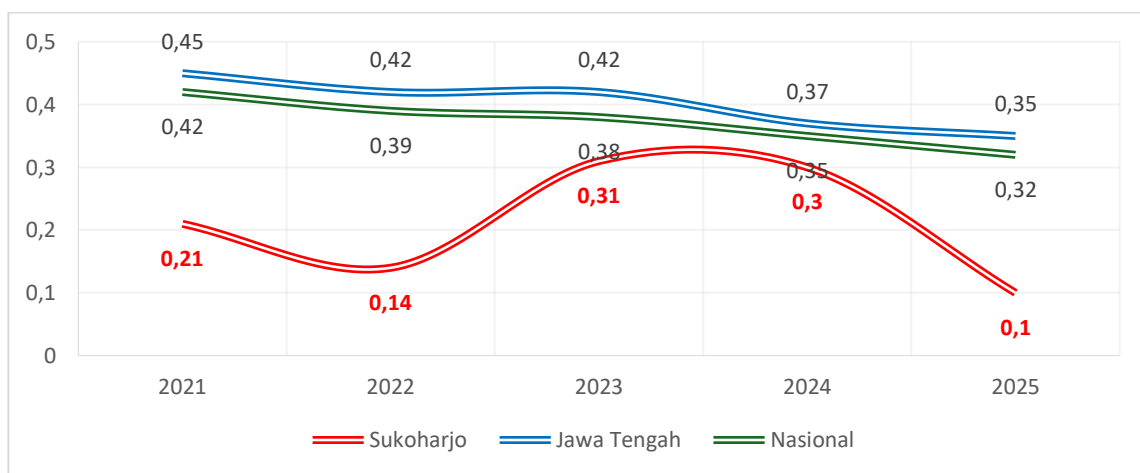


Sumber: BPS (Diolah)

Gambar 3.10 Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 (Indeks)

3.1.1.5. Indeks Keparahan kemiskinan (P2)

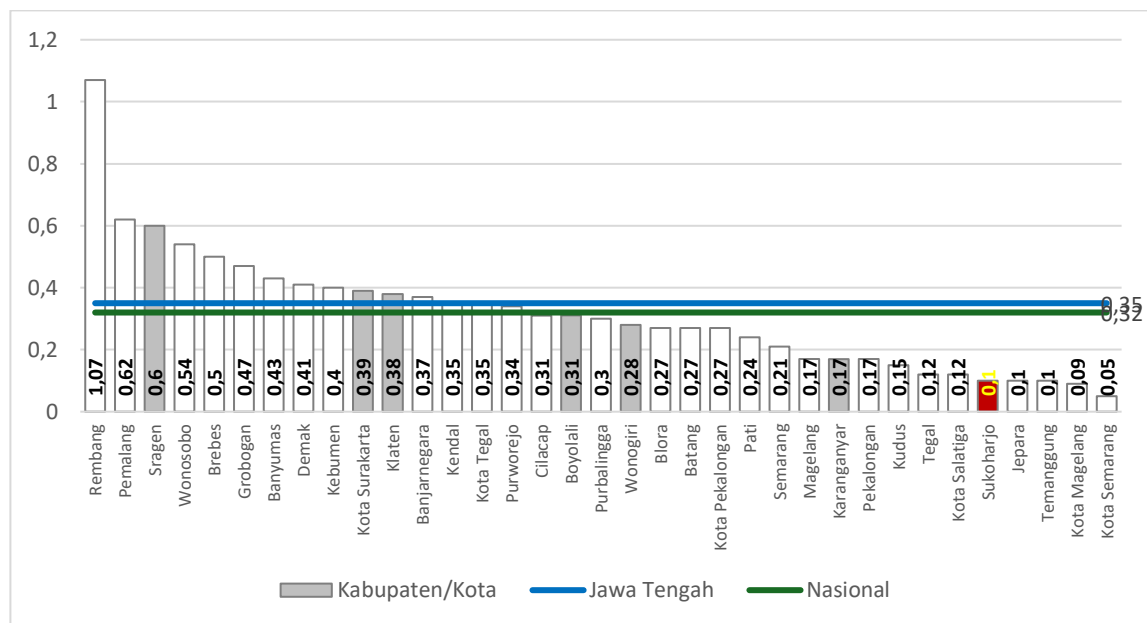
Indeks P2 Sukoharjo juga membaik, dari 0,21 (nol koma dua puluh satu) tahun 2021 menjadi 0,10 (nol koma sepuluh) tahun 2025. Selama kurun waktu lima tahun terakhir tersebut, selalu lebih rendah dari provinsi dan nasional. P2 yang rendah mengisyaratkan ketimpangan antar-penduduk miskin semakin mengecil, sehingga manfaat pertumbuhan, perlindungan sosial, dan intervensi harga pangan menetes lebih merata di dalam kelompok miskin (Alkire et al., 2011a; Foster et al., 1984).



Sumber: BPS (Diolah)

Gambar 3.11 Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2021-2025 (%)

Dari sisi keparahan (P2), Sukoharjo menunjukkan stabilitas yang baik, yaitu tetap berada di angka 0,1, (nol koma satu) lebih rendah dari Provinsi 0,35 (nol koma tiga puluh lima) dan Nasional 0,32 (nol koma tiga puluh dua). Angka ini menempatkan Sukoharjo pada posisi terendah di wilayah Subosukawonosraten, mengindikasikan bahwa ketimpangan pengeluaran antarpenduduk miskin di Sukoharjo relatif rendah. Kabupaten Sragen kembali tertinggi dengan P2 sebesar 0,6 (nol koma enam).



Sumber: BPS (Diolah)

Gambar 3.12 Posisi Relatif Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 (Indeks)

Kondisi kemiskinan konsumsi menunjukkan bahwa GK yang naik bersamaan dengan turunnya persentase miskin, jumlah miskin, P1, P2, dan terkendalnya kemiskinan ekstrem, mengindikasikan pemulihan kesejahteraan konsumsi yang kredibel di Sukoharjo pascapandemi. Secara teoritis, ini konsisten dengan narasi pertumbuhan pro-miskin (*pro-poor growth*): pertumbuhan yang menurunkan kemiskinan lebih cepat daripada laju kenaikan GK (Kakwani et al., 2000). Untuk menjaga momentum, strategi 2025–2029 perlu memusatkan intervensi pada rumah tangga yang “hampir miskin” (dekat GK), memperkuat daya beli pangan, dan menstabilkan harga komoditas kunci (beras, telur, ayam), karena tiga hal

inilah yang paling menentukan P1/P2 dan transisi keluar dari kemiskinan konsumsi (Deaton, 1997; Ravallion, 2018). Meskipun strategi-strategi ini telah menunjukkan harapan, tantangan tetap ada, terutama dalam memastikan bahwa bantuan sosial mencapai penerima manfaat yang dituju tanpa kesalahan pengecualian atau inklusi. Selain itu, dampak faktor eksternal, seperti perlambatan ekonomi atau krisis seperti pandemi COVID-19, dapat mempersulit upaya ini, menyoroti perlunya kerangka kebijakan yang adaptif dan tangguh (Kusumawati et al., 2019; Langi et al., 2023).

3.3. Kondisi Kemiskinan Non Konsumsi

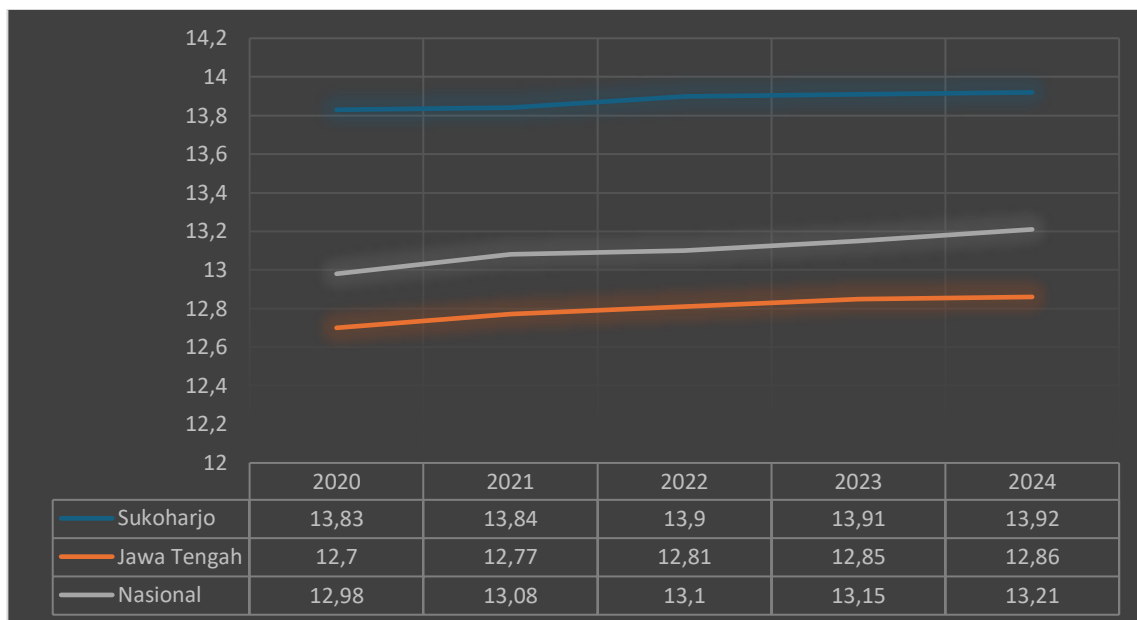
3.2.1. Bidang Pendidikan

Pendidikan merupakan faktor fundamental dalam menurunkan tingkat kemiskinan karena meningkatkan produktivitas, pendapatan, serta memperluas akses terhadap kesempatan ekonomi (Todaro et al., 2015). Kinerja positif bidang pendidikan mendukung agenda pembangunan manusia berkelanjutan sebagaimana dikemukakan oleh Amartya Sen (2006) melalui pendekatan *capability*, di mana perluasan akses pendidikan menjadi sarana utama untuk memperluas kebebasan dan peluang manusia keluar dari kemiskinan.

A. Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Dalam konteks Kabupaten Sukoharjo, indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) menunjukkan tren positif selama periode 2020–2024, yang menandakan kemajuan dalam upaya pengentasan kemiskinan struktural berbasis peningkatan kualitas sumber daya manusia.

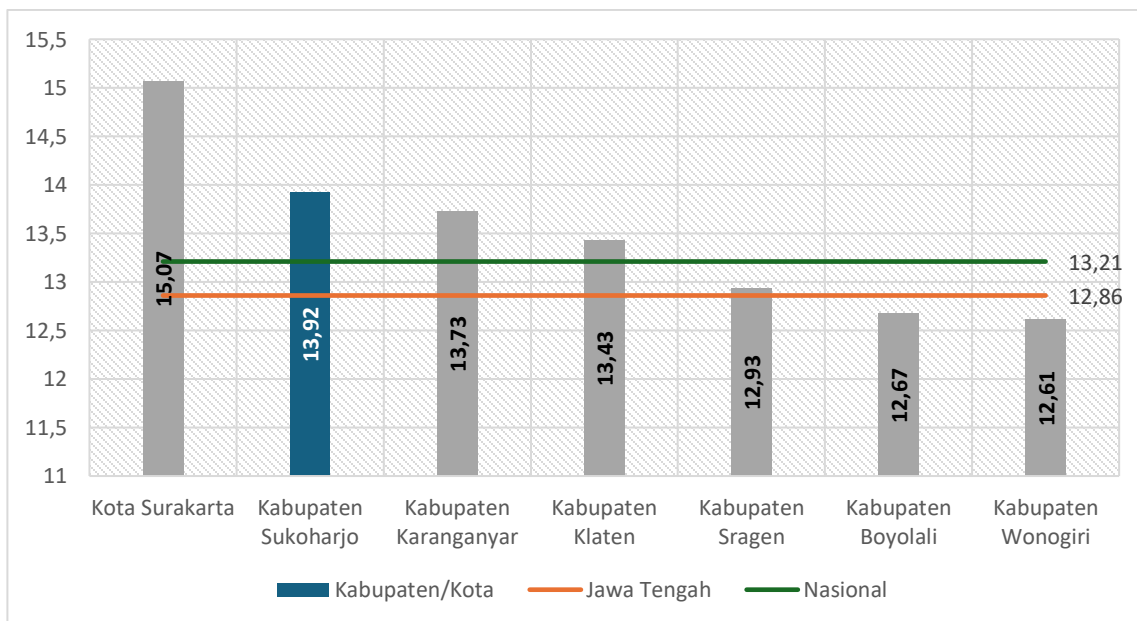
Berdasarkan data BPS Kabupaten Sukoharjo (2024), HLS meningkat dari 13,18 (tiga belas koma delapan belas) tahun pada 2020 menjadi 13,92 (tiga belas koma Sembilan puluh dua) tahun pada 2024, melampaui rata-rata Provinsi Jawa Tengah 12,86 (dua belas koma delapan puluh enam) tahun dan nasional 13,21 (tiga belas koma dua puluh satu) tahun. Hal ini menunjukkan bahwa seorang anak di Sukoharjo secara rata-rata diproyeksikan dapat menempuh pendidikan hingga tahun kedua perguruan tinggi (Diploma/Sarjana muda).



Sumber: BPS (Diolah)

Gambar 3.13 Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 (Tahun)

Secara spasial, posisi Sukoharjo berada di urutan kedua tertinggi di wilayah Subosukowonosraten, tepat di bawah Kota Surakarta 15,07 (lima belas koma nol tujuh) tahun, dan lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Karanganyar 13,73 (tiga belas koma tujuh puluh tiga) tahun, Klaten 13,43 (tiga belas koma empat puluh tiga) tahun, serta Sragen 12,93 (dua belas koma Sembilan puluh tiga) tahun.

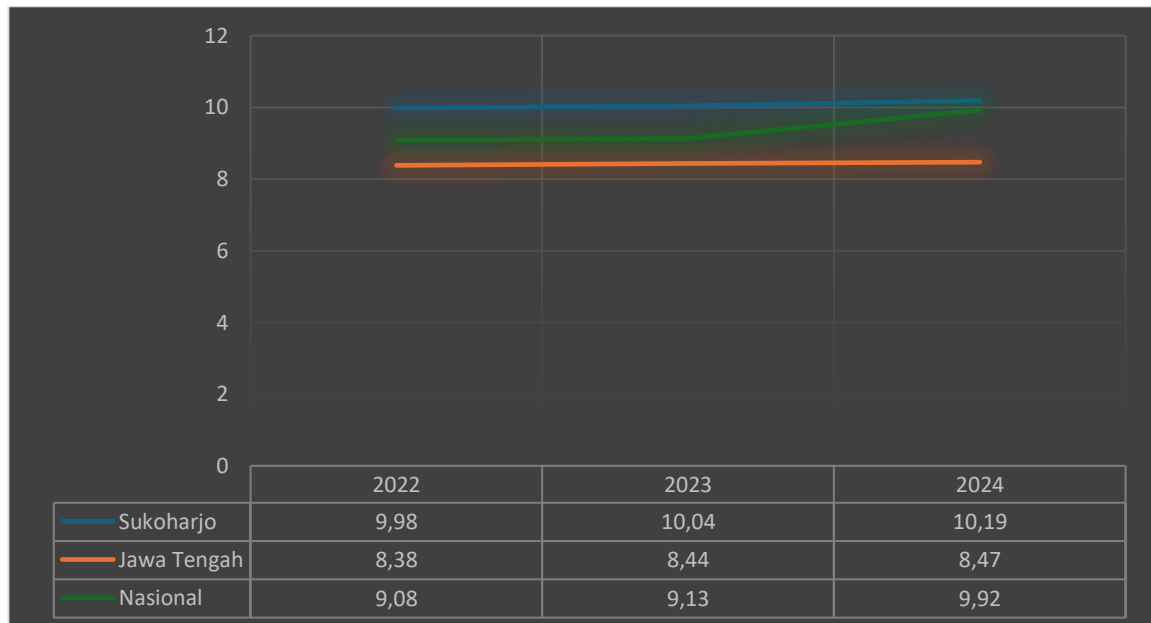


Sumber: BPS (Diolah)

Gambar 3.14 Posisi Relatif Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Sukoharjo di Wilayah Subosukowonosraten Tahun 2024 (Tahun)

Kondisi HLS Kabupaten Sukoharjo menunjukkan bahwa capaian ini merepresentasikan keberhasilan pembangunan pendidikan daerah yang merata dan berkualitas, sejalan dengan Sustainable Development Goal (SDG) ke-4 (empat) tentang pendidikan inklusif dan bermutu.

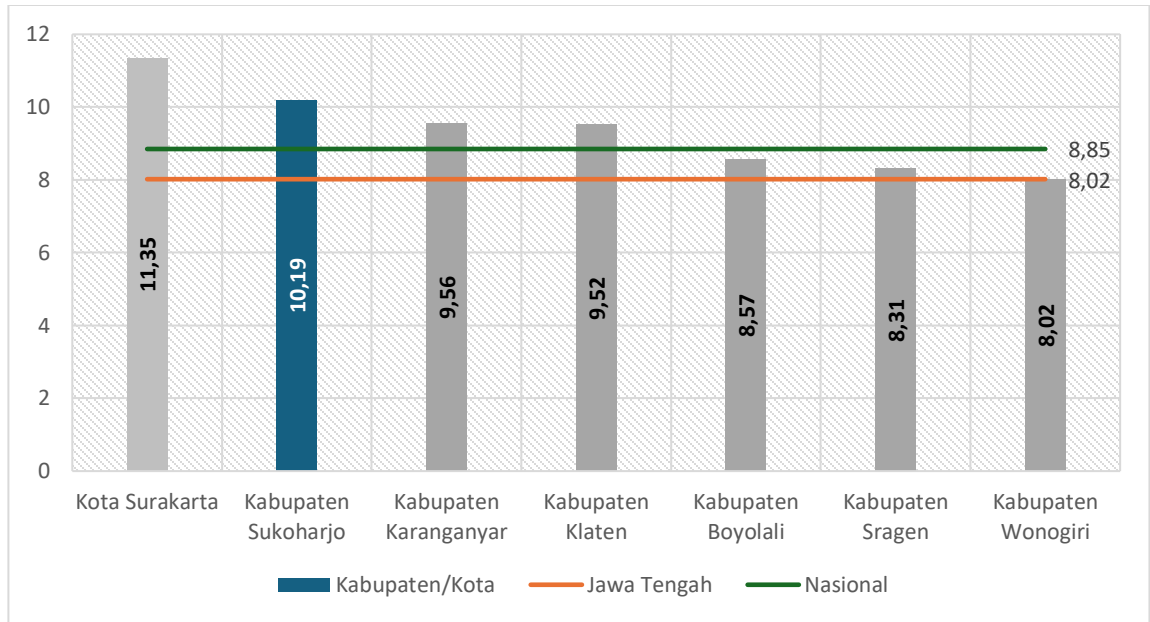
Sementara itu, indikator Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) yang mencerminkan rerata lama pendidikan formal penduduk usia 15 (lima belas) tahun ke atas juga menunjukkan peningkatan konsisten dari 9,98 (Sembilan koma sembilan puluh delapan) tahun 2022 menjadi 10,19 (sepuluh koma Sembilan belas) tahun 2024.



Sumber: BPS (Diolah)

Gambar 3.15 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 (Tahun)

Capaian tahun 2024 menempatkan Sukoharjo sebagai kabupaten dengan RLS tertinggi di kawasan Subosukowonosraten setelah Kota Surakarta 11,35 (sebelas koma tiga puluh lima) tahun, serta melampaui rata-rata Provinsi Jawa Tengah 8,47 (delapan koma empat puluh tujuh) tahun dan nasional 9,92 (Sembilan koma Sembilan puluh dua) tahun.



Sumber: BPS (Diolah)

Gambar 3.16 Posisi Relatif Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Kabupaten Sukoharjo di Wilayah Subosukowonosraten Tahun 2024 (Tahun)

Peningkatan RLS mengindikasikan penurunan angka putus sekolah dan keberhasilan pemerintah daerah dalam memperluas akses pendidikan menengah ke atas (Gambar 2.45 dan 2.46). Fenomena ini sejalan dengan teori human capital yang dikemukakan oleh Becker (1995), di mana peningkatan investasi pendidikan menghasilkan return ekonomi jangka panjang melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penurunan kemiskinan antar generasi.

B. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS) menunjukkan tingkat keterlibatan penduduk usia sekolah dalam mengikuti pendidikan formal. Pada tahun 2024, APS Sukoharjo mengalami peningkatan signifikan di semua kelompok usia, dengan capaian 91,62% (Sembilan puluh satu koma enam puluh dua persen) untuk kelompok usia 5–6 tahun (PAUD), 96,36% (Sembilan puluh enam koma tiga puluh enam persen) untuk usia 7–12 (tujuh – dua belas) tahun (SD/MI), dan 85,63% (delapan puluh lima koma enam puluh tiga) untuk usia 13–15 (tiga belas – lima belas) tahun (SMP/MTs).

Kenaikan APS usia 5–6 (lima-enam) tahun dari 40,48% (empat puluh koma empat puluh delapan persen) tahun 2020 menjadi 91,62% (Sembilan puluh satu koma enam puluh dua persen) tahun 2024 merupakan indikasi meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan anak usia dini, sekaligus hasil dari peningkatan kapasitas lembaga PAUD di tingkat desa dan kelurahan.

Meski demikian, capaian APS usia 13–15 (tiga belas – lima belas) tahun masih menghadapi tantangan berupa disparitas fasilitas antar wilayah, terutama pada sekolah menengah pertama di kawasan perdesaan. Kesenjangan sarana dan kualitas tenaga pendidik berpengaruh langsung terhadap capaian partisipasi sekolah, terutama di tingkat menengah pertama (Irnidayanti et al., 2023; Nadda, 2025; Sirait, 2016). Oleh karena itu, peningkatan APS di kelompok usia ini memerlukan intervensi kebijakan pendidikan berbasis spasial, dengan memperkuat akses transportasi dan ketersediaan infrastruktur pendidikan.

Tabel 3.1 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6 Tahun, 7-12 Tahun dan 13-15 Tahun Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024 (%)

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Tahun (%)	40,48	36,72	82,85	89,57	91,62
Angka Partisipasi Sekolah 7-12 Tahun (%)	99,79	97,1	99,28	97,06	96,36
Angka Partisipasi Sekolah 13-15 Tahun (%)	78,62	79,39	87,99	88,11	85,63

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Diolah)

C. Perpustakaan dan Literasi Masyarakat

Selain pendidikan formal, peningkatan literasi masyarakat juga menjadi bagian integral dari dimensi non-konsumsi kemiskinan. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten Sukoharjo meningkat dari 67,5 (enam puluh tujuh koma lima) pada 2020 menjadi 75,32 (tujuh puluh lima koma tiga puluh dua) pada 2024, sementara tingkat kegemaran membaca masyarakat naik dari 50 (lima puluh) tahun 2021 menjadi 70,9 (tujuh puluh koma Sembilan) tahun 2024.

Capaian ini menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam memperluas akses literasi publik melalui penguatan layanan perpustakaan daerah, digitalisasi bahan pustaka, serta kegiatan community reading movement di berbagai kecamatan.

Perkembangan ini sejalan dengan konsep inclusive knowledge society oleh UNESCO, bahwa literasi informasi merupakan prasyarat bagi partisipasi sosial-ekonomi dalam masyarakat modern (Richmond et al. 2008). Program literasi daerah Sukoharjo juga merepresentasikan praktik public value creation (Moore, 1997), di mana penyediaan akses informasi dan literasi publik memberikan nilai sosial langsung bagi masyarakat miskin dengan memperkuat kemampuan adaptif terhadap perubahan ekonomi.

Tabel 3.2 Perkembangan Perpustakaan dan Literasi Masyarakat Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
1. Nilai tingkat Kegemaran membaca masyarakat	Indeks	-	50	51,4	52,32	70,90
2. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	-	19,5	65,51	67,85	75,32

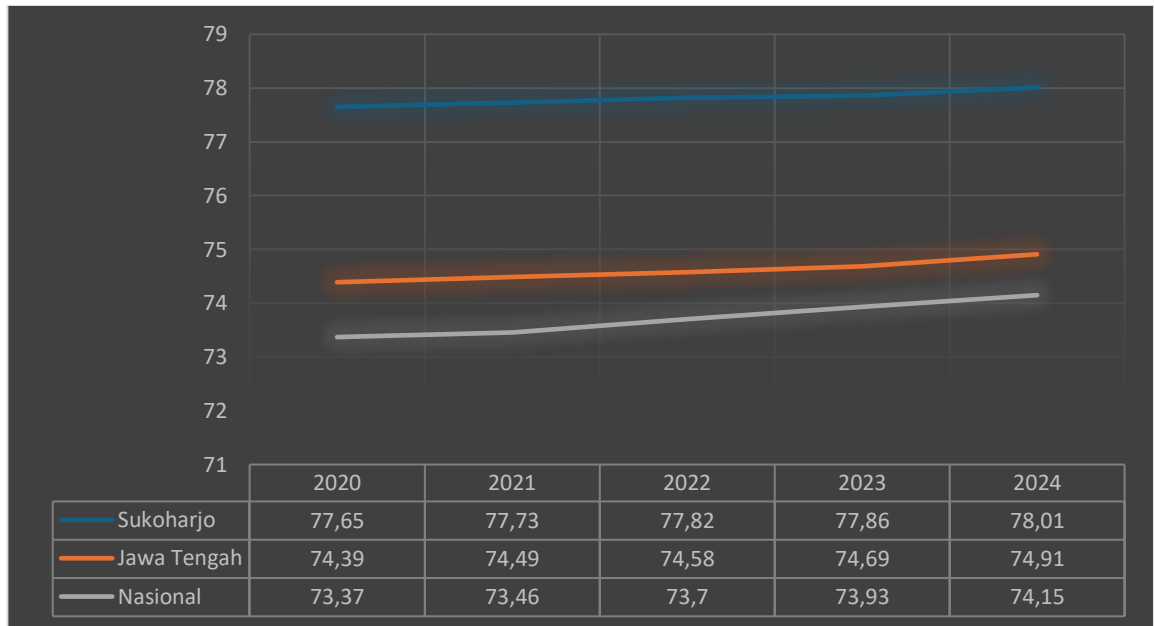
Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

3.2.2. Bidang Kesehatan

Kesehatan merupakan komponen esensial dalam dimensi non-konsumsi kemiskinan karena berpengaruh langsung terhadap produktivitas tenaga kerja, biaya sosial ekonomi, dan keberlanjutan pembangunan manusia (Grossman, 1972; Todaro et al., 2015).

A. Angka Harapan Hidup (AHH)

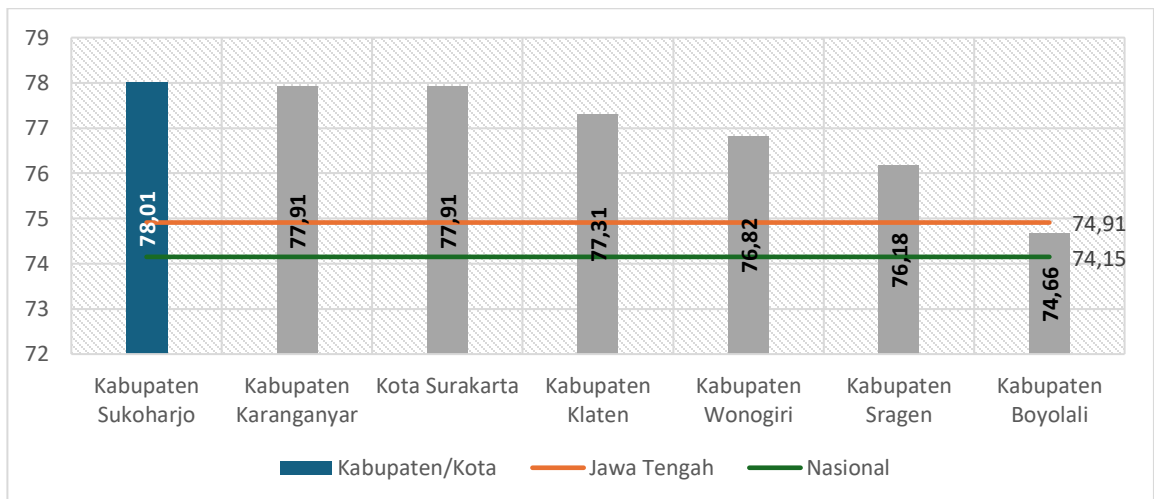
Indikator utama dalam bidang kesehatan adalah Angka Harapan Hidup (AHH), yang mencerminkan kualitas hidup, gizi, dan akses terhadap layanan kesehatan. Berdasarkan data BPS Kabupaten Sukoharjo (2024), Angka Harapan Hidup terus meningkat dari 77,65 (tujuh puluh tujuh koma enam puluh lima) tahun 2020 menjadi 78,01 (tujuh puluh delapan koma nol satu) tahun 2024, melampaui rata-rata Provinsi Jawa Tengah 74,91 (tujuh puluh empat koma Sembilan satu) tahun dan nasional 74,15 (tujuh puluh empat koma lima belas) tahun.



Sumber: BPS (Diolah)

Gambar 3.17 Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 (Tahun)

Capaian Angka Harapan Hidup tahun 2024 menempatkan Sukoharjo sebagai daerah dengan Angka Harapan Hidup tertinggi di wilayah Subosukowonosraten, di atas Karanganyar 77,91 (tujuh puluh tujuh koma Sembilan puluh satu) tahun, Boyolali 76,64 (tujuh puluh enam koma enam puluh empat) tahun, dan Sragen 76,18 (tujuh puluh enam koma delapan belas) tahun (Gambar 2.37–2.38).



Sumber: BPS (Diolah)

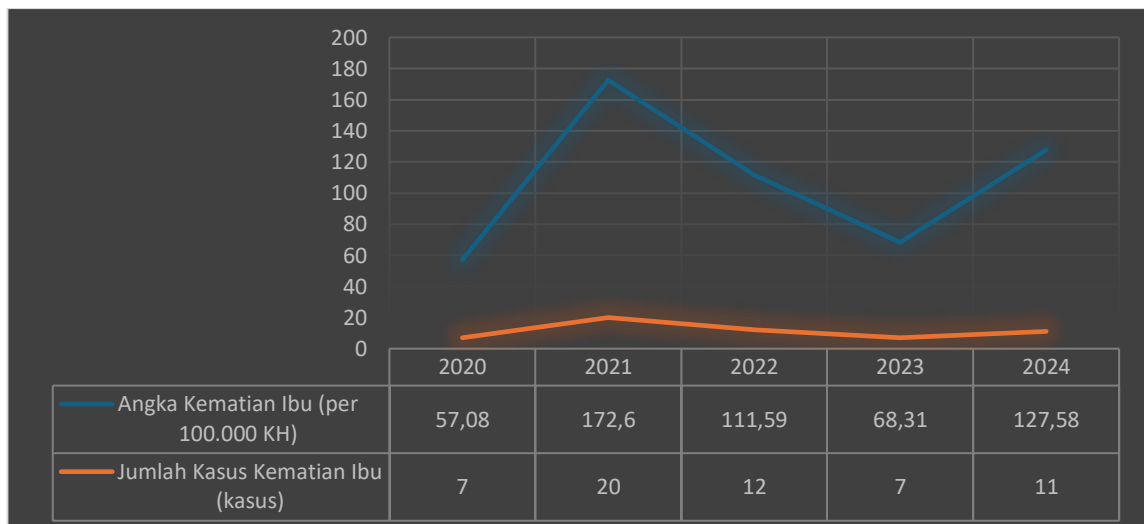
Gambar 3.18 Posisi Relatif Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Sukoharjo di Wilayah Subosukowonosraten Tahun 2024 (Tahun)

Tren peningkatan AHH Kabupaten Sukoharjo mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam memperkuat sistem kesehatan primer, meningkatkan cakupan imunisasi dan gizi masyarakat, serta memperluas jangkauan layanan kesehatan reproduksi. Secara teoritis, peningkatan AHH sejalan dengan konsep *health-led growth* (D. Bloom et al., 2003), yang menjelaskan bahwa kesehatan yang baik meningkatkan partisipasi angkatan kerja dan produktivitas ekonomi, sehingga mendorong pertumbuhan dan mengurangi kemiskinan jangka panjang.

B. Angka Kematian Ibu (AKI), Bayi (AKB), dan Balita (AKABA)

Indikator mortalitas menjadi refleksi langsung dari keberhasilan sistem kesehatan daerah. Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Sukoharjo menunjukkan fluktuasi signifikan pada periode 2020–2024.

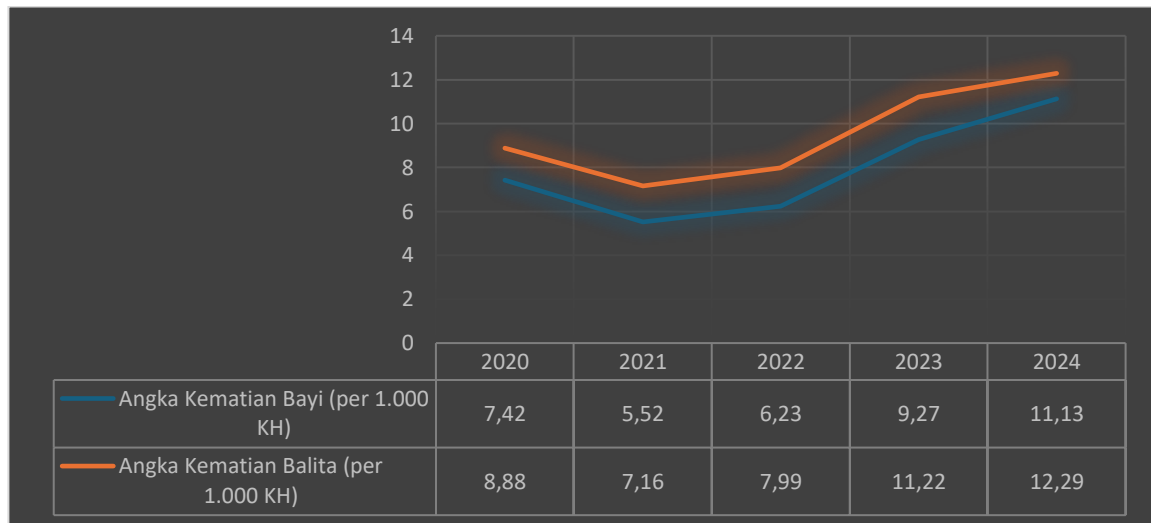
Pada tahun 2020, AKI tercatat 57,08 (lima puluh tujuh koma nol delapan) per 100.000 (seratus ribu) kelahiran hidup, melonjak tajam menjadi 172,6 (seratus tujuh puluh dua koma enam) tahun 2021 akibat keterbatasan layanan saat pandemi COVID-19, lalu menurun menjadi 68,31 (enam puluh delapan koma tiga puluh satu) tahun 2023 dan 127,58 (seratus dua puluh tujuh koma lima puluh delapan) tahun 2024. Meski terjadi perbaikan, jumlah kematian ibu tetap menjadi perhatian utama terutama pada kelompok usia muda dan berisiko tinggi, yang berkorelasi dengan rendahnya akses gizi dan pemeriksaan kehamilan teratur.



Sumber: Dinas Kesehatan (diolah)

Gambar 3.19 Perkembangan Angka Kematian Ibu/AKI (Per 100.000 KH) dan Jumlah Kasus Kematian Ibu (Kasus) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024

Adapun Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKABA) mengalami tren peningkatan pada periode yang sama. AKB naik dari 7,16 (tujuh koma dua belas) per 1.000 (seribu) KH tahun 2021 menjadi 12,29 (dua belas koma dua puluh Sembilan) per 1.000 (seribu) KH tahun 2024, sedangkan AKABA naik dari 8,88 (delapan koma delapan puluh delapan) tahun 2021 menjadi 12,93 (dua belas koma Sembilan puluh tiga) tahun 2024.



Sumber: Dinas Kesehatan (diolah)

Gambar 3.20 Perkembangan Angka Kematian Bayi/AKB dan Angka Kematian Balita/AKABA Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024 (Per 1.000 KH)

AKB dan AKABA menunjukkan tantangan dalam penanganan BBLR (Bayi Berat Lahir Rendah), anemia pada ibu hamil, serta pemantauan bayi risiko tinggi yang masih terbatas. Determinan utama AKB dan AKI di daerah pedesaan Indonesia meliputi pendidikan ibu, jarak antar kelahiran, dan ketersediaan fasilitas persalinan, sehingga upaya penguatan layanan kesehatan ibu-anak perlu diintegrasikan dengan program edukasi dan gizi keluarga (Agustini et al., 2024; Putri, 2024).

C. Stunting, Gizi Kurang, dan Gizi Buruk

Fenomena stunting dan malnutrisi mencerminkan kemiskinan multidimensi karena berhubungan dengan ketahanan pangan, pola konsumsi rumah tangga, dan akses layanan kesehatan dasar. Di Kabupaten Sukoharjo, prevalensi stunting sempat menurun menjadi 7,00% (tujuh koma nol nol persen) tahun 2023 namun

kembali meningkat menjadi 9,56% (Sembilan koma lima puluh enam persen) tahun 2024, sedangkan balita gizi kurang naik dari 4,43% (empat koma empat puluh tiga) tahun 2020 menjadi 5,1% (lima koma satu persen) tahun 2024

Kenaikan ini menunjukkan bahwa meskipun intervensi program gizi seperti PMT, F100, dan edukasi ASI eksklusif meningkat, namun kesenjangan antarwilayah dan perubahan pola konsumsi masih menjadi tantangan. Penurunan stunting memerlukan sinergi lintas sektor melalui strategi food–nutrition–health–education linkage, karena pendekatan sektoral tunggal tidak cukup efektif mengatasi akar penyebab gizi buruk (Anton et al., 2023). Dengan demikian, penguatan ketahanan pangan lokal dan edukasi gizi keluarga menjadi strategi penting dalam menurunkan kerentanan gizi di Sukoharjo.

Tabel 3.3 Perkembangan Prevalensi Stunting, Prevalensi Balita Gizi Kurang, dan Prevalensi Balita Gizi Buruk Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024 (%)

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	7,68	7,10	8,10	7,00	9,5
Prevalensi Balita Gizi Kurang (%)	4,4	4,5	5,95	4,43	5,1
Prevalensi Balita Gizi Buruk (%)	0,07	0,07	0,11	0,17	0,2

Sumber: Dinas Kesehatan (Diolah)

D. Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

Perkembangan pelayanan minimal bidang kesehatan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024, capaian 100% tercatat pada indikator: (1) Persentase ibu hamil dan bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar; (2) Cakupan imunisasi dasar lengkap; (3) Skrining kesehatan penduduk usia produktif dan lanjut usia; (4) Penanganan penderita hipertensi, diabetes melitus, dan ODGJ berat; dan (5) Deteksi dini HIV/AIDS serta TBC. Capaian ini menunjukkan konsistensi kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo dalam memenuhi Standar Teknis Pelayanan Minimal (SPM) sesuai Permenkes No. 70 Tahun 2022.

Dalam perspektif *public value management* (Moore, 2013), keberhasilan ini menunjukkan bahwa tata kelola kesehatan Sukoharjo telah mampu menciptakan nilai publik (*public value*)

berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui layanan kesehatan yang berbasis data, inklusif, dan terukur.

Tabel 3.4 Perkembangan Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
1. Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Rasio	-	-	-	-	0,15
2. Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang Terakreditasi	%	100	100	100	100	100
3. Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	96	96	100	100	100
4. Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100	100	100	100	100
5. Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100	100	100	100	100
6. Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	86	100	100	100	100
7. Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	63	92	100	100	100
8. Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	42	97	100	100	100
9. Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	76	43	100	100	100
10. Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	42	97	100	100	100

Indikator	Satuan	Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
11. Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan	%	88	58	100	100	100
12. Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	48	20	100	100	100
13. Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	24	21	100	100	100
14. Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	85	71	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan

E. Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga

Aspek pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga menjadi faktor penting dalam siklus kemiskinan jangka panjang. Data Tabel 2.46 menunjukkan bahwa Total Fertility Rate (TFR) Sukoharjo menurun dari 1,89 (satu koma delapan puluh Sembilan tahun 2020 menjadi 1,33 (satu koma tiga puluh tiga) tahun 2024, lebih rendah dari ambang batas replacement level fertility (2,1). Penurunan ini menandakan keberhasilan program KB dalam mengontrol laju pertumbuhan penduduk secara berkelanjutan.

Selain itu, pemakaian kontrasepsi modern (Modern CPR) meningkat dari 54,62% (lima puluh empat koma enam puluh dua persen) tahun 2021 menjadi 57,57% (lima puluh tujuh koma lima puluh tujuh persen) tahun 2024, sementara unmet need (kebutuhan KB yang belum terpenuhi) menurun dari 15,65% (lima belas koma enam puluh lima persen) tahun 2021 menjadi 9,29% (sembilan koma dua puluh sembilan persen) tahun 2024. Hal ini menunjukkan efektivitas edukasi kesehatan reproduksi dan ketersediaan layanan KB di lapangan, serta semakin efektifnya layanan KB dalam menjangkau kelompok miskin. Menurut Suryono & Hapsari (2021), keberhasilan program KB di daerah dengan karakteristik semi-perkotaan seperti Sukoharjo sangat dipengaruhi oleh pendekatan edukatif dan konseling langsung melalui kader keluarga berencana

yang terintegrasi dengan Puskesmas (Rahardja, 2011; Wang et al., 2024).

Kinerja ini memperkuat dimensi ketahanan sosial masyarakat karena menurunkan beban ekonomi rumah tangga miskin akibat pertumbuhan penduduk yang tinggi, sebagaimana ditegaskan dalam studi UNFPA (2023) tentang hubungan antara reproductive health access dan pengentasan kemiskinan perempuan.

Tabel 3.5 Perkembangan Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
1. TFR (Angka Kelahiran Total)	Angka	1,89	1,81	1,67	1,58	1,33
2. Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	68,05	54,62	63,89	69,3	67,57
3. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	15,65	27,81	13,27	11,39	9,29

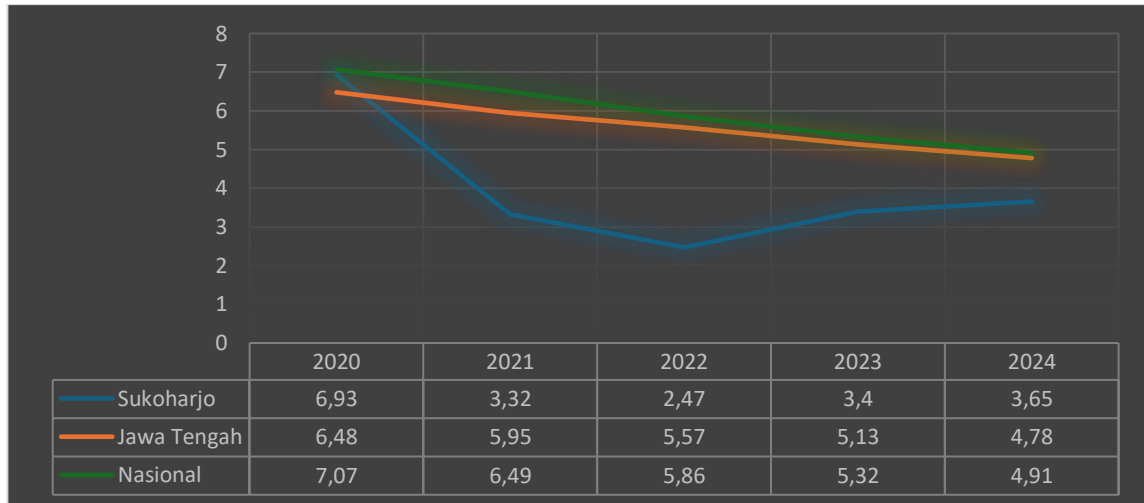
Sumber: Dinas Pengendalian penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

3.2.3. Bidang Ketenagakerjaan dan Pemberdayaan Ekonomi

Ketenagakerjaan merupakan salah satu dimensi fundamental dalam pengentasan kemiskinan karena berhubungan langsung dengan produktivitas ekonomi, pendapatan rumah tangga, dan distribusi kesejahteraan (Fields, 2012; Todaro et al., 2015).

A. Kondisi TPT, TPAK, dan Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan

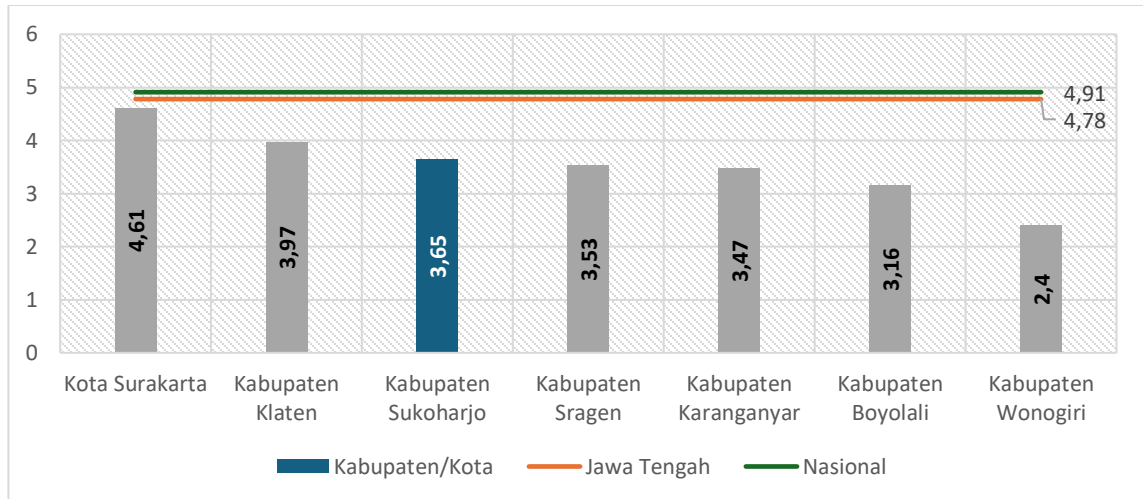
Di Kabupaten Sukoharjo, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menunjukkan penurunan signifikan dari 6,93% (enam koma sembilan puluh tiga persen) tahun 2020 menjadi 3,65% (tiga koma enam puluh lima persen) tahun 2024, lebih rendah dari rata-rata Provinsi Jawa Tengah 4,78% (empat koma tujuh puluh delapan persen) dan nasional 4,91% (empat koma sembilan puluh satu persen). Tren penurunan ini mencerminkan pemulihan pasar tenaga kerja pasca pandemi COVID-19 serta peningkatan efisiensi penyerapan tenaga kerja sektor industri, khususnya tekstil, garmen, dan manufaktur.



Sumber: BPS (Diolah)

Gambar 3.21 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020 – 2024 (%)

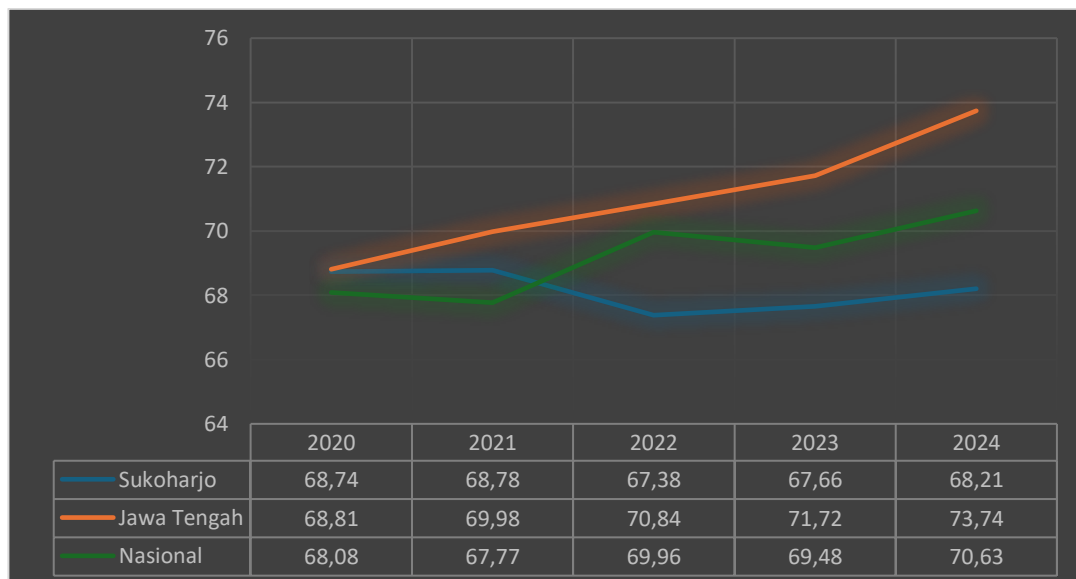
Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2024 sebesar 3,65% (tiga koma enam puluh lima persen), berada di bawah rata-rata Jawa Tengah 4,78% (empat koma tujuh puluh delapan persen) dan nasional 4,91% (empat koma sembilan puluh satu persen), serta menempati posisi menengah di antara wilayah Subosukowonosraten. Kabupaten Sukoharjo lebih rendah dibandingkan Kota Surakarta 4,61% (empat koma enam puluh satu persen) dan Kabupaten Klaten 3,97% (tiga koma sembilan puluh tujuh persen), namun masih lebih tinggi dibanding Boyolali 3,16% (tiga koma enam belas persen), Karanganyar 3,47% (tiga koma empat puluh tujuh persen), Sragen 3,53% (tiga koma lima puluh tiga persen), dan terendah di Wonogiri 2,4% (dua koma empat persen), menunjukkan kinerja pasar kerja Sukoharjo cukup baik secara regional dan nasional, namun masih terdapat ruang peningkatan efisiensi penyerapan tenaga kerja dibandingkan dengan kabupaten sekitar yang lebih rendah TPT-nya.



Sumber: BPS (Diolah)

Gambar 3.22 Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Sukoharjo di Wilayah Subosukowonosraten Tahun 2024 (%)

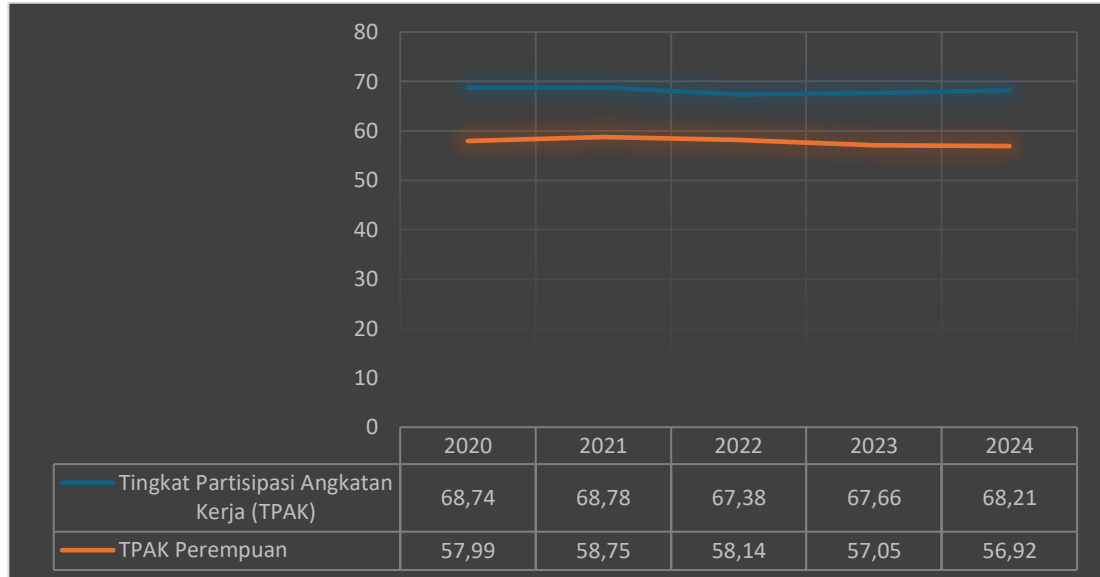
Namun, meskipun TPT membaik, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menunjukkan stagnasi di sekitar 68% (enampuluh delapan persen) tahun 2020–2024, dengan penurunan partisipasi perempuan dari 57,99% (lima puluh tujuh koma sembilan puluh persen) tahun 2020 menjadi 56,92% (lima puluh enam koma sembilan puluh dua persen) tahun 2024. Hal ini mengindikasikan adanya hambatan struktural dan sosial terhadap partisipasi perempuan di pasar kerja akibat restrukturisasi industri padat karya seperti tekstil dan garmen.



Sumber: BPS (Diolah)

Gambar 3.23 Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 (%)

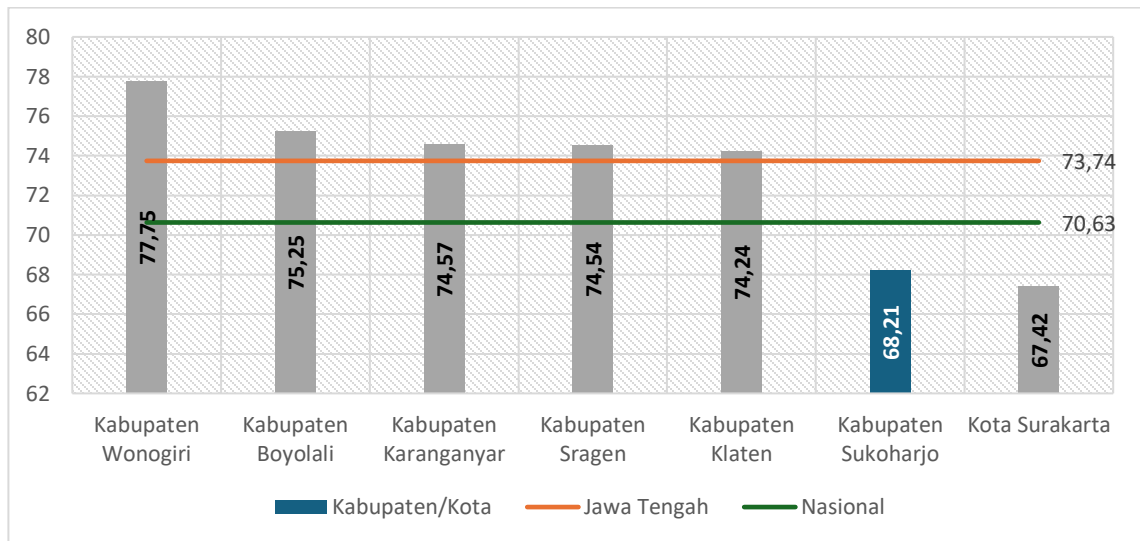
Berikut gambar perkembangan TPAK Perempuan Kabupaten Sukoharjo tahun 2020-2024.



Sumber: BPS (Diolah)

Gambar 3.24 Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan TPAK Perempuan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024 (%)

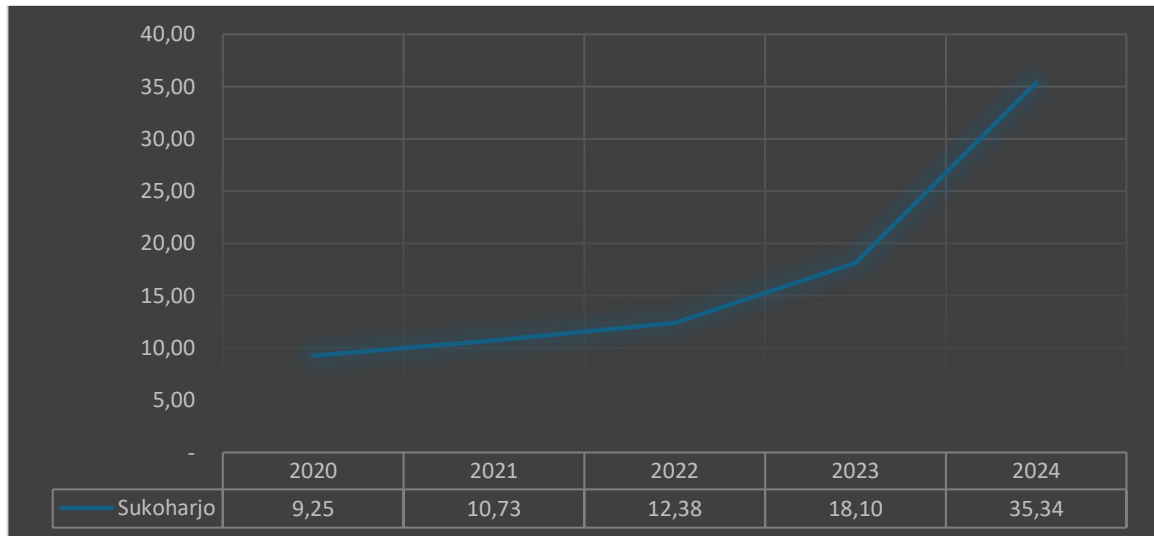
Pada tahun 2024, data TPAK menunjukkan bahwa Kabupaten Sukoharjo memiliki tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 68,21% (enam puluh delapan koma dua puluh satu persen), yang menempatkannya sebagai wilayah dengan nilai TPAK terendah, yaitu TPAK Kabupaten Sukoharjo tahun 2024 terendah di antara wilayah Subosukowonosraten, dan juga lebih rendah dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Tengah 73,74% (tujuh puluh tiga koma tujuh puluh empat persen) serta rata-rata nasional 70,63% (tujuh puluh koma enam puluh tiga persen). Bahkan, dibandingkan Kota Surakarta pun menunjukkan TPAK yang sedikit lebih rendah, yakni sebesar 67,42% (enam puluh tujuh koma empat puluh dua persen), namun konteks kota biasanya memiliki struktur ketenagakerjaan yang berbeda dengan wilayah kabupaten. Rendahnya TPAK di Sukoharjo dapat menjadi indikasi adanya tantangan struktural dalam pasar kerja, serta rendahnya motivasi atau kesiapan angkatan kerja. Selain itu, pergeseran ke sektor jasa dan konsumsi rumah tangga, terutama pada kelompok usia muda dan perempuan.



Sumber: BPS (Diolah)

Gambar 3.25 Posisi Relatif Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Sukoharjo di Wilayah Subosukowonosraten Tahun 2024 (%)

Dari sisi perlindungan sosial, cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) meningkat tajam dari 9,25% (sembilan koma dua puluh lima) tahun 2020 menjadi 35,34% (tiga puluh koma tiga puluh empat) tahun 2024, menunjukkan peningkatan kepedulian terhadap jaminan sosial pekerja dan efektivitas intervensi kebijakan daerah. Kenaikan ini berdampak positif terhadap pengurangan risiko sosial ekonomi akibat kecelakaan kerja, PHK, maupun kematian, sejalan dengan teori labor protection and welfare economics (Barr, 2020), yang menekankan peran sistem perlindungan sosial dalam mengurangi kerentanan kemiskinan struktural.



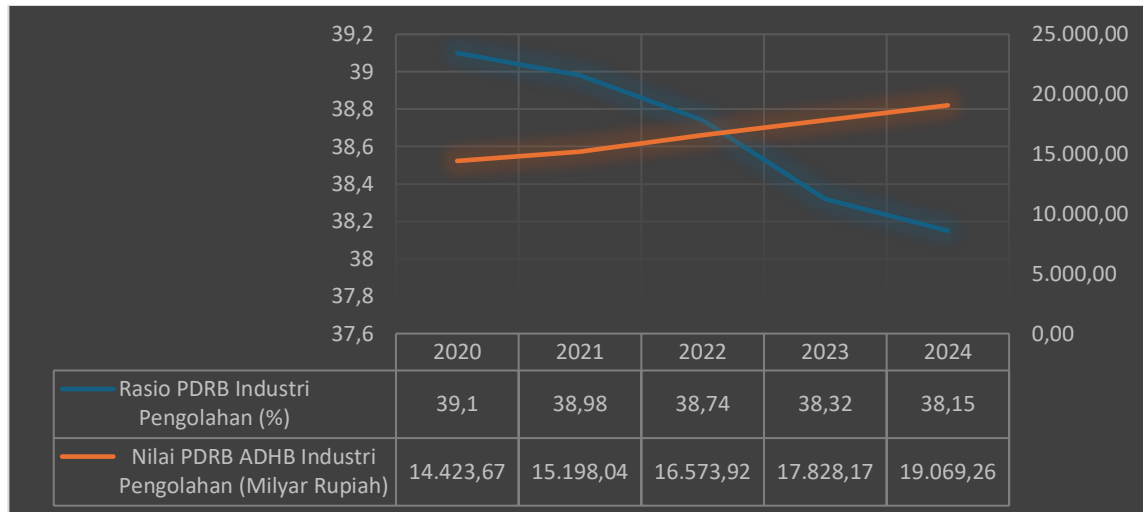
Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Diolah)

Gambar 3.26 Perkembangan Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024 (%)

B. Struktur Ekonomi dan Kontribusi Industri Pengolahan

Sektor industri pengolahan menjadi motor utama penyerapan tenaga kerja di Sukoharjo. Berdasarkan data BPS (2024), nilai tambah sektor industri pengolahan atas dasar harga berlaku (ADHB) meningkat dari Rp14,42 (empat belas koma empat puluh dua) triliun (2020) menjadi Rp19,07 (sembilan belas koma nol tujuh) triliun (2024), meskipun rasio kontribusi terhadap PDRB menurun dari 39,10% (tiga puluh sembilan koma sepuluh persen) menjadi 38,15% (tiga puluh delapan koma lima belas persen). Fenomena ini menunjukkan proses diversifikasi ekonomi daerah, di mana sektor-sektor lain seperti jasa, akomodasi, dan perdagangan tumbuh lebih cepat. Namun demikian, industri manufaktur tetap menjadi sektor dengan daya serap tenaga kerja terbesar, terutama di wilayah Grogol, Kartasura, dan Polokarto.

Menurut teori structural transformation (Kuznets, 1955), pergeseran kontribusi industri terhadap PDRB yang disertai peningkatan produktivitas menunjukkan kemajuan menuju struktur ekonomi yang lebih seimbang antara sektor manufaktur dan jasa. Kinerja industri pengolahan Sukoharjo mencerminkan dinamika tersebut, dengan penguatan basis industri menengah dan tumbuhnya pelaku industri kreatif yang berbasis teknologi.

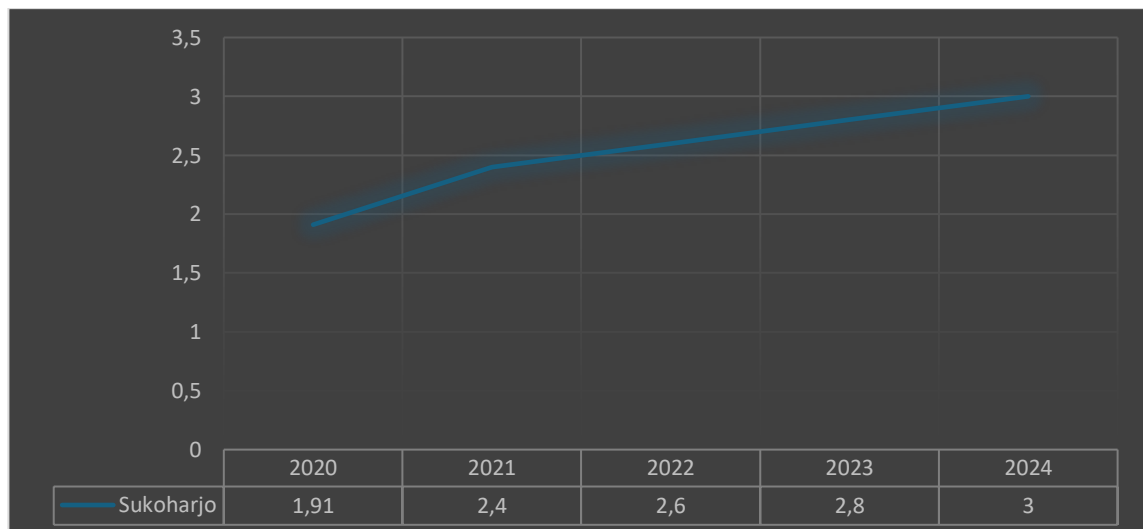


Sumber: BPS (Diolah)

Gambar 3.27 Perkembangan Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024 (%)

C. Kewirausahaan, UKM, dan Koperasi

Kewirausahaan dan pengembangan UMKM merupakan tulang punggung ekonomi daerah yang berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan berbasis komunitas. Data Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan (2024) menunjukkan bahwa rasio kewirausahaan Sukoharjo meningkat dari 1,91% (satu koma sembilan puluh satu persen) tahun 2020 menjadi 3,00% (tiga koma nol nol persen) tahun 2024, mencerminkan pertumbuhan jumlah pelaku usaha mandiri dan mikro.



Sumber: Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan (Diolah)

Gambar 3.28 Perkembangan Rasio Kewirausahaan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024 (%)

Selain itu, persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha naik dari 2,47% (dua koma empat puluh tujuh persen) tahun 2020 menjadi 16,69% (enam belas koma enam puluh sembilan persen) tahun 2024, menunjukkan keberhasilan program inkubasi bisnis dan pelatihan kewirausahaan perempuan. Capaian ini selaras dengan teori entrepreneurial-led development (Naudé, 2010), di mana peningkatan jumlah wirausaha berperan signifikan dalam memperluas kesempatan kerja informal produktif, memperkuat basis ekonomi lokal, dan meningkatkan resiliensi sosial rumah tangga miskin.

Kualitas kelembagaan koperasi juga meningkat meski fluktuatif, dengan koperasi berkualitas mencapai 23,44% (dua puluh tiga koma empat puluh empat persen) tahun 2024, menandakan adanya perbaikan manajemen dan kepatuhan pelaporan RAT. Peningkatan ini menunjukkan efektivitas program reformasi kelembagaan koperasi berbasis digitalisasi administrasi dan transparansi keuangan.

Tabel 3.6 Perkembangan Usaha Kecil dan Menengah, serta Koperasi Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
1. Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	%	2,47	2,83	10,71	15,44	16,69
2. Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	%	31,94	23,44	26,1	27,13	14,45

Sumber: Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan

D. Pariwisata dan Ekonomi Jasa

Sektor pariwisata dan penyediaan akomodasi-makanan-minuman di Sukoharjo juga menunjukkan pertumbuhan yang positif. Kontribusi sektor ini terhadap PDRB naik dari 3,55% (tiga koma lima puluh lima persen) tahun 2020 menjadi 4,05% (empat koma nol lima persen) tahun 2024, dengan nilai PDRB meningkat dari Rp1,307 (satu koma tiga ratus tujuh) triliun menjadi Rp2,024 (dua koma dua puluh empat) triliun. Peningkatan ini berkaitan dengan pengembangan destinasi wisata tematik serta meningkatnya konektivitas kawasan Subosukowonosraten.

Peran sektor pariwisata penting dalam inclusive growth karena menciptakan lapangan kerja di sektor jasa, transportasi, kuliner, dan UMKM kreatif. Pertumbuhan pariwisata lokal yang terintegrasi

dengan ekonomi kreatif dapat memperkuat daya saing daerah tanpa meningkatkan ketimpangan spasial (Musaddad et al., 2019).

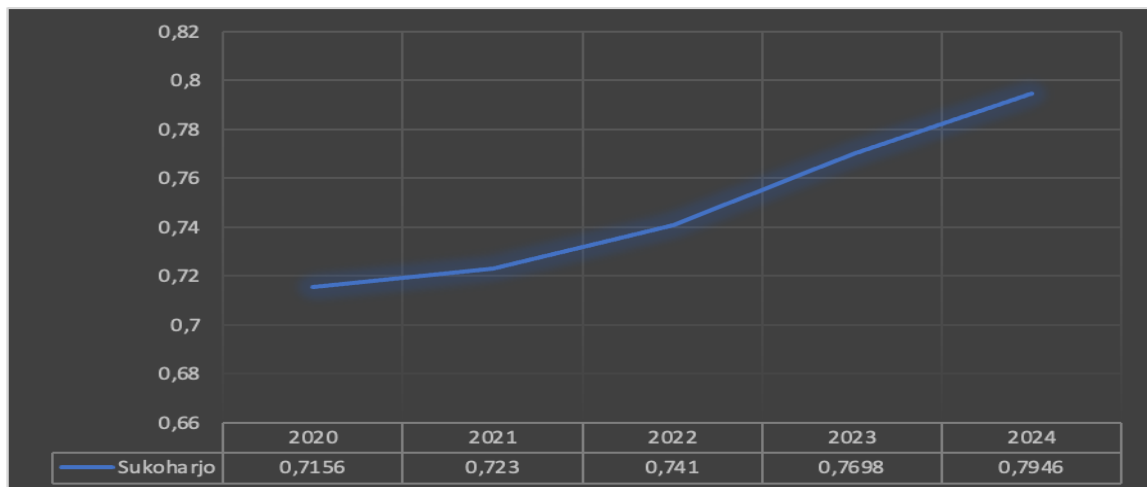


Sumber: BPS (Diolah)

Gambar 3.29 Perkembangan Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024 (%)

E. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

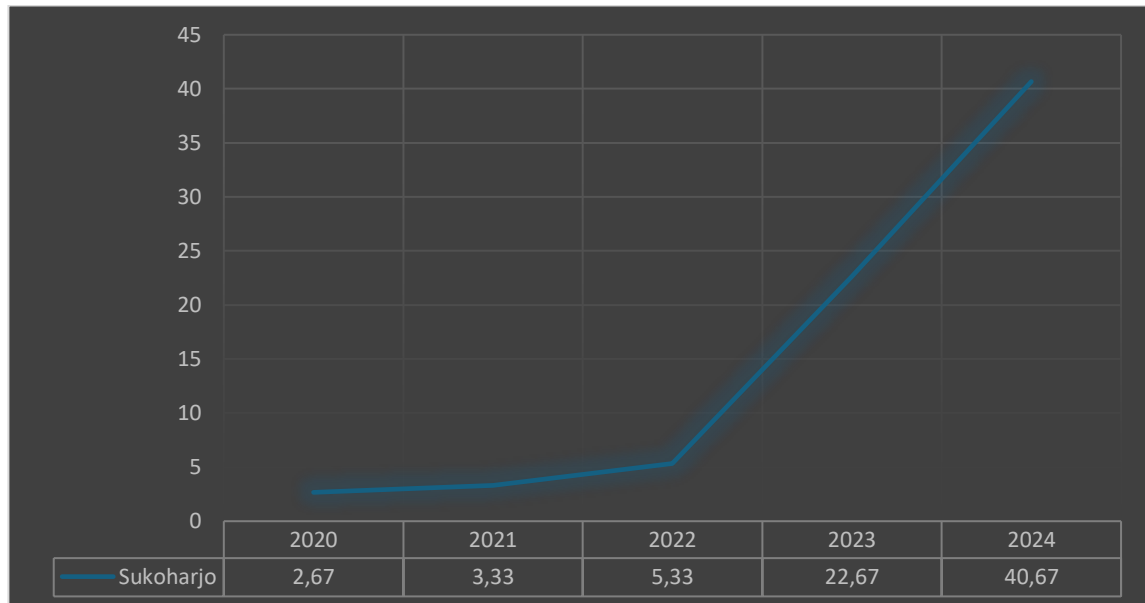
Pembangunan desa menjadi instrumen utama pengurangan kemiskinan berbasis komunitas. Berdasarkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (2024), Indeks Desa Membangun (IDM) meningkat dari 0,7156 (nol koma tujuh satu lima enam) tahun 2020 menjadi 0,7946 (nol koma tujuh sembilan empat enam) tahun 2024, sementara persentase desa mandiri melonjak dari 2,67% (dua koma enam puluh tujuh persen) menjadi 40,67% (empat puluh koma enam puluh tujuh persen).



Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Diolah)

Gambar 3.30 Perkembangan Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024 (Indeks)

Berikut gambar perkembangan persentase desa mandiri Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024.



Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Diolah)

Gambar 3.31 Perkembangan Persentase Desa Mandiri Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024 (%)

Kenaikan IDM dan persentase desa mandiri menggambarkan efektivitas kebijakan pembangunan partisipatif dan penguatan kapasitas ekonomi desa melalui program BUMDes dan Dana Desa.

Menurut Chambers (1983) dalam konsep *participatory rural development*, peningkatan kapasitas lokal dan partisipasi masyarakat menjadi kunci dalam menekan kemiskinan pedesaan melalui peningkatan daya saing ekonomi dan ketahanan sosial-ekologis. Sukoharjo berhasil menunjukkan transformasi menuju desa mandiri yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga pada aspek sosial dan ekologi.

F. Kepemudaan dan Kompetensi Tenaga Kerja

Peran generasi muda dalam pasar kerja daerah menjadi penting dalam konteks bonus demografi. Berdasarkan data Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (2024), tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri mencapai 22,55% (dua puluh dua koma lima puluh lima persen), namun masih

berpendapatan rendah. Namun, peningkatan produktivitas tenaga kerja dari Rp55,53 (lima puluh lima koma lima puluh tiga) juta tahun 2020 menjadi Rp65,45 (enam puluh lima koma empat puluh lima) juta tahun 2024 (Tabel 2.40), menandakan efisiensi dan peningkatan skill tenaga kerja muda.

Namun demikian, tenaga kerja bersertifikat kompetensi baru mencapai 0,03% (nol koma nol tiga persen) tahun 2024, menunjukkan perlunya penguatan pelatihan vokasional berbasis industri dan kolaborasi dengan BLK serta sektor swasta.

Pendekatan human capital formation (Becker, 1995) menegaskan bahwa peningkatan keterampilan tenaga kerja muda melalui pelatihan formal dapat mempercepat mobilitas vertikal sosial dan mengurangi risiko kemiskinan generasional.

Tabel 3.7 Perkembangan Kepemudaan dan Kompetensi Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
1. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	-	20,05	22,05	21,86	22,55
2. Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	1	1	1	1	0
3. Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	-	-	-	-	0,03
4. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp/Orang	55.531	57.949	61.366	63.513	65.448
5. Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS (Ketenagakerjaan)	%	67	67	67	67	70

Indikator	Satuan	Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
6. Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%	67	55	67	71	60

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

3.2.4. Bidang Infrastruktur Dasar

Pembangunan infrastruktur dasar merupakan salah satu pilar utama dalam penanggulangan kemiskinan struktural, karena berhubungan langsung dengan aksesibilitas, kualitas permukiman, konektivitas ekonomi, serta peningkatan produktivitas tenaga kerja (Calderón et al., 2010). Ketersediaan infrastruktur yang memadai dapat menurunkan biaya transaksi ekonomi rumah tangga miskin, meningkatkan mobilitas tenaga kerja, serta memperluas akses terhadap layanan dasar seperti air bersih, sanitasi, dan hunian layak.

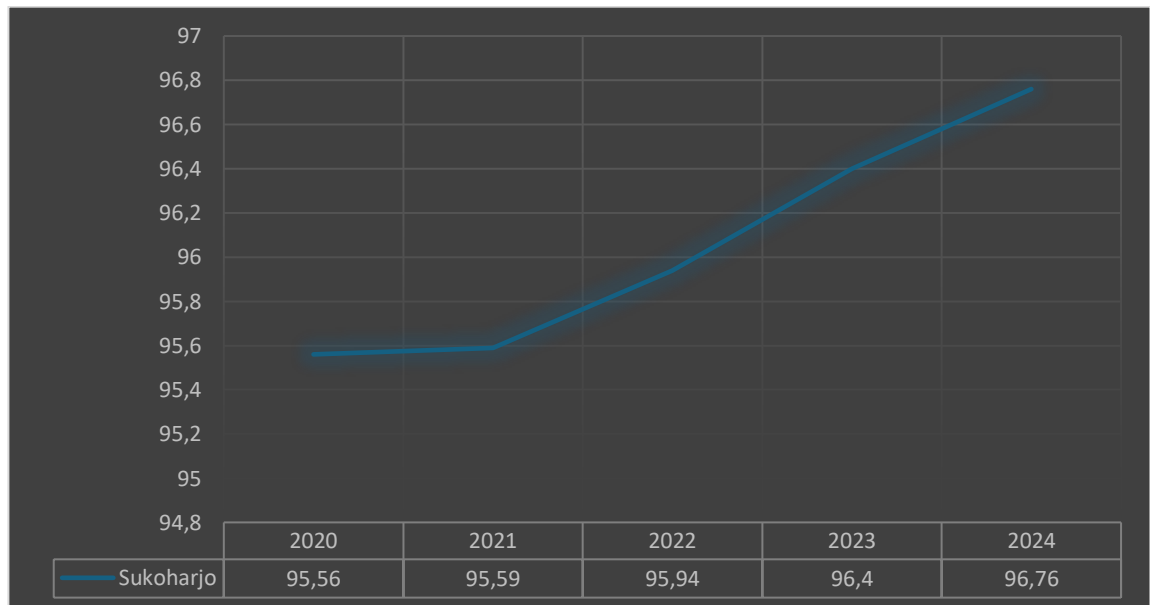
A. Penurunan Kawasan Kumuh

Persentase kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Sekoharjo menunjukkan hasil yang positif. Berdasarkan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (2024), luas kawasan kumuh di bawah 10 hektar yang berhasil ditangani menurun signifikan dari 49,74% (empat puluh sembilan koma tujuh puluh empat persen) tahun 2020 menjadi 4,22% (empat koma dua puluh dua persen) tahun 2024.

Penurunan ini merefleksikan efektivitas program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) dan intervensi berbasis peremajaan lingkungan, pembangunan PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum), serta peningkatan kualitas rumah melalui bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS). Menurut UN-Habitat (2020), keberhasilan pengurangan kawasan kumuh bukan hanya diukur dari sisi fisik (bangunan dan drainase), tetapi juga dari aspek sosial seperti partisipasi masyarakat dan keberlanjutan kelembagaan lokal. Sukoharjo menjadi contoh baik karena keberhasilan pengurangan kawasan kumuh didukung kolaborasi lintas sektor dan mekanisme community-based upgrading.

B. Penyediaan Rumah Layak Huni dan Relokasi

Program penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana dan masyarakat terdampak relokasi tercapai 100% (seratus persen) selama empat tahun berturut-turut (2020–2024), menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam perlindungan sosial terhadap kelompok rentan. Selain itu, jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) berhasil ditekan dari 10.849 (sepuluh ribu delapan ratus empat puluh sembilan) unit tahun 2020 menjadi 5.792 (lima ribu tujuh ratus sembilan puluh dua) unit tahun 2024, atau menurun hampir 47% (empat puluh tujuh persen) dalam lima tahun terakhir. Namun, secara keseluruhan akses terhadap hunian layak meningkat konsisten dari 95,56% (sembilan puluh lima koma lima puluh enam persen) tahun 2020 menjadi 96,76% (sembilan puluh enam koma tujuh puluh enam persen) tahun 2024, menandakan adanya peningkatan kualitas hunian dan pemenuhan standar bangunan layak.



Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Diolah)

Gambar 3.32 Perkembangan Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024 (%)

Penurunan RTLH ini berimplikasi langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin, karena memperbaiki dimensi

hunian dalam kemiskinan multidimensi (Alkire et al., 2011b). Secara ekonomi, hal ini mendukung konsep *basic needs approach* (Streeten et al., 1982), bahwa pemenuhan kebutuhan dasar seperti perumahan layak adalah prasyarat utama untuk keluar dari kemiskinan absolut.

C. Fasilitas PSU dan Lingkungan Permukiman

Indikator persentase PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) yang telah diserahkan ke pemerintah daerah meningkat signifikan dari 8% (delapan persen) tahun 2020 menjadi 11,61% (sebelas koma enam puluh satu persen) tahun 2024. Capaian ini menunjukkan adanya penguatan tata kelola aset permukiman serta peningkatan koordinasi antara pengembang perumahan dan pemerintah daerah dalam pemeliharaan infrastruktur lingkungan. Peran PSU sangat penting dalam mendukung keberlanjutan lingkungan hunian karena mencakup akses jalan lingkungan, drainase, dan fasilitas air bersih yang langsung memengaruhi kualitas hidup masyarakat berpendapatan rendah.

Berikut tabel perkembangan kawasan kumuh, rumah layak huni dan PSU Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024.

Tabel 3.8 Perkembangan Kawasan Kumuh, Rumah Layak Huni dan PSU Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024

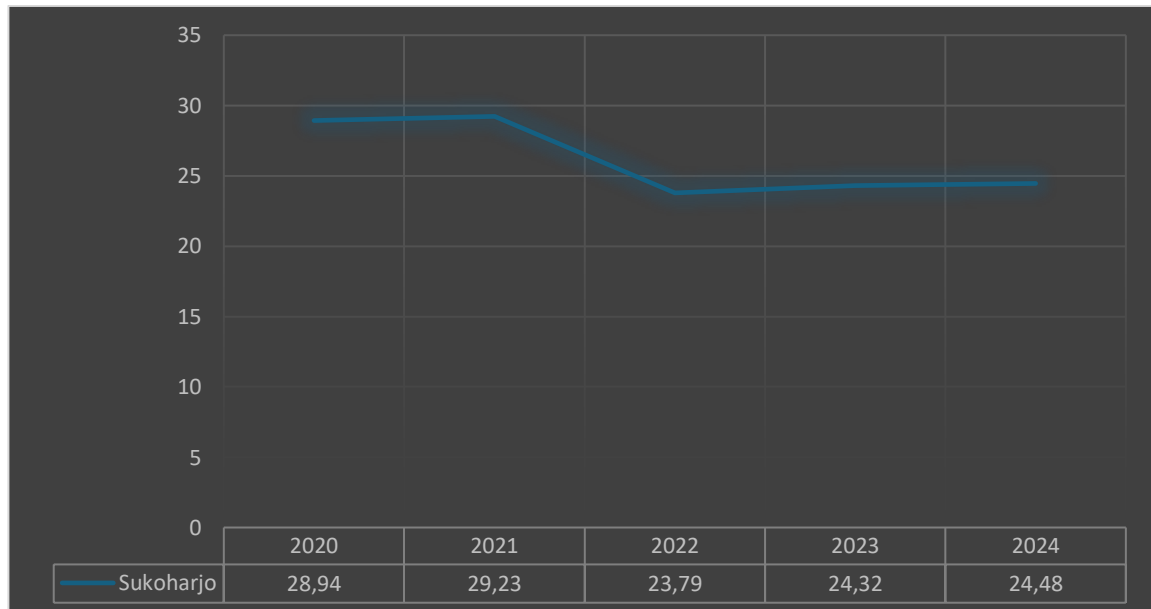
Indikator	Satuan	Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%	-	100	100	100	100
2. Fasilitas penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	%	-	-	-	-	100
3. Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	%	16	49,74	35,93	1,88	4,22

Indikator	Satuan	Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
4. Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	60,73	51,08	90	75,66	57,92
5. Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	-	8,08	8,78	10,48	11,61

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

D. Akses Air Minum dan Sanitasi

Akses rumah tangga terhadap air minum perpipaan di Kabupaten Sukoharjo mengalami fluktuasi selama 2020–2024, dengan penurunan dari 29,23% (dua puluh sembilan koma dua puluh tiga persen) tahun 2021 menjadi 24,48% (dua puluh empat koma empat puluh delapan persen) tahun 2024 (Gambar 2.83). Penurunan ini mengindikasikan adanya tantangan dalam kapasitas jaringan distribusi dan kontinuitas pelayanan SPAM, terutama di wilayah selatan yang belum terjangkau pipa PDAM.

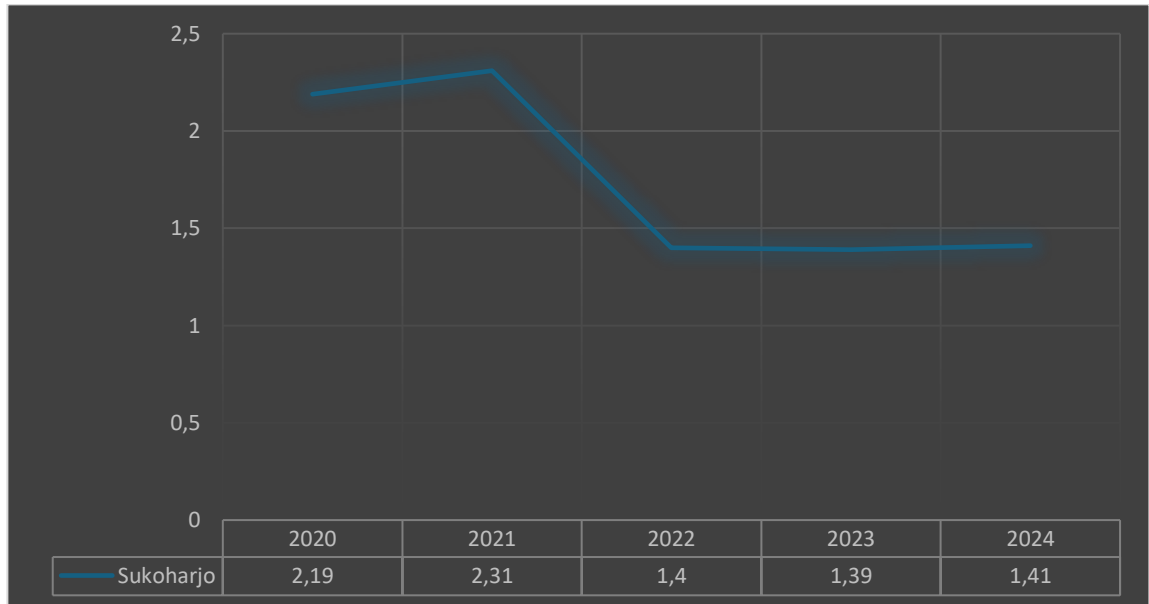


Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Diolah)

Gambar 3.33 Perkembangan Akses Rumah Tangga terhadap Air Minum Perpipaan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024 (%)

Sementara itu, akses terhadap sanitasi aman masih menjadi tantangan besar, dengan capaian hanya 1,41% (satu koma empat

puluh satu persen) tahun 2024 setelah mengalami penurunan dari 2,31% (dua koma tiga puluh satu persen) tahun 2021 (Gambar 2.85). Rendahnya capaian ini mencerminkan keterbatasan fasilitas pengolahan lumpur tinja (IPLT) dan kesadaran masyarakat terhadap sanitasi lingkungan.



Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Diolah)

Gambar 3.34 Perkembangan Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024 (%)

Dalam konteks ekonomi pembangunan, kondisi ini menunjukkan adanya *infrastructure inequality* (Calderón et al., 2014), di mana sebagian rumah tangga miskin masih belum dapat mengakses layanan dasar yang memadai, meskipun tingkat kemiskinan konsumsi menurun.

3.2.5. Bidang Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan dimensi utama dalam penanggulangan kemiskinan non-konsumsi karena berhubungan langsung dengan kemampuan rumah tangga memenuhi kebutuhan dasar kalori dan gizi. Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas pangan berimplikasi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan dan penurunan *food poverty line* (FAO, 2024; Sen, 2006).

A. Aksesibilitas Pangan

Indeks Ketahanan Pangan (IKP), yang mencerminkan kemampuan daerah dalam menjaga akses pangan secara fisik, ekonomi, dan sosial. Selama periode 2020–2024, IKP Kabupaten Sukoharjo meningkat dari 88,76 (delapan puluh delapan koma tujuh puluh enam) tahun 2020 menjadi 90,93 (sembilan puluh koma sembilan puluh tiga) tahun 2024 (Tabel 2.3), menunjukkan perbaikan signifikan dalam aspek ketersediaan pangan, akses konsumsi bergizi, dan stabilitas pasokan. Capaian ini mengindikasikan peningkatan efektivitas kebijakan pangan daerah dalam mendukung keberlanjutan gizi masyarakat, terutama pascapandemi.

B. Dinamika Energi dan Kecukupan Kalori

Ketersediaan energi pangan per kapita meningkat dari 3.765 kkal/kapita/hari (2020) menjadi 3.882 kkal/kapita/hari (2022), menunjukkan kecukupan kalori di atas ambang kebutuhan minimum (2.100 kkal/kapita/hari). Persentase ketersediaan energi (kalori) naik dari 125,54% (seratus dua puluh lima koma lima puluh empat persen) tahun 2023 menjadi 137,04% (seratus tiga puluh tujuh koma nol empat persen) tahun 2024, mencerminkan surplus pangan dan ketahanan energi yang baik.

Capaian ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan di Sukoharjo relatif stabil dan mendukung penurunan kerentanan gizi rumah tangga miskin, bahwa daerah dengan kecukupan kalori di atas dari kebutuhan minimum sejalan dengan penurunan kemiskinan (FAO, 2024).

C. Akses dan Kecukupan Konsumsi Pangan

Perkembangan Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PoU) menurun tajam dari 12,74% (dua belas koma tujuh puluh empat persen) tahun 2022 menjadi 8,05% (delapan koma nol lima persen) tahun 2024, menandakan perbaikan dalam konsumsi energi dan diversifikasi pangan rumah tangga miskin. Selain itu, angka kecukupan energi konsumsi (AKE) meningkat dari 2.100 kkal/kapita/hari (2020) menjadi 2.013 kkal/kapita/hari (2024), sedangkan angka kecukupan protein konsumsi (AKP) juga naik dari 57 gr/kapita/hari (2021) menjadi 56,8 gr/kapita/hari (2024) (lihat tabel intervensi ketahanan pangan 2024). Peningkatan ini konsisten dengan teori nutrition-based poverty alleviation (Strauss et al., 1998), yang menegaskan bahwa konsumsi gizi seimbang memperkuat produktivitas tenaga kerja, menurunkan morbiditas, dan meningkatkan kemampuan ekonomi rumah tangga.

Selain itu, persentase desa/kelurahan rawan pangan yang ditangani mencapai 62,5% (enam puluh dua koma lima persen) tahun 2024, menunjukkan penguatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG) serta efektivitas intervensi Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) berbasis desa.

Berikut tabel perkembangan kemandirian pangan Kabupaten Sukoharjo tahun 2020-2024.

Tabel 3.9 Perkembangan Kemandirian Pangan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Ketahanan Pangan (angka)	88,76	88,7	89,11	91,02	90,93
Prevalensi ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>), dalam %	11,54	11,92	12,74	10,31	8,05
Ketersediaan Pangan Utama (Ton)	240,13	217,68	270,98	248,8	278,01
Angka Kecukupan Energi Konsumsi (kkal/kap/hari)	2100,1	2150	2110	2.129	2.013
Prosentase Ketersediaan Energi (Kalori)	171,13	141,82	127,29	135,19	137,04
Angka Kecukupan Protein Konsumsi (gr/kap/th)	62,2	57	55	55,4	56,8
Prosentase Desa/Kelurahan Rawan Pangan yang ditangani	12,5	25	37,5	50	62,50

Sumber: Dinas Pangan (Diolah)

D. Produksi Pertanian dan Produktivitas Tanaman Pangan

Sektor pertanian Sukoharjo berkontribusi besar terhadap dimensi ketersediaan pangan. Berdasarkan data Dinas Pertanian dan Perikanan (2024), produksi gabah meningkat dari 310.778 (tiga ratus sepuluh ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan) ton (2020) menjadi 340.997 (tiga ratus empat puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) ton (2024), dengan produktivitas stabil di kisaran 70–77 kw/ha. Produktivitas hortikultura juga meningkat dari 2.743 ton (2020) menjadi 2.442 ton (2024), sementara produksi palawija relatif menurun. Hal ini mengindikasikan proses diversifikasi lahan dari tanaman palawija ke hortikultura bernilai ekonomi tinggi.

Produktivitas pertanian keseluruhan meningkat dari 68,71 ku/ha (2020) menjadi 70,59 ku/ha (2024), mencerminkan efektivitas penerapan teknologi budidaya, irigasi, dan penyuluhan pertanian.

Kinerja ini selaras dengan teori agricultural transformation (Johnston et al., 1961) yang menyatakan bahwa modernisasi sektor pertanian merupakan tahap awal pembangunan ekonomi daerah yang berorientasi pada pengurangan kemiskinan pedesaan.

Namun demikian, persentase gagal panen masih tercatat di angka 3% (tiga persen) tahun 2024, dan produktivitas lahan berfluktuasi akibat variabilitas iklim dan keterbatasan alat mesin pertanian modern (alsintan). Oleh karena itu, diperlukan kebijakan climate-smart agriculture untuk menjaga ketahanan pangan jangka panjang.

Rasio luas jaringan irigasi kewenangan kabupaten yang berfungsi baik juga mengalami peningkatan signifikan, dari 44% (empat puluh empat persen) tahun 2020 menjadi 65% (enam puluh lima persen) tahun 2024. Capaian ini memperlihatkan keberhasilan program rehabilitasi dan operasi irigasi yang berkelanjutan.

Kinerja tersebut penting karena berhubungan langsung dengan ketahanan pangan daerah dan kesejahteraan petani. Peningkatan investasi pada infrastruktur irigasi dapat menurunkan tingkat kemiskinan pedesaan, karena meningkatkan produktivitas lahan dan menstabilkan pendapatan petani (Fan et al., 2005).

Tabel 3.10 Perkembangan Pertanian dan Produktivitas Tanaman Pangan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024

Indikator	Capaian				
	2020	2021	2022	2023	2024
Produksi Gabah (Ton)	310.778	28.275	308.688	360.896	340.997
Jumlah Produksi Tanaman Palawija (Ton)	35.100	24.697	21.637	20.051	30.367
Jumlah Produksi Tanaman Komoditas Hortikultura (Ton)	49.858	33.948	46.298	43.462	43.663
Jumlah produksi Tanaman Perkebunan (Ton)	33.959,59	37.880,75	38.445,69	40.383,74	43.281,84
Produktivitas pertanian per hektar per tahun (Ku/Ha)	68,71	65,74	64,41	70,27	70,59
Persentase Gagal Panen (%)	3	3	3	3	3
Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi (%)	%	54	44	54,3	69,3

Sumber: Dinas Pertanian dan Perikanan

E. Sektor Peternakan

Sektor peternakan menunjukkan perkembangan yang dinamis. Total produksi peternakan meningkat dari 13.795 (tiga belas ribu tujuh ratus sembilan puluh lima) ton tahun 2020 menjadi 15.473 (lima belas ribu empat ratus tujuh puluh tiga) ton tahun 2024, dengan kenaikan signifikan pada populasi unggas, terutama ayam ras pedaging dan petelur yang melonjak dari 5,87 (lima koma delapan tujuh) juta ekor tahun 2020 menjadi 12,51 (dua belas koma lima satu) juta ekor tahun 2024. Kenaikan ini berimplikasi positif terhadap peningkatan ketersediaan protein hewani domestik, yang menjadi faktor penting dalam menurunkan angka stunting dan undernutrition.

Namun, dinamika terjadi pada populasi sapi potong dan kerbau yang cenderung menurun akibat pergeseran lahan peternakan dan meningkatnya harga pakan. Populasi sapi dewasa menurun dari 14.312 ekor (2023) menjadi 10.561 ekor (2024), menunjukkan perlunya peningkatan program perbibitan dan efisiensi sistem pakan ternak.

Kinerja sektor ini juga dapat dilihat dari indikator penurunan kasus penyakit hewan menular, yang menunjukkan perbaikan sistem kesehatan hewan dan biosekuriti. Pada 2020–2024, penurunan kasus penyakit hewan tercatat sebesar 50% (lima puluh persen) setelah lonjakan insiden pada 2023 akibat wabah Lumpy Skin Disease (LSD). Hasil ini menunjukkan peningkatan respons cepat terhadap penyakit hewan dan penerapan kebijakan PP No. 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan.

Tabel 3.11 Perkembangan Sektor Peternakan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024

Indikator	Capaian				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah produksi peternakan (Ton)	13.809,8	13.613,5	14.462,06	15.200,2	15.473,3
Jumlah Populasi Ternak (Unit)	75.504	80.280	80.664	97.061	110.887
Persentase Penurunan kejadian dan Jumlah kasus penyakit hewan menular (%)	0	0	0	-95,45	50

Sumber: Dinas Pertanian dan Perikanan

F. Sektor Perikanan: Tangkap dan Budidaya

Sektor perikanan di Kabupaten Sukoharjo, meskipun tidak sebesar daerah pesisir, memberikan kontribusi penting bagi penyediaan pangan protein dan lapangan kerja berbasis air tawar. Produksi perikanan meningkat dari 13.486 (tiga belas ribu empat ratus delapan puluh enam) ton tahun 2020 menjadi 14.475 (empat belas ribu empat ratus tujuh puluh lima) ton tahun 2024, dengan puncak capaian pada tahun 2022 sebesar 15.509 (lima belas ribu lima ratus sembilan ribu) ton. Fluktuasi ini mencerminkan pengaruh faktor iklim dan ketersediaan pakan, namun tren jangka panjangnya menunjukkan penguatan kapasitas produksi terutama di subsektor budidaya ikan air tawar (lele, nila, gurame). Jumlah pembudidaya bersertifikat CBIB meningkat dari 5 (lima) orang tahun 2020 menjadi 58 (lima puluh delapan) orang tahun 2024, menggambarkan profesionalisasi sektor perikanan kecil. Selain itu, cakupan bina kelompok nelayan mencapai 100%, menunjukkan efektivitas program pemberdayaan nelayan. Kinerja ini sesuai dengan konsep *blue economy* (Bappenas, 2021), yang menekankan keberlanjutan ekologi dan efisiensi pemanfaatan sumber daya perairan untuk kesejahteraan masyarakat.

Tabel 3.12 Perkembangan Sektor Perikanan: Tangkap dan Budidaya Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024

Indikator	Capaian				
	2020	2021	2022	2023	2024
Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	3.615,53	3.652,54	3.689,06	3.725,95	3.763,20
Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	13.486,00	14.216,00	15.509,00	14.791,00	14.475,25
Cakupan bina kelompok nelayan (%)	100	100	100	100	100
Jumlah Pembudidaya bersertifikat CBIB (orang)	5	20	30	57	58

Sumber: Dinas Pertanian dan Perikanan

3.2.6. Bidang Sosial

Bidang sosial memiliki posisi strategis dalam memperkuat ketahanan sosial masyarakat miskin dan rentan. Dalam kerangka *Multidimensional Poverty* (Alkire et al., 2011b), deprivasi sosial merupakan salah satu dimensi utama penyusun kemiskinan non-konsumsi selain pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Dimensi ini mencakup eksklusi sosial, keterbatasan akses terhadap pelayanan dasar, serta lemahnya mekanisme perlindungan sosial formal.

Amartya Sen (2006) menegaskan bahwa kemiskinan tidak sekadar kekurangan pendapatan, tetapi ketidakmampuan untuk menjalani

kehidupan yang memiliki *capability* dan *functioning* dasar, termasuk kemampuan untuk memperoleh jaminan sosial, perlindungan dari bencana, dan partisipasi sosial. Dengan demikian, peningkatan sistem kesejahteraan sosial menjadi instrumen penting dalam mengurangi kemiskinan struktural dan kerentanan sosial masyarakat di Kabupaten Sukoharjo.

A. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Selama periode 2020–2024, persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terhadap total penduduk di Kabupaten Sukoharjo menunjukkan fluktuasi yang relatif stabil di kisaran 37% (tiga puluh tujuh persen), dengan angka tertinggi pada 2021 sebesar 37,87% (tiga puluh tujuh koma delapan puluh tujuh persen), dan menurun menjadi 37,21% (tiga puluh tujuh koma dua puluh satu persen) pada 2024. Jumlah absolut PPKS pada tahun 2024 mencapai sekitar 340.048 (tiga ratus empat puluh ribu empat puluh delapan) orang, atau hampir seperlima dari total penduduk. Kondisi ini menggambarkan masih kuatnya beban sosial daerah dalam menangani kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia terlantar, anak terlantar, serta keluarga miskin kronis.

Fluktuasi tersebut merefleksikan dinamika data sosial yang belum sepenuhnya real-time akibat keterbatasan integrasi sistem antar-instansi. Efektivitas program kesejahteraan sosial daerah sangat dipengaruhi oleh kapasitas pendataan dan keakuratan social registry, di mana integrasi data lintas sektor (Dinas Sosial, Dukcapil, dan P3KE) menjadi kunci dalam pengentasan kemiskinan berbasis bukti (Bah et al., 2015; Setyanto, 2025).



Sumber: Dinas Sosial (Diolah)

Gambar 3.35 Perkembangan Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024 (%)

B. Pelayanan Sosial dan Penanganan Kelompok Rentan

Berdasarkan data Dinas Sosial (2024), capaian indikator pelayanan sosial dasar menunjukkan hasil yang optimal. Dua indikator kunci, yaitu (1) tingkat persentase penyandang disabilitas, anak terlantar, lansia terlantar, dan gelandangan yang terpenuhi kebutuhannya serta (2) persentase korban bencana alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, tercatat 100% (seratus persen) konsisten sejak 2021 hingga 2024 (Tabel 2.39). Capaian ini mencerminkan keberhasilan implementasi kebijakan perlindungan sosial sesuai Permensos No. 9 Tahun 2018 tentang Layanan dan Rehabilitasi Sosial.

Tabel 3.13 Perkembangan Pelayanan Sosial dan Penanganan Kelompok Rentan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024

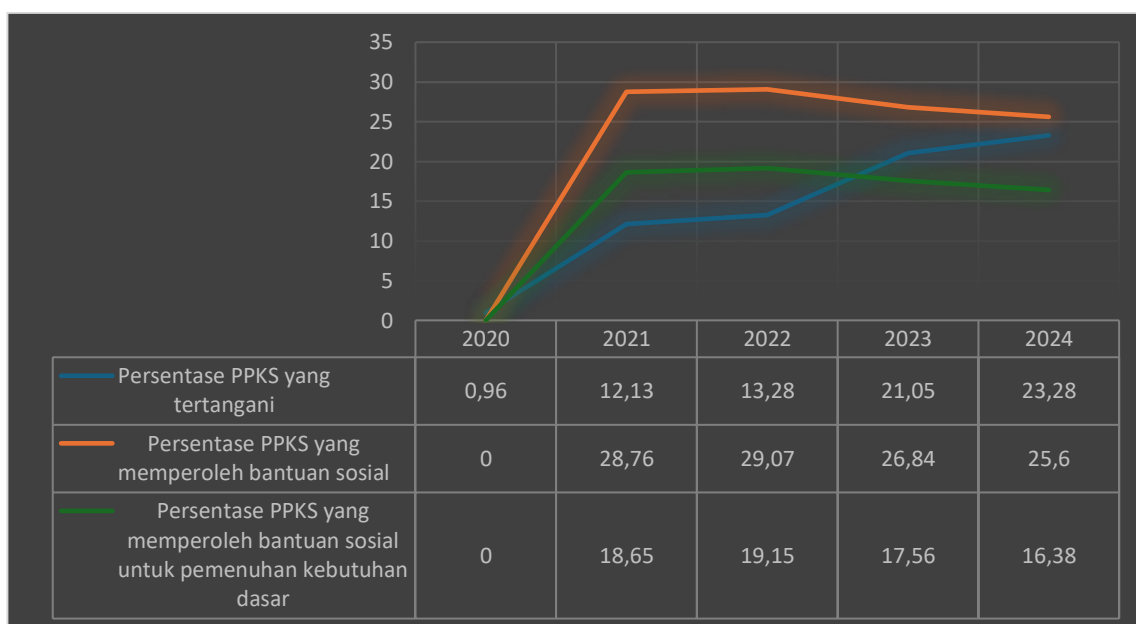
Indikator	Capaian				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (%)	-	100	100	100	100
Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota (%)	-	100	100	100	100

Sumber: Dinas Sosial

Namun, meskipun capaian layanan dasar tinggi, tren PPKS yang masih di atas 37% (tiga puluh tujuh persen) menandakan belum optimalnya penanganan root causes kemiskinan sosial. Proporsi PPKS yang tertangani meningkat dari 0,96% (nol koma sembilan puluh enam persen) tahun 2020 menjadi 23,28% (dua puluh tiga koma dua puluh delapan persen) tahun 2024, menunjukkan kemajuan signifikan dalam jangkauan layanan. Namun, proporsi PPKS yang memperoleh bantuan sosial justru menurun dari 29,07% (dua puluh sembilan koma nol tujuh) tahun 2022 menjadi 25,6% (dua puluh lima koma enam persen) tahun 2024. Fenomena ini

menggambarkan pergeseran pendekatan dari charity-based aid menuju empowerment-based support, di mana pemerintah daerah mulai menekankan kemandirian sosial penerima manfaat.

Di sisi lain, indikator PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar menurun dari 19,15% (sembilan belas koma lima belas persen) tahun 2022 menjadi 16,38% (enam belas koma tiga puluh delapan persen) tahun 2024. Hal ini menandakan adanya tantangan dalam efektivitas targeting dan kapasitas pendamping sosial di lapangan. Hambatan utama dalam pelayanan sosial daerah adalah rasio pekerja sosial profesional yang rendah dibandingkan jumlah penerima manfaat, yang berimplikasi pada keterbatasan pemantauan dan penanganan kasus secara individual (Rahma et al., 2014; Sitepu, 2017).



Sumber: Dinas Sosial (Diolah)

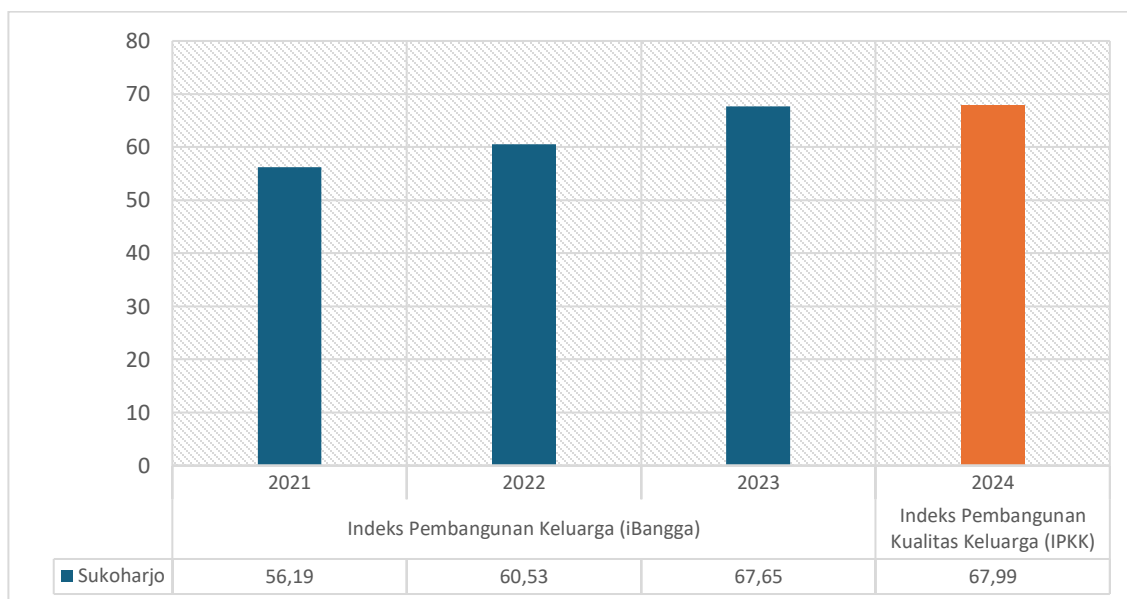
Gambar 3.36 Perkembangan Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Penanganan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024 (%)

C. Dimensi Keluarga dan Kualitas Sosial

Pembangunan sosial daerah juga diarahkan untuk memperkuat ketahanan keluarga sebagai unit dasar kesejahteraan sosial. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kabupaten Sukoharjo meningkat signifikan dari 56,19 (lima puluh enam koma sembilan belas) tahaun 2021 menjadi 67,65 (enam puluh tujuh koma enam puluh lima)

tahun 2023, kemudian diintegrasikan ke dalam Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK) pada tahun 2024 sebesar 67,99 (enam puluh tujuh koma sembilan puluh sembilan).

Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan program pembangunan keluarga dalam meningkatkan dimensi ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga. Peningkatan kualitas keluarga mempengaruhi penurunan kemiskinan multidimensi, terutama melalui peningkatan literasi kesehatan, stabilitas ekonomi, dan pendidikan anak (Arsani, 2020; Dharana et al., 2024; Salesman, 2021).



Sumber: BKKBN, Dinas Pengendalian penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Diolah)

Gambar 3.37 Perkembangan Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2023 dan Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 (Indeks)

Selain itu, kebijakan responsif gender juga memperkuat dimensi sosial kemiskinan. Persentase anggaran responsif gender (ARG) meningkat dari 2% (dua persen) tahun 2021 menjadi 10,48% (sepuluh koma empat puluh delapan persen) tahun 2023 sebelum menurun menjadi 4,82% (empat koma delapan puluh dua persen) tahun 2024, menunjukkan dinamika dalam pengarusutamaan gender lintas perangkat daerah. Fluktuasi ini perlu diantisipasi melalui penguatan koordinasi antar-OPD agar program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat berjalan berkelanjutan.

Tabel 3.14 Perkembangan Anggaran Responsif Gender (ARG) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase ARG pada belanja langsung APBD (%)	%	-	2	4,34	10,48	4,82

Sumber: Dinas Pengendalian penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

D. Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Inklusi Sosial

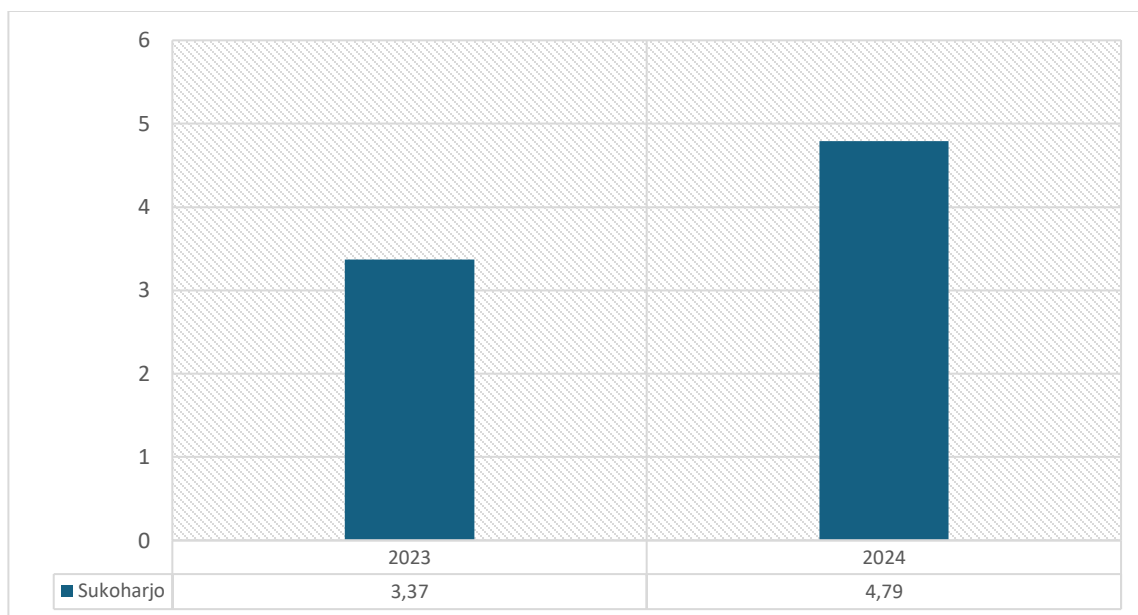
Administrasi kependudukan menjadi fondasi penting bagi kebijakan sosial yang tepat sasaran. Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (2024) menunjukkan kemajuan yang sangat signifikan, dengan rekaman KTP elektronik meningkat dari 96,82% (sembilan puluh enam koma delapan puluh dua persen) tahun 2020 menjadi 99,24% (sembilan puluh sembilan koma dua puluh empat persen) tahun 2024, serta kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-4 tahun mencapai 99,94% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh empat) tahun 2024. Selain itu, kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) meningkat dari 46,91% (empat puluh enam koma sembilan puluh satu persen) tahun 2020 menjadi 83,89% (delapan puluh tiga koma delapan puluh sembilan persen) tahun 2024, menandakan keberhasilan literasi identitas anak dan integrasi layanan kependudukan dengan pendidikan dan kesehatan.

Tabel 3.15 Perkembangan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024

Indikator	Capaian				
	2020	2021	2022	2023	2024
Perekaman KTP elektronik (%)	96,82	99,62	97,68	99,8	99,24
Persentase anak usia 0-4 tahun yang memiliki akte kelahiran (%)	99,76	99,87	99,94	99,93	99,94
persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA (%)	46,9	66,31	55,91	81,84	83,89

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sementara itu, persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) meningkat dari 3,37% (tiga koma tiga puluh tujuh persen) tahun 2023 menjadi 4,79% (empat koma tujuh puluh sembilan persen) tahun 2024, mencerminkan respons positif terhadap kebijakan transformasi digital pelayanan publik.



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Diolah)

Gambar 3.38 Perkembangan Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2024 (%)

Capaian pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil menggambarkan kemajuan signifikan dalam membangun sistem administrasi kependudukan inklusif yang menjadi basis penyaluran bantuan sosial dan perlindungan hak-hak sipil warga miskin. Menurut UNDP (2022), inklusi administratif merupakan prasyarat bagi inklusi sosial yang berkeadilan, karena memastikan setiap warga memiliki identitas legal untuk mengakses layanan dasar, bantuan sosial, dan partisipasi ekonomi.

3.4. Gambaran Realisasi Anggaran Penanggulangan Kemiskinan

Kinerja keuangan merupakan salah satu bentuk penilaian dengan asas manfaat dan efisiensi dalam penggunaan anggaran. Dalam organisasi sektor publik, setelah operasional penggunaan anggaran langkah selanjutnya adalah pengukuran kinerja untuk menilai prestasi dan akuntabilitas organisasi dan manajemen dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Salah satu ciri *good governance* penyelenggaraan keuangan daerah adalah akuntabilitas atau pertanggungjawaban. Dalam penggunaan anggaran bukan hanya kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik tersebut dibelanjakan dengan ekonomis, efektif dan efisien, namun juga penggunaan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo selama kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2024 mengalami perkembangan yang positif, yaitu meningkat dari sebesar Rp.2,04 Triliun pada tahun 2020 meningkat menjadi sebesar Rp. 2,24 triliun pada tahun 2024. Secara rata-rata pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2020 hingga tahun 2024 pada angka 1,02% (satu koma nol dua persen). Dilihat dari rata-rata pertumbuhannya selama lima tahun terakhir, pendapatan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan yang mengalami pertumbuhan cukup signifikan dengan rata-rata sebesar 36,08% (tiga puluh enam koma nol delapan persen).

Tabel 3.16 Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024 (%)

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan
1	Pendapatan Daerah	(4,82)	3,88	(4,94)	7,25	3,73	1,02
1.1	Pendapatan Asli Daerah	2,35	12,53	(6,26)	8,44	3,07	4,03
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	(10,38)	(0,32)	22,19	12,48	1,10	5,02
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	(12,01)	9,49	6,82	23,16	152,95	36,08
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	49,06	3,03	12,41	0,89	7,22	14,52
1.1.4	Lain-lain PAD yang disahkan	18,89	30,99	(37,66)	0,78	(17,75)	(0,95)
1.2	Pendapatan Transfer	(7,23)	1,64	(0,30)	7,00	4,05	1,03
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	(7,23)	0 (10,05)	(2,06)	7,73	3,90	(1,54)
1.2.3	Transfer Antar Daerah	0	0	13,25	2,15	5,06	4,09
1.3	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	3,41	(5,56)	(95,01)	(53,11)	(100,00)	(50,06)
1.3.1	Pendapatan Hibah	3,41	(96,00)	17,80	(53,11)	(100,00)	(45,58)
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat	0	0	0	0	0	0
1.3.3	Pendapatan Lainnya	0	0	0	0	0	0

Sumber: Dokumen LRA, 2020-2024 (diolah)

Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo selama lima tahun terakhir mengalami perkembangan yang meningkat, dari sebesar Rp2,07(dua koma nol tujuh) triliun pada tahun 2020 meningkat menjadi sebesar Rp2,35 (dua koma tiga puluh lima) triliun pada tahun 2024. Rerata pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2020-2024 sebesar 2,23% (dua koma dua puluh tiga persen) dimana pertumbuhan paling besar yaitu belanja tidak terduga sebesar 75,51% (tujuh puluh lima koma lima puluh satu persen).

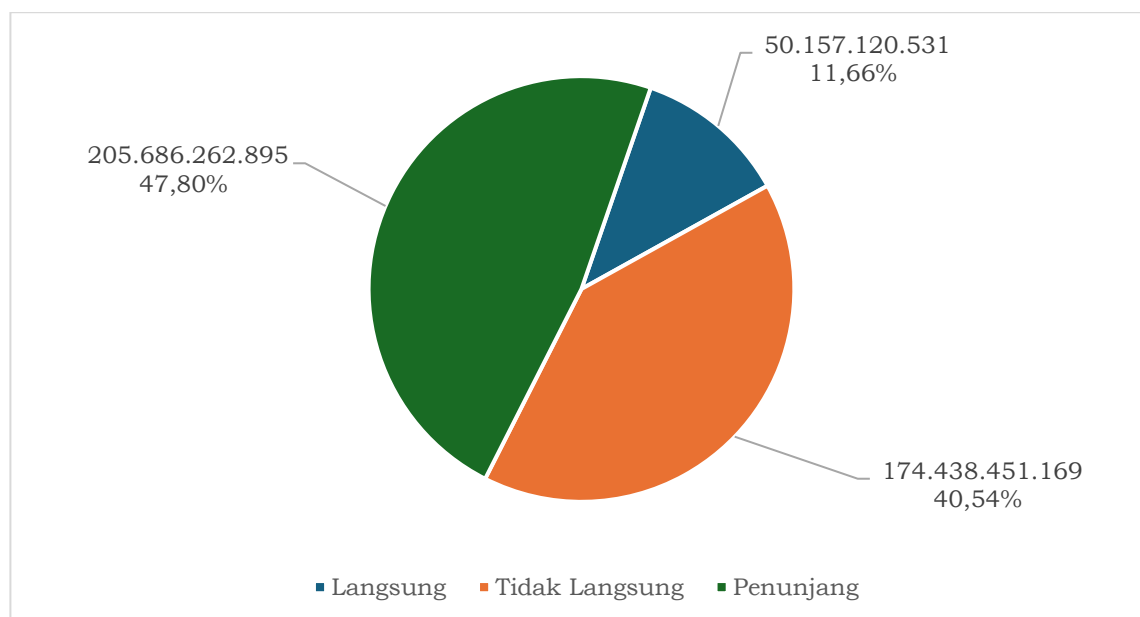
Tabel 3.17 Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024 (Rupiah)

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan
2	Belanja Daerah	2.073.080.966.909	2.089.455.558.854	2.042.027.804.977	2.235.426.792.478	2.350.492.492.454	2,24
2.1	Belanja Operasi	1.424.856.112.004	1.472.694.410.236	1.476.279.908.868	1.565.378.114.470	1.709.135.538.150	3,76
2.1.1	Belanja Pegawai	838.548.756.755	830.659.026.029	824.229.915.680	827.872.956.836	911.823.685.254	0,74
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	490.000.647.249	575.798.113.836	588.004.129.525	634.798.969.751	672.311.280.676,00	6,57
2.1.3	Belanja Bunga	0	0	0	0	0	0
2.1.4	Belanja Subsidi	0	624.509.495	704.788.792	580.074.513	632.535.549,00	1,40
2.1.5	Belanja Hibah	71.383.208.000	48.541.701.076	61.033.159.330	98.941.813.370	107.657.436.671,00	42,13
2.1.6	Bantuan Sosial	24.923.500.000	17.071.059.800	2.307.915.541	3.184.300.000	16.710.600.000,00	75,09
2.1.7	Bantuan Keuangan						
2.2	Belanja Modal	238.738.380.776	283.872.873.485	220.460.177.459	292.716.698.008	234.714.674.156	(4,47)
2.2.1	Belanja Tanah	56.852.726.056	57.390.168.126	14.666.775.507	2.612.595.129	0	48,82
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	78.305.886.096	66.022.615.391	43.732.158.456	71.363.929.617	57.057.488.669,00	(2,39)
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	32.626.619.100	68.356.082.100	57.712.175.084	114.282.812.756	68.487.478.404,00	17,73
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	66.354.103.100	88.714.959.040	98.571.813.860	99.142.721.002	104.768.565.884,00	(1,29)
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	4.599.046.424	3.389.048.828	5.777.254.552	5.314.639.504	4.401.141.199,00	(9,27)
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	0	0	0	0	0	0
2.3	Belanja Tidak Terduga	64.214.838.529	405.163.533	53.657.650	40.890.000	250.222.728	75,51
2.4	Belanja Transfer	345.271.635.600	332.483.111.600	345.234.061.000	377.291.090.000	406.392.057.420	3,86
2.4.1	Transfer/Bagi Hasil ke Desa	23.123.358.000	20.319.837.000	27.436.569.000	24.698.997.000	37.331.519.000	11,81
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	322.148.277.600	312.163.274.600	317.797.492.000	352.592.093.000	369.060.538.420	3,41
	Surplus/Defisit	(32.686.205.581)	30.177.811.684	(27.209.542.586)	(74.536.610.887)	(109.071.929.083)	(70,28)

Sumber: Dokumen LRA, 2020-2024 (diolah)

Keberhasilan pemerintah daerah Kabupaten Sukoharjo dalam penurunan tingkat kemiskinan pada tahun 2024 yang mencapai 6,83% (enam koma delapan puluh tiga persen), merupakan keberhasilan pelaksanaan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 92 Tahun 2022 tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2022-2026. Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sukoharjo tahun 2024 berdasarkan Perbup No 92 Tahun 2022 dikelompokkan menjadi 3 jenis intervensi, yaitu: (1) Tidak Langsung, (2) Langsung, dan (3) Penunjang.

Secara keseluruhan, anggaran penanggulangan kemiskinan Kabupaten Sukoharjo tahun 2024 menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam mendorong penurunan kemiskinan secara terintegrasi lintas sektor. Berdasarkan data yang tersaji, total belanja daerah mencapai Rp 2,35 triliun, sementara anggaran khusus penanggulangan kemiskinan berjumlah Rp 430,31 miliar atau sekitar 18,31% (delapan belas koma tiga puluh satu persen) dari total belanja daerah. Dari total tersebut, program kelompok langsung memperoleh alokasi sebesar Rp 52,05 miliar 2,1 % (dua koma satu persen), program tidak langsung sebesar Rp 173,32 miliar 40,3 % (empat puluh koma tiga persen), dan program penunjang sebesar Rp 204,94 miliar 47,6 % (empat puluh tujuh koma enam persen). Struktur ini menunjukkan bahwa sebagian besar intervensi pengentasan kemiskinan masih berorientasi pada program penunjang dan tidak langsung, yang berfungsi memperkuat ekosistem layanan publik dan pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat miskin.



Sumber: Perangkat Daerah terkait, 2025 (Diolah)

Gambar 3.39 Realisasi Anggaran Penanggulangan Kemiskinan Menurut Kelompok Intervensi Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 (Rupiah, %)

Dari sisi sektoral, terdapat perbedaan signifikan dalam distribusi anggaran antar urusan. Urusan Kesehatan menjadi penerima alokasi terbesar, yakni Rp 171,13 miliar atau 39,77 % (tiga puluh sembilan koma tujuh puluh tujuh persen) dari total anggaran penanggulangan kemiskinan daerah, menegaskan bahwa dimensi kesehatan menjadi pilar utama dalam strategi pengentasan kemiskinan berbasis ketahanan manusia (human capital). Urusan Pendidikan menyusul dengan alokasi Rp 154,82 miliar atau 35,98 % (tiga puluh lima koma sembilan puluh delapan persen), mencerminkan prioritas daerah terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui akses pendidikan dasar dan layanan literasi publik. Kedua sektor ini secara kumulatif menyerap lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) anggaran kemiskinan, yang menegaskan orientasi Kabupaten Sukoharjo terhadap pembangunan manusia sebagai strategi jangka panjang penanggulangan kemiskinan.

Di sisi lain, urusan Pertanian juga memperoleh alokasi yang cukup signifikan, yaitu Rp 32,03 miliar atau 7,44 % (tujuh koma empat puluh empat persen), mencerminkan pentingnya sektor primer dalam mendukung penghidupan masyarakat miskin di wilayah perdesaan. Diikuti oleh urusan Sosial sebesar Rp 16,57 miliar atau 3,85 % (tiga koma delapan puluh lima persen), dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp 13,74 miliar atau 3,19 % (tiga koma sembilan belas persen), yang berperan penting dalam pemberdayaan sosial dan ekonomi lokal berbasis komunitas. Sementara itu, urusan-urusan seperti Perumahan dan Kawasan Permukiman (Rp 10,32 miliar), Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Rp 8,56 miliar), dan Perdagangan (Rp 7,45 miliar) turut memperkuat aspek spasial dan infrastruktur dasar pengentasan kemiskinan.

Urusan lain seperti Ketahanan Pangan, Koperasi UKM, Tenaga Kerja, dan BPBD memiliki kontribusi relatif kecil secara nominal, namun memiliki efek pengungkit tinggi terhadap keberlanjutan ekonomi keluarga miskin melalui penguatan daya tahan pangan, peningkatan produktivitas, serta perlindungan sosial adaptif. Secara ekonomi pembangunan, struktur anggaran ini menunjukkan bahwa Sukoharjo telah menggeser pendekatan pengentasan kemiskinan dari bantuan langsung menuju transformasi struktural melalui peningkatan modal manusia, produktivitas ekonomi rakyat, dan ketahanan sosial masyarakat miskin.

Tabel 3.18 Realisasi Anggaran Penanggulangan Kemiskinan Menurut Urusan Perangkat Daerah terkait Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 (Rupiah, %)

No	Urusan	Realisasi Anggaran Penanggulangan Kemiskinan Menurut Sektor/Urusan Tahun 2024	Kontribusi Menurut Anggaran Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2024 (%)	Kontribusi Menurut Belanja Daerah Tahun 2024 (%)
1	Pendidikan	154.818.886.927	35,98	6,59
2	Perpustakaan	268.355.000	0,06	0,01
3	Kesehatan	171.107.779.589	39,77	7,28
4	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.677.700.107	1,32	0,24
5	Tenaga Kerja	852.300.705	0,20	0,04
6	Koperasi UKM	1.025.878.352	0,24	0,04
7	Perindustrian	314.246.776	0,07	0,01
8	Perdagangan	7.445.346.465	1,73	0,32
9	Pemuda	242.787.700	0,06	0,01
10	Pariwisata	568.803.000	0,13	0,02
11	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	13.742.074.000	3,19	0,58
12	Keuangan	632.535.549	0,15	0,03
13	Perhubungan	850.116.457	0,20	0,04
14	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8.565.319.470	1,99	0,36
15	Perumahan dan Kawasan Permukiman	10.317.250.000	2,40	0,44
16	Sosial	16.573.938.596	3,85	0,71
17	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	21.950.000	0,01	0,00
18	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.512.097.094	0,35	0,06
19	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.106.082.964	0,26	0,05
20	Transmigrasi	128.930.000	0,03	0,01
21	Ketahanan Pangan	1.909.288.328	0,44	0,08
22	Pertanian	32.026.692.956	7,44	1,36
23	Perikanan	573.474.560	0,13	0,02
	Jumlah	430.281.834.595	100,00	18,31

Sumber: Perangkat Daerah terkait, 2025 (Diolah)

3.5. Analisis Keterkaitan Kondisi Kemiskinan

Secara umum, kondisi kemiskinan di Kabupaten Sukoharjo menunjukkan tren penurunan yang signifikan selama periode 2021–2025. Persentase penduduk miskin (PO) menurun dari 8,23 persen pada 2021 menjadi 6,83

persen pada 2025, dengan jumlah penduduk miskin berkurang dari 73,84 ribu menjadi 62,66 ribu jiwa. Penurunan ini sejalan dengan peningkatan indikator kesejahteraan non-konsumsi, seperti rata-rata lama sekolah, penurunan stunting, peningkatan cakupan JKN, serta penurunan rumah tidak layak huni dan peningkatan ketahanan pangan. Secara teoritis, hubungan ini menegaskan pendekatan *multidimensional poverty* (Alkire et al., 2011b) dan *capability approach* (Sen, 2006), yang melihat kemiskinan bukan hanya dari sisi pendapatan, tetapi juga dari kemampuan individu dan rumah tangga untuk mengakses layanan dasar dan memperluas pilihan hidupnya.

Dari perspektif posisi relatif, Sukoharjo menempati peringkat ke-10 dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah dalam hal tingkat kemiskinan terendah, dan telah mencapai indikator lebih baik dibanding rata-rata provinsi (9,48 persen) serta nasional (8,47 persen). Hal ini menunjukkan efektivitas kebijakan daerah yang telah mengintegrasikan intervensi di berbagai sektor pembangunan. Secara *time series*, penurunan P0, P1, dan P2 selama lima tahun terakhir mencerminkan keberhasilan kebijakan sektoral dalam memperbaiki akses layanan dasar. Penurunan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dari 0,91 menjadi 0,62 menandakan peningkatan kemampuan konsumsi rumah tangga miskin terhadap garis kemiskinan, sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) turun dari 0,21 menjadi 0,10, menunjukkan semakin kecilnya kesenjangan antarpenduduk miskin.

Dari sisi efektivitas, pencapaian ini merupakan hasil sinergi lintas bidang. Dalam sektor pendidikan, peningkatan akses pendidikan dasar dan vokasional berkontribusi pada peningkatan produktivitas tenaga kerja (Becker, 1995; Wilantari, 2021). Di bidang kesehatan, penurunan prevalensi stunting dan peningkatan cakupan JKN menurunkan risiko kemiskinan akibat beban biaya pengobatan (Grossman, 1972; Jayathilaka et al., 2020). Sementara itu, di bidang ketenagakerjaan dan pemberdayaan ekonomi, peningkatan tenaga kerja formal dan kewirausahaan kecil menengah menciptakan efek *income smoothing* bagi rumah tangga miskin (Cho, 2015; Fields, 2012). Pembangunan infrastruktur dasar juga meningkatkan mobilitas ekonomi dan menurunkan biaya sosial (M. Liu et al., 2023), sedangkan penguatan ketahanan pangan dan perlindungan sosial adaptif mengurangi kerentanan terhadap guncangan ekonomi (Abraham et al., 2020; Bowen et al., 2020).

Dari aspek relevansi dan keterkaitan, penurunan kemiskinan konsumsi di Sukoharjo tidak dapat dilepaskan dari kemajuan di enam bidang non-konsumsi sebagai berikut:

(1) Bidang Pendidikan:

Peningkatan rata-rata lama sekolah dan partisipasi sekolah dasar dan menengah telah memperkuat modal manusia dan memperbesar peluang kerja produktif. Berdasarkan *human capital theory* (Becker, 1995),

peningkatan investasi pendidikan berimplikasi langsung terhadap penurunan kemiskinan melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja dan mobilitas sosial (Pohan et al., 2016).

(2) Bidang Kesehatan:

Peningkatan UHH yang disertai perbaikan status gizi dan penurunan stunting menjadi determinan utama penurunan P1 dan P2. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan kesehatan yang memperluas akses layanan dasar dan jaminan kesehatan masyarakat miskin efektif menurunkan deprivasi ekonomi jangka panjang (Ma et al., 2022).

(3) Bidang Ketenagakerjaan dan Pemberdayaan Ekonomi:

Penurunan tingkat pengangguran terbuka dan peningkatan partisipasi angkatan kerja produktif menunjukkan adanya penguatan ekonomi lokal. Peningkatan proporsi tenaga kerja formal dan wirausaha produktif secara signifikan menurunkan tingkat kemiskinan struktural, sebagaimana diuraikan dalam *employment-based poverty reduction model* (Fields, 2012).

(4) Bidang Infrastruktur Dasar:

Peningkatan akses air minum layak, sanitasi aman, dan perumahan layak menjadi katalis utama perbaikan kesejahteraan. Akses infrastruktur tidak hanya memperbaiki kualitas hidup, tetapi juga meningkatkan efisiensi ekonomi rumah tangga (Modebe et al., 2012).

(5) Bidang Ketahanan Pangan:

Diversifikasi sumber pangan dan peningkatan produktivitas pertanian rakyat memperkuat ketahanan ekonomi pedesaan. Sesuai teori FAO (2022), peningkatan ketersediaan pangan bergizi mengurangi risiko kemiskinan gizi (*nutritional poverty*) yang berdampak antargenerasi.

(6) Bidang Sosial:

Perluasan cakupan perlindungan sosial adaptif seperti bansos, PKH, dan BLT mendorong peningkatan social resilience rumah tangga miskin. Pendekatan ini memperkuat kemampuan masyarakat untuk pulih dari guncangan ekonomi dan sosial, sejalan dengan konsep *resilience framework* (Adger, 2000; Davies et al., 2013).

Penurunan konsisten pada empat indikator kemiskinan utama menunjukkan bahwa Sukoharjo berhasil menempuh strategi pembangunan yang inklusif dan lintas sektor. Secara empiris, korelasi antara penurunan P0, P1, dan P2 dengan peningkatan capaian non-konsumsi memperlihatkan kuatnya *multidimensional linkages* (Alkire et al., 2011b; Sen, 2006), yaitu perbaikan akses pendidikan dan kesehatan tidak hanya menurunkan pengeluaran rumah tangga miskin, tetapi juga memperkuat kemampuan ekonomi jangka panjang melalui peningkatan produktivitas kerja. Infrastruktur dasar dan ketahanan pangan berperan

menurunkan risiko kemiskinan sementara bidang sosial berfungsi sebagai *shock absorber* bagi kelompok rentan.

Dari perspektif teori ekonomi, hasil ini konsisten dengan *capability approach* (Sen, 2006), *inclusive growth theory* (Bourguignon, 2003), dan *vicious circle of poverty* (Nurkse, 1953), di mana penanggulangan kemiskinan efektif bila dilakukan melalui perluasan kapabilitas manusia dan perbaikan struktur kesempatan ekonomi. Secara konseptual, komplementaritas program bahwa hubungan antar keenam bidang ini bersifat sinergis dan saling memperkuat. Dengan demikian, efektivitas kebijakan lintas bidang tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan kemiskinan di Sukoharjo telah mengarah pada pendekatan yang integratif dan berkelanjutan.

Dari analisis keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa penurunan kemiskinan konsumsi (P0, P1, P2) di Sukoharjo memiliki keterkaitan positif yang kuat dengan perbaikan indikator non-konsumsi di enam bidang utama. Kebijakan daerah yang menempatkan kemiskinan sebagai isu lintas sektoral telah berhasil meningkatkan efektivitas intervensi dan relevansi program. Ke depan, arah kebijakan perlu difokuskan pada penguatan kolaborasi lintas sektor dengan strategi *pro-poor growth*, *human capital accumulation*, dan *social protection synergy* guna mempertahankan tren penurunan kemiskinan menuju target 4,5–5 persen pada tahun 2029.

Tabel 3.19 Analisis Keterkaitan Kondisi Kemiskinan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021–2025

Indikator	Posisi Relatif	Antar Waktu (Tren 2021– 2025)	Efektivitas	Relevansi	Keterkaitan
Persentase Penduduk Miskin (P0)	Lebih rendah dibanding rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan Nasional pada 2025; Sukoharjo 6,83% (peringkat ke-10 dari 35 kabupaten/kota).	Menurun konsisten dari 2021 hingga 2025, penurunan 1,4 poin menunjukkan pemulihan pasca-pandemi dan ekspansi ekonomi inklusif.	Efektivitas tinggi; penurunan P0 lebih cepat dibanding rata-rata provinsi dan nasional, menunjukkan efektivitas program penanggulangan kemiskinan.	Sejalan dengan target mewujudkan “Zero Extreme Poverty”.	• Peningkatan Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah menurunkan kemiskinan jangka panjang. • Peningkatan AHH, penurunan stunting dan peningkatan cakupan JKN menekan kemiskinan akibat biaya kesehatan. • TPAK meningkat dan pengangguran menurun memperluas lapangan kerja formal. • Akses air minum dan sanitasi layak naik signifikan. • Indeks Ketahanan Pangan meningkat seiring diversifikasi komoditas lokal. • PPKS menurun dengan meningkatnya cakupan perlindungan sosial adaptif.
Jumlah Penduduk Miskin (JPM)	Termasuk lima kabupaten dengan jumlah penduduk miskin terendah di Jateng.	Turun signifikan dari 2021 hingga 2025, berkurang ±11,18 ribu jiwa.	Efektivitas tinggi; sinergi program nasional dan daerah (pemanfaatan P3KE, optimalisasi TKPKD dan bantuan sosial) sehingga efektif menurunkan jumlah absolut	Relevan dengan capaian pertumbuhan ekonomi dan peningkatan PDRB per kapita.	• Perluasan akses pendidikan menengah pertama dan vokasional berkontribusi terhadap kemandirian ekonomi. • Penurunan angka kematian bayi dan ibu meningkatkan stabilitas sosial ekonomi keluarga. • Pertumbuhan UMKM produktif mendorong kenaikan pendapatan rumah tangga miskin. • Bantuan RLH dan PSU memperbaiki lingkungan

Indikator	Posisi Relatif	Antar Waktu (Tren 2021– 2025)	Efektivitas	Relevansi	Keterkaitan
			penduduk miskin.		kumuh dan kualitas permukiman. • Ketersediaan pangan lokal stabil mendukung ketahanan ekonomi rumah tangga. • Pemberdayaan sosial menurunkan ketergantungan bantuan.
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Lebih rendah dibanding Jawa Tengah dan Nasional.	Sempat naik 2021 akibat pandemi, lalu turun stabil hingga 2025.	Efektivitas cukup tinggi; menurunnya kesenjangan pengeluaran rumah tangga miskin terhadap GK.	Sejalan dengan capaian penurunan P1 nasional.	• Pendidikan vokasional meningkatkan peluang kerja produktif. • Penurunan stunting dan peningkatan akses kesehatan ibu dan anak memperkuat produktivitas jangka panjang. • Peningkatan tenaga kerja formal dan wirausaha kecil mempersempit kesenjangan pendapatan. • Akses transportasi dan konektivitas antarwilayah menurunkan biaya logistik rumah tangga miskin. • Diversifikasi pangan rumah tangga menekan volatilitas konsumsi. • Peningkatan partisipasi sosial memperkuat jaringan perlindungan sosial komunitas.
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Lebih rendah dibanding Jawa Tengah dan Nasional.	Menurun konsisten dari 2021 hingga 2025, menunjukkan berkurangnya disparitas antar	Efektivitas sangat tinggi; menyempitnya distribusi pengeluaran antar kelompok miskin.	Relevan dengan capaian penurunan P2 nasional.	• Pemerataan akses pendidikan dasar hingga menengah mengurangi disparitas antarkelompok. • Peningkatan cakupan layanan kesehatan mengurangi beban pengeluaran medis ekstrem.

Indikator	Posisi Relatif	Antar Waktu (Tren 2021– 2025)	Efektivitas	Relevansi	Keterkaitan
		rumah tangga miskin.			• Kewirausahaan mikro dan industri kecil mengurangi ketimpangan antarwilayah. • Pembangunan infrastruktur dasar meningkatkan konektivitas ekonomi desa. • Ketersediaan cadangan pangan desa memperkuat stabilitas sosial. • Bantuan sosial responsif gender dan disabilitas memperkecil kesenjangan sosial ekonomi.

3.6. Determinan Kemiskinan

Analisis determinan kemiskinan atau root cause analysis merupakan tahap lanjutan setelah menggambarkan kondisi umum kemiskinan daerah. Analisis ini dimaksudkan untuk menelusuri faktor-faktor penyebab mendasar kemiskinan di Kabupaten Sukoharjo, baik dari sisi penyedia layanan/perangkat daerah (*supply side*) maupun sisi penerima manfaat/kelompok sasaran (*demand side*). Sebagaimana ditegaskan oleh Amartya Sen (2006) dalam *Development as Freedom*, kemiskinan tidak hanya dipahami sebagai kekurangan pendapatan, tetapi juga sebagai keterbatasan kemampuan (*capability deprivation*) dalam mengakses sumber daya dasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, infrastruktur, pangan, dan perlindungan sosial.

Secara umum, determinan kemiskinan di Sukoharjo memiliki keterkaitan dengan ketimpangan spasial dan sosial dalam akses terhadap layanan dasar. Ketimpangan ini berimplikasi terhadap rendahnya kualitas sumber daya manusia, terbatasnya peluang ekonomi produktif, serta belum optimalnya inklusivitas kebijakan publik. Membbaiknya indikator-indikator non-konsumsi dalam bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, infrastruktur dasar, ketahanan pangan, dan sosial akan berdampak langsung terhadap penurunan tingkat kemiskinan (P0) dan penguatan dimensi kesejahteraan yang lebih berkelanjutan.

Berdasarkan hasil evaluasi pengukuran kinerja indikator utama kemiskinan non-konsumsi selama periode 2020–2024, determinan kemiskinan di Kabupaten Sukoharjo dapat dijabarkan sebagai berikut.

3.4.1. Determinan Kemiskinan Bidang Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu determinan paling fundamental dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sukoharjo. Menurut teori human capital (Becker, 1995), pendidikan berfungsi sebagai investasi jangka panjang yang mampu meningkatkan produktivitas dan membuka peluang kerja formal. Namun, pemerataan akses dan kualitas pendidikan di Sukoharjo masih menghadapi sejumlah tantangan baik dari *supply side* maupun dari *demand side*.

Dari sisi *supply side*, permasalahan utama terletak pada belum meratanya distribusi kualitas fasilitas pendidikan antarwilayah, terutama di daerah pedesaan dan perbatasan. Kekurangan guru, khususnya pada bidang sains, teknologi, dan vokasi, masih menjadi hambatan dalam peningkatan mutu pembelajaran. Sarana pendukung seperti laboratorium, ruang praktik, dan perpustakaan sekolah dasar serta menengah juga belum memenuhi standar nasional. Fasilitas literasi publik, seperti perpustakaan keliling dan taman baca masyarakat, belum mampu menjangkau wilayah terpencil, sehingga disparitas literasi antarwilayah tetap tinggi.

Sementara dari *demand side*, tingginya angka putus sekolah di kalangan keluarga miskin mencerminkan lemahnya kemampuan masyarakat dalam mempertahankan anak-anaknya di sekolah, terutama akibat beban ekonomi dan rendahnya persepsi manfaat pendidikan formal terhadap kebutuhan ekonomi rumah tangga. Selain itu, budaya membaca di masyarakat masih lemah, yang diperparah dengan meningkatnya penggunaan gawai di kalangan remaja yang beralih dari aktivitas literatif ke hiburan digital.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kebijakan pendidikan di Sukoharjo perlu diarahkan pada pemerataan fasilitas pendidikan berbasis spasial, peningkatan mutu tenaga pendidik, serta penguatan digitalisasi pembelajaran. Program afirmatif seperti beasiswa keluarga miskin dan sekolah vokasi berbasis industri lokal juga perlu diperluas untuk mendorong peningkatan daya saing tenaga kerja lokal serta memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

Tabel 3.20 Determinan Kemiskinan Bidang Pendidikan

<i>Supply Side</i>	<i>Demand Side</i>	Implikasi Kebijakan Prioritas
• Distribusi kualitas fasilitas pendidikan belum merata dan masih kekurangan guru sains, TIK, serta vokasi. • Laboratorium, sarana digital learning, dan perpustakaan belum memadai. • Fasilitas literasi keliling dan bahan bacaan edukatif kurang menjangkau desa. • Kualitas dan digitalisasi pembelajaran belum merata di seluruh jenjang.	• Angka putus sekolah tinggi di keluarga miskin. • Persepsi pendidikan belum dianggap relevan dengan kebutuhan ekonomi lokal. • Rendahnya budaya membaca dan literasi digital anak. • Minimnya dukungan orang tua terhadap proses pendidikan anak.	• Pemerataan sarana pendidikan dasar-menengah berbasis spasial. • Penguatan program beasiswa dan BOS afirmatif untuk keluarga miskin. • Digitalisasi sekolah dan literasi digital bagi siswa dan guru. • Integrasi kurikulum vokasi dengan kebutuhan industri lokal.

3.4.2. Determinan Kemiskinan Bidang Kesehatan

Dimensi kesehatan berperan penting dalam menurunkan tingkat kerentanan masyarakat terhadap kemiskinan. Dalam model health capital yang dikemukakan oleh Grossman (1972), kesehatan dianggap sebagai bentuk modal produktif yang memungkinkan individu untuk bekerja, belajar, dan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Di Kabupaten Sukoharjo, capaian indikator kesehatan menunjukkan

kemajuan, namun masih terdapat kesenjangan akses dan kualitas layanan kesehatan antara wilayah perkotaan dan pedesaan.

Dari *supply side*, distribusi kualitas fasilitas layanan kesehatan dasar, belum sepenuhnya merata. Selain itu, jumlah penyuluh keluarga berencana (KB) masih terbatas dan distribusi alat kontrasepsi belum merata di puskesmas pedesaan, yang berdampak pada rendahnya cakupan pelayanan KB di tingkat keluarga miskin.

Dari *demand side*, rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan rutin serta masih kuatnya ketergantungan terhadap pengobatan tradisional menjadi hambatan utama dalam peningkatan derajat kesehatan. Stigma sosial terhadap program KB dan kurangnya pengetahuan tentang pentingnya kesehatan reproduksi menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam program kesehatan preventif.

Implikasinya, kebijakan kesehatan daerah perlu diarahkan pada penguatan layanan primer berbasis komunitas, peningkatan jumlah tenaga medis, serta perluasan program edukasi kesehatan dan gizi keluarga. Integrasi layanan kesehatan dengan data sosial seperti PPKS dan P3KE juga diperlukan untuk memastikan ketepatan sasaran dan efisiensi intervensi kesehatan di wilayah miskin.

Tabel 3.21 Determinan Kemiskinan Bidang Kesehatan

<i>Supply Side</i>	<i>Demand Side</i>	Implikasi Kebijakan Prioritas
- Kualitas fasilitas layanan kesehatan dasar belum seimbang antarwilayah. - Keterbatasan penyuluh KB dan distribusi alat kontrasepsi di wilayah pedesaan. - Pelayanan gizi dan kesehatan ibu-anak belum menjangkau semua kecamatan.	- Rendahnya kesadaran pemeriksaan rutin dan pola hidup sehat. - Ketergantungan pada pengobatan tradisional non-standar. - Stigma terhadap program KB masih kuat. - Pengetahuan keluarga miskin tentang kesehatan reproduksi rendah.	- Peningkatan layanan kesehatan primer di daerah pinggiran. - Penguatan tenaga medis dan penyuluh KB. - Edukasi kesehatan dan reproduksi berbasis komunitas. - Integrasi data gizi, KB, dan PPKS dalam sistem sosial daerah.

3.4.3. Determinan Kemiskinan Bidang Ketenagakerjaan dan Pemberdayaan Ekonomi

Ketenagakerjaan dan pemberdayaan ekonomi menjadi kunci utama pengurangan kemiskinan, mengingat lapangan kerja produktif adalah sumber utama peningkatan kesejahteraan rumah tangga. Dalam kerangka *inclusive growth* (Bourguignon, 2003), kemiskinan dapat

ditekan apabila pertumbuhan ekonomi disertai dengan pemerataan kesempatan kerja.

Dari *supply side*, tantangan yang dihadapi Kabupaten Sukoharjo meliputi belum optimalnya penyelarasan antara pelatihan kerja dengan kebutuhan pasar tenaga kerja modern. Lembaga pelatihan kerja masih menghadapi keterbatasan anggaran dan sarana pelatihan, sementara sistem informasi pasar tenaga kerja daerah belum sepenuhnya terintegrasi. Dukungan pendampingan terhadap koperasi dan UMKM juga masih terbatas, terutama dalam adopsi teknologi digital untuk meningkatkan daya saing produk. Selain itu, pengembangan kawasan industri lokal yang ramah lingkungan belum optimal, begitu pula dengan fasilitas pendukung sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang masih minim.

Dari *demand side*, rendahnya partisipasi pemuda dalam pelatihan keterampilan dan kegiatan wirausaha menunjukkan kurangnya kesadaran akan pentingnya pengembangan kapasitas diri. Sebagian besar tenaga kerja masih berpendidikan rendah dengan keterampilan dasar yang tidak kompetitif di sektor formal. Pelaku UMKM juga menghadapi hambatan dalam akses pembiayaan, serta keterbatasan literasi digital dan keuangan.

Kebijakan strategis di bidang ini perlu diarahkan pada penguatan Balai Latihan Kerja (BLK) yang berbasis kebutuhan industri, peningkatan kolaborasi antara sektor pendidikan vokasi dan dunia usaha, serta perluasan akses pembiayaan dan digitalisasi UMKM. Dengan demikian, pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin dapat menjadi instrumen nyata dalam menurunkan angka pengangguran terbuka dan kemiskinan struktural di Sukoharjo.

Tabel 3.22 Determinan Kemiskinan Bidang Ketenagakerjaan dan Pemberdayaan Ekonomi

<i>Supply Side</i>	<i>Demand Side</i>	Implikasi Kebijakan Prioritas
• Pelatihan kerja belum selaras dengan kebutuhan industri (mismatch skill). • Minimnya fasilitas pelatihan dan pendampingan koperasi dan UKM. • Belum optimalnya digitalisasi UMKM dan	• Rendahnya partisipasi pemuda desa dalam pelatihan dan kewirausahaan. • Keterampilan dasar dominan, sulit bersaing di sektor formal. • Rendahnya literasi keuangan dan digital pelaku usaha.	• Pengembangan BLK (Balai Latihan Kerja) berbasis industri. • Pemberdayaan UMKM melalui digitalisasi dan akses pembiayaan. • Kolaborasi industri dan pendidikan vokasi. • Penguatan ekosistem kewirausahaan muda dan ekonomi kreatif.

sistem informasi pasar kerja daerah. • Infrastruktur ekonomi lokal (pasar, kawasan industri) belum inklusif.	• Akses permodalan terbatas dan motivasi berwirausaha rendah.	
---	---	--

3.4.4. Determinan Kemiskinan Bidang Infrastruktur Dasar

Ketersediaan infrastruktur dasar memiliki pengaruh langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan ketimpangan spasial. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan (UNDP, 2022), infrastruktur menjadi prasyarat penting bagi mobilitas sosial dan akses terhadap pelayanan publik.

Dari *supply side*, kendala yang dihadapi meliputi pembangunan jalan, jembatan, dan infrastruktur sanitasi yang berkualitas belum merata. Bantuan perumahan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah belum mampu mengatasi seluruh kebutuhan backlog perumahan, sedangkan akses air bersih dan sanitasi aman masih rendah di permukiman kumuh.

Dari *demand side*, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan infrastruktur publik mengakibatkan penurunan kualitas layanan dasar. Keterbatasan transportasi antarwilayah menghambat distribusi hasil pertanian, sementara sebagian besar keluarga miskin tidak memiliki kemampuan finansial untuk memperbaiki rumah dan fasilitas sanitasi. Kesadaran terhadap perilaku hidup bersih dan sehat juga masih terbatas.

Kebijakan yang diperlukan mencakup pengembangan infrastruktur dasar berbasis inklusi sosial dan lingkungan, peningkatan kualitas permukiman melalui program rumah layak huni dan sanitasi berbasis masyarakat. Integrasi pembangunan infrastruktur dengan program pengentasan kemiskinan menjadi prioritas strategis jangka menengah.

Tabel 3.23 Determinan Kemiskinan Bidang Infrastruktur Dasar

<i>Supply Side</i>	<i>Demand Side</i>	Implikasi Kebijakan Prioritas
- Peningkatan kualitas jalan, jembatan, sanitasi, dan air bersih belum merata. - Program perumahan layak huni belum menutup seluruh kebutuhan.	- Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan infrastruktur. - Keluarga miskin tidak mampu memperbaiki rumah dan sanitasi.	- Integrasi pembangunan infrastruktur dengan penanggulangan kemiskinan. - Pembangunan rumah layak huni dan sanitasi aman berbasis komunitas.

• Infrastruktur air bersih dan sanitasi belum merata di permukiman kumuh. • Aspek adaptasi iklim belum terintegrasi dalam pembangunan publik.	• Kesadaran perilaku hidup bersih masih rendah.	
--	---	--

3.4.5. Determinan Kemiskinan Bidang Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan fondasi kesejahteraan masyarakat miskin, karena secara langsung memengaruhi konsumsi, gizi, dan stabilitas ekonomi rumah tangga. Berdasarkan pendekatan FAO (2024), dimensi ketersediaan, akses, dan stabilitas pangan menjadi komponen utama yang menentukan keberlanjutan ketahanan pangan daerah.

Dari *supply side*, permasalahan utama di Sukoharjo mencakup belum optimalnya fasilitasi diversifikasi pangan lokal dan penggunaan teknologi modern dalam produksi pertanian. Sistem irigasi di wilayah kering belum mendukung produktivitas optimal. Sementara itu, penyuluhan pertanian dan peternakan modern belum menjangkau seluruh petani, dan fasilitas untuk subsektor perikanan tangkap maupun budidaya masih terbatas.

Dari *demand side*, masyarakat masih bergantung pada bahan pangan tunggal, terutama beras, sehingga hasil diversifikasi pangan lokal belum terserap optimal. Harga jual hasil panen yang rendah menurunkan motivasi petani, sedangkan ketergantungan pada metode tradisional menyebabkan efisiensi produksi rendah. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap gizi seimbang dan diversifikasi konsumsi turut memperkuat ketimpangan pangan.

Kebijakan ketahanan pangan daerah perlu difokuskan pada modernisasi pertanian, penguatan rantai nilai (*value chain*) pertanian, serta peningkatan kapasitas petani melalui digitalisasi dan inovasi pemasaran. Selain itu, perlu didorong edukasi gizi seimbang dan pengembangan pasar pangan lokal sebagai bagian dari ekonomi perdesaan berkelanjutan.

Tabel 3.24 Determinan Kemiskinan Bidang Ketahanan Pangan

<i>Supply Side</i>	<i>Demand Side</i>	Implikasi Kebijakan Prioritas
• Diversifikasi pangan lokal belum difasilitasi optimal. • Distribusi alat pertanian modern	• Pola konsumsi masyarakat masih bergantung pada beras.	• Modernisasi pertanian dan digitalisasi rantai pasok pangan.

<i>Supply Side</i>	<i>Demand Side</i>	Implikasi Kebijakan Prioritas
- belum menjangkau seluruh petani. - Infrastruktur irigasi dan sarana perikanan masih minim. - Penyuluhan pertanian dan peternakan modern terbatas.	- Harga jual hasil panen rendah, menurunkan motivasi petani. - Ketergantungan pada metode pertanian tradisional. - Pengetahuan pasar dan inovasi petani rendah.	- Penguatan kelembagaan petani dan akses ke pasar regional. - Diversifikasi konsumsi dan edukasi gizi seimbang. - Integrasi pertanian, perikanan, dan peternakan dalam ekonomi desa.

3.4.6. Determinan Kemiskinan Bidang Sosial

Bidang sosial mencerminkan dimensi inklusi dan perlindungan sosial, yang berfungsi sebagai jaring pengaman bagi kelompok rentan. Sejalan dengan pendekatan multidimensional poverty (Alkire et al., 2014), dimensi sosial berperan penting dalam menilai kesejahteraan di luar ukuran pendapatan.

Dari *supply side*, tantangan yang dihadapi Kabupaten Sukoharjo antara lain belum optimalnya penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran akibat keterbatasan integrasi data, serta masih kurangnya fasilitas rumah perlindungan bagi kelompok rentan seperti lansia, anak-anak terlantar, dan penyandang disabilitas. Jumlah petugas pencatat sipil masih terbatas di wilayah perdesaan, sementara digitalisasi layanan sosial dan kependudukan belum berjalan optimal. Selain itu, program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak belum menjangkau seluruh kecamatan.

Dari *demand side*, stigma terhadap kelompok rentan masih menjadi hambatan utama. Masyarakat miskin sering kali kurang proaktif dalam memperbarui dokumen kependudukan, yang berimplikasi pada keterlambatan penyaluran bantuan. Hambatan geografis dan sosial turut mengurangi partisipasi warga dalam program sosial, sedangkan pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih rendah karena tekanan norma sosial.

Kebijakan sosial daerah perlu difokuskan pada integrasi data sosial, meliputi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan/atau data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) melalui sistem Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DT-SEN), perluasan layanan rumah aman, serta penguatan partisipasi perempuan dalam ekonomi produktif desa. Digitalisasi pelayanan sosial dan kependudukan berbasis desa menjadi kunci untuk menciptakan tata kelola sosial yang lebih inklusif dan responsif terhadap kelompok rentan.

Tabel 3.25 Determinan Kemiskinan Bidang Sosial

<i>Supply Side</i>	<i>Demand Side</i>	Implikasi Kebijakan Prioritas
• Bantuan sosial belum tepat sasaran akibat integrasi data terbatas. • Kurangnya rumah perlindungan sosial dan fasilitas pengaduan kekerasan. • Petugas pencatat sipil dan layanan sosial di desa terbatas. • Digitalisasi layanan kependudukan dan sosial belum optimal.	• Stigma terhadap kelompok rentan (disabilitas, perempuan korban kekerasan). • Rendahnya kesadaran memperbarui dokumen kependudukan. • Hambatan geografis mengurangi partisipasi masyarakat. • Perempuan desa belum aktif dalam kegiatan ekonomi produktif.	• Integrasi data sosial (DTKS-P3KE) dan sistem DT-SEN. • Penguatan rumah aman dan pusat layanan kekerasan perempuan/anak. • Peningkatan partisipasi perempuan dalam ekonomi produktif. • Transformasi digital layanan sosial berbasis desa.

3.7. Isu Strategis

Isu strategis penanggulangan kemiskinan merupakan hasil sintesis dari berbagai determinan kemiskinan yang telah diuraikan pada subbab sebelumnya, baik yang bersumber dari dimensi konsumsi maupun non-konsumsi. Isu strategis dimaksud menggambarkan kondisi-kondisi fundamental yang secara signifikan memengaruhi keberhasilan upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sukoharjo. Analisis ini disusun berdasarkan *root cause analysis* (analisis akar masalah) terhadap kondisi empiris 2020–2024, serta memperhatikan korelasi antardimensi sosial, ekonomi, dan spasial yang memengaruhi kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, isu strategis bukan sekadar permasalahan yang muncul di permukaan, tetapi merupakan pernyataan kritis yang menjelaskan keterkaitan antara faktor penyebab (*determinant*), dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkannya, serta peluang strategis yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan pembangunan. Menurut UNDP *Human Development Framework* (2022), kemiskinan tidak hanya diukur dari ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga dari keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, infrastruktur dasar, ketahanan pangan, serta perlindungan sosial. Dengan demikian, isu strategis penanggulangan kemiskinan di Sukoharjo perlu dilihat secara multidimensional dan lintas sektor.

Analisis menunjukkan bahwa dinamika kemiskinan di Kabupaten Sukoharjo bersifat kompleks dan berlapis. Pertama, kemiskinan struktural masih terkait erat dengan keterbatasan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, yang berdampak pada rendahnya kualitas sumber daya manusia. Kedua, kemiskinan kultural dan spasial

muncul akibat kesenjangan antarwilayah dalam hal infrastruktur dasar, ketersediaan lapangan kerja, serta akses terhadap pangan dan energi. Ketiga, kemiskinan sosial muncul akibat keterbatasan sistem perlindungan dan inklusi sosial bagi kelompok rentan.

Dengan mengacu pada *Human Development Theory* (Sen, 2006) dan pendekatan *Multidimensional Poverty* (Alkire et al., 2011b), kemiskinan dipahami sebagai kondisi keterbatasan kemampuan individu dalam mengakses dan memanfaatkan peluang ekonomi, sosial, dan politik yang tersedia. Oleh sebab itu, isu-isu strategis yang dirumuskan dalam RPKD ini bersifat lintas sektor dan berorientasi pada perbaikan sistemik, dengan menekankan pentingnya integrasi kebijakan antarbidang untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang inklusif dan berkeadilan.

Berdasarkan hasil analisis: (1) konteks empiris Sukoharjo 2020–2024, (2) keterkaitan teoretis, (3) akar masalah yang bersifat struktural, dan (4) arah strategis kebijakan untuk menanganinya, ditetapkan enam isu strategis utama yang menjadi fokus dalam perencanaan penanggulangan kemiskinan Kabupaten Sukoharjo periode 2025–2029.

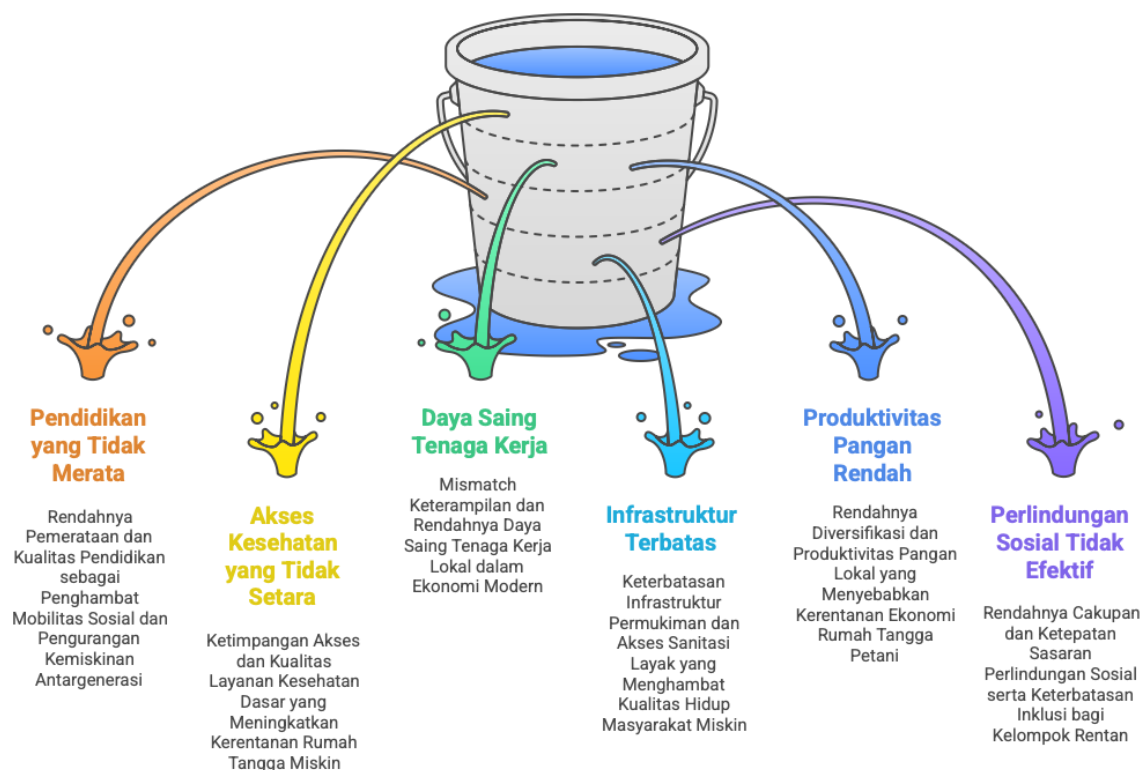
Isu Strategis 1: Rendahnya Pemerataan dan Kualitas Pendidikan sebagai Penghambat Mobilitas Sosial dan Pengurangan Kemiskinan Antargenerasi

Isu strategis utama dalam bidang pendidikan adalah masih terbatasnya pemerataan akses dan kualitas pendidikan yang berimplikasi terhadap rendahnya mobilitas sosial dan tingginya risiko kemiskinan antargenerasi. Dalam konteks teori *human capital* (Becker, 1995), pendidikan berperan sebagai instrumen peningkatan produktivitas tenaga kerja dan faktor penting dalam membentuk kesejahteraan jangka panjang. Namun di Kabupaten Sukoharjo, kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan masih terlihat jelas dalam ketersediaan fasilitas pendidikan, mutu tenaga pendidik, serta sarana pendukung pembelajaran seperti laboratorium, perpustakaan, dan infrastruktur digital.

Selain itu, faktor sosial ekonomi keluarga miskin menjadi penghambat utama dalam keberlanjutan pendidikan anak. Banyak anak dari rumah tangga miskin yang putus sekolah karena tekanan ekonomi atau rendahnya persepsi terhadap manfaat pendidikan formal. Kesenjangan digital pascapandemi juga memperlebar jurang akses antara sekolah unggulan dengan sekolah di daerah pinggiran. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan belum sepenuhnya menembus dimensi struktural kemiskinan.

Oleh karena itu, arah kebijakan strategis ke depan perlu difokuskan pada pemerataan sarana pendidikan berbasis spasial, peningkatan kompetensi guru di bidang vokasi dan teknologi, serta digitalisasi sistem pembelajaran. Peningkatan literasi dasar dan literasi digital juga harus diintegrasikan dengan program afirmatif bagi keluarga miskin. Peningkatan mutu dan akses pendidikan akan berimplikasi langsung terhadap peningkatan

human capital dan mempercepat pemutusan rantai kemiskinan antargenerasi di Sukoharjo.



Gambar 3.40 Isu Strategis Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sukoharjo

Isu Strategis 2: Ketimpangan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan Dasar yang Meningkatkan Kerentanan Rumah Tangga Miskin

Bidang kesehatan di Kabupaten Sukoharjo menghadapi isu strategis berupa ketimpangan akses dan kualitas layanan kesehatan dasar yang berpengaruh terhadap peningkatan kerentanan sosial ekonomi rumah tangga miskin. Dalam perspektif *health capital model* (Grossman, 1972), kesehatan merupakan bentuk investasi manusia yang meningkatkan kemampuan bekerja dan berproduksi. Namun, masyarakat miskin sering kali menghadapi kendala geografis, finansial, dan informasi dalam mengakses layanan kesehatan.

Ketersediaan tenaga medis dan fasilitas kesehatan yang belum merata antara wilayah perkotaan dan pedesaan menyebabkan disparitas pelayanan yang cukup besar. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan rutin dan tingginya ketergantungan terhadap pengobatan tradisional non-standar memperburuk situasi kesehatan masyarakat miskin. Program Keluarga

Berencana (KB) dan kesehatan ibu–anak juga masih menghadapi tantangan berupa stigma sosial dan keterbatasan penyuluh di lapangan.

Isu ini menjadi krusial karena buruknya kondisi kesehatan memiliki efek domino terhadap produktivitas tenaga kerja, beban pengeluaran rumah tangga, dan peningkatan kemiskinan kronis. Dengan demikian, arah kebijakan strategis penanggulangan kemiskinan harus mengintegrasikan penguatan layanan kesehatan dasar berbasis komunitas, perluasan akses pembiayaan kesehatan, serta peningkatan literasi kesehatan masyarakat. Program promotif dan preventif perlu diprioritaskan melalui kolaborasi lintas sektor, agar upaya pengentasan kemiskinan tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup.

Isu Strategis 3: Mismatch Keterampilan dan Rendahnya Daya Saing Tenaga Kerja Lokal dalam Ekonomi Modern

Isu strategis utama dalam bidang ketenagakerjaan dan pemberdayaan ekonomi di Kabupaten Sukoharjo adalah terjadinya skill mismatch antara kompetensi tenaga kerja lokal dengan kebutuhan pasar kerja modern, yang berdampak pada rendahnya daya saing dan keterbatasan kesempatan kerja produktif. Fenomena ini mencerminkan ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja (Todaro et al., 2015).

Secara empiris, sebagian besar angkatan kerja di Sukoharjo masih berpendidikan menengah ke bawah dengan keterampilan terbatas. Program pelatihan kerja belum sepenuhnya menyesuaikan dengan kebutuhan industri, sementara akses pelaku UMKM terhadap pembiayaan dan digitalisasi masih minim. Rendahnya literasi keuangan dan teknologi digital memperlemah daya saing ekonomi lokal di tengah transformasi industri dan perdagangan daring.

Kesenjangan ini juga menyebabkan pertumbuhan ekonomi daerah belum sepenuhnya inklusif. Sektor industri, pariwisata, dan ekonomi kreatif memiliki potensi besar, namun belum mampu menyerap tenaga kerja lokal secara optimal karena keterbatasan kapasitas dan inovasi masyarakat.

Dengan demikian, arah kebijakan strategis harus diarahkan pada pengembangan sumber daya manusia adaptif melalui pelatihan vokasional berbasis kebutuhan industri (*demand-driven training*), penguatan inkubator bisnis dan kewirausahaan muda, serta perluasan digitalisasi UMKM. Pemerintah daerah juga perlu memperkuat jejaring kemitraan dengan dunia usaha dan lembaga pendidikan vokasi agar pertumbuhan ekonomi di Sukoharjo benar-benar menjadi *pro-poor growth* yang mengurangi kemiskinan secara berkelanjutan.

Isu Strategis 4: Keterbatasan Infrastruktur Permukiman dan Akses Sanitasi Layak yang Menghambat Kualitas Hidup Masyarakat Miskin

Bidang infrastruktur dasar menghadapi isu strategis utama berupa keterbatasan infrastruktur permukiman dan akses sanitasi layak yang

masih menjadi faktor penghambat peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin. Dalam kerangka *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya tujuan ke-6 dan ke-11, akses air bersih, sanitasi, dan permukiman layak merupakan prasyarat penting bagi pembangunan manusia dan penurunan kemiskinan multidimensi.

Di Kabupaten Sukoharjo, sebagian wilayah perdesaan dan permukiman padat penduduk masih mengalami keterbatasan infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, dan drainase lingkungan. Kondisi ini berimplikasi pada rendahnya akses ekonomi, tingginya biaya logistik, dan meningkatnya risiko kesehatan lingkungan. Keterbatasan program perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah juga menyebabkan sebagian keluarga miskin tinggal di rumah tidak layak huni.

Dari sisi sosial, rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dan sanitasi turut memperburuk kualitas hidup. Selain itu, infrastruktur publik belum sepenuhnya memperhatikan prinsip ketahanan iklim dan keberlanjutan lingkungan.

Kebijakan strategis di bidang ini harus difokuskan pada peningkatan infrastruktur dasar berbasis komunitas, pembangunan rumah layak huni dan sanitasi aman, serta penyediaan transportasi desa yang menunjang konektivitas ekonomi. Dengan memperkuat infrastruktur dasar, pemerintah daerah tidak hanya meningkatkan kualitas lingkungan permukiman, tetapi juga memperluas akses masyarakat miskin terhadap kegiatan ekonomi produktif.

Isu Strategis 5: Rendahnya Diversifikasi dan Produktivitas Pangan Lokal yang Menyebabkan Kerentanan Ekonomi Rumah Tangga Petani

Dalam bidang ketahanan pangan, isu strategis yang dihadapi Kabupaten Sukoharjo adalah rendahnya diversifikasi dan produktivitas pangan lokal yang menyebabkan kerentanan ekonomi dan gizi rumah tangga petani. Menurut FAO (2024), ketahanan pangan mencakup dimensi ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan stabilitas pangan. Kegagalan pada salah satu dimensi tersebut dapat memperburuk kondisi kemiskinan di wilayah pedesaan.

Produksi pertanian Sukoharjo masih didominasi oleh komoditas tunggal, khususnya padi, dengan tingkat adopsi teknologi pertanian modern yang rendah. Distribusi pupuk bersubsidi sering mengalami keterlambatan, sementara akses terhadap irigasi, infrastruktur pascapanen, dan pasar modern masih terbatas. Di sisi lain, konsumsi pangan masyarakat masih bergantung pada beras, sehingga hasil diversifikasi pangan seperti umbi-umbian, jagung, dan sayuran lokal kurang terserap optimal.

Permasalahan tersebut menciptakan siklus kerentanan di sektor pangan, di mana rendahnya produktivitas dan harga jual hasil pertanian menurunkan pendapatan petani, yang pada akhirnya memperdalam kemiskinan di pedesaan.

Arah kebijakan strategis harus diarahkan pada peningkatan diversifikasi pangan berbasis kearifan lokal, penerapan teknologi pertanian presisi, serta penguatan rantai nilai pertanian dan akses pasar petani. Program penyuluhan, pelatihan, serta penguatan koperasi petani perlu diintensifkan agar sektor pangan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi inklusif yang berkelanjutan.

Isu Strategis 6: Rendahnya Cakupan dan Ketepatan Sasaran Perlindungan Sosial serta Keterbatasan Inklusi bagi Kelompok Rentan

Bidang sosial menghadapi isu strategis berupa rendahnya cakupan dan ketepatan sasaran program perlindungan sosial, serta terbatasnya inklusi sosial bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, perempuan kepala keluarga, dan anak terlantar. Dalam perspektif multidimensional poverty (Alkire et al., 2011b), dimensi sosial seperti perlindungan dan partisipasi merupakan komponen kunci kesejahteraan manusia.

Di Kabupaten Sukoharjo, meskipun telah terdapat berbagai program bantuan sosial, masih ditemukan ketidaktepatan sasaran akibat keterbatasan integrasi data antara DTKS dan P3KE. Beberapa kelompok rentan belum sepenuhnya terjangkau oleh program pemberdayaan sosial karena faktor administratif, stigma, atau keterbatasan akses layanan publik.

Selain itu, kesenjangan digitalisasi layanan sosial memperlambat proses verifikasi data penerima manfaat dan menimbulkan duplikasi program. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta rendahnya keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekonomi produktif di pedesaan, menunjukkan bahwa perlindungan sosial belum bertransformasi menjadi sistem yang inklusif.

Arah kebijakan strategis perlu difokuskan pada penguatan integrasi data sosial berbasis Satu Data Kesejahteraan, perluasan rumah aman dan pusat layanan gender, serta pemberdayaan ekonomi bagi perempuan dan kelompok rentan. Transformasi digital layanan sosial perlu dipercepat untuk memastikan efektivitas, akuntabilitas, dan inklusivitas dalam program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sukoharjo.

BAB IV PRIORITAS BIDANG

4.1. Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

Keterpaduan strategi dan arah kebijakan penanggulangan kemiskinan dalam berbagai dokumen perencanaan menunjukkan konsistensi hierarkis antara kebijakan nasional, provinsi, dan daerah. RPJPN 2025–2045 menjadi fondasi makro dengan visi *Indonesia Emas 2045*, yang dioperasionalkan melalui RPJMN 2025–2029 dengan fokus pada empat pilar strategis: pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, akses layanan dasar, dan inklusivitas sosial. Dokumen turunan seperti *Peta Jalan Pemberantasan Kemiskinan (Bappenas)* dan *Rencana Induk BP Taskin 2025–2029* memperdalam implementasi kebijakan dengan menekankan integrasi data sosial ekonomi (*Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional/DT-SEN*) dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin melalui skema *graduasi*.

Pada level provinsi, RPJPD dan RPJMD Jawa Tengah menyelaraskan arah kebijakan nasional dengan konteks kewilayahan yang menempatkan pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan sebagai prioritas utama pembangunan. Strategi ini difokuskan pada transformasi sosial-ekonomi, peningkatan SDM, dan pembangunan infrastruktur dasar sebagai penopang kesejahteraan masyarakat. Visi “Jawa Tengah sebagai Penumpu Pangan dan Industri Nasional yang Maju, Sejahtera, Berbudaya, dan Berkelanjutan” memperkuat mandat daerah dalam mengembangkan ekonomi hijau dan digital yang inklusif.

Sementara itu, Kabupaten Sukoharjo melalui RPJPD dan RPJMD 2025–2029 menerjemahkan kebijakan provinsi dan nasional ke dalam program nyata yang sesuai dengan karakteristik lokal. Strategi tiga pilar (mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan, dan meminimalkan kantong kemiskinan) menjadi inti dari kebijakan daerah, yang diintegrasikan melalui pendekatan *Satu Data Kemiskinan Daerah* berbasis Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional/D-TSEN atau data Pensasaran Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), sinergi perlindungan sosial, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin produktif. Pendekatan ini menunjukkan kesinambungan antara *policy intent* nasional dengan *policy action* lokal.

Hubungan antar dokumen perencanaan tersebut membentuk sistem kebijakan penanggulangan kemiskinan yang vertikal (terpadu antara pusat, provinsi, dan kabupaten) serta horizontal (lintas sektor dan dimensi kemiskinan), sehingga arah kebijakan penanggulangan kemiskinan Kabupaten Sukoharjo 2025–2029 berperan sebagai titik konvergensi dari berbagai kebijakan pembangunan nasional dan regional, dengan orientasi pada transformasi sosial-ekonomi yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

menuju Sukoharjo tanpa kemiskinan ekstrem pada tahun 2026 dan kesejahteraan menyeluruh pada tahun 2029.

4.1.1. Kebijakan Nasional

A. Komitmen Penanggulangan Kemiskinan Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Kebijakan nasional terkait dengan komitmen global dalam penanggulangan kemiskinan tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 mengenai Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan komitmen global dan nasional yang menggantikan Millennium Development Goals (MDGs) yang berakhir pada tahun 2015. SDGs, yang disepakati pada pertemuan dunia pada September 2015, menjadi bagian dari Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan. Kesepakatan ini mengarah pada transformasi pembangunan berbasis hak asasi manusia dan kesetaraan, dengan tujuan memajukan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan secara berkelanjutan.

Dalam TPB/SDGs, terdapat 17 tujuan yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, antara lain: (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi, dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh; serta (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Empat pilar utama yang menjadi indikator pengembangan SDGs di Indonesia adalah:

1. Pilar Pembangunan Sosial mencakup Tujuan 1, 2, 3, 4, dan 5.
2. Pilar Pembangunan Ekonomi yang mencakup Tujuan 7, 8, 9, 10, dan 17.
3. Pilar Pembangunan Lingkungan yang mencakup Tujuan 6, 11, 12, 13, 14, dan 15.
4. Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola yaitu untuk Tujuan 16.

Pilar Pembangunan Sosial dalam SDGs Indonesia sangat berkaitan dengan upaya penanggulangan kemiskinan. Hal ini meliputi lima

tujuan utama, yaitu: (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; dan (5) Kesetaraan Gender. Tujuan ini mencakup berbagai aspek pembangunan sosial yang relevan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1. Tanpa Kemiskinan:

Tujuan ini menekankan peningkatan pendapatan bagi masyarakat miskin, menjamin akses terhadap layanan dasar, dan melindungi masyarakat dari risiko bencana. Pemerintah daerah memainkan peran penting dalam mendekatkan layanan dasar seperti air bersih dan sanitasi. Strategi pengembangan ekonomi lokal juga diperlukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan membangun ketahanan mereka terhadap bencana.

2. Tanpa Kelaparan:

Tujuan ini memastikan bahwa semua masyarakat memiliki akses terhadap makanan bergizi sepanjang tahun. Pemerintah daerah dapat mendukung ketahanan pangan melalui pengelolaan sumber daya alam seperti lahan dan air di kawasan pedesaan, serta memperkuat pasar dan infrastruktur transportasi. Di perkotaan, diperlukan langkah untuk memastikan makanan terjangkau dan aman, mengurangi limbah pangan, dan mengatasi malnutrisi, khususnya pada anak-anak.

3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera:

Tujuan ini fokus pada upaya untuk memastikan masyarakat hidup sehat dan memiliki usia panjang. Penyediaan layanan dasar seperti air bersih dan sanitasi sangat penting untuk mengurangi angka kematian bayi dan ibu. Pemerintah daerah juga dapat mengatasi masalah kesehatan masyarakat seperti HIV/AIDS melalui program pendidikan dan layanan pencegahan yang terintegrasi.

4. Pendidikan Berkualitas:

Akses pendidikan yang lebih luas, terutama pendidikan dasar, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Pemerintah daerah juga dapat membantu masyarakat yang menghadapi hambatan untuk bersekolah, serta memastikan pelatihan teknis yang relevan dengan kebutuhan lokal. Upaya ini bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pendidikan yang inklusif.

5. Kesetaraan Gender:

Tujuan ini mendorong penghapusan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan, serta memastikan mereka memiliki peran

yang setara dalam pembangunan. Pemerintah daerah dapat menjadi contoh kesetaraan gender dengan menyediakan layanan yang inklusif, serta mempromosikan perempuan sebagai pemimpin dalam pemerintahan dan masyarakat.

B. Arah Transformasi Sosial dan Ekonomi dalam Penanggulangan Kemiskinan Berdasarkan RPJPN 2025–2045

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045 menetapkan bahwa penurunan kemiskinan merupakan bagian dari agenda besar transformasi sosial dan ekonomi menuju terwujudnya Visi Indonesia Emas 2045. Dalam kerangka ini, Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 menegaskan bahwa penurunan angka kemiskinan menjadi salah satu dari lima sasaran utama pembangunan nasional jangka panjang. Sasaran tersebut secara langsung berkaitan dengan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, memperluas peluang kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat, dengan target pengurangan tingkat kemiskinan hingga 0,5–0,8 persen pada tahun 2045 dari baseline sekitar 7,0–8,0 persen pada tahun 2025. Selain itu, pengukuran kemiskinan diupayakan mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara absolut, sehingga hasilnya dapat diperbandingkan antar waktu dan antar wilayah sebagai dasar evaluasi efektivitas kebijakan publik.

Visi Indonesia Emas 2045 diterjemahkan dalam delapan misi pembangunan nasional yang mencakup tiga agenda utama transformasi: sosial, ekonomi, dan tata kelola, serta dua agenda pendukung, yaitu supremasi hukum dan stabilitas, serta ketahanan sosial, budaya, dan ekologi. Ketiga agenda utama ini dijalankan melalui kerangka implementasi yang menekankan pemerataan pembangunan kewilayahan, penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan, serta kesinambungan pembangunan lintas generasi. Dalam konteks tersebut, transformasi sosial dan transformasi ekonomi merupakan dua dimensi yang paling erat kaitannya dengan percepatan penurunan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Transformasi sosial dalam RPJPN 2025–2045 diarahkan pada pengentasan kemiskinan di seluruh wilayah Indonesia, terutama di kawasan dengan tingkat kerentanan tinggi seperti Jawa bagian selatan. Upaya ini dilakukan melalui penguatan perlindungan sosial adaptif dan peningkatan akses layanan dasar. Perlindungan sosial adaptif dimaksudkan untuk mempercepat penuntasan kemiskinan serta memperluas cakupan perlindungan bagi seluruh penduduk

berdasarkan tingkat kerentanan, dengan tetap menjunjung prinsip keadilan dan inklusivitas. Implementasi kebijakan ini dilakukan melalui berbagai langkah konkret, antara lain penuntasan kemiskinan dengan satu sistem registrasi sosial ekonomi (Regsosek) dan perlindungan sosial adaptif terintegrasi untuk memperkuat sistem perencanaan dan penganggaran berbasis bukti, penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang efektif dan mencapai cakupan universal, serta pengembangan bantuan sosial yang responsif terhadap bencana dan perubahan iklim. Kebijakan tersebut juga mencakup integrasi penentuan target, manfaat, dan pelaksanaan berbagai program sosial, peningkatan lingkungan yang ramah bagi anak, lansia, penyandang disabilitas, perempuan, dan kelompok rentan, hingga penyempurnaan metodologi penghitungan angka kemiskinan agar pengukurannya lebih representatif terhadap kondisi faktual kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan itu, transformasi sosial pada tahap pertama RPJPN (periode 2025–2029) sebagai fase fundamental untuk membangun masyarakat yang sehat, cerdas, kreatif, dan berdaya saing. Fokusnya diarahkan pada penyelesaian layanan dasar di bidang kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Upaya prioritas dalam tahap ini mencakup percepatan wajib belajar 13 tahun termasuk prasekolah, peningkatan partisipasi pendidikan tinggi di bidang sains, teknologi, rekayasa, seni, dan matematika (STEAM), restrukturisasi pengelolaan tenaga pendidik dan kesehatan, investasi pada layanan kesehatan primer dan penuntasan stunting, serta penuntasan kemiskinan melalui sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang terintegrasi. Keseluruhan kebijakan ini diarahkan untuk membentuk masyarakat yang inklusif, sehat, dan tangguh dengan sistem perlindungan sosial yang adaptif terhadap perubahan sosial dan ekonomi.

Di sisi lain, transformasi ekonomi berfungsi sebagai penggerak utama peningkatan produktivitas nasional melalui inovasi, penguatan ekonomi produktif, dan penerapan prinsip ekonomi hijau. RPJPN 2025–2045 menekankan pentingnya hilirisasi sumber daya alam unggulan, penguatan riset dan inovasi, transisi energi berkeadilan dengan memprioritaskan energi baru dan terbarukan, serta pembangunan platform digital untuk mempercepat transformasi ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, peningkatan konektivitas infrastruktur dan pengembangan wilayah perkotaan maupun perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat memperluas lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan antarwilayah. Dalam konteks ini, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi simbol sekaligus katalis bagi transformasi ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, kebijakan ketahanan sosial, budaya, dan ekologi menjadi landasan dalam mendukung pencapaian visi pembangunan nasional jangka panjang. Kebijakan ini menitikberatkan pada upaya memperkuat daya tahan masyarakat dan lingkungan dalam menghadapi perubahan dan guncangan, baik sosial maupun alam. Fokus kebijakan mencakup penguatan masyarakat yang inklusif, peningkatan kualitas lingkungan hidup, ketahanan energi dan pangan, serta peningkatan kapasitas adaptasi terhadap risiko bencana dan perubahan iklim. Dalam kerangka tersebut, prinsip keberlanjutan menjadi fondasi utama agar hasil transformasi sosial dan ekonomi dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dengan demikian, arah penanggulangan kemiskinan dalam RPJPN 2025–2045 tidak hanya dimaknai sebagai upaya menurunkan angka kemiskinan, tetapi juga sebagai strategi pembangunan manusia dan transformasi struktural menuju kesejahteraan yang merata. Integrasi kebijakan sosial, ekonomi, dan lingkungan, didukung oleh sistem data yang komprehensif dan tata kelola yang transparan, menjadi prasyarat untuk memastikan bahwa transformasi menuju Indonesia Emas 2045 berjalan secara inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

C. Arah dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan dalam RPJMN 2025–2029

Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, menempatkan penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas utama dalam kerangka Transformasi Sosial dan Transformasi Ekonomi yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dokumen RPJMN ini merupakan tahapan pertama dari pelaksanaan RPJPN 2025–2045, yang berfokus pada pembangunan manusia dan penguatan ekonomi produktif sebagai fondasi menuju Indonesia Emas. Dalam konteks tersebut, pemerintah menargetkan penurunan tingkat kemiskinan nasional menjadi 4,5–5,0% (empat koma lima – lima koma nol persen) pada tahun 2029, dengan baseline 6,0–7,0% (enam koma nol – tujuh koma nol persen) pada tahun 2025, serta penurunan kemiskinan ekstrem hingga di bawah 0,5% (lima persen) pada tahun 2026. Selain itu, proporsi kelas menengah diharapkan meningkat hingga mencapai 20% (dua puluh persen) sebagai indikator keberhasilan transformasi struktural ekonomi yang inklusif.

Secara substantif, arah kebijakan penanggulangan kemiskinan dalam RPJMN 2025–2029 difokuskan pada empat strategi utama yang saling melengkapi.

- Pertama, strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat dilaksanakan melalui penguatan integrasi bantuan sosial dan subsidi, pengembangan sistem perlindungan sosial yang adaptif terhadap perubahan sosial dan ekonomi, serta penerapan sistem penyaluran bantuan yang terintegrasi dan terdigitalisasi. Strategi ini menekankan pentingnya manajemen kepesertaan bersama yang terkoordinasi antarprogram, pendampingan sosial yang terpadu, serta mekanisme graduasi bagi penerima manfaat agar dapat bertransisi dari ketergantungan menuju kemandirian ekonomi. Pendekatan ini juga mengintegrasikan program perlindungan sosial dengan kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, sehingga proses penurunan kemiskinan dapat berlangsung secara berkelanjutan.
- Kedua, strategi peningkatan pendapatan penduduk, yang diarahkan untuk memperluas kesempatan kerja dan memperkuat basis ekonomi produktif masyarakat berpendapatan rendah. Strategi utama dilakukan melalui penyediaan tenaga kerja terampil, penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta perluasan akses terhadap permodalan dan pasar. Upaya ini juga meliputi pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi daerah, penciptaan ekosistem ekonomi kreatif dan digital, serta peningkatan kapasitas keterampilan kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri. Strategi ini merefleksikan pergeseran paradigma pembangunan dari pendekatan bantuan sosial menuju pemberdayaan ekonomi, di mana peningkatan produktivitas dan kemampuan adaptasi tenaga kerja menjadi kunci untuk mempercepat pertumbuhan kelas menengah.
- Ketiga, strategi peningkatan akses dan kualitas pelayanan serta infrastruktur dasar, diarahkan untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat miskin dan rentan. Langkah-langkah utama dalam strategi ini mencakup peningkatan akses dan kualitas fasilitas pendidikan serta kesehatan, pembangunan dan rehabilitasi rumah layak huni, penguatan infrastruktur digital dan energi yang mendukung ekonomi inklusif, serta peningkatan produktivitas pertanian guna memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi perdesaan. Kebijakan ini menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan tidak hanya memerlukan intervensi ekonomi, tetapi juga perbaikan lingkungan sosial dan fisik yang memungkinkan masyarakat miskin berpartisipasi secara produktif dalam perekonomian. Peningkatan konektivitas antarwilayah, khususnya antara pusat-pusat pertumbuhan dan kawasan perdesaan, juga menjadi bagian dari strategi ini agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata.

- Keempat, strategi peningkatan inklusivitas bagi kelompok rentan, yang menegaskan komitmen negara terhadap prinsip keadilan sosial dan nondiskriminasi dalam pembangunan. Strategi ini mencakup langkah-langkah khusus untuk penyandang disabilitas dan penduduk lanjut usia melalui pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial, pelaksanaan program rehabilitasi sosial, penyusunan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD-PD) dan Rencana Aksi Daerah Lanjut Usia (RAD-LU), serta internalisasi isu kerentanan dalam seluruh dokumen perencanaan dan penganggaran, seperti RPJPD, RKPD, dan Renja OPD. Selain itu, strategi ini juga menekankan pentingnya pelibatan aktif kelompok rentan dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan daerah sebagai bentuk penerapan prinsip partisipatif dalam tata kelola pembangunan inklusif.

Dalam keseluruhan kerangka RPJMN 2025–2029, transformasi sosial dan ekonomi dijalankan secara sinergis sebagai satu kesatuan proses pembangunan yang saling memperkuat. Transformasi sosial bertujuan untuk membangun masyarakat yang sehat, cerdas, sejahtera, dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas layanan dasar, perluasan perlindungan sosial, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sementara itu, transformasi ekonomi menitikberatkan pada peningkatan produktivitas nasional melalui inovasi, hilirisasi sumber daya alam, penerapan ekonomi hijau, dan digitalisasi ekonomi yang mampu menciptakan pertumbuhan berkeadilan. Sinergi antara kedua transformasi tersebut diharapkan dapat menurunkan kemiskinan secara signifikan, memperluas lapangan kerja layak, dan memperkuat daya saing ekonomi daerah dalam satu kesatuan sistem pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Dengan demikian, arah kebijakan penanggulangan kemiskinan dalam RPJMN 2025–2029 tidak hanya berorientasi pada pencapaian target angka kemiskinan, tetapi juga pada transformasi struktural yang menyentuh dimensi sosial, ekonomi, dan kelembagaan secara simultan. Pendekatan integratif ini menjadi dasar bagi pemerintah pusat dan daerah untuk menyusun kebijakan penanggulangan kemiskinan yang adaptif terhadap dinamika global, perubahan iklim, serta disrupsi digital, sekaligus memperkuat daya tahan sosial masyarakat Indonesia menuju 2045.

D. Kelembagaan, Arah Kebijakan, dan Strategi Nasional dalam Percepatan Pengentasan Kemiskinan 2025–2029

Penanggulangan kemiskinan di Indonesia memasuki babak baru melalui pembaruan kerangka kelembagaan dan strategi kebijakan

nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024 tentang Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Regulasi ini mencabut Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 beserta perubahannya (Perpres Nomor 96 Tahun 2015), dan membentuk Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP TASKIN) sebagai lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Pembentukan badan ini menjadi tonggak penting dalam upaya memperkuat tata kelola penanggulangan kemiskinan yang lebih terintegrasi, efektif, dan berbasis hasil.

Secara kelembagaan, BP TASKIN dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh Wakil Kepala yang ditunjuk langsung oleh Presiden. Lembaga ini memiliki mandat utama untuk menyelenggarakan dukungan percepatan pengentasan kemiskinan secara terpadu lintas sektor dan lintas wilayah. Dalam menjalankan tugasnya, Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP TASKIN) memiliki tiga fungsi strategis, yaitu: (1) penyusunan rencana induk dan program percepatan pengentasan kemiskinan; (2) penyelarasan kebijakan dan program percepatan pengentasan kemiskinan antar-kementerian/lembaga; serta (3) koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan program percepatan pengentasan kemiskinan di seluruh tingkatan pemerintahan. Dengan demikian, BP TASKIN berperan sebagai simpul koordinasi nasional yang menjembatani kebijakan pusat dengan implementasi daerah, memastikan agar seluruh program penanggulangan kemiskinan berjalan harmonis dan tidak tumpang tindih.

Arah kebijakan pengentasan kemiskinan nasional kemudian dijabarkan secara operasional dalam Peta Jalan Pemberantasan Kemiskinan 2025–2029 yang disusun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Dokumen ini menjadi instrumen strategis yang mengintegrasikan berbagai agenda prioritas nasional untuk memastikan penurunan kemiskinan berjalan sistematis, terukur, dan berkelanjutan. Peta jalan tersebut menegaskan pentingnya penyempurnaan metodologi pengukuran kemiskinan agar mampu merepresentasikan kondisi kesejahteraan secara multidimensional, serta mendorong transformasi sistem data melalui implementasi Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) sebagai fondasi tunggal dalam penargetan kebijakan sosial ekonomi nasional.

Lebih lanjut, strategi pemberantasan kemiskinan pada periode ini difokuskan pada tiga aspek besar, yaitu perlindungan sosial adaptif dan inklusif, pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, dan transformasi ruang sosial-ekonomi. Perlindungan sosial adaptif diwujudkan melalui pengembangan Program Kartu Kesejahteraan untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan Kartu Usaha sebagai instrumen peningkatan kemandirian ekonomi. Kedua program ini

diintegrasikan melalui skema sinergi kartu untuk memastikan kesinambungan antara bantuan sosial, perlindungan jaminan sosial, dan pemberdayaan ekonomi. Selain itu, skema graduasi dikembangkan untuk mendorong transisi penerima bantuan menuju kemandirian ekonomi, dengan dukungan peningkatan akses terhadap layanan dasar, optimalisasi perekonomian desa, penguatan peran desa dalam swasembada pangan, serta kolaborasi dengan perguruan tinggi dan dunia usaha dalam mempercepat pemberantasan kemiskinan.

Dalam konteks ini, Rencana Induk Percepatan Pengentasan Kemiskinan 2025–2029 yang disusun oleh BP TASKIN menjadi kerangka operasional nasional yang memadukan berbagai inisiatif tersebut. Rencana induk ini menetapkan dua strategi utama yang saling melengkapi, yakni:

- (1) Strategi Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin, dan
- (2) Strategi Pemberdayaan Ekonomi yang Memerdekakan.

Strategi pertama bertujuan untuk meringankan beban pengeluaran masyarakat miskin melalui penyediaan jaminan sosial yang meliputi perlindungan kesehatan, ketenagakerjaan, bantuan sosial (tunai dan non-tunai), serta subsidi untuk kebutuhan dasar seperti listrik, bahan bakar, dan gas. Strategi ini juga mencakup peningkatan akses terhadap layanan dan infrastruktur dasar, termasuk pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, dan teknologi informasi. Fokus utamanya adalah membangun sistem perlindungan sosial yang inklusif dan adaptif agar kelompok rentan memiliki akses memadai terhadap kebutuhan dasar. Untuk mendukung implementasinya, dilakukan penguatan sistem penargetan nasional berbasis Regsosek, sinergi antarprogram dalam proses graduasi pengentasan kemiskinan, serta peningkatan kualitas layanan publik di tingkat daerah. Hasil yang diharapkan adalah meningkatnya kepesertaan aktif dalam program jaminan sosial, penyaluran bantuan yang lebih tepat sasaran, serta ketersediaan infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata.

Sementara itu, strategi kedua berorientasi pada pemberdayaan ekonomi yang memerdekakan masyarakat miskin agar mereka mampu menjadi pelaku aktif dalam perekonomian. Strategi ini dikembangkan melalui pendekatan ekosistem SCLSC (Supply Chain–Local Social Capital) di sembilan sektor prioritas ekonomi rakyat. Pendekatan tersebut menempatkan masyarakat miskin sebagai subjek pembangunan dengan melibatkan mereka secara aktif dalam seluruh rantai nilai, mulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi, guna menciptakan efisiensi, mengurangi pemborosan, dan memaksimalkan manfaat ekonomi. Pelaksanaan strategi ini didukung

oleh pengembangan Kartu Usaha, pelatihan vokasional, pendampingan intensif, serta akses pembiayaan dan digitalisasi usaha mikro. Dengan demikian, strategi ini tidak hanya bertujuan mengurangi kemiskinan secara statistik, tetapi juga membangun kemandirian ekonomi yang berkelanjutan di tingkat rumah tangga dan komunitas.

Sinergi antara kerangka kelembagaan BP TASKIN, kebijakan Peta Jalan Pemberantasan Kemiskinan, dan Rencana Induk Percepatan Pengentasan Kemiskinan 2025–2029 menandai pergeseran paradigma penanggulangan kemiskinan nasional dari pendekatan charity-based menuju empowerment-based development. Pemerintah pusat dan daerah dituntut untuk membangun integrasi lintas sektor, memperkuat basis data sosial ekonomi, dan mengimplementasikan kebijakan berbasis bukti agar setiap program memiliki daya ungkit yang nyata terhadap penurunan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan ini selaras dengan visi transformasi sosial-ekonomi nasional dalam RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029, yang menempatkan pengentasan kemiskinan bukan hanya sebagai target angka, melainkan sebagai indikator utama keberhasilan pembangunan manusia Indonesia yang berkeadilan dan inklusif.

4.1.2. Kebijakan Provinsi Jawa Tengah

A. Sinkronisasi Arah Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dengan RPJPD Provinsi Jawa Tengah 2025–2045

Upaya penanggulangan kemiskinan di tingkat daerah tidak dapat dipisahkan dari arah kebijakan pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Tengah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025–2045. Dokumen ini menegaskan bahwa pengurangan kemiskinan dan ketimpangan menjadi prioritas kedua dari lima sasaran utama pembangunan, sejalan dengan visi nasional untuk menurunkan angka kemiskinan hingga di bawah 1% (satu persen) pada tahun 2045. Dalam konteks regional, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan penurunan tingkat kemiskinan hingga kisaran 0,25–0,75% (nol koma dua puluh lima–nol koma tujuh puluh lima persen) pada tahun 2045, dengan baseline 2025 sebesar 9,00–9,66% (sembilan koma nol nol – sembilan koma enam puluh enam persen). Hal ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam mendukung tujuan Indonesia Emas 2045, melalui strategi transformasi sosial dan ekonomi yang terencana, terukur, serta berkelanjutan.

Visi pembangunan jangka panjang Jawa Tengah 2025–2045 dirumuskan sebagai “Jawa Tengah sebagai Penumpu Pangan dan Industri Nasional yang Maju, Sejahtera, Berbudaya, dan Berkelanjutan.” Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan delapan misi pembangunan daerah, yaitu: (1) Transformasi Sosial; (2) Transformasi Ekonomi; (3) Transformasi Tata Kelola; (4) Keamanan Daerah yang Tangguh dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah; (5) Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi; (6) Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan; (7) Sarana dan Prasarana Berkualitas dan Ramah Lingkungan; serta (8) Kestinambungan Pembangunan. Dari keseluruhan misi tersebut, Transformasi Sosial dan Transformasi Ekonomi menjadi fondasi utama dalam memperkuat upaya pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan antarwilayah dan antarpenduduk.

Pada tahap awal implementasi RPJPD, yaitu periode 2025–2029, arah pembangunan Jawa Tengah difokuskan pada agenda “Penguatan Landasan Transformasi”. Transformasi sosial diarahkan untuk memperluas akses layanan dasar yang bermutu, merata, dan inklusif, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Tiga prioritas utama pembangunan sosial pada periode ini adalah: (1) Kesehatan untuk Semua, yang menekankan akses universal terhadap layanan kesehatan primer dan pencegahan stunting; (2) Pendidikan Berkualitas yang Inklusif, yang mendorong wajib belajar 13 tahun dan peningkatan mutu guru serta sarana pendidikan; serta (3) Perlindungan Sosial Adaptif, yang memastikan perlindungan bagi seluruh kelompok rentan melalui sistem jaminan sosial yang terintegrasi dan responsif terhadap perubahan sosial ekonomi. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa pembangunan manusia menjadi inti strategi pengentasan kemiskinan di tingkat provinsi, sejalan dengan paradigma pembangunan nasional yang menempatkan kesejahteraan manusia sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu, Transformasi Ekonomi diarahkan pada peningkatan produktivitas dan daya saing sektor-sektor unggulan di Jawa Tengah melalui penerapan ekonomi hijau, hilirisasi industri berbasis sumber daya lokal, pengembangan ekonomi kreatif dan digital, serta peningkatan kemandirian desa. Transformasi ini didukung oleh penguatan sumber daya manusia berbasis riset, inovasi, dan digitalisasi untuk mempercepat adaptasi terhadap perubahan ekonomi global. Lima prioritas strategis yang menopang transformasi ekonomi Jawa Tengah mencakup: (1) Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Inovasi untuk mendorong produktivitas; (2) Implementasi Ekonomi Hijau untuk menjamin keberlanjutan lingkungan; (3) Transformasi Digital dalam tata kelola dan sektor industri; (4) Integrasi Ekonomi Domestik dan Global melalui

konektivitas logistik dan perdagangan antarwilayah; serta (5) Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata.

Dalam dimensi sosial, kebijakan perlindungan sosial jangka panjang bagi masyarakat Jawa Tengah dijabarkan secara rinci dalam RPJPD 2025–2045. Perlindungan sosial diarahkan agar inklusif, adaptif, dan terintegrasi, menjangkau seluruh kelompok masyarakat sesuai tingkat kerentanan, dengan prinsip berkeadilan dan tanpa diskriminasi. Arah kebijakan ini diwujudkan melalui beberapa langkah strategis:

- (a) penguatan sistem perlindungan sosial adaptif dan inklusif yang memanfaatkan sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) sebagai instrumen penargetan berbasis data tunggal;
- (b) perluasan bantuan sosial yang mencakup bantuan pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan dan gizi, kebutuhan hidup dasar, perumahan layak, pemberdayaan ekonomi, hingga subsidi energi dan transportasi bagi masyarakat marjinal;
- (c) perluasan jaminan sosial yang mencakup jaminan kesehatan, ketenagakerjaan, kematian, dan hari tua bagi kelompok rentan;
- (d) pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berbasis kerakyatan dan inklusif untuk meningkatkan kemandirian masyarakat miskin;
- (e) percepatan pemerataan akses air minum dan sanitasi serta eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS); dan
- (f) peningkatan akses terhadap rumah layak huni dan terjangkau yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah.

Kebijakan ini menunjukkan bahwa penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah tidak hanya berorientasi pada penyediaan bantuan sosial, tetapi juga menekankan pemberdayaan ekonomi dan perbaikan kualitas hidup masyarakat secara holistik. Pendekatan ini memperkuat posisi Jawa Tengah sebagai provinsi yang berperan strategis dalam mendukung pencapaian sasaran nasional penghapusan kemiskinan ekstrem dan penurunan ketimpangan regional, sekaligus mencerminkan integrasi nyata antara kebijakan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup.

Dengan demikian, arah kebijakan penanggulangan kemiskinan Provinsi Jawa Tengah 2025–2045 merupakan cerminan dari paradigma pembangunan inklusif yang menempatkan manusia sebagai pusat transformasi. Upaya memperkuat perlindungan sosial adaptif, memperluas akses pendidikan dan kesehatan, serta memberdayakan ekonomi lokal berbasis potensi daerah menjadi dasar untuk mewujudkan Jawa Tengah yang maju, sejahtera,

berbudaya, dan berkelanjutan, sekaligus menjadi penopang utama pencapaian visi Indonesia Emas 2045.

B. Sinkronisasi Arah Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2025–2029

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2029 merupakan tahapan awal dari pelaksanaan RPJPD 2025–2045 yang berfungsi sebagai jembatan antara arah kebijakan nasional dan implementasi pembangunan daerah. Dalam dokumen ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menegaskan bahwa penurunan angka kemiskinan menjadi salah satu prioritas utama pembangunan daerah, sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam RPJMN 2025–2029 dan visi jangka panjang Jawa Tengah sebagai Penumpu Pangan dan Industri Nasional yang Maju, Sejahtera, Berbudaya, dan Berkelanjutan. Upaya pengentasan kemiskinan dalam RPJMD ini tidak hanya berorientasi pada penurunan angka statistik, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin secara menyeluruh melalui pendekatan sosial, ekonomi, dan spasial yang terintegrasi.

Kebijakan penurunan kemiskinan pada periode RPJMD 2025–2029 menargetkan penurunan angka kemiskinan hingga mencapai 7,25–7,50 persen pada tahun 2029, dengan baseline 2025 sebesar 9,00–9,66 persen. Sasaran ini menjadi bagian dari agenda transformasi sosial dan ekonomi yang menjadi landasan pembangunan daerah secara komprehensif. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menegaskan bahwa strategi penanggulangan kemiskinan harus diarusutamakan dalam seluruh program dan kegiatan pembangunan, baik lintas sektor maupun lintas wilayah. Pendekatan ini bertujuan agar kebijakan pengentasan kemiskinan tidak berjalan secara sektoral dan parsial, melainkan terintegrasi dalam kerangka transformasi sosial-ekonomi yang berkelanjutan.

Terdapat tiga strategi utama dalam upaya penanggulangan kemiskinan (termasuk kemiskinan ekstrem) yang menjadi fondasi pelaksanaan RPJMD Jawa Tengah 2025–2029. Pertama, strategi mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, yang diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar melalui peningkatan akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, dan sanitasi. Kedua, strategi meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, yang berfokus pada pengembangan kapasitas individu dan kelompok melalui pendidikan vokasi, pelatihan kerja, serta penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ketiga, strategi meminimalkan wilayah kantong kemiskinan melalui pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan konektivitas

antarwilayah, serta sinergi kebijakan spasial untuk mengurangi disparitas antarwilayah perkotaan dan perdesaan. Ketiga strategi utama tersebut didukung oleh peningkatan tata kelola penanggulangan kemiskinan melalui validasi dan integrasi data berbasis teknologi informasi modern.

Seluruh strategi tersebut dilaksanakan dalam kerangka transformasi sosial dan ekonomi yang menjadi orientasi utama RPJMD Jawa Tengah 2025–2029. Dengan demikian, kebijakan penanggulangan kemiskinan dalam RPJMD Jawa Tengah 2025–2029 tidak hanya berfungsi sebagai agenda sosial, tetapi juga sebagai strategi pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan inklusif. Melalui sinergi antara kebijakan sosial, ekonomi, dan spasial yang didukung oleh tata kelola data yang modern dan inklusif, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen untuk mewujudkan penurunan kemiskinan yang signifikan, berkelanjutan, dan sejalan dengan visi besar Jawa Tengah 2045 dan Indonesia Emas 2045.

4.1.3. Kebijakan Kabupaten Sukoharjo

A. Sinkronisasi Arah Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dengan RPJPD Kabupaten Sukoharjo 2025–2045

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 menetapkan pengurangan angka kemiskinan sebagai sasaran kedua dari lima prioritas utama. Fokusnya adalah mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan sehingga tingkat kemiskinan dapat ditekan menjadi 0,00-0,35 persen pada tahun 2045, dengan proyeksi baseline tahun 2025 berada pada kisaran 7,10-7,30 persen.

Visi jangka panjang Kabupaten Sukoharjo untuk periode 2025-2045 dirumuskan sebagai "Sukoharjo Bermartabat, Maju, Makmur, dan Berkelanjutan". Untuk mewujudkan visi ini, empat misi pembangunan daerah telah ditetapkan, yaitu: (1) Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Amanah (Governance); (2) Menciptakan Sumber Daya Manusia yang Unggul; (3) Meningkatkan Pendapatan Masyarakat dan Mendorong Perekonomian Daerah yang Inklusif; serta (4) Membangun Infrastruktur yang Tangguh dan Berwawasan Lingkungan.

Misi yang berkaitan langsung dengan sasaran pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan adalah Misi 2 dan Misi 3. Pada tahap awal pelaksanaan RPJPD Kabupaten Sukoharjo 2025-2045 (periode 2025-2029), kebijakan difokuskan pada "Penguatan Landasan Transformasi."

Misi 2: Menciptakan Sumber Daya Manusia yang Unggul. Kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui pemenuhan pelayanan dasar di bidang kesehatan dan pendidikan, serta peningkatan kualitas hidup keluarga. Tujuannya adalah membentuk individu yang produktif, berkarakter, adaptif, dan tangguh. Tiga fokus utama dalam pembangunan ini meliputi:

1. Penyediaan pendidikan berkualitas yang inklusif.
2. Layanan kesehatan yang terjangkau bagi semua masyarakat.
3. Peningkatan kualitas hidup keluarga yang responsif gender dan tangguh terhadap bencana.

Misi 3: Meningkatkan Pendapatan Masyarakat dan Mendorong Perekonomian Daerah yang Inklusif, Strategi ini bertujuan meningkatkan produktivitas sektor-sektor utama penyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dengan fokus pada sektor yang mampu menyerap banyak tenaga kerja untuk mendorong pemerataan pendapatan dan ketahanan pangan. Selain itu, kebijakan ini juga mencakup pengembangan sumber pertumbuhan ekonomi baru yang didukung perlindungan sosial serta penerapan prinsip ekonomi hijau. Dua fokus pembangunan dalam misi ini adalah:

1. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah ekonomi.
2. Pengembangan sistem perlindungan sosial dan pangan yang adaptif.

Sebagai bagian dari tahap awal RPJPD 2025-2045, Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Sukoharjo 2025-2029 menargetkan penurunan tingkat kemiskinan menjadi 5,33-5,56 persen pada tahun 2029, dengan baseline pada tahun 2025 sebesar 7,10-7,30 persen.

B. Sinkronisasi Arah Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dengan RPJMD Kabupaten Sukoharjo 2025–2029

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025–2029 merupakan dokumen strategis lima tahunan yang menjabarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dalam kerangka pembangunan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan. Dokumen ini disusun dengan memperhatikan keterpaduan terhadap RPJPD Kabupaten Sukoharjo 2025–2045, RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2025–2029, serta RPJMN 2025–2029, sehingga arah kebijakan pembangunan daerah sejalan dengan kebijakan nasional dan provinsi. Secara substansial, RPJMD Sukoharjo mengintegrasikan transformasi ekonomi, sosial, dan tata

kelola pemerintahan dalam kerangka penanggulangan kemiskinan yang holistik dan inklusif.

Visi pembangunan daerah, “*Sukoharjo Lebih Maju, Adil, dan Bermartabat*”, menegaskan orientasi moral, sosial, dan ekonomi yang berkeadilan, serta mewujudkan kesejahteraan melalui tata kelola yang amanah dan partisipatif. Nilai-nilai fundamental seperti inovatif, kolaboratif, adil, bahagia, dan religius menjadi fondasi dalam setiap kebijakan publik, termasuk strategi pengentasan kemiskinan. Nilai inovatif mendorong pemanfaatan teknologi dan kreativitas dalam pelayanan publik dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Nilai kolaboratif menekankan pentingnya kemitraan antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam menekan angka kemiskinan. Sementara itu, nilai keadilan dan religius mengarahkan kebijakan agar berpihak pada kelompok rentan tanpa diskriminasi sosial maupun ekonomi.

Secara konseptual, sinkronisasi arah kebijakan penanggulangan kemiskinan dalam RPJMD Sukoharjo terwujud melalui tiga sasaran utama pembangunan, yaitu: (1) penguatan landasan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, (2) penguatan transformasi sosial yang merata dan responsif, serta (3) penguatan tata kelola yang berdaya saing dan berprinsip *good governance*. Masing-masing sasaran diimplementasikan melalui strategi tematik dan program prioritas yang saling terkait dan berorientasi langsung pada pengurangan kemiskinan multidimensi.

- Sasaran 1 (Transformasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan), strategi diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemberdayaan UMKM, peningkatan produktivitas pertanian, perluasan akses permodalan, dan pembangunan infrastruktur ekonomi yang merata. Program seperti *UMKM Naik Kelas*, *Smart Farming*, *Investasi Berbasis Potensi Lokal*, serta *Program Asuransi Pertanian* berfungsi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat produktif sekaligus memperkecil ketimpangan wilayah. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *inclusive growth*, di mana pertumbuhan ekonomi tidak hanya dilihat dari output makro, tetapi juga dari partisipasi dan manfaat langsung bagi masyarakat miskin.
- Sasaran 2 (Transformasi Sosial yang Merata dan Responsif), penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui pendekatan pembangunan manusia dan perlindungan sosial. Strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia diwujudkan melalui program *Sekolah Efektif Unggulan*, *Posyandu Terpadu (One Stop Health Center)*, *Pencegahan dan Penanganan Stunting*, *Pendidikan Inklusi dan Keterampilan Khusus*, hingga *Pemberdayaan Perempuan Sukoharjo (PPS)*. Program-program ini memperkuat

akses terhadap layanan dasar dan memastikan bahwa setiap warga, terutama kelompok miskin dan rentan, memiliki kesempatan yang sama dalam mengembangkan kapasitas diri. Lebih jauh, kebijakan ini diintegrasikan dengan strategi *penguatan perlindungan sosial adaptif* melalui program *Beasiswa Kuliah Sukoharjo Pintar, Penyediaan Rumah Layak Huni, Ketahanan Pangan Berbasis Komunitas, dan Santunan Kematian*. Pendekatan ini menggambarkan upaya pemerintah daerah dalam menurunkan beban pengeluaran rumah tangga miskin serta meningkatkan pendapatan secara berkelanjutan.

- Sasaran 3 (Transformasi Tata Kelola dan Good Governance) mendukung keberlanjutan program pengentasan kemiskinan melalui tata kelola pemerintahan yang transparan, digital, dan partisipatif. Inisiatif seperti *Sukoharjo Digital Government (Tol Layanan Publik)*, *Sukoharjo Smart Village*, dan *Sukoharjo Bersih dari Korupsi (SBK)* memperkuat efektivitas birokrasi dan efisiensi pelayanan publik yang berdampak langsung pada kelompok miskin. Sementara itu, strategi pembangunan karakter masyarakat religius dan berbudaya, melalui program *Sukoharjo Mengaji, Sukoharjo Harmoni, dan Pemberdayaan Ekonomi Pesantren*, berfungsi memperkuat kohesi sosial dan spiritual masyarakat, sehingga penanggulangan kemiskinan tidak hanya berorientasi ekonomi tetapi juga berbasis nilai-nilai sosial dan moral.

Sinkronisasi arah kebijakan RPJMD Sukoharjo juga mencerminkan *alignment* dengan tujuan pembangunan nasional, khususnya dalam pilar *penghapusan kemiskinan ekstrem, penguatan daya saing ekonomi daerah, dan pembangunan manusia unggul dan produktif*. Arah kebijakan tersebut konsisten dengan prioritas RPJMN 2025–2029 dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah yang menekankan integrasi ekonomi hijau, pemberdayaan UMKM, peningkatan ketahanan pangan, serta transformasi sosial melalui pendidikan dan kesehatan universal. Dalam konteks ini, Sukoharjo mengambil posisi strategis sebagai kabupaten dengan model pembangunan inklusif berbasis *human-centered development*, yang tidak hanya menurunkan angka kemiskinan konsumsi tetapi juga memperkuat dimensi non-konsumsi seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

Dengan demikian, sinkronisasi arah kebijakan penanggulangan kemiskinan dalam RPJMD Sukoharjo 2025–2029 menggambarkan keterpaduan antara *transformasi ekonomi, sosial, dan kelembagaan* yang berorientasi pada penghapusan kemiskinan struktural. Pendekatan ini menempatkan kemiskinan bukan sekadar masalah

pendapatan, tetapi sebagai permasalahan multidimensi yang membutuhkan intervensi lintas sektor. Melalui kombinasi strategi pemberdayaan, penyediaan layanan dasar, dan reformasi tata kelola, RPJMD Sukoharjo diharapkan mampu menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan dan menutup kesenjangan sosial secara progresif menuju masyarakat yang lebih maju, adil, dan bermartabat.

Tabel 4.1 Hubungan Strategi dan Arah Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Nasional dan Daerah

No	Dokumen	Strategi	Arah Kebijakan	Hubungan Antar Dokumen	Simpulan
1	RPJPN 2025–2045	Transformasi Sosial dan Ekonomi menuju Indonesia Emas 2045	Pengentasan kemiskinan di seluruh wilayah, terutama Jawa bagian selatan, melalui perlindungan sosial adaptif, peningkatan layanan dasar, dan satu sistem data Regsosek.	Menjadi kerangka makro arah pembangunan nasional yang memuat prinsip <i>social protection for all</i> dan integrasi data sosial ekonomi.	Menjadi dasar konseptual RPJMD Sukoharjo dalam membangun sistem penanggulangan kemiskinan berbasis bukti dan terintegrasi lintas sektor.
2	RPJMN 2025–2029	(a) Pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin; (b) Peningkatan pendapatan; (c) Peningkatan akses layanan dasar; (d) Inklusivitas kelompok rentan.	Fokus pada penurunan tingkat kemiskinan 4,5–5% dan kemiskinan ekstrem <0,5%; penguatan perlindungan sosial adaptif dan inklusif, pengembangan UMKM, serta ketahanan pangan dan infrastruktur dasar.	Menjadi turunan operasional dari RPJPN dengan target jangka menengah. Strateginya menekankan pada <i>graduasi kemiskinan</i> dan inklusivitas sosial.	RPJMD Sukoharjo mengadopsi struktur tiga pilar nasional (pengeluaran–pendapatan–kantong kemiskinan) sebagai kerangka kerja utama RPKD.
3	Peta Jalan Pemberantasan Kemiskinan (Bappenas)	Integrasi kebijakan berbasis Regsosek dan skema graduasi kemiskinan.	Transformasi data terpadu, perlindungan sosial adaptif, sinergi kartu kesejahteraan dan kartu usaha, optimalisasi peran desa dan perguruan tinggi.	Menjadi panduan teknokratis bagi sinkronisasi program dan tata kelola perlindungan sosial di daerah.	Sukoharjo menyesuaikan sistem pendataan kemiskinan daerah berbasis Regsosek serta mengembangkan <i>database</i> sosial ekonomi terverifikasi.
4	Rencana Induk Percepatan Pengentasan	Dua strategi utama: (1) Mengurangi	a. Jaminan sosial dan bantuan dasar (kesehatan,	Menjadi dokumen operasional	Sukoharjo mengintegrasikan kedua strategi ini dalam

No	Dokumen	Strategi	Arah Kebijakan	Hubungan Antar Dokumen	Simpulan
	Kemiskinan 2025–2029 (BP Taskin)	beban pengeluaran masyarakat miskin; (2) Pemberdayaan ekonomi yang memerdekakan.	pendidikan, energi, air, pangan); b. Pemberdayaan ekonomi mikro melalui pelatihan, pendampingan, dan akses pasar.	tematik yang menguraikan implementasi strategis pengentasan kemiskinan.	program sektoral seperti <i>Padat Karya Terpadu, UMKM Naik Kelas, dan Rumah Layak Huni</i> .
5	RPJPD Provinsi Jawa Tengah 2025–2045	Transformasi Sosial dan Ekonomi menuju “Jawa Tengah sebagai Penumpu Pangan dan Industri Nasional yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan”.	a. Perlindungan sosial adaptif dan inklusif; b. Peningkatan akses pendidikan dan kesehatan; c. Pemberdayaan UMKM dan ekonomi hijau; d. Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan.	Menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam konteks kewilayahan Jawa Tengah.	Menjadi rujukan RPJPD dan RPJMD Sukoharjo dalam penyesuaian visi transformasi sosial-ekonomi dan target kemiskinan 0,25–0,75% pada 2045.
6	RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2025–2029	1) Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin; 2) Meningkatkan pendapatan; 3) Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan.	Fokus pada peningkatan SDM, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan pembangunan infrastruktur dasar.	Menjadi dokumen operasional provinsi yang menjadi <i>linkage</i> antara RPJMN dan RPJMD kabupaten/kota.	RPJMD Sukoharjo mengacu langsung pada tiga strategi ini dalam merancang pilar kebijakan RPKD 2025–2029.
7	RPJPD Kabupaten Sukoharjo 2025–2045	Penguatan Landasan Transformasi Sosial dan Ekonomi Lokal.	a. Penguatan pendidikan dan kesehatan inklusif; b. Peningkatan produktivitas ekonomi daerah; c. Penerapan ekonomi hijau dan digital.	Merupakan penjabaran RPJPD Provinsi Jawa Tengah ke dalam konteks lokal Sukoharjo.	Menjadi arah jangka panjang dalam membentuk fondasi pembangunan manusia dan ekonomi berkelanjutan berbasis pemerataan wilayah.
8	RPJMD Kabupaten Sukoharjo 2025–2029	a. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin; b. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin; c. Meminimalkan	Fokus pada penguatan SDM, pemberdayaan ekonomi produktif, serta peningkatan infrastruktur dan tata kelola data kemiskinan berbasis <i>Satu Data</i> .	Merupakan turunan langsung dari RPJMD Provinsi dan RPJMN dengan adaptasi lokal berbasis Regsosek dan P3KE.	Kebijakan penanggulangan kemiskinan Sukoharjo menekankan pada integrasi perlindungan sosial, peningkatan ekonomi rakyat, dan pemerataan layanan dasar, selaras dengan arah nasional dan provinsi.

No	Dokumen	Strategi	Arah Kebijakan	Hubungan Antar Dokumen	Simpulan
		kantong kemiskinan melalui sinergi kebijakan.			

4.2. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sukoharjo

Strategi utama penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sukoharjo disusun sebagai respon atas kompleksitas kemiskinan yang bersifat multidimensi, di mana permasalahan ekonomi, sosial, dan spasial saling berkelindan dan memperkuat satu sama lain. Ketiga strategi utama, yaitu (1) mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, (2) meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, dan (3) meminimalkan wilayah kantong kemiskinan.



Gambar 4.1 Strategi Utama Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2029

Strategi ini dirancang secara terintegrasi agar mampu menjawab determinan kemiskinan yang bersumber dari sisi penyedia layanan (*supply side*) maupun sisi penerima manfaat (*demand side*). Strategi ini juga menjadi penjabaran operasional dari arah kebijakan pembangunan daerah yang sejalan dengan RPJMN 2025–2029, RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2025–2029, serta RPJPD Sukoharjo 2025–2045 yang menekankan transformasi sosial dan ekonomi menuju kesejahteraan berkelanjutan.

1. Strategi pertama, mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, diarahkan untuk memperkuat sistem perlindungan sosial dan mengurangi tekanan ekonomi rumah tangga miskin melalui intervensi

pada dimensi kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, dan pangan. Dalam perspektif teori ekonomi kesejahteraan (Atkinson & Stiglitz, 1980), pengeluaran konsumsi dasar berperan sebagai komponen penting dalam fungsi utilitas rumah tangga miskin; semakin besar proporsi pendapatan yang terserap untuk kebutuhan pokok, semakin kecil ruang bagi rumah tangga miskin untuk berinvestasi dalam pendidikan, kesehatan, dan peningkatan produktivitas. Oleh karena itu, kebijakan pengurangan beban pengeluaran diarahkan pada pemenuhan hak-hak dasar melalui perluasan akses layanan pendidikan gratis, jaminan kesehatan daerah, serta bantuan sosial afirmatif seperti beasiswa bagi siswa miskin, subsidi listrik dan air, serta bantuan pangan nontunai. Pendekatan *supply side* dari strategi ini menekankan pada pemerataan kualitas layanan dasar dan digitalisasi sistem pendidikan dan kesehatan, sementara *demand side* berfokus pada peningkatan partisipasi keluarga miskin dalam memanfaatkan layanan publik secara optimal. Melalui langkah tersebut, strategi ini diharapkan mampu menekan kerentanan konsumsi sekaligus memperkuat ketahanan sosial-ekonomi masyarakat berpendapatan rendah di Sukoharjo.

2. Strategi kedua, meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, merupakan inti dari upaya pemberdayaan ekonomi rakyat dan penciptaan kemandirian finansial masyarakat miskin. Strategi ini berakar pada teori *human capital* (Becker, 1993) dan *pro-poor growth* (Ravallion, 2001), yang menekankan pentingnya peningkatan kemampuan produktif, akses terhadap faktor produksi, dan keterlibatan dalam aktivitas ekonomi bernilai tambah. Dalam konteks Sukoharjo, strategi ini diwujudkan melalui penguatan pelatihan kerja berbasis industri, pengembangan wirausaha muda dan perempuan, serta peningkatan kapasitas UMKM melalui digitalisasi, literasi keuangan, dan perluasan akses pembiayaan mikro. Dari sisi *supply side*, intervensi diarahkan pada peningkatan fungsi Balai Latihan Kerja (BLK) dan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), penguatan inkubator bisnis, dan kemitraan antara industri dan lembaga pendidikan vokasi. Sementara dari sisi *demand side*, fokusnya adalah pada peningkatan partisipasi masyarakat miskin dalam kegiatan ekonomi produktif melalui pelatihan keterampilan, pembentukan kelompok usaha bersama, serta peningkatan motivasi kewirausahaan. Strategi ini tidak hanya meningkatkan pendapatan individu, tetapi juga menciptakan *multiplier effect* bagi perekonomian lokal, terutama di sektor pertanian, industri kecil, dan perdagangan. Dengan demikian, masyarakat miskin tidak lagi bergantung pada bantuan sosial, tetapi mampu berperan aktif sebagai pelaku ekonomi yang produktif dan berdaya saing.

3. Strategi ketiga, meminimalkan wilayah kantong kemiskinan, diarahkan untuk mengatasi akar struktural kemiskinan yang bersifat spasial dan multidimensi melalui pendekatan konvergensi lintas sektor. Pendekatan ini didasarkan pada teori geografi ekonomi baru (Krugman, 1991) yang menekankan pentingnya konektivitas, infrastruktur, dan aglomerasi ekonomi dalam menciptakan keseimbangan pertumbuhan antarwilayah. Di Kabupaten Sukoharjo, beberapa kecamatan seperti Weru, Tawang Sari, dan Bulu masih menunjukkan tingkat deprivasi ganda, di mana keterbatasan akses terhadap layanan dasar bersinggungan dengan rendahnya produktivitas ekonomi dan keterisolasian geografis. Oleh karena itu, strategi ini difokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar yang inklusif, seperti jalan, jembatan, sanitasi, air bersih, dan rumah layak huni, serta pengembangan potensi lokal berbasis desa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah tertinggal. Dari sisi *supply side*, pemerintah memperkuat koordinasi lintas sektor melalui integrasi program pembangunan dan pemanfaatan Dana Desa untuk pengentasan kemiskinan, sedangkan dari sisi *demand side*, masyarakat diberdayakan melalui partisipasi aktif dalam perencanaan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengembangan usaha lokal berbasis sumber daya wilayah. Strategi ini juga menekankan pentingnya pendekatan spasial dan digital (*geospasial poverty mapping*) untuk memastikan intervensi tepat sasaran sesuai profil kemiskinan di tiap desa.

Secara keseluruhan, ketiga strategi utama ini membentuk kerangka sinergis antara perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan pemerataan pembangunan wilayah. Pengurangan beban pengeluaran menstabilkan kesejahteraan dasar masyarakat miskin, peningkatan pendapatan mendorong kemandirian ekonomi, dan minimalisasi kantong kemiskinan memastikan pemerataan hasil pembangunan secara geografis. Integrasi ketiga strategi tersebut mencerminkan pergeseran paradigma penanggulangan kemiskinan dari pendekatan *charity-based* menuju *empowerment-based*, yang menekankan kolaborasi lintas sektor, inovasi sosial, serta penggunaan data mikro sebagai dasar pengambilan keputusan. Dengan implementasi yang konsisten, konvergen, dan berbasis bukti (*evidence-based policy*), strategi penanggulangan kemiskinan Kabupaten Sukoharjo diharapkan mampu mencapai target penurunan kemiskinan menuju 4,5–5,0 persen dan kemiskinan ekstrem di bawah 1 persen pada tahun 2029, sekaligus memperkuat fondasi kesejahteraan sosial yang berkelanjutan hingga tahun 2045.

4.3. Arah Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sukoharjo

1. Arah Kebijakan Pertama: Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Pendidikan untuk Memutus Rantai Kemiskinan Antargenerasi

Dalam kerangka strategi mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, arah kebijakan di bidang pendidikan difokuskan pada upaya pemerataan akses dan peningkatan kualitas layanan pendidikan dasar, menengah, dan vokasional. Kebijakan ini berlandaskan pada teori *human capital* (Becker, 1993), di mana investasi dalam pendidikan memiliki efek jangka panjang terhadap peningkatan produktivitas, kesempatan kerja, dan mobilitas sosial vertikal. Di Kabupaten Sukoharjo, kesenjangan sarana pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, terutama dalam mutu tenaga pendidik, fasilitas pembelajaran digital, serta akses beasiswa bagi keluarga miskin, masih menjadi determinan penting kemiskinan struktural.

Arah kebijakan diarahkan pada perluasan akses pendidikan bermutu melalui intervensi afirmatif bagi rumah tangga miskin seperti beasiswa daerah, penyediaan sarana sekolah ramah anak dan ramah disabilitas, serta peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Selain itu, dilakukan transformasi sistem pendidikan vokasional agar lebih adaptif terhadap kebutuhan industri lokal dan tren ekonomi digital. Dari *supply side*, kebijakan memperkuat ekosistem pendidikan yang inklusif melalui pemerataan fasilitas sekolah dan peningkatan kualitas SDM pendidik. Dari *demand side*, kebijakan mendorong partisipasi keluarga miskin dalam program pendidikan berkelanjutan, pelatihan vokasional, serta peningkatan literasi digital. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya menjadi layanan dasar, tetapi juga instrumen pemberdayaan ekonomi yang memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi.

2. Arah Kebijakan Kedua: Penguatan Layanan Kesehatan Dasar dan Ketahanan Gizi untuk Rumah Tangga Miskin

Arah kebijakan bidang kesehatan mendukung strategi mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dengan menekankan pada peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan dasar, terutama bagi kelompok rentan seperti ibu, anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Dalam kerangka *health capital model* (Grossman, 1972), kesehatan merupakan modal manusia yang menentukan kemampuan produktif dan pendapatan jangka panjang rumah tangga. Namun di Sukoharjo, ketimpangan distribusi fasilitas kesehatan, tenaga medis, serta keterjangkauan layanan menjadi hambatan utama bagi masyarakat miskin.

Kebijakan diarahkan pada penguatan layanan kesehatan primer melalui peningkatan kualitas puskesmas dan posyandu, pemerataan tenaga medis di daerah pinggiran, serta peningkatan pembiayaan kesehatan melalui jaminan kesehatan daerah (Jaminan Sukoharjo

Sehat). Selain itu, kebijakan memperkuat program penurunan stunting, peningkatan gizi masyarakat, serta pemberdayaan kader kesehatan berbasis komunitas. Dari *supply side*, intervensi meliputi peningkatan kapasitas fasilitas kesehatan dan tenaga medis, integrasi data kesehatan dengan sistem Regsosek, serta digitalisasi layanan kesehatan. Dari *demand side*, fokus diarahkan pada perubahan perilaku masyarakat melalui edukasi kesehatan reproduksi, gizi keluarga, dan peningkatan kesadaran pemeriksaan kesehatan rutin. Kombinasi kebijakan ini diharapkan meningkatkan *life expectancy*, menurunkan angka stunting di bawah 10 persen, serta memperkuat produktivitas masyarakat miskin secara berkelanjutan.

3. Arah Kebijakan Ketiga: Peningkatan Kapasitas Produktif dan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Miskin

Bidang ketenagakerjaan menjadi fokus utama dalam strategi meningkatkan pendapatan masyarakat miskin melalui pendekatan pemberdayaan ekonomi produktif dan penciptaan lapangan kerja yang inklusif. Arah kebijakan ini bertumpu pada konsep *pro-poor growth* (Ravallion, 2001), yang menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan dari tenaga kerja miskin. Di Kabupaten Sukoharjo, fenomena *mismatch* antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industri menyebabkan tingginya pengangguran terselubung di sektor informal.

Kebijakan diarahkan pada peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan vokasional berbasis permintaan industri (*demand-driven training*), pengembangan kewirausahaan muda, serta peningkatan akses pembiayaan mikro bagi UMKM. Pemerintah daerah juga memperluas program inkubator bisnis desa dan wirausaha perempuan produktif yang berbasis komunitas. Dari *supply side*, kebijakan menitikberatkan pada penguatan kelembagaan pelatihan kerja, fasilitasi kemitraan antara BLK dan LPK, dunia usaha, dan perguruan tinggi vokasi. Dari *demand side*, kebijakan mendorong partisipasi masyarakat miskin dalam pelatihan kewirausahaan dan pengelolaan usaha mikro. Strategi ini diharapkan menurunkan tingkat pengangguran terbuka, meningkatkan proporsi UMKM naik kelas, serta memperluas kontribusi sektor informal produktif terhadap PDRB daerah.

4. Arah Kebijakan Keempat: Pemenuhan Infrastruktur Dasar yang Inklusif dan Berkeadilan Spasial

Arah kebijakan bidang infrastruktur mendukung strategi meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dan mengurangi beban

pengeluaran melalui peningkatan akses terhadap infrastruktur dasar, transportasi, permukiman layak huni, air bersih, dan sanitasi aman. Berdasarkan perspektif *spatial inequality* (Krugman, 1991), kemiskinan sering terkonsentrasi di wilayah dengan keterbatasan konektivitas dan infrastruktur. Di Sukoharjo, beberapa wilayah perdesaan seperti Weru dan Tawang Sari masih mengalami keterbatasan akses jalan produksi, air bersih, dan fasilitas sanitasi.

Arah kebijakan diarahkan pada pembangunan infrastruktur dasar berbasis komunitas dengan pendekatan padat karya produktif yang melibatkan masyarakat miskin. Dari *supply side*, kebijakan difokuskan pada penyediaan infrastruktur publik seperti jaringan air minum, jalan penghubung desa, serta program rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dari *demand side*, masyarakat didorong untuk berpartisipasi aktif dalam pemeliharaan infrastruktur dan pengelolaan lingkungan. Kebijakan ini tidak hanya memperbaiki kondisi fisik wilayah, tetapi juga meningkatkan mobilitas ekonomi, menurunkan biaya logistik, dan memperkuat inklusivitas pembangunan antarwilayah.

5. Arah Kebijakan Kelima: Peningkatan Produktivitas dan Diversifikasi Pangan Lokal Berbasis Kearifan Lokal

Kebijakan di bidang pangan dan pertanian menjadi bagian dari strategi meningkatkan pendapatan masyarakat miskin serta meminimalkan wilayah kantong kemiskinan. Berdasarkan teori ketahanan pangan (FAO, 2023), dimensi ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan merupakan komponen penting dalam kesejahteraan rumah tangga. Di Sukoharjo, ketergantungan terhadap padi sebagai komoditas utama dan rendahnya adopsi teknologi pertanian modern menyebabkan rendahnya produktivitas dan kerentanan pendapatan petani kecil.

Arah kebijakan diarahkan pada peningkatan produktivitas melalui modernisasi pertanian berbasis teknologi presisi, diversifikasi pangan lokal (umbi, jagung, hortikultura), serta penguatan koperasi dan rantai nilai pertanian. Dari *supply side*, kebijakan mendukung penyediaan alat dan mesin pertanian, perbaikan irigasi, serta pengembangan lembaga penyuluhan berbasis digital. Dari *demand side*, petani dan rumah tangga miskin didorong untuk mengakses pelatihan pertanian modern, memperluas pasar melalui digitalisasi, dan meningkatkan konsumsi pangan lokal bergizi. Melalui kebijakan ini, ketahanan pangan daerah akan meningkat, pendapatan petani terjaga, dan kontribusi sektor pertanian terhadap penurunan kemiskinan menjadi lebih nyata dan berkelanjutan.

6. Arah Kebijakan Keenam: Transformasi Perlindungan Sosial Adaptif dan Inklusif

Bidang sosial menjadi inti dari strategi mengurangi beban pengeluaran dan meminimalkan wilayah kantong kemiskinan melalui penguatan perlindungan sosial yang inklusif, adaptif, dan berbasis data. Berdasarkan kerangka *multidimensional poverty* (Alkire & Foster, 2011), aspek sosial seperti keamanan, perlindungan, dan partisipasi masyarakat memiliki peran kunci dalam mengurangi kerentanan dan meningkatkan kesejahteraan. Di Sukoharjo, masih terdapat ketidaktepatan sasaran bantuan sosial serta keterbatasan inklusi bagi kelompok rentan seperti perempuan kepala keluarga, lansia, dan penyandang disabilitas.

Arah kebijakan diarahkan pada penguatan integrasi data kesejahteraan sosial berbasis *One Data System* antara DTKS, P3KE, dan Regsosek untuk meningkatkan akurasi sasaran. Selain itu, kebijakan memperluas akses layanan perlindungan sosial bagi kelompok rentan, termasuk pengembangan rumah aman, pusat layanan disabilitas, dan program pemberdayaan perempuan. Dari *supply side*, pemerintah memperkuat kapasitas kelembagaan sosial dan digitalisasi sistem bantuan. Dari *demand side*, masyarakat didorong untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial, pelaporan kekerasan, serta kegiatan ekonomi inklusif. Kebijakan ini diharapkan menciptakan sistem perlindungan sosial yang berkeadilan, responsif terhadap guncangan sosial-ekonomi, serta memperkuat daya tahan masyarakat miskin dalam jangka panjang.

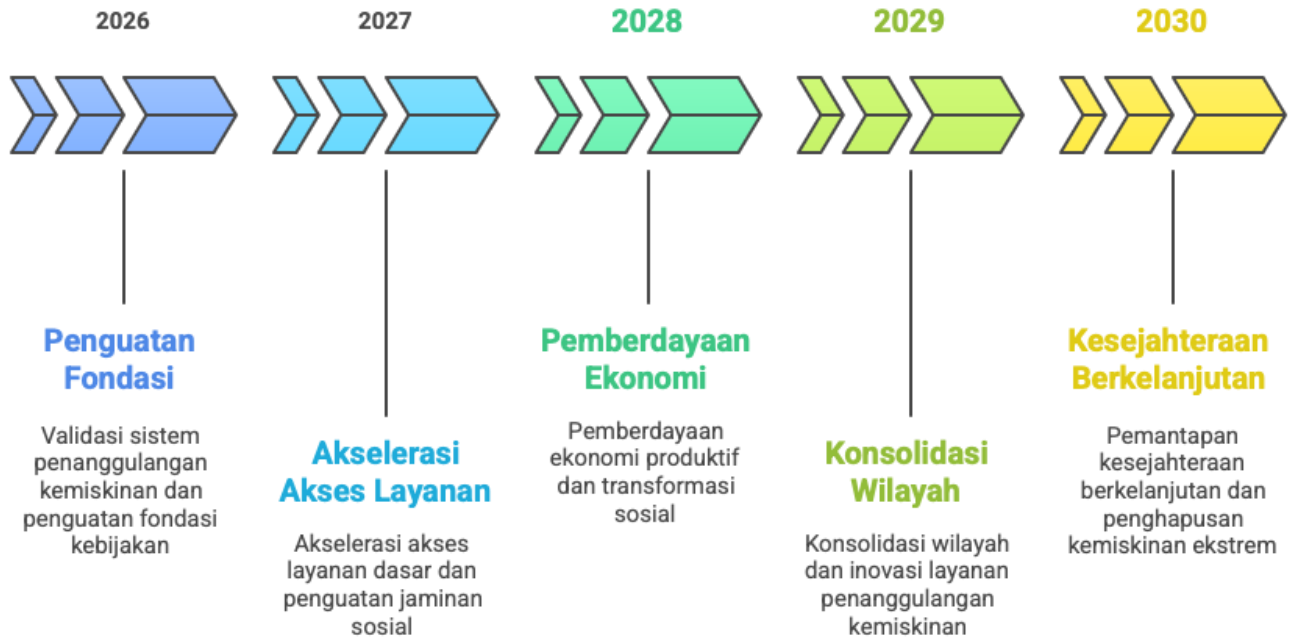


Gambar 4.2 Arah Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2029

4.4. Penahapan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sukoharjo

Penahapan kebijakan penanggulangan kemiskinan Kabupaten Sukoharjo 2026–2030, yaitu tahun 2026 merupakan fase *institutional and data strengthening*, membangun koordinasi lintas sektor yang solid agar kebijakan di tahun berikutnya berjalan dengan basis data yang kuat, sistemik, dan terukur; tahun 2027 ditandai sebagai fase akselerasi pemenuhan layanan dasar dan perluasan jaminan sosial yang inklusif, guna memastikan seluruh rumah tangga miskin terlindungi dari risiko sosial-ekonomi melalui intervensi yang tepat sasaran; tahun 2028 menjadi fase transformasi sosial dan ekonomi daerah, di mana masyarakat miskin beralih dari penerima manfaat pasif menjadi pelaku ekonomi produktif. Pertumbuhan ekonomi diupayakan bersifat *pro-poor* sehingga secara langsung menurunkan kemiskinan dan meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal; tahun 2029 merupakan fase yang menjadi tonggak penting untuk menciptakan sistem tata kelola kemiskinan yang adaptif,

kolaboratif, dan berbasis inovasi teknologi, yang tidak hanya menurunkan angka kemiskinan tetapi juga memperkuat daya tahan sosial-ekonomi wilayah; dan tahun 2030 menandai peralihan paradigma dari *poverty alleviation* menuju *welfare sustainability*, memastikan bahwa penurunan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Sukoharjo bersifat permanen, inklusif, dan berkeadilan antargenerasi.



Gambar 4.3 Penahapan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2026-2030

Berikut penjelasan penahapan kebijakan penanggulangan kemiskinan Kabupaten Sukoharjo 2026–2030:

1. Tahun 2026 – Penguatan Fondasi dan Validasi Sistem Penanggulangan Kemiskinan

Tahun 2026 menjadi fase awal dari siklus implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah yang berorientasi pada penguatan fondasi kelembagaan, validasi data, dan integrasi sistem perlindungan sosial. Pada tahap ini, kebijakan difokuskan pada strategi mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dan memperkuat governance system berbasis data akurat. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo diarahkan untuk melakukan integrasi dan penyelarasan antara Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), P3KE, dan Regsosek untuk membentuk *One Data System for Welfare* yang menjadi landasan perencanaan berbasis bukti (*evidence-based policy*).

Fokus kebijakan tahun 2026 mencakup:

- (1) Bidang pendidikan diarahkan pada pemetaan dan intervensi awal terhadap anak usia sekolah dari rumah tangga miskin melalui program Sukoharjo Pintar serta penguatan sistem beasiswa berbasis data mikro.
- (2) Bidang kesehatan difokuskan pada perluasan Jaminan Sukoharjo Sehat (JKS) bagi rumah tangga miskin dan penyusunan baseline indikator gizi dan stunting.
- (3) Bidang ketenagakerjaan diarahkan pada pendataan tenaga kerja rentan serta penyusunan peta kebutuhan pelatihan (skills mapping) untuk pelatihan vokasional berbasis industri lokal.
- (4) Bidang infrastruktur menitikberatkan pada audit kondisi rumah tidak layak huni (RTLH), akses air bersih, dan sanitasi aman di wilayah kantong kemiskinan.
- (5) Bidang ketahanan pangan difokuskan pada penyusunan peta produktivitas dan rantai nilai pertanian serta identifikasi kelompok tani miskin sebagai dasar program ketahanan pangan tahun berikutnya.
- (6) Bidang sosial diarahkan pada validasi penerima bantuan sosial, pembentukan forum koordinasi penanggulangan kemiskinan lintas perangkat daerah, serta penyusunan roadmap perlindungan sosial adaptif.

Dengan demikian, tahun 2026 merupakan fase institutional and data strengthening, membangun koordinasi lintas sektor yang solid agar kebijakan di tahun berikutnya berjalan dengan basis data yang kuat, sistemik, dan terukur.

2. Tahun 2027 – Akselerasi Akses Layanan Dasar dan Penguatan Jaminan Sosial

Tahun 2027 merupakan fase expansion atau perluasan intervensi menuju kelompok masyarakat miskin dan rentan. Fokus tahun ini adalah memperkuat strategi mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin melalui peningkatan akses terhadap layanan dasar serta perluasan sistem jaminan sosial daerah. Tahun 2027 juga menandai pergeseran kebijakan dari sekadar pendataan menuju implementasi pelayanan publik inklusif berbasis One Data Welfare yang telah disiapkan pada 2026.

Fokus kebijakan tahun 2027 mencakup:

- (1) Bidang pendidikan menitikberatkan pada perluasan beasiswa anak miskin, pembentukan community learning center di setiap desa prioritas, serta peningkatan kapasitas guru di daerah pinggiran untuk mengurangi kesenjangan mutu pendidikan.
- (2) Bidang kesehatan diarahkan pada peningkatan cakupan layanan primer dan kesehatan ibu-anak, percepatan penurunan angka

stunting di bawah 12%, serta digitalisasi pelayanan kesehatan berbasis *e-health*.

- (3) Bidang ketenagakerjaan mulai mengimplementasikan pelatihan vokasional bagi pemuda desa dan perempuan kepala keluarga melalui BLK dan LPK di Kabupaten Sukoharjo.
- (4) Bidang infrastruktur difokuskan pada pembangunan 100% sanitasi aman di desa prioritas kemiskinan serta percepatan pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat berpendapatan rendah.
- (5) Bidang ketahanan pangan menginisiasi program Diversifikasi Pangan Lokal Sehat untuk menekan ketergantungan terhadap beras dan mendorong konsumsi pangan alternatif.
- (6) Bidang sosial memperkenalkan platform digital penyaluran bantuan sosial terpadu, mengintegrasikan bantuan lintas kementerian dan perangkat daerah.

Tahun 2027 ditandai sebagai fase akselerasi pemenuhan layanan dasar dan perluasan jaminan sosial yang inklusif, guna memastikan seluruh rumah tangga miskin terlindungi dari risiko sosial-ekonomi melalui intervensi yang tepat sasaran.

3. Tahun 2028 – Pemberdayaan Ekonomi Produktif dan Transformasi Sosial

Memasuki tahun 2028, arah kebijakan Sukoharjo bergeser ke fase empowerment and transformation, dengan strategi dominan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin melalui pemberdayaan ekonomi produktif, penguatan sumber daya manusia, dan perluasan lapangan kerja berbasis potensi lokal. Tahun ini merupakan momentum peralihan dari bantuan sosial menuju kemandirian ekonomi rakyat miskin.

Fokus kebijakan tahun 2028 mencakup:

- (1) Bidang ketenagakerjaan dan pemberdayaan ekonomi menitikberatkan pada pengembangan pelatihan vokasional *demand-driven* berbasis kebutuhan industri, penguatan inkubator bisnis desa, serta pemberdayaan wirausaha muda dan perempuan produktif.
- (2) Bidang pendidikan diarahkan pada penguatan *link and match* antara sekolah vokasional dan dunia kerja, termasuk penyesuaian kurikulum berbasis kompetensi digital.
- (3) Bidang kesehatan memperluas skema *Health and Nutrition for Productivity* bagi pekerja informal dan keluarga miskin produktif agar peningkatan kesehatan berdampak langsung terhadap produktivitas ekonomi.
- (4) Bidang infrastruktur menekankan pembangunan konektivitas antarwilayah pertanian, sentra UMKM, dan kawasan industri guna

mempercepat arus distribusi dan memperluas akses ekonomi masyarakat desa.

- (5) Bidang ketahanan pangan diimplementasikan melalui program Smart Farming Sukoharjo, yaitu modernisasi pertanian presisi dan integrasi koperasi petani ke pasar digital.
- (6) Bidang sosial diarahkan pada pemberdayaan kelompok rentan melalui ekonomi inklusif, seperti pengembangan koperasi perempuan, kelompok disabilitas produktif, dan penguatan jejaring sosial berbasis komunitas.

Tahun 2028 menjadi fase transformasi sosial dan ekonomi daerah, di mana masyarakat miskin beralih dari penerima manfaat pasif menjadi pelaku ekonomi produktif. Pertumbuhan ekonomi diupayakan bersifat pro-poor sehingga secara langsung menurunkan kemiskinan dan meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal.

4. Tahun 2029 – Konsolidasi Wilayah dan Inovasi Layanan Penanggulangan Kemiskinan

Tahun 2029 menjadi fase *consolidation and innovation*, yaitu periode konsolidasi antarprogram lintas sektor serta penerapan inovasi digital dalam tata kelola kemiskinan daerah. Ketiga strategi utama, yaitu mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan, dan meminimalkan wilayah kantong kemiskinan, dijalankan secara simultan dan sinergis.

Fokus kebijakan tahun 2029 mencakup:

- (1) Bidang infrastruktur dan permukiman diarahkan pada penguatan konektivitas antarwilayah tertinggal, optimalisasi pemanfaatan Dana Desa untuk pengentasan kemiskinan, serta penerapan Geo-Poverty Mapping sebagai dasar penentuan prioritas pembangunan.
- (2) Bidang pendidikan dan kesehatan memperluas digitalisasi layanan publik melalui pengembangan Integrated Social Service Platform (ISSP) yang mengintegrasikan sistem data spasial, pendidikan, dan kesehatan.
- (3) Bidang ketenagakerjaan menekankan pengembangan cluster entrepreneurship dan digital labor platform untuk memperluas kesempatan kerja produktif, terutama bagi generasi muda dan pelaku usaha mikro.
- (4) Bidang pangan dan pertanian memperkuat rantai nilai (value chain) produk lokal, meningkatkan integrasi koperasi petani dengan pasar digital, serta memperluas akses pembiayaan mikro untuk petani kecil.
- (5) Bidang sosial mengimplementasikan sistem monitoring berbasis machine learning untuk meningkatkan ketepatan sasaran, efisiensi penyaluran bantuan, dan transparansi pelaksanaan program.

Fase ini menjadi tonggak penting untuk menciptakan sistem tata kelola kemiskinan yang adaptif, kolaboratif, dan berbasis inovasi teknologi, yang tidak hanya menurunkan angka kemiskinan tetapi juga memperkuat daya tahan sosial-ekonomi wilayah.

5. Tahun 2030 – Pemantapan Kesejahteraan Berkelanjutan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Tahun 2030 merupakan fase puncak (*stabilization and sustainability*) dari keseluruhan siklus penanggulangan kemiskinan daerah. Fokus kebijakan diarahkan pada penguatan keberlanjutan sistem, penghapusan kemiskinan ekstrem, dan pemantapan kesejahteraan sosial antargenerasi. Strategi ketiga, yaitu meminimalkan wilayah kantong kemiskinan, menjadi landasan untuk memastikan keberlanjutan hasil pembangunan.

Fokus kebijakan tahun 2030 mencakup:

- (1) Bidang pendidikan ditandai dengan peluncuran gerakan Sukoharjo Learning Society yang membentuk masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
- (2) Bidang kesehatan mencapai tahap implementasi penuh Universal Health Coverage (UHC), di mana seluruh warga miskin dan rentan terdaftar dalam skema JKN-JKS, dengan sistem manajemen kasus berbasis digital.
- (3) Bidang ketenagakerjaan memperkuat ekosistem wirausaha digital, ekonomi hijau (green economy), serta integrasi pasar kerja daerah ke sistem nasional ketenagakerjaan.
- (4) Bidang infrastruktur dan permukiman fokus pada pemeliharaan berkelanjutan fasilitas dasar yang telah terbangun dan pengembangan permukiman tangguh bencana berbasis adaptasi iklim.
- (5) Bidang ketahanan pangan melakukan konsolidasi food resilience network yang menghubungkan koperasi petani dengan pasar modern, memastikan ketahanan ekonomi dan gizi rumah tangga pedesaan.
- (6) Bidang sosial difokuskan pada exit strategy bantuan sosial, transformasi penerima manfaat menjadi pelaku ekonomi produktif, serta penguatan lembaga sosial masyarakat desa untuk menjaga kohesi sosial.

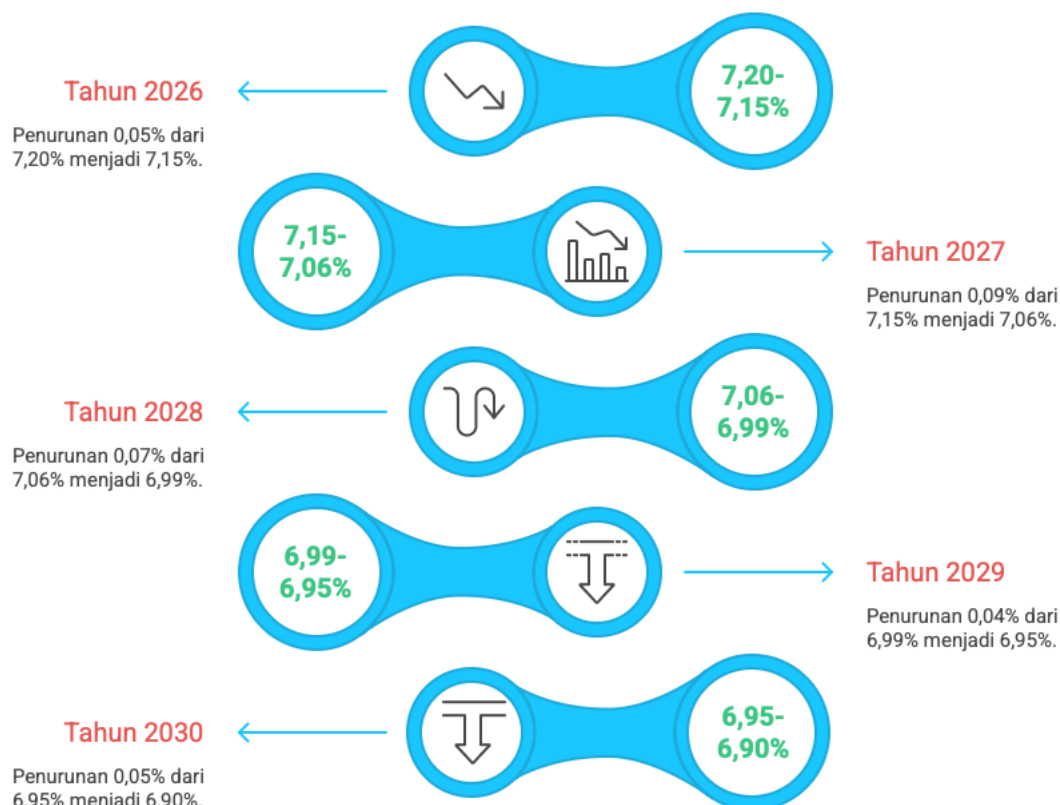
Tahun 2030 menandai peralihan paradigma dari poverty alleviation menuju welfare sustainability, memastikan bahwa penurunan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Sukoharjo bersifat permanen, inklusif, dan berkeadilan antargenerasi.

4.5. Target Penurunan Kemiskinan Kabupaten Sukoharjo

Penetapan target penurunan kemiskinan Kabupaten Sukoharjo untuk periode tahun 2025–2030 berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025–2029, yang merupakan penjabaran dari visi pembangunan daerah dalam RPJPD 2025–2045 dan selaras dengan arah kebijakan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029 serta target *Sustainable Development Goals (SDGs)*, khususnya tujuan pertama yaitu *No Poverty*. RPJMD tersebut menetapkan arah kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui pendekatan multidimensi yang mencakup penguatan kapasitas ekonomi rakyat, peningkatan akses layanan dasar, serta pemerataan pembangunan antarwilayah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan hasil pemantauan kinerja pembangunan daerah, tingkat kemiskinan Kabupaten Sukoharjo menunjukkan tren penurunan yang konsisten. Pada tahun 2023, tingkat kemiskinan tercatat sebesar 7,58 persen, kemudian menurun menjadi 7,47 persen pada tahun 2024, yang menandakan efektivitas pelaksanaan berbagai program prioritas pengentasan kemiskinan di sektor pendidikan, kesehatan, sosial, dan ketenagakerjaan. Lebih signifikan lagi, hasil capaian awal tahun 2025 menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan berhasil ditekan hingga mencapai 6,83 persen, atau lebih rendah dari target awal yang diperkirakan berada pada kisaran 7,10–7,30 persen. Capaian ini merupakan indikator kuat bahwa kebijakan terintegrasi antarperangkat daerah telah menghasilkan dampak nyata dalam menurunkan jumlah penduduk miskin secara substansial.

Sejalan dengan arah kebijakan RPJMD, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo menargetkan penurunan tingkat kemiskinan secara gradual dan berkelanjutan hingga tahun 2030. Target tersebut meliputi capaian 7,20–7,15 persen pada tahun 2026, 7,15–7,06 persen pada tahun 2027, 7,06–6,99 persen pada tahun 2028, 6,99–6,95 persen pada tahun 2029, dan mencapai 6,95–6,90 persen pada tahun 2030 sebagai kondisi akhir periode perencanaan. Dengan capaian realisasi tahun 2025 yang sudah lebih rendah dari perkiraan awal (6,83 persen), maka tren penurunan kemiskinan Sukoharjo berada pada jalur akseleratif, menandakan efektivitas sistem tata kelola, pelaksanaan program intervensi, serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi produktif.



Sumber: RPJMD Kabupaten Sukoharjo 2025-2029 (diolah)

Gambar 4.4 Target Penurunan Tingkat Kemiskinan/ Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Sukoharjo Tahun 2026-2030

Pencapaian target penurunan kemiskinan juga sangat dipengaruhi oleh kebijakan stabilisasi harga dan pengendalian inflasi daerah, penguatan sistem perlindungan sosial adaptif melalui integrasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), P3KE, dan Regsosek, serta sinergi program lintas sektor antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Pendekatan berbasis data ini memastikan bahwa setiap intervensi kebijakan dapat diarahkan secara tepat sasaran kepada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.

Dengan realisasi tahun 2025 sebesar 6,83 (enam koma delapan puluh tiga) persen, Kabupaten Sukoharjo telah menempatkan dirinya di atas rata-rata penurunan kemiskinan Provinsi Jawa Tengah. Hal ini mencerminkan keberhasilan Pemerintah Daerah dalam menjalankan tata kelola kebijakan yang responsif, evidence-based, dan kolaboratif. Apabila tren penurunan ini dapat dipertahankan, maka target akhir penurunan kemiskinan sebesar 6,90 (enam koma Sembilan puluh) persen pada tahun 2030 sangat realistis untuk dicapai, bahkan berpotensi turun hingga di bawah 6,5 (enam koma

lima) persen apabila sinergi lintas sektor dan dukungan fiskal dapat terus diperkuat.

Dengan demikian, target penurunan kemiskinan daerah bukan hanya berfungsi sebagai ukuran kinerja pembangunan sosial ekonomi, tetapi juga sebagai simbol keberhasilan transisi menuju kesejahteraan berkelanjutan (*welfare sustainability*). Pemerintah Kabupaten Sukoharjo berkomitmen menjadikan agenda penanggulangan kemiskinan sebagai gerakan bersama lintas aktor dan lintas generasi, dengan semangat inklusifitas, pemerataan, dan ketahanan sosial ekonomi masyarakat.

4.6. Program Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sukoharjo

Program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo 2025–2030 secara substantif dapat diposisikan sebagai *policy instruments* untuk mengoperasionalkan tiga strategi utama penanggulangan kemiskinan daerah, yaitu (1) mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, (2) meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, dan (3) meminimalkan wilayah kantong kemiskinan.

Ketiga strategi ini tidak berdiri sendiri, melainkan membentuk satu kerangka *policy continuum* yang mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, dan spasial sebagaimana ditekankan dalam dokumen RPJPD Kabupaten Sukoharjo 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029.

Setiap strategi utama menuntut kombinasi kebijakan dari *supply side* (penyedia layanan publik, infrastruktur, dan sistem kelembagaan) dan *demand side* (penerima manfaat dan partisipasi masyarakat miskin). Dengan pendekatan konvergensi lintas sektor, arah kebijakan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, infrastruktur, ketahanan pangan, dan sosial, seluruhnya berperan langsung dalam menurunkan kemiskinan multidimensi yang masih melekat di beberapa wilayah perdesaan.

1. Strategi Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin

Strategi ini berorientasi pada penguatan *social protection system* untuk menurunkan beban ekonomi rumah tangga miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar. Dalam kerangka teori kesejahteraan (Atkinson & Stiglitz, 1980), pengeluaran konsumsi dasar (pendidikan, kesehatan, perumahan, dan pangan) menjadi komponen vital dalam fungsi utilitas rumah tangga miskin. Semakin besar proporsi pendapatan yang dialokasikan untuk kebutuhan pokok, semakin kecil peluang mereka untuk berinvestasi dalam modal manusia.

Oleh karena itu, arah kebijakan Kabupaten Sukoharjo diarahkan pada penyediaan layanan dasar gratis, jaminan sosial daerah, dan subsidi afirmatif. Program prioritas seperti Sukoharjo Sehat (jaminan kesehatan daerah), Beasiswa Sukoharjo Pintar, Sekolah Efektif/Unggulan Tingkat SD, Rumah Layak Huni, Air Bersih dan Sanitasi

Aman, Subsidi Bunga UMKM, serta Santunan Kematian adalah instrumen konkret pengurangan beban pengeluaran. Dari *supply side*, pemerintah memperkuat kualitas layanan publik dan sistem data terpadu (*One Data Welfare System*), sedangkan dari *demand side*, masyarakat miskin didorong untuk lebih aktif memanfaatkan fasilitas sosial dan layanan dasar yang telah disediakan.

Pendekatan ini bukan hanya menekan biaya hidup, tetapi juga menciptakan *shock absorber* sosial terhadap risiko ekonomi seperti inflasi, pengangguran, dan krisis kesehatan.

2. Strategi Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Miskin

Strategi ini merupakan inti dari kebijakan pemberdayaan ekonomi dan penciptaan kemandirian finansial masyarakat miskin. Berlandaskan teori modal manusia (Becker, 1993) dan pertumbuhan *pro-poor* (Ravallion, 2001), kebijakan diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produktif dan akses masyarakat miskin terhadap faktor produksi.

Program prioritas seperti Smart Farming, UMKM Naik Kelas, Pemberdayaan Ekonomi Pesantren, Inkubator Bisnis Desa, dan Pemberdayaan Perempuan Sukoharjo (PPS), serta Pengolahan Produk Pertanian Berbasis Rumah Tangga merupakan manifestasi strategi ini. Dari *supply side*, pemerintah memperkuat lembaga pelatihan kerja (BLK dan LPK), mengembangkan kemitraan dengan industri, serta memperluas akses pembiayaan mikro melalui KUR dan UMi. Sementara dari *demand side*, masyarakat miskin dilibatkan aktif dalam pelatihan keterampilan, kelompok usaha produktif, dan program literasi keuangan.

Strategi ini diharapkan mampu menciptakan *multiplier effect* ekonomi lokal, memperluas lapangan kerja, serta mendorong transformasi sosial dari penerima bantuan menjadi pelaku ekonomi produktif. Penerapannya juga beririsan dengan arah kebijakan bidang ketahanan pangan, pertanian modern, dan diversifikasi usaha pedesaan, menjadikan strategi ini penggerak utama pertumbuhan ekonomi berbasis rakyat.

3. Strategi Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan

Strategi ketiga diarahkan untuk mengatasi dimensi spasial kemiskinan melalui pembangunan infrastruktur dasar yang inklusif dan pemerataan pertumbuhan antarwilayah. Dalam perspektif *New Economic Geography* (Krugman, 1991), kemiskinan spasial terjadi

karena adanya perbedaan akses, keterisolasian geografis, dan minimnya konektivitas ekonomi.

Program prioritas seperti Infrastruktur Mantap Jalanku Mulus, Penataan Kawasan Kumuh, Smart Village, Desa Wisata Berkelanjutan, dan Geo-Poverty Mapping menjadi bentuk nyata intervensi spasial untuk mempersempit kesenjangan antarwilayah. Dari *supply side*, pemerintah memperkuat integrasi pembangunan antar-OPD dan mendorong pemanfaatan Dana Desa untuk pengentasan kemiskinan. Dari *demand side*, masyarakat dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan infrastruktur desa, menciptakan *ownership* terhadap pembangunan lokal.

Melalui strategi ini, intervensi sosial dan ekonomi diharapkan konvergen pada wilayah prioritas (desa miskin, perdesaan pinggiran, dan kawasan rawan sosial), menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan spasial.

Klasifikasi Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sukoharjo.

Tabel 4.2 Program Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Sukoharjo

No	Nama Program Prioritas	Keterkaitan Strategi Utama	Bidang Penanggulangan Kemiskinan	Fokus Dampak terhadap Kemiskinan	Program Prioritas Penanggulangan Kemiskinan
1	Beasiswa Sukoharjo Pintar, serta Sekolah Efektif/ Unggulan Tingkat SD	Mengurangi Beban Pengeluaran	Pendidikan	Pemerataan akses pendidikan dasar dan vokasional bagi keluarga miskin untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi	Program Pengelolaan Pendidikan
2	Sukoharjo Sehat (Jaminan Kesehatan Daerah), serta Pencegahan dan Penanganan Stunting	Mengurangi Beban Pengeluaran	Kesehatan	Penurunan beban biaya kesehatan rumah tangga miskin melalui UHC dan peningkatan layanan primer	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
3	Rumah Layak Huni dan Penataan Lingkungan Kawasan Kumuh, serta	Mengurangi Beban Pengeluaran dan Meminimalkan	Infrastruktur Dasar	Penyediaan hunian layak, air bersih, dan sanitasi aman di wilayah perdesaan tertinggal	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

No	Nama Program Prioritas	Keterkaitan Strategi Utama	Bidang Penanggulangan Kemiskinan	Fokus Dampak terhadap Kemiskinan	Program Prioritas Penanggulangan Kemiskinan
	Akses Air Minum dan Sanitasi Layak	Kantong Kemiskinan			• Program Pengembangan Perumahan • Program Kawasan Permukiman • Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum • Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional • Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah • Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase • Program Pengembangan Permukiman • Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
4	Subsidi Bunga UMKM dan Bantuan Modal Usaha Mikro	Mengurangi Beban Pengeluaran dan Meningkatkan Pendapatan	Ketenagakerjaan dan Pemberdayaan Ekonomi	Dukungan akses keuangan bagi usaha mikro untuk memperluas basis ekonomi produktif keluarga miskin	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
5	Smart Farming Sukoharjo, dan Pengolahan Produk Pertanian Berbasis Rumah Tangga	Meningkatkan Pendapatan	Ketahanan Pangan	Peningkatan produktivitas petani miskin melalui teknologi pertanian presisi dan diversifikasi komoditas	• Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

No	Nama Program Prioritas	Keterkaitan Strategi Utama	Bidang Penanggulangan Kemiskinan	Fokus Dampak terhadap Kemiskinan	Program Prioritas Penanggulangan Kemiskinan
					• Program Penyuluhan Pertanian • Program Penyuluhan Pertanian • Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian • Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan • Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
6	UMKM Naik Kelas dan Inkubator Bisnis Desa	Meningkatkan Pendapatan	Ketenagakerjaan dan Pembedayaan Ekonomi	Pengembangan wirausaha desa berbasis digital dan kemitraan pasar untuk memperluas sumber pendapatan	• Program Pengembangan UMKM • Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
7	Pemberdayaan Ekonomi Pesantren dan Pemberdayaan Perempuan Sukoharjo (PPS)	Meningkatkan Pendapatan	Sosial serta Ketenagakerjaan dan Pemberdayaan Ekonomi	Peningkatan peran lembaga sosial keagamaan dalam penciptaan usaha inklusif dan ekonomi berbasis komunitas	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
8	Desa Wisata Berkelanjutan	Meningkatkan Pendapatan dan Meminimalkan Kantong Kemiskinan	Ketenagakerjaan dan Pemberdayaan Ekonomi	Peningkatan ekonomi lokal berbasis potensi desa dan pelestarian budaya untuk memperluas lapangan kerja	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
9	Infrastruktur Mantap Jalanku Mulus	Meminimalkan Kantong Kemiskinan	Infrastruktur Dasar	Peningkatan konektivitas antarwilayah	• Program Penyelenggaraan Lalu Lintas

No	Nama Program Prioritas	Keterkaitan Strategi Utama	Bidang Penanggulangan Kemiskinan	Fokus Dampak terhadap Kemiskinan	Program Prioritas Penanggulangan Kemiskinan
	& Mobilitas Sukoharjo			miskin dengan pusat ekonomi untuk menekan disparitas spasial	dan Angkutan Jalan (LLAJ) • Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
10	Smart Village dan Sukoharjo Digital Government	Meminimalkan Kantong Kemiskinan	Sosial	Digitalisasi layanan publik dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa	• Program Peningkatan Kerja Sama Desa • Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat • Program Pencatatan Sipil • Program Pendaftaran Penduduk • Program Pendaftaran Penduduk
11	Ketahanan Pangan Berbasis Komunitas	Meningkatkan Pendapatan	Ketahanan Pangan	Penguatan ekonomi pangan lokal melalui koperasi, urban farming, dan sistem pangan berkelanjutan	• Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat • Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat • Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat • Program Pengelolaan

No	Nama Program Prioritas	Keterkaitan Strategi Utama	Bidang Penanggulangan Kemiskinan	Fokus Dampak terhadap Kemiskinan	Program Prioritas Penanggulangan Kemiskinan
					Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan • Program Penanganan Kerawanan Pangan
12	Santunan Kematian	Mengurangi Beban Pengeluaran	Sosial	Peningkatan Pemberian Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Penduduk Miskin	• Program Pemberdayaan Sosial • Program Rehabilitasi Sosial • Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

4.7. Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2026-2030

Upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sukoharjo dirancang dalam kerangka kebijakan yang komprehensif, sistematis, dan berbasis data, dengan mengacu pada prinsip *multidimensional poverty reduction*. Kemiskinan dipandang bukan sekadar kekurangan pendapatan, melainkan keterbatasan akses terhadap layanan dasar, peluang ekonomi, dan perlindungan sosial yang memadai. Karena itu, strategi kebijakan daerah diarahkan untuk menciptakan sistem penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi antara dimensi sosial, ekonomi, dan spasial, yang mencerminkan paradigma *inclusive growth* serta sejalan dengan *Sustainable Development Goals (SDGs)*, khususnya Tujuan 1 (*No Poverty*), Tujuan 8 (*Decent Work and Economic Growth*), dan Tujuan 10 (*Reduced Inequalities*). Pendekatan ini juga selaras dengan amanat kebijakan penanggulangan kemiskinan yang menempatkan pembangunan manusia dan keadilan sosial sebagai poros utama pembangunan berkelanjutan.

Dalam kerangka implementasi daerah, Kabupaten Sukoharjo membagi program penanggulangan kemiskinan ke dalam tiga kelompok besar, yaitu langsung, tidak langsung, dan penunjang, yang masing-masing mewakili dimensi intervensi berbeda namun saling melengkapi.

1. Program kelompok langsung merupakan instrumen kebijakan yang berfokus pada rumah tangga miskin sebagai penerima manfaat utama (*direct beneficiaries*), mencakup pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, pangan, dan jaminan sosial. Program ini mewakili dimensi *basic needs fulfillment* dan *social protection*, di mana pemerintah berperan aktif mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin dan memperkuat jaring pengaman sosial.
2. Program kelompok tidak langsung berfungsi sebagai penghubung antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial melalui penguatan kapasitas produktif masyarakat miskin, penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan usaha kecil, dan peningkatan keterampilan. Program ini merupakan implementasi dari paradigma *pro-poor growth*, yang menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi yang inklusif harus mampu menurunkan kemiskinan secara langsung melalui pemerataan hasil pembangunan.
3. Program kelompok penunjang berperan sebagai *governance enabler*, yaitu memperkuat sistem kelembagaan, infrastruktur, tata kelola, dan mekanisme koordinasi lintas sektor. Kelompok ini mendukung keberlanjutan kebijakan melalui penyediaan layanan publik yang adaptif, perluasan aksesibilitas wilayah, serta peningkatan efektivitas birokrasi daerah dalam menangani akar struktural kemiskinan.

Ketiga kelompok program tersebut dioperasionalkan melalui tiga strategi utama penanggulangan kemiskinan, yakni (1) *mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin*, (2) *meningkatkan pendapatan masyarakat miskin*, dan (3) *meminimalkan wilayah kantong kemiskinan*. Ketiga kelompok program yang berjalan di bawah tiga strategi utama ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sukoharjo telah menerapkan paradigma *from social assistance to social empowerment*, dari sekadar bantuan menuju pemberdayaan masyarakat miskin secara berkelanjutan sebagai landasan menuju visi daerah pada tahun 2029.

4.7.1. Program Kelompok Langsung

1. Strategi Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin

Strategi pertama dalam kelompok program langsung diarahkan dengan menekan biaya hidup masyarakat miskin melalui perluasan akses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, sanitasi, pangan, dan sosial.

- Sektor pendidikan, Program Pengelolaan Pendidikan dilaksanakan dengan berbagai sub kegiatan seperti Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik dan Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD, yang mendukung partisipasi anak usia sekolah dari keluarga miskin. Aktivitas seperti kursus keterampilan di SKB, pendampingan asesmen nasional di PKBM, dan penyediaan paket

perlengkapan PAUD di lembaga pendidikan untuk menjangkau peserta didik dari keluarga miskin. Program ini mengurangi pengeluaran rumah tangga untuk biaya pendidikan dan mendorong pemerataan akses belajar.

- Sektor perpustakaan berkontribusi melalui Program Pembinaan Perpustakaan yang menyelenggarakan Gerakan Literasi Sukoharjo (GELIS), Sosialisasi Budaya Baca, dan layanan Perpustakaan Keliling. Kegiatan literasi inklusif seperti kelas menulis, lomba membaca, dan storytelling dari kalangan anak-anak, pelajar, dan masyarakat umum. Inovasi ini bukan hanya memperluas akses literasi, tetapi juga menurunkan beban biaya keluarga miskin untuk akses pengetahuan dan sumber belajar.
- Sektor kesehatan, strategi mengurangi beban pengeluaran diwujudkan melalui Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat. Pelayanan kesehatan ibu hamil dan bayi baru lahir untuk memperoleh pemeriksaan gratis melalui Puskesmas dan DAK Non Fisik. Layanan kesehatan lansia juga, sedangkan program gizi masyarakat melalui posyandu dengan kegiatan PMT penyuluhan serta Gerakan Aksi Bergizi yang diikuti siswa putri. Diharapkan menurunkan risiko kesehatan keluarga miskin sekaligus menjaga produktivitas masyarakat.
- Sektor perumahan dan kawasan permukiman, memperkuat strategi ini dengan Program Pengembangan Perumahan *dan* Program Kawasan Permukiman. Intervensi seperti rehabilitasi rumah korban bencana dan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) didanai dari APBD, APBN, APBD Provinsi, dan CSR. Upaya ini memastikan rumah tangga miskin memiliki hunian layak dan sehat, yang secara langsung menekan beban pengeluaran rumah tangga untuk perbaikan mandiri.
- Sektor pekerjaan umum dan penataan ruang, melaksanakan pembangunan sistem air limbah (SPALD) dan air minum (SPAM) untuk menekan biaya air bersih dan sanitasi bagi rumah tangga miskin. Operasi dan pemeliharaan SPALD memperluas jangkauan layanan sanitasi terpusat, serta SPAM untuk memperbaiki akses air bersih berkelanjutan di kawasan perdesaan.
- Sektor sosial, memperkuat strategi ini dengan program rehabilitasi sosial dan perlindungan sosial melalui anak terlantar dan ODGJ direunifikasi, penyandang disabilitas dan lansia terlantar memperoleh bimbingan fisik dan sosial, serta keluarga miskin menerima santunan kematian. Disamping itu, verifikasi data fakir miskin dilakukan di tingkat desa/kelurahan dengan rumah tangga diverifikasi, yang menjadi basis penyaluran bantuan sosial terarah.

- Sektor ketahanan pangan, dengan Gerakan Pangan Murah dan Kewaspadaan Pangan melalui intervensi stabilisasi harga bahan pokok di beberapa lokasi kegiatan. Upaya ini menekan inflasi pangan rumah tangga miskin dan memastikan ketersediaan pangan dengan harga terjangkau.

Dari semua bidang tersebut, terlihat bahwa strategi mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dalam kelompok program langsung diimplementasikan secara menyeluruh melalui layanan dasar yang langsung menyasar kebutuhan pokok masyarakat miskin dan kelompok rentan. Dampaknya bukan hanya menekan pengeluaran harian, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial ekonomi rumah tangga miskin di Sukoharjo.

2. Strategi Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Miskin

Strategi kedua dalam kelompok program langsung diarahkan dengan penguatan kemampuan ekonomi masyarakat miskin agar mampu mandiri secara finansial, mencakup peningkatan keterampilan kerja, pengembangan kewirausahaan, penguatan UMKM, peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan, serta perluasan akses pasar dan pembiayaan.

- Sektor ketenagakerjaan, melaksanakan Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, dengan pelatihan berbasis kompetensi bagi pencari kerja, serta *Job Fair* untuk menempatkan pencari kerja, serta mengembangkan Unit Layanan Disabilitas (ULD) untuk memperluas inklusi kerja bagi penyandang disabilitas.
- Sektor Koperasi UKM, memainkan peran penting melalui Program Pemberdayaan Usaha Menengah dan Mikro serta Program Perlindungan Koperasi. Kegiatan Bimtek Pemasaran dan Digitalisasi untuk menjangkau UMKM, serta sosialisasi penumbuhan ekonomi keluarga berbasis koperasi bagi keluarga penerima manfaat. Intervensi ini meningkatkan kapasitas kewirausahaan dan memperkuat ekonomi keluarga miskin produktif.
- Sektor pariwisata, turut berkontribusi dengan Program Pengembangan SDM Ekonomi Kreatif dengan melatih pengelola desa wisata dan Pokdarwis, serta mensertifikasi tenaga kerja pariwisata. Kegiatan ini guna mendorong munculnya wirausaha muda di sektor pariwisata berbasis desa dan budaya lokal.
- Sektor pertanian, peningkatan pendapatan dilakukan melalui modernisasi pertanian dan distribusi pangan lokal, yaitu Pembangunan Jalan Usaha Tani, Pengendalian OPT, dan Pengawasan Mutu Pakan Ternak.

- Sektor pangan, dengan pengembangan Gapoktan LDPM, lumbung pangan masyarakat, dan kios pangan murah yang memperluas akses pangan sekaligus meningkatkan nilai tambah petani.
- Sektor perikanan, melalui Program Pengelolaan Perikanan Budidaya melaksanakan Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil, yang berorientasi pada peningkatan produktivitas kelompok pembudidaya di wilayah pedesaan.
- Sektor sosial, melalui Program Pemberdayaan Sosial dengan melatih PSKS dan relawan sosial agar berdaya secara ekonomi, serta memperkuat kelembagaan masyarakat melalui kelompok usaha bersama (KUBE).

Dengan keseluruhan intervensi lintas sektor tersebut, strategi meningkatkan pendapatan masyarakat miskin dalam kelompok program langsung di Kabupaten Sukoharjo tidak hanya menggerakkan roda ekonomi lokal, tetapi juga menciptakan sistem ekonomi rakyat yang berdaya, berkelanjutan, dan inklusif.

3. Strategi Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan

Strategi ketiga dalam kelompok program langsung diarahkan untuk mengatasi kemiskinan yang bersifat spasial melalui pendekatan pembangunan wilayah berbasis desa dan penguatan infrastruktur. Pendekatan ini menekankan konvergensi program antarperangkat daerah untuk mendorong pemerataan hasil pembangunan.

- Sektor pengendalian penduduk dan keluarga berencana, menjalankan Program Pembinaan KB dengan pelayanan MKJP bagi pasangan usia subur, serta advokasi Program Bangga Kencana bagi empat organisasi (Kemenag, Baznas, PKK, dan kampung KB). Upaya ini membantu menekan laju pertumbuhan penduduk di desa miskin ekstrem, sekaligus memperkuat kualitas keluarga.
- Sektor perumahan dan permukiman, menjadi pilar utama strategi ini. Melalui Program Penataan Kawasan Permukiman Kumuh, dengan memperbaiki rumah tidak layak huni di luar kawasan kumuh dan melakukan *pemugaran kawasan permukiman kumuh* di beberapa lokasi prioritas. Pembangunan ini tidak hanya meningkatkan kualitas lingkungan, tetapi juga mengurangi konsentrasi kemiskinan wilayah.
- Sektor pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, melalui Program Perlindungan Anak dan Program Pengarusutamaan Gender melaksanakan Sosialisasi Bullying dan Pencegahan Kekerasan Anak di SMA/SMK, serta Pemberdayaan

Perempuan Ekonomi Lokal. Kegiatan ini menurunkan risiko sosial di wilayah kantong kemiskinan dan memperkuat peran perempuan dalam pembangunan lokal.

- Sektor penanggulangan bencana, memperkuat kesiapsiagaan di wilayah rawan dengan penyediaan logistik darurat dan koordinasi mitigasi berbasis komunitas. Pendekatan ini melindungi rumah tangga miskin dari risiko kehilangan aset akibat bencana, sekaligus menjaga keberlanjutan ekonomi wilayah miskin ekstrem.

Dari keseluruhan intervensi di atas, strategi meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dalam kelompok program langsung menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Sukoharjo untuk membangun keseimbangan spasial dan sosial melalui sinergi lintas sektor dan pendekatan pembangunan inklusif berbasis wilayah.

4.7.2. Program Kelompok Tidak Langsung

1. Strategi Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin

Strategi pertama dalam kelompok program tidak langsung diarahkan pada upaya mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin dengan memperkuat akses terhadap layanan dasar publik, khususnya pada bidang pendidikan, kesehatan, pangan, administrasi kependudukan, dan penanggulangan bencana.

- Sektor pendidikan, melaksanakan program yang bertujuan meringankan beban biaya pendidikan, yaitu Program Pengelolaan Pendidikan yang mencakup kegiatan pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah nonformal, optimalisasi dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk PAUD, TK, TPA, dan satuan kesetaraan, serta pengelolaan dana BOS untuk jenjang SD dan SMP. Kegiatan seperti sosialisasi PKBM, penelusuran Anak Tidak Sekolah (ATS), serta sosialisasi pencegahan kekerasan di satuan pendidikan nonformal merupakan bentuk nyata upaya penurunan beban pengeluaran keluarga miskin melalui peningkatan partisipasi pendidikan di luar jalur formal. Program ini juga disertai pengadaan alat praktik dan peraga untuk PAUD, yang berkontribusi langsung pada peningkatan mutu pembelajaran tanpa membebani biaya operasional lembaga.
- Sektor perpustakaan, melaksanakan Program Pembinaan Perpustakaan melalui kegiatan KITAPUN SENAPAS (Kita Tata Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan), dilakukan pembinaan dan pengembangan perpustakaan sekolah, desa, dan perpustakaan khusus agar dapat memenuhi standar nasional. Kegiatan monitoring dan evaluasi perpustakaan desa serta

penyusunan Peraturan Bupati tentang pelaksanaan Perda Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perpustakaan memperkuat tata kelola literasi publik yang berperan dalam menekan biaya akses pengetahuan dan pendidikan bagi masyarakat miskin.

- Sektor kesehatan, strategi ini diperkuat melalui Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat, salah satu subkegiatannya adalah pengembangan RSUD Ir. Soekarno dengan penyediaan ruang *Cathlab* dan *CT Scan*, yang meningkatkan akses layanan kesehatan spesialisik bagi masyarakat dengan biaya rendah. Selain itu, kegiatan pengelolaan surveilans kesehatan, pertemuan monitoring, serta koordinasi TGC (Tim Gerak Cepat) Penanggulangan KLB memperkuat sistem deteksi dini penyakit dan kesiapsiagaan kesehatan publik. Selain itu, melaksanakan Penyemprotan Fogging dan Pemeriksaan Jentik Berkala (PJB) sebagai bentuk upaya preventif untuk mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan, yang merupakan beban ekonomi besar bagi rumah tangga miskin.
- Sektor pangan, melaksanakan kegiatan Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah serta Pengadaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Kabupaten, guna memastikan ketersediaan pangan dengan harga terjangkau bagi masyarakat miskin di saat krisis.
- Sektor administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, menjalankan Program Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dengan strategi jemput bola ke desa-desa, sekolah, dan kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat terdampak bencana. Pelayanan aktif seperti perekaman KTP-el bagi pemula, penerbitan dokumen kependudukan, dan konsultasi penyelesaian masalah pendaftaran dilakukan secara masif agar masyarakat tidak perlu menanggung biaya transportasi dan waktu tambahan.
- Sektor penanggulangan bencana, melaksanakan kegiatan sosialisasi, edukasi, dan pelatihan mitigasi bencana bagi masyarakat rawan bencana, serta penguatan kapasitas kawasan untuk kesiapsiagaan. Subkegiatan seperti Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten dan penyediaan sarana pusdalops menjadi bagian penting dari perlindungan sosial adaptif. Upaya ini membantu masyarakat miskin mengurangi risiko kehilangan aset akibat bencana alam maupun sosial, yang sering menjadi pemicu kemiskinan baru.

Dengan demikian, keseluruhan program dalam strategi mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dalam kelompok program tidak langsung membentuk basis perlindungan sosial daerah yang dapat menurunkan pengeluaran rumah tangga miskin melalui

layanan publik gratis, kemudahan administrasi, akses kesehatan dan pangan, serta kesiapsiagaan terhadap risiko sosial dan lingkungan.

2. Strategi Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Miskin

Strategi kedua dalam kelompok program tidak langsung diarahkan dengan pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kapasitas produktif masyarakat miskin agar mampu keluar dari jebakan kemiskinan struktural. Dalam konteks program tidak langsung, intervensi ini terdistribusi pada berbagai bidang seperti ketenagakerjaan, UMKM, perindustrian, koperasi, pertanian, perikanan, serta pemberdayaan keluarga dan masyarakat desa.

- Sektor ketenagakerjaan, melaksanakan Program Penempatan Tenaga Kerja, mencakup kegiatan pelatihan dan fasilitasi tenaga kerja disabilitas melalui Unit Layanan Disabilitas (ULD), pengawasan LPTKS, serta penyediaan informasi pasar kerja melalui Karir Hub. Program ini bertujuan meningkatkan peluang kerja bagi kelompok miskin dan rentan, termasuk kaum difabel, dengan menghubungkan mereka ke pasar tenaga kerja formal. Program Hubungan Industrial juga mendukung strategi ini melalui sosialisasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan penegakan penerapan skala upah layak bagi pekerja.
- Sektor koperasi UKM, melaksanakan Program Pemberdayaan UMKM dan Pengembangan Usaha Mikro melalui bimbingan teknis (Bimtek) pemasaran, digitalisasi UMKM, serta kemudahan perizinan, pemerintah daerah mendorong pelaku usaha kecil untuk naik kelas dan memperluas akses pasar. Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro dan Kemitraan Usaha Mikro berkontribusi terhadap peningkatan legalitas usaha dan daya saing ekonomi lokal.
- Sektor perdagangan, melaksanakan Program Pengembangan Ekspor mendorong peningkatan nilai tambah dan perluasan pasar bagi produk unggulan daerah melalui kegiatan Peningkatan Citra Produk Ekspor.
- Sektor pertanian, memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan pendapatan masyarakat miskin, khususnya di wilayah pedesaan, dengan melaksanakan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian mencakup pembangunan dan rehabilitasi jalan usaha tani, embung, jaringan irigasi, serta rumah potong hewan. Kegiatan-kegiatan ini mendukung peningkatan efisiensi dan produktivitas pertanian rakyat, sekaligus memperluas lapangan kerja berbasis desa. Selain itu, Program Penyuluhan Pertanian dan Sekolah Lapang Kelompok

Tani berperan dalam peningkatan kapasitas kelembagaan petani agar mampu mengadopsi teknologi modern.

- Sektor perikanan, melaksanakan kegiatan seperti Pendampingan dan Pelatihan Kelompok Usaha Budidaya Ikan dengan mendorong peningkatan pengetahuan dan teknologi bagi kelompok budidaya kecil, sehingga meningkatkan produktivitas dan pendapatan pembudidaya ikan. Program pengolahan hasil perikanan juga diarahkan untuk memperluas nilai tambah produksi lokal.
- Sektor pengendalian penduduk dan keluarga berencana, melaksanakan Program Pembinaan Keluarga Berencana dan Program Ketahanan Keluarga Sejahtera melalui pelatihan teknis bagi kader BKB, BKR, BKL, dan UPPKS. Kegiatan ini memperkuat ekonomi keluarga miskin melalui usaha kecil berbasis rumah tangga, serta mengembangkan kelompok wirausaha perempuan dan remaja.
- Sektor pemberdayaan masyarakat dan desa, melaksanakan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan BUMDes untuk memperkuat ekonomi desa melalui pelatihan pengelolaan keuangan, pembentukan koperasi desa, serta fasilitasi kerja sama antar desa. Program-program ini memberikan ruang partisipasi bagi masyarakat miskin untuk menjadi pelaku ekonomi lokal yang mandiri dan produktif.

Secara keseluruhan, strategi meningkatkan pendapatan masyarakat miskin dalam kelompok program tidak langsung diimplementasikan secara sistematis melalui pendekatan multisektor yang menekankan peningkatan kapasitas, produktivitas, dan kemandirian ekonomi. Pendekatan ini memperkuat arah kebijakan ketiga tentang peningkatan kapasitas produktif masyarakat miskin, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang pro-rakyat miskin (*pro-poor growth*).

3. Strategi Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan

Strategi ketiga dalam kelompok program tidak langsung diarahkan dengan berfokus pada dimensi spasial kemiskinan, yaitu pemerataan pembangunan antarwilayah dan penurunan ketimpangan akses terhadap infrastruktur dasar. Dalam konteks program tidak langsung, berbagai kegiatan di bidang infrastruktur, permukiman, perdesaan, dan ketahanan pangan menjadi instrumen utama.

- Sektor pekerjaan umum dan penataan ruang, melaksanakan Program Pengelolaan Sumber Daya Air melalui rehabilitasi jaringan irigasi permukaan dan perbaikan sarana pengairan pertanian untuk memperkuat ketahanan ekonomi desa pertanian.

- Sektor perumahan dan kawasan permukiman, melaksanakan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) serta Pemugaran Permukiman Kumuh untuk mencegah tumbuhnya kawasan miskin baru. Selain itu, melaksanakan Verifikasi dan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menjadi upaya untuk memastikan kepemilikan infrastruktur publik secara legal oleh pemerintah daerah. Kebijakan ini mendukung arah kebijakan keempat tentang pemerataan infrastruktur yang inklusif, karena meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mengurangi risiko sosial, serta memperkuat konektivitas ekonomi wilayah tertinggal.
- Sektor pemberdayaan masyarakat dan desa, melaksanakan Program Penataan Desa dan Peningkatan Kerja Sama Antar Desa melalui fasilitasi penataan kewenangan desa, pemutakhiran data IDM, peningkatan Sistem Informasi Desa (SID), serta pembentukan BUMDesma dan kerja sama antar desa. Pendekatan ini berfungsi sebagai strategi spasial untuk mengurangi ketimpangan antarwilayah melalui penguatan ekonomi perdesaan berbasis potensi lokal.
- Sektor ketahanan pangan, melaksanakan Program Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi untuk Kemandirian Pangan dilakukan dengan pembangunan dan bantuan fisik lumbung pangan masyarakat, serta penguatan infrastruktur kedaulatan pangan di desa. Upaya ini juga dikaitkan dengan Program Diversifikasi Pangan Lokal dan Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah agar ketahanan pangan di wilayah rentan dapat terjaga sepanjang tahun.

Kombinasi antara pembangunan infrastruktur dasar, pengembangan ekonomi desa, dan ketahanan pangan lokal ini tidak hanya menurunkan kesenjangan spasial, tetapi juga memperkuat integrasi ekonomi antarwilayah. Dengan demikian, strategi meminimalkan kantong kemiskinan dalam kelompok program tidak langsung berfungsi sebagai pengungkit pertumbuhan inklusif dan berkeadilan spasial, sekaligus menjadi prasyarat penting bagi penghapusan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Sukoharjo.

4.7.3. Program Kelompok Penunjang

1. Strategi Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin

Strategi pertama pada kelompok program penunjang diarahkan untuk menekan beban biaya hidup rumah tangga miskin melalui penyediaan layanan dasar publik yang berkualitas, terjangkau, dan

inklusif, khususnya pada bidang pendidikan, kesehatan, perhubungan, administrasi kependudukan, perdagangan, dan infrastruktur dasar.

- Sektor pendidikan, melaksanakan Program Pengelolaan Pendidikan mencakup pembangunan laboratorium, rehabilitasi ruang kelas, serta pembinaan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) bagi guru dan siswa pada jenjang SD dan SMP. Kegiatan pelatihan pendidik anak berkebutuhan khusus dan penyusunan kompetensi dasar muatan lokal untuk PAUD menjadi langkah konkret dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif dan menekan beban biaya tambahan bagi keluarga miskin. Program ini dilengkapi dengan kegiatan pembangunan ruang guru, ruang kelas baru, serta rehabilitasi sarana dan prasarana sekolah di berbagai desa. Semua kegiatan tersebut tidak hanya meningkatkan kualitas pendidikan tetapi juga mengurangi pengeluaran rumah tangga dalam pembiayaan fasilitas belajar anak-anak mereka. Selain itu, Pendataan dan Penataan Distribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan berperan penting dalam pemerataan kualitas layanan pendidikan. Melalui kegiatan penataan distribusi guru, pemerintah daerah memastikan ketersediaan tenaga pendidik yang merata di semua wilayah. Hal ini tidak hanya memperbaiki mutu pendidikan dasar tetapi juga mengurangi biaya transportasi dan akses pendidikan bagi siswa di desa.
- Sektor perpustakaan, memperkuat dimensi literasi publik melalui Program Pembinaan Perpustakaan, yang melaksanakan peningkatan kapasitas pustakawan dan pengadaan bahan bacaan tercetak. Upaya ini memperluas akses informasi dan pendidikan gratis bagi masyarakat miskin.
- Sektor kesehatan, melaksanakan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat. Kegiatan pengadaan sarana alat kesehatan seperti Cathlab dan CT-Scan meningkatkan akses layanan medis spesialisik dengan biaya rendah, sedangkan pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat melalui bantuan premi bagi peserta JKN dan PBP kelas 3 aktif menjamin perlindungan finansial kesehatan bagi masyarakat miskin. Kegiatan promosi kesehatan, seperti Gerakan Aksi Bergizi di sekolah dan penyediaan media promosi kesehatan berfungsi memperkuat kesadaran preventif di kalangan masyarakat miskin. Selain itu, pengembangan BLUD rumah sakit serta pelaksanaan akreditasi fasilitas kesehatan memastikan kualitas pelayanan yang setara antarwilayah.
- Sektor perhubungan, memainkan peran signifikan dalam menekan biaya transportasi publik melalui penyediaan angkutan

umum, pembangunan terminal tipe C, dan penyelenggaraan program mudik gratis yang menurunkan beban mobilitas keluarga miskin. Melalui kegiatan pengawasan ketersediaan angkutan umum, memastikan pelayanan transportasi yang aman dan terjangkau hingga wilayah perdesaan.

- Sektor perdagangan, melaksanakan Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting mendukung stabilitas harga pasar melalui pemantauan stok dan distribusi barang serta pengawasan pupuk bersubsidi, sehingga keluarga miskin terlindung dari fluktuasi harga yang memicu inflasi pangan.
- Sektor administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, menjalankan berbagai sub kegiatan seperti pendataan penduduk rentan, sosialisasi pendaftaran, bimbingan teknis, dan pengelolaan blangko dokumen kependudukan. Layanan jemput bola ke sekolah, kampung, dan lembaga sosial mempercepat penerbitan dokumen kependudukan tanpa biaya tambahan, yang sangat membantu keluarga miskin dalam mengakses layanan publik lainnya. Program Pencatatan Sipil turut memperkuat layanan dasar melalui pencatatan peristiwa penting, sosialisasi kepada masyarakat, dan kerja sama dengan perguruan tinggi serta organisasi masyarakat sipil. Semua kegiatan tersebut menekan biaya administrasi publik dan meningkatkan efektivitas inklusi sosial melalui dokumen legal yang sah.
- Sektor pekerjaan umum dan penataan ruang, melaksanakan penyediaan air minum, dalam menekan beban pengeluaran rumah tangga.
- Sektor perumahan dan kawasan permukiman, melaksanakan program pada kelompok penunjang seperti perencanaan PSU perumahan, serta penyerahan sarana umum perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Kegiatan verifikasi PSU dan pembangunan permukiman kumuh diarahkan untuk meningkatkan akses hunian layak sekaligus menekan beban pengeluaran rumah tangga terhadap biaya tempat tinggal.
- Sektor keuangan daerah, menyalurkan subsidi bunga bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang berstatus miskin atau rentan miskin. Kebijakan subsidi bunga ini berfungsi sebagai *fiscal transfer* langsung yang mengurangi beban pembiayaan pelaku usaha kecil agar tetap produktif.
- Sektor penanggulangan bencana, menjalankan kegiatan penanggulangan bencana melalui pembentukan kampung siaga dan penguatan kapasitas TRC untuk memastikan perlindungan

aset masyarakat miskin dari risiko bencana yang dapat memicu kemiskinan baru.

Secara umum, seluruh kegiatan strategi ini dalam kelompok program penunjang berfungsi memperluas cakupan perlindungan sosial, memastikan keterjangkauan harga kebutuhan pokok, dan menyediakan layanan publik gratis yang memperkuat daya tahan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah.

2. Strategi Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Miskin

Strategi kedua pada kelompok program penunjang diarahkan dengan menekankan peningkatan kapasitas produktif masyarakat miskin melalui pemberdayaan ekonomi, peningkatan keterampilan, dan perluasan akses terhadap sumber daya produktif di berbagai bidang: koperasi, ketenagakerjaan, industri, pariwisata, pertanian, dan pemberdayaan keluarga.

- Sektor koperasi UKM, melaksanakan berbagai program kelompok penunjang seperti Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam, Pengawasan Koperasi, serta Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi. Kegiatan pelatihan dasar koperasi, bimtek penyusunan laporan RAT, dan pendampingan restrukturisasi koperasi diarahkan untuk memperkuat kelembagaan ekonomi rakyat yang menjadi tulang punggung penghidupan masyarakat miskin. Di sisi lain, Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi memastikan bahwa koperasi simpan pinjam berjalan sehat dan transparan, sehingga akses keuangan mikro bagi kelompok miskin dapat dijaga keberlanjutannya.
- Sektor perindustrian dan tenaga kerja, mengimplementasikan Program Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat melalui pelatihan wirausaha baru dan peningkatan kapasitas SDM perusahaan, termasuk di sektor pabrik rokok yang didukung DBHCHT. Program ini memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja miskin. Sementara itu, Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) memperkuat basis data industri untuk menghubungkan pelaku usaha kecil dengan rantai pasok nasional, sehingga meningkatkan efisiensi dan peluang kemitraan.
- Sektor pariwisata, melaksanakan promosi pariwisata berbasis media digital untuk meningkatkan kunjungan wisata dan memperluas pendapatan pelaku usaha kecil sektor jasa di sekitar destinasi wisata.
- Sektor pertanian, menjadi basis peningkatan pendapatan bagi masyarakat miskin pedesaan, melaksanakan Program

Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan untuk melindungi hasil panen dan mencegah kerugian petani miskin. Kegiatan pendampingan penggunaan alat pertanian (alsintan) serta pengawasan produk hewan dan hasil perikanan menjamin keamanan produksi sekaligus efisiensi usaha tani.

- Sektor ketahanan pangan, melaksanakan Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani (KWT) dalam pemanfaatan pekarangan dan diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal yang tidak hanya meningkatkan ketersediaan pangan tetapi juga menambah penghasilan keluarga.
- Sektor pengendalian penduduk dan keluarga berencana, melaksanakan Program Peningkatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, UPPKS) dan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera mengedepankan pelatihan bagi kader Tribina, sosialisasi kelompok UPPKA, serta promosi ekonomi keluarga berbasis komunitas perempuan. Upaya ini menumbuhkan wirausaha keluarga miskin sekaligus memperkuat kohesi sosial.
- Sektor pemberdayaan masyarakat dan desa, mendukung strategi ini melalui Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dan BPD serta Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa agar desa memiliki kapasitas manajerial dalam pengelolaan ekonomi lokal.

Dengan demikian, strategi peningkatan pendapatan dalam kelompok program penunjang menekankan transformasi struktural ekonomi rakyat melalui pelatihan, pendampingan, dan peningkatan akses pasar.

3. Strategi Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan

Strategi ketiga berorientasi pada pengurangan kesenjangan spasial dan pembangunan wilayah inklusif, dengan fokus pada perumahan, infrastruktur dasar, perdesaan, serta pengendalian kawasan kumuh.

- Sektor perumahan dan kawasan permukiman, melaksanakan Program Kawasan Permukiman dan Program PSU Perumahan melalui kegiatan verifikasi dan penyerahan PSU perumahan MBR, penyusunan dokumen perencanaan PSU, serta pembangunan fasilitas umum yang menunjang fungsi hunian. Upaya ini meningkatkan kualitas permukiman di wilayah padat penduduk dan berisiko tinggi terhadap kemiskinan.
- Sektor pekerjaan umum dan penataan ruang, memperkuat akses air bersih melalui penyusunan rencana teknis Sistem Penyediaan

Air Minum (SPAM), yang menjadi prasyarat bagi kesejahteraan dasar di wilayah perdesaan.

- Sektor pemberdayaan masyarakat dan desa, berperan penting dalam memperkecil kesenjangan antarwilayah melalui Program Penataan Desa *dan* Administrasi Pemerintahan Desa. Kegiatan seperti fasilitasi kewenangan desa, penyusunan profil desa, pengawasan peraturan desa, serta penyelenggaraan musyawarah desa diarahkan untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan desa dalam perencanaan pembangunan berbasis data dan partisipatif. Melalui pendekatan ini, wilayah perdesaan dapat merancang prioritas pembangunan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal, memperkuat arah kebijakan keempat tentang infrastruktur dasar yang berkeadilan spasial.
- Sektor ketahanan pangan, menekan risiko kemiskinan wilayah melalui penyusunan peta ketahanan pangan, pemantauan stok pangan, serta pemberdayaan kelompok masyarakat dalam konsumsi pangan lokal. Serta mengimplementasikan survei konsumsi dan koordinasi evaluasi pola pangan untuk memetakan ketimpangan ketersediaan pangan antar kecamatan. Kegiatan ini berkontribusi terhadap stabilitas sosial-ekonomi di daerah rawan pangan.
- Sektor penanggulangan bencana, memiliki peran strategis dalam mencegah munculnya kantong kemiskinan baru akibat bencana alam maupun sosial, melaksanakan Program Penanganan Bencana melalui kegiatan pembentukan Kampung Siaga Bencana dan pelatihan mitigasi di tingkat desa, serta memperkuat kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) dan kelembagaan bencana untuk mempercepat respon darurat. Upaya ini secara langsung berkontribusi pada ketahanan masyarakat terhadap guncangan sosial ekonomi dan lingkungan.

Dari keseluruhan intervensi, strategi meminimalkan wilayah kantong kemiskinan menegaskan pentingnya pembangunan berbasis wilayah (area-based development) dengan pendekatan lintas sektor dan partisipatif. Peningkatan kualitas perumahan, infrastruktur dasar, pemerintahan desa, dan ketahanan pangan berfungsi saling melengkapi dalam menciptakan kesejahteraan yang merata di seluruh wilayah Kabupaten Sukoharjo.

Tabel 4.3 Kerangka Pendanaan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2026-2030

No.	Strategi dan Kelompok Program	Kerangka Pendanaan (Rupiah)				
		2026	2027	2028	2029	2030
I.	Strategi Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin	378.537.867.069	344.959.657.028	342.866.315.337	340.827.955.725	337.692.479.562
	a. Program Kelompok Langsung	34.938.754.500	35.365.076.134	35.708.034.071	29.728.988.704	21.444.941.189
	b. Program Kelompok Tidak Langsung	177.610.837.340	143.425.869.953	140.811.021.633	143.324.924.788	148.381.385.140
	c. Program Kelompok Penunjang	165.988.275.229	166.168.710.941	166.347.259.633	167.774.042.233	167.866.153.233
II.	Strategi Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Miskin	49.332.994.804	51.980.780.243	49.771.443.709	50.400.696.209	47.112.081.209
	a. Program Kelompok Langsung	17.258.049.800	19.206.547.000	18.386.899.500	18.580.252.000	15.318.537.000
	b. Program Kelompok Tidak Langsung	16.397.006.624	17.097.540.739	15.349.150.619	15.441.150.619	13.803.150.619
	c. Program Kelompok Penunjang	15.677.938.380	15.676.692.504	16.035.393.590	16.379.293.590	17.990.393.590
III.	Strategi Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	32.264.736.400	32.493.518.900	32.746.214.900	32.522.328.500	33.044.077.960
	a. Program Kelompok Langsung	6.194.492.400	6.214.492.400	6.239.492.400	6.279.492.400	6.289.492.400
	b. Program Kelompok Tidak Langsung	11.990.660.000	12.024.942.400	12.081.343.640	12.153.210.004	12.203.338.004
	c. Program Kelompok Penunjang	14.079.584.000	14.254.084.100	14.425.378.860	14.089.626.096	14.551.247.556
	Total	460.135.598.273	429.433.956.171	425.383.973.946	423.750.980.434	417.848.638.731

4.7.4. Program *Public-Private Partnership*

Penguatan Program *Public-Private Partnership* (PPP) dalam Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2026–2030 merupakan langkah strategis untuk memperluas kapasitas fiskal dan kelembagaan daerah dalam menjawab kompleksitas persoalan kemiskinan yang bersifat multidimensi. Sejalan dengan kerangka Program Intervensi Langsung, Program Intervensi Tidak Langsung, dan Program Intervensi Penunjang, PPP diposisikan sebagai mekanisme pendanaan dan pelaksanaan komplementer yang memperkuat efektivitas intervensi pemerintah daerah melalui keterlibatan aktor non-pemerintah, khususnya lembaga filantropi dan dunia usaha. Pendekatan ini menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan tidak semata menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan merupakan agenda bersama yang menuntut kolaborasi lintas sektor secara terencana dan terarah.

Dalam konteks Kabupaten Sukoharjo, dua pilar utama PPP yang relevan dan telah berjalan adalah program filantropi sosial melalui BAZNAS dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP/CSR). Program PPP-BAZNAS Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024–2025 menunjukkan bahwa BAZNAS berperan signifikan dalam mendukung intervensi langsung, melalui penyaluran bantuan sosial, bantuan pangan, bantuan biaya hidup, layanan kesehatan, pendidikan, serta penanganan kondisi darurat bagi kelompok fakir dan miskin. Program-program BAZNAS juga berkontribusi pada intervensi tidak langsung melalui penguatan kapasitas ekonomi rumah tangga miskin, seperti bantuan modal usaha mikro, pengembangan usaha produktif, dan dukungan sarana ekonomi skala kecil yang berorientasi pada keberlanjutan pendapatan mustahik. Dengan demikian, BAZNAS tidak hanya berfungsi sebagai *social safety net*, tetapi juga sebagai instrumen transisi dari perlindungan sosial menuju pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin.

Sementara itu, implementasi TJSLP di Kabupaten Sukoharjo menunjukkan bahwa dunia usaha telah menjadi mitra potensial dalam mendukung intervensi tidak langsung dan penunjang. Program TJSLP mencakup bidang pendidikan, kesehatan, sosial-keagamaan, pemberdayaan ekonomi, lingkungan hidup, serta infrastruktur dasar, yang secara substantif berkorelasi dengan faktor-faktor penentu kemiskinan struktural. Dalam kaitannya dengan Program Intervensi Tidak Langsung, TJSLP berkontribusi pada peningkatan akses layanan dasar dan penguatan modal manusia masyarakat miskin. Sedangkan dalam kaitannya dengan Program Intervensi Penunjang, TJSLP mendukung penciptaan lingkungan sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang kondusif bagi keberlanjutan penurunan kemiskinan, termasuk melalui pembangunan sarana-prasarana, penguatan komunitas, serta

pengembangan wilayah berbasis kebutuhan lokal. Keberadaan Forum TJSLP dengan struktur kelembagaan lintas sektor memberikan dasar institusional yang kuat bagi integrasi program CSR dengan prioritas pembangunan daerah, termasuk agenda penanggulangan kemiskinan ekstrem.

Integrasi Program PPP dalam Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2026–2030 diarahkan untuk memastikan bahwa seluruh kontribusi non-APBD tersebut berjalan selaras, terarah, dan berbasis lokasi prioritas, sebagaimana telah ditetapkan dalam kerangka kebijakan RPKD. PPP tidak ditempatkan sebagai program yang berdiri sendiri, melainkan sebagai pengungkit (leverage) yang memperkuat capaian program intervensi langsung, tidak langsung, dan penunjang. Oleh karena itu, penguatan mekanisme koordinasi, integrasi data sasaran (DTKS/Regsosek/P3KE/DTSEN), serta sistem monitoring dan evaluasi lintas aktor menjadi prasyarat utama agar PPP mampu memberikan dampak nyata dan terukur terhadap penurunan kemiskinan.

Dengan pendekatan tersebut, Program Public–Private Partnership dalam RPKD Kabupaten Sukoharjo 2026–2030 diharapkan mampu memperluas jangkauan intervensi, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, serta memperkuat keberlanjutan hasil penanggulangan kemiskinan. Kolaborasi antara pemerintah daerah, BAZNAS, dan dunia usaha melalui TJSLP menjadi fondasi penting dalam membangun sistem penanggulangan kemiskinan yang inklusif, adaptif, dan berorientasi pada pencapaian kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

BAB V

LOKASI PRIORITAS

5.1. Lokasi Prioritas Utama (*Model Village*) Penanggulangan Kemiskinan Terpadu

Penetapan Desa/Kelurahan Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2026 di Kabupaten Sukoharjo mencerminkan pendekatan spasial-integratif berbasis dimensi kesejahteraan mendukung kebijakan Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Sukoharjo. Strategi ini mengacu pada tiga strategi utama, yaitu: (1) mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, (2) meningkatkan pendapatan masyarakat miskin dan rentan, serta (3) meminimalkan wilayah kantong kemiskinan. Ketiga strategi tersebut secara teoritik merupakan implementasi dari konsep *capability approach* (Sen, 2006), menempatkan kemiskinan sebagai deprivasi multidimensi atas peluang hidup layak, termasuk pendidikan, kesehatan, dan lingkungan produktif.

Analisis spasial menunjukkan bahwa dari 11 kecamatan prioritas, sebagian besar desa/kelurahan berulang muncul sebagai prioritas pada lebih dari satu bidang tematik. Hal ini menunjukkan adanya tumpang tindih (*overlap*) antar dimensi kemiskinan, yang dalam teori Alkire-Foster (2011) disebut sebagai *joint deprivation*. Seperti, Kecamatan Gatak memiliki Desa Trosemi dan Wironanggan yang konsisten muncul di bidang pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, sosial, ketenagakerjaan, dan infrastruktur dasar, menandakan kompleksitas deprivasi yang tinggi baik dari sisi akses pelayanan dasar maupun produktivitas tenaga kerja. Pola yang sama tampak di Bendosari (Jagan-Mertan) dan Nguter (Tanjungrejo) yang menggambarkan karakter *pockets of poverty* yang bersifat persisten dan memerlukan intervensi terpadu lintas-sektor.

- Pada strategi pertama, yaitu mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, keterkaitan lintas bidang terlihat kuat di kecamatan dengan karakter semi-urban seperti Baki, Grogol, dan Mojolaban, di mana faktor utama kemiskinan bersumber dari biaya akses pendidikan, kesehatan, dan pangan. Desa Jetis dan Mancasan di Kecamatan Baki, misalnya, masuk dalam prioritas bidang kesehatan dan ketahanan pangan karena memiliki prevalensi keluarga miskin dengan risiko stunting dan tingkat pengeluaran pangan yang tinggi. Secara teoritis, kondisi ini sejalan dengan model *household budget constraint* (Becker, 1995), di mana keterbatasan pendapatan menyebabkan proporsi belanja pangan dan kesehatan menjadi beban utama rumah tangga miskin. Sementara itu, di Kecamatan Grogol, Desa Pondok dan Kwarasan menunjukkan keterkaitan antara rendahnya partisipasi sekolah anak miskin dan tingginya biaya kesehatan serta pangan. Fenomena ini mengindikasikan pentingnya program *conditional cash transfer* (CCT) seperti PKH dan

Bansos Pangan dalam menurunkan beban pengeluaran secara simultan lintas dimensi.

- Pada strategi kedua, peningkatan pendapatan masyarakat miskin, menunjukkan konsentrasi lokasi prioritas di wilayah dengan potensi tenaga kerja produktif tetapi belum terserap secara optimal. Contohnya, Kecamatan Polokarto (Desa Kemasan dan Rejosari) dan Mojolaban (Desa Palur) masuk dalam prioritas bidang ketenagakerjaan dengan tingkat pengangguran usia produktif tinggi di kelompok kesejahteraan 40 persen terbawah. Menurut teori *labor market segmentation* (Fields, 2012), kondisi ini menggambarkan keterbatasan akses terhadap pekerjaan formal dan tingginya proporsi pekerja sektor informal yang berpendapatan rendah. Oleh karena itu, intervensi peningkatan pendapatan di wilayah ini tidak hanya menekankan pelatihan vokasional dan padat karya, tetapi juga perlu memperkuat rantai nilai ekonomi lokal (*local value chain development*) melalui UMKM dan usaha rumah tangga berbasis komunitas. Dengan demikian, peningkatan pendapatan dapat berlangsung secara berkelanjutan dan tidak bergantung sepenuhnya pada bantuan sosial.
- Pada strategi ketiga, meminimalkan wilayah kantong kemiskinan, memperlihatkan konsentrasi di wilayah perdesaan dengan backlog rumah tidak layak huni (RTLH), keterbatasan akses air minum layak, dan sanitasi dasar. Desa seperti Watubonang (Tawang Sari), Tanjungrejo (Nguter), dan Mertan (Bendosari) muncul konsisten dalam bidang infrastruktur dasar, menunjukkan adanya kesenjangan spasial dalam penyediaan layanan dasar. Menurut teori *new economic geography* (Krugman, 1991), defisit infrastruktur di wilayah perdesaan menyebabkan terjadinya *spatial inequality* akibat rendahnya aksesibilitas terhadap pasar dan layanan publik, sehingga menahan mobilitas ekonomi masyarakat miskin. Oleh karena itu, integrasi program perumahan, sanitasi, dan air minum dengan pengembangan ekonomi lokal menjadi kunci untuk mengatasi kemiskinan struktural di wilayah-wilayah ini.

Hasil analisis keterkaitan lintas bidang juga menunjukkan bahwa beberapa desa memiliki potensi untuk dijadikan lokasi prioritas utama (*model village*) penanggulangan kemiskinan terpadu. Seperti, Desa Trosemi (Gatak), Desa Jagan (Bendosari), Desa Watubonang (Tawang Sari), dan Desa Tanjungrejo (Nguter) adalah contoh desa yang secara simultan muncul hampir semua bidang tematik (prioritas 1). Secara konseptual, intervensi di desa-desa ini sejalan dengan pendekatan *area-based development* yang menekankan pentingnya sinergi program sektoral di satu wilayah agar efek pengurangan kemiskinan lebih terukur dan cepat. Selain itu, dari perspektif evaluasi kebijakan publik, keterpaduan ini memungkinkan pengukuran dampak (*impact evaluation*) berbasis kemiskinan multidimensi.

Dengan demikian, penetapan lokasi prioritas utama tidak hanya berfungsi sebagai daftar administratif, tetapi sebagai peta spasial intervensi

terintegrasi yang menghubungkan dimensi konsumsi, pendapatan, dan akses layanan dasar. Melalui sinergi lintas-sektor dan pendekatan berbasis wilayah, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo diharapkan mampu mempercepat penurunan tingkat kemiskinan ekstrem menuju target 0 persen yang mendukung pencapaian *SDGs poin 1: No Poverty*.

Tabel 5.1 Lokasi Prioritas Utama (*Model Village*) Penanggulangan Kemiskinan Terpadu

No	Kecamatan	Desa Prioritas 2026	Desa/Kelurahan Prioritas 1					
			Pendidikan	Kesehatan	Ketahanan Pangan	Sosial	Ketenagakerjaan	Infrastruktur Dasar
1	Baki	Jetis; Mancasan; Menuran; Purbayan; Siwal	—	Jetis	Jetis; Mancasan	Jetis; Mancasan	—	—
2	Bendosari	Jagan; Mertan	Jagan	Jagan	Jagan; Mertan	Jagan; Mertan	—	Jagan; Mertan
3	Bulu	Lengking; Malangan	—	Malangan	Lengking; Malangan	Lengking; Malangan	—	Lengking; Malangan
4	Gatak	Blimbing; Trosemi; Wironanggan	Blimbing; Trosemi; Wironanggan	Trosemi; Wironanggan	Trosemi; Blimbing; Wironanggan	Trosemi; Blimbing; Wironanggan	Trosemi	Trosemi
5	Grogol	Kadokan; Kwarasan; Pandeyan; Parangjoro; Pondok; Sanggrahan	Pondok	Kwarasan; Kadokan; Parangjoro; Pondok	Kadokan; Kwarasan; Parangjoro; Pondok; Sanggrahan	Kadokan; Kwarasan; Parangjoro; Pondok; Sanggrahan	Kwarasan; Sanggrahan	Parangjoro
6	Kartasura	Ngadirejo	Ngadirejo	Ngadirejo	Ngadirejo	Ngadirejo	Ngadirejo	—
7	Mojolaban	Bekonang; Cangkol; Dukuh; Gadingan; Joho; Plumbon; Tegalmade	Dukuh; Cangkol; Plumbon; Palur	Plumbon; Gadingan; Palur	Cangkol; Dukuh; Plumbon; Tegalmade; Gadingan	Cangkol; Dukuh; Plumbon; Tegalmade; Gadingan	Palur	—
8	Nguter	Daleman; Tanjungrejo	Tanjungrejo	—	Tanjungrejo	Tanjungrejo	—	Tanjungrejo
9	Polokarto	Jatisobo; Kemasari; Polokarto; Rejosari	Kemasari	—	Rejosari; Kemasari; Polokarto; Jatisobo	Rejosari; Kemasari; Polokarto; Jatisobo	Kemasari	Kemasari; Rejosari; Polokarto
10	Sukoharjo	Sonorejo; Sukoharjo (Kel.)	—	—	Sonorejo; Sukoharjo	Sonorejo; Sukoharjo	Sukoharjo	Sonorejo
11	Tawang Sari	Watubonang	Watubonang	Watubonang	Watubonang	Watubonang	—	Watubonang

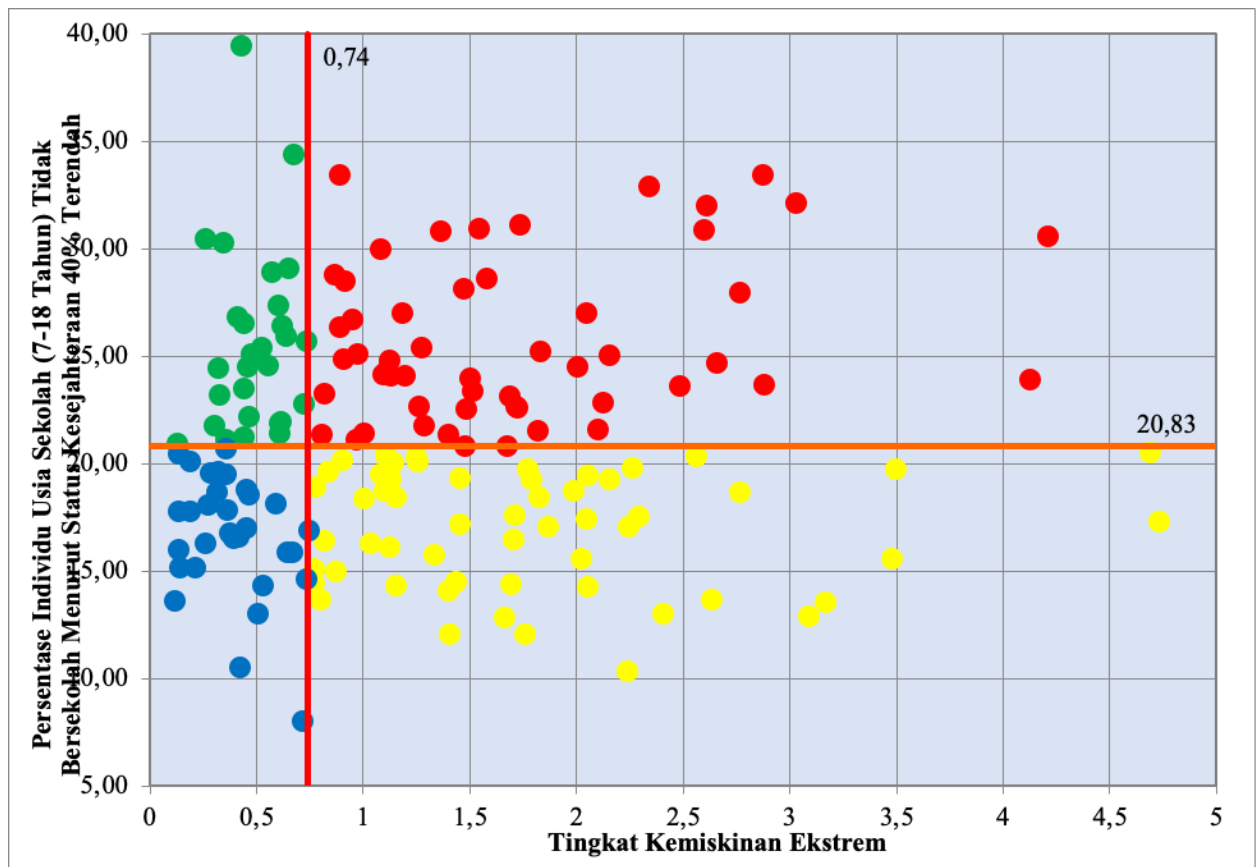
5.2. Lokasi Prioritas Menurut Strategi Utama Penanggulangan Kemiskinan

5.2.1. Lokasi Prioritas Strategi Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin (Bidang Pendidikan, Kesehatan, Ketahanan Pangan dan Sosial)

Pelaksanaan program untuk penurunan beban pengeluaran diutamakan bagi penduduk miskin ekstrem diutamakan bagi lokasi desa/kelurahan prioritas untuk percepatan penurunan kemiskinan ekstrem pada bidang pendidikan, kesehatan dan ketahanan pangan, serta sosial.

A. Lokasi Prioritas Bidang Pendidikan

Berdasarkan analisis kuadran, desa/kelurahan prioritas untuk percepatan penurunan kemiskinan ekstrem pada bidang pendidikan dapat dikonsentrasikan pada desa/kelurahan yang termasuk prioritas 1/merah, terdapat sebanyak 53 desa/kelurahan.



Keterangan:

- Prioritas 1 : Kemiskinan Ekstrem Tinggi dan Persentase Individu Usia Sekolah (7-18 Tahun) Tidak Bersekolah Menurut Status Kesejahteraan 40% Terendah Tinggi
- Prioritas 2 : Kemiskinan Ekstrem Tinggi dan Persentase Individu Usia Sekolah (7-18 Tahun) Tidak Bersekolah Menurut Status Kesejahteraan 40% Terendah Rendah
- Prioritas 3 : Kemiskinan Ekstrem Rendah dan Persentase Individu Usia Sekolah (7-18 Tahun) Tidak Bersekolah Menurut Status Kesejahteraan 40% Terendah Tinggi
- Prioritas 4 : Kemiskinan Ekstrem Rendah dan Persentase Individu Usia Sekolah (7-18 Tahun) Tidak Bersekolah Menurut Status Kesejahteraan 40% Terendah Rendah

Gambar 5.1 Grafik Desa/Kelurahan Prioritas Untuk Percepatan Penurunan Kemiskinan Ekstrem Pada Bidang Pendidikan

Selengkapnya persebaran desa/kelurahan prioritas untuk percepatan penurunan kemiskinan ekstrem pada bidang pendidikan dari sisi kemiskinan ekstrem dan individu usia sekolah (7-18 tahun) tidak bersekolah menurut status kesejahteraan 40% terendah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.2 Desa/Kelurahan Prioritas Untuk Percepatan Penurunan Kemiskinan Ekstrem Pada Bidang Pendidikan

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Indikator Utama	Indikator Pendukung	Prioritas
			Kemiskinan Ekstrem	Persentase Individu Usia Sekolah (7-18 Tahun) Tidak Bersekolah Menurut Status Kesejahteraan 40% Terendah	
1.	Nguter	Jangglengan	4,21	30,60	1
2.	Polokarto	Kenokorejo	4,12	23,95	1
3.	Bendosari	Mojorejo	3,02	32,16	1
4.	Gatak	Krajan	2,88	23,71	1
5.	Gatak	Trosemi	2,87	33,51	1
6.	Bendosari	Jagan	2,76	27,98	1
7.	Bendosari	Puhgogor	2,65	24,73	1
8.	Tawangsari	Majasto	2,60	32,08	1
9.	Polokarto	Ngombakan	2,59	30,89	1
10.	Grogol	Pondok	2,48	23,67	1
11.	Bendosari	Cabeyan	2,34	32,97	1
12.	Nguter	Serut	2,15	25,06	1
13.	Polokarto	Kemasan	2,12	22,89	1
14.	Weru	Karangwuni	2,10	21,63	1
15.	Nguter	Pengkol	2,04	27,03	1
16.	Bulu	Bulu	2,00	24,56	1
17.	Weru	Alasombo	1,83	25,27	1
18.	Baki	Bakipandeyan	1,81	21,56	1
19.	Tawangsari	Grajegan	1,73	31,16	1
20.	Weru	Karakan	1,72	22,66	1
21.	Gatak	Blimbing	1,72	22,69	1
22.	Bulu	Karangasem	1,68	23,20	1
23.	Grogol	Banaran	1,67	20,85	1
24.	Weru	Tawang	1,57	28,67	1
25.	Gatak	Jati	1,54	31,00	1
26.	Gatak	Wironanggan	1,51	23,41	1
27.	Mojolaban	Dukuh	1,50	23,99	1
28.	Tawangsari	Watubonang	1,48	22,59	1
29.	Sukoharjo	Dukuh	1,47	20,84	1
30.	Grogol	Teluk	1,47	28,17	1
31.	Polokarto	Mranggen	1,40	21,41	1
32.	Nguter	Kedungwinong	1,36	30,84	1
33.	Baki	Kudu	1,28	21,79	1

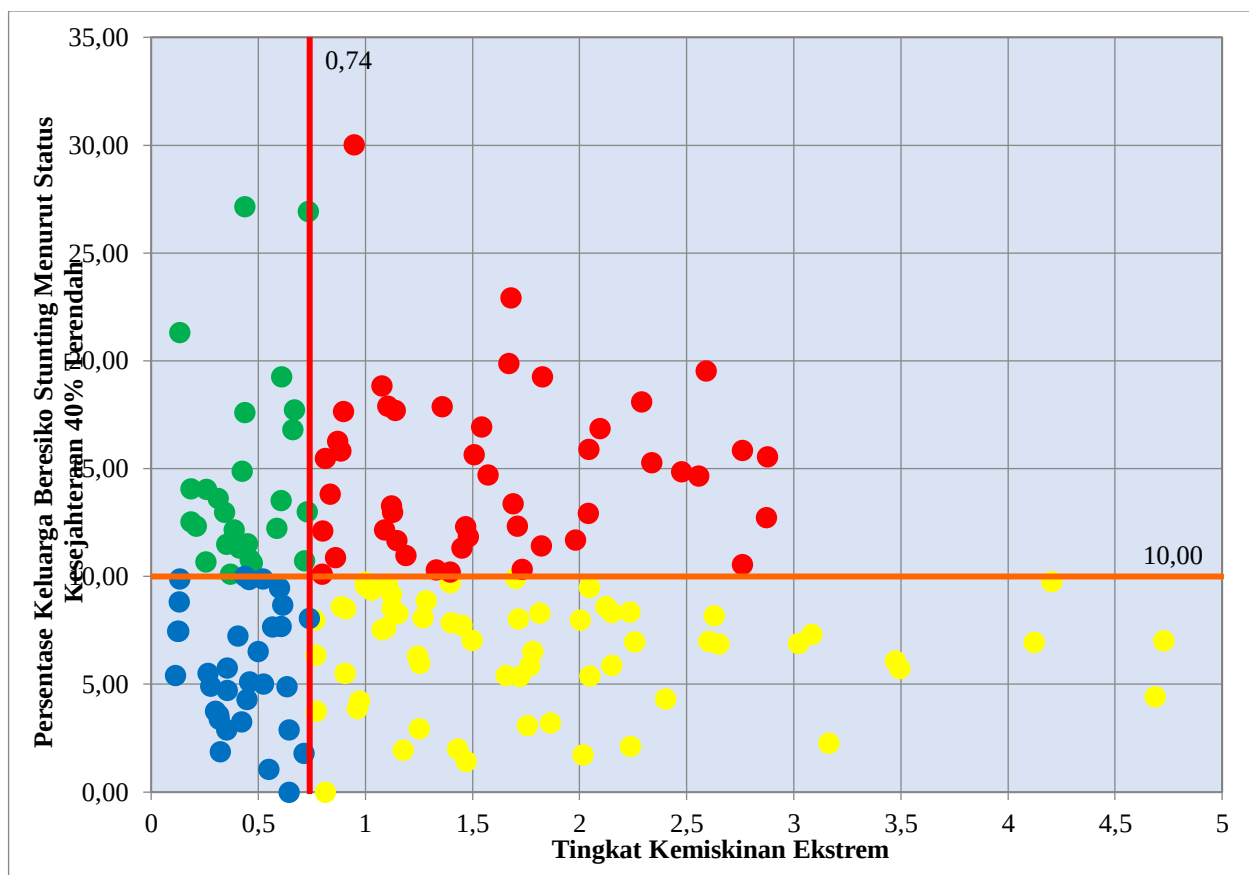
No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Indikator Utama	Indikator Pendukung	Prioritas
			Kemiskinan Ekstrem	Persentase Individu Usia Sekolah (7-18 Tahun) Tidak Bersekolah Menurut Status Kesejahteraan 40% Terendah	
34.	Gatak	Geneng	1,27	25,42	1
35.	Polokarto	Bulu	1,26	22,73	1
36.	Mojolaban	Plumbon	1,19	24,12	1
37.	Kartasura	Wirogunan	1,18	27,07	1
38.	Polokarto	Wonorejo	1,13	24,12	1
39.	Baki	Waru	1,12	24,85	1
40.	Nguter	Plesan	1,11	24,39	1
41.	Weru	Karangmojo	1,09	24,22	1
42.	Mojolaban	Palur	1,08	30,01	1
43.	Mojolaban	Cangkol	1,00	21,47	1
44.	Kartasura	Makamhaji	0,97	25,11	1
45.	Nguter	Tanjungrejo	0,96	21,12	1
46.	Kartasura	Ngadirejo	0,95	26,76	1
47.	Bendosari	Paluhombo	0,91	28,51	1
48.	Kartasura	Ngabeyan	0,91	24,90	1
49.	Mojolaban	Triyagan	0,89	26,37	1
50.	Nguter	Baran	0,89	33,50	1
51.	Bendosari	Sidorejo	0,86	28,83	1
52.	Kartasura	Kartasura	0,81	23,30	1
53.	Tawang Sari	Dalangan	0,80	21,40	1
54.	Bulu	Sanggang	4,73	17,31	2
55.	Bulu	Kamal	4,69	20,56	2
56.	Bulu	Kedungsono	3,50	19,79	2
57.	Nguter	Lawu	3,48	15,62	2
58.	Nguter	Celep	3,16	13,57	2
59.	Bendosari	Manisharjo	3,08	12,95	2
60.	Grogol	Kwarasan	2,76	18,69	2
61.	Polokarto	Rejosari	2,63	13,68	2
62.	Nguter	Gupit	2,56	20,36	2
63.	Gatak	Klaseman	2,40	13,02	2
64.	Baki	Jetis	2,29	17,60	2
65.	Polokarto	Karangwuni	2,26	19,84	2
66.	Nguter	Juron	2,24	17,07	2
67.	Weru	Ngreco	2,24	10,34	2
68.	Bendosari	Mertan	2,15	19,29	2
69.	Baki	Ngrombo	2,05	14,29	2
70.	Bulu	Kunden	2,05	19,46	2
71.	Weru	Krajan	2,04	17,48	2
72.	Sukoharjo	Kriwen	2,02	15,59	2
73.	Grogol	Parangjoro	1,98	18,77	2
74.	Sukoharjo	Sonorejo	1,87	17,12	2
75.	Mojolaban	Laban	1,82	18,45	2
76.	Polokarto	Polokarto	1,78	19,31	2
77.	Sukoharjo	Combongan	1,77	19,78	2
78.	Tawang Sari	Pundungrejo	1,76	12,12	2
79.	Kartasura	Ngemplak	1,71	17,65	2
80.	Mojolaban	Tegalmade	1,70	16,49	2
81.	Tawang Sari	Tambakboyo	1,69	14,40	2

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Indikator Utama	Indikator Pendukung	Prioritas
			Kemiskinan Ekstrem	Persentase Individu Usia Sekolah (7-18 Tahun) Tidak Bersekolah Menurut Status Kesejahteraan 40% Terendah	
82.	Grogol	Sanggrahan	1,66	12,90	2
83.	Gatak	Trangsari	1,45	19,39	2
84.	Bulu	Tiyaran	1,45	17,22	2
85.	Sukoharjo	Begajah	1,43	14,56	2
86.	Polokarto	Bakalan	1,40	12,09	2
87.	Sukoharjo	Sukoharjo	1,40	14,15	2
88.	Bulu	Malangan	1,33	15,77	2
89.	Sukoharjo	Kenep	1,25	20,12	2
90.	Bendosari	Toriyo	1,24	20,34	2
91.	Bulu	Gentan	1,15	14,34	2
92.	Mojolaban	Gadingan	1,15	18,48	2
93.	Grogol	Kadokan	1,14	20,06	2
94.	Sukoharjo	Bulakan	1,13	19,33	2
95.	Gatak	Sanggung	1,12	16,13	2
96.	Mojolaban	Klumprit	1,10	20,42	2
97.	Grogol	Manang	1,10	18,79	2
98.	Gatak	Luwang	1,08	19,56	2
99.	Bulu	Lengking	1,03	16,30	2
100.	Polokarto	Jatisobo	1,00	18,39	2
101.	Grogol	Cemani	0,90	20,22	2
102.	Polokarto	Godog	0,87	15,00	2
103.	Nguter	Kepuh	0,84	19,66	2
104.	Weru	Weru	0,81	16,44	2
105.	Sukoharjo	Banmati	0,80	13,71	2
106.	Sukoharjo	Mandan	0,77	18,96	2
107.	Weru	Karangtengah	0,77	15,12	2
108.	Baki	Mancasan	0,77	14,46	2
109.	Mojolaban	Joho	0,73	25,76	3
110.	Bulu	Ngasinan	0,72	22,84	3
111.	Gatak	Tempel	0,67	34,46	3
112.	Kartasura	Pucangan	0,64	29,16	3
113.	Kartasura	Singopuran	0,63	25,95	3
114.	Nguter	Tanjung	0,61	26,47	3
115.	Baki	Siwal	0,61	22,01	3
116.	Mojolaban	Sapen	0,61	21,91	3
117.	Mojolaban	Wirun	0,61	21,43	3
118.	Weru	Karanganyar	0,60	27,38	3
119.	Bendosari	Bendosari	0,57	28,95	3
120.	Kartasura	Kertonatan	0,55	24,62	3
121.	Polokarto	Kayuapak	0,52	25,46	3
122.	Polokarto	Pranan	0,47	25,16	3
123.	Tawang Sari	Ponowaren	0,46	22,22	3
124.	Baki	Gentan	0,46	24,52	3
125.	Baki	Kadilangu	0,44	26,58	3
126.	Bendosari	Gentan	0,44	21,28	3
127.	Baki	Purbayan	0,44	23,52	3
128.	Gatak	Sraten	0,43	39,47	3
129.	Gatak	Mayang	0,41	26,86	3

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Indikator Utama	Indikator Pendukung	Prioritas
			Kemiskinan Ekstrem	Persentase Individu Usia Sekolah (7-18 Tahun) Tidak Bersekolah Menurut Status Kesejahteraan 40% Terendah	
130.	Kartasura	Pabelan	0,35	21,15	3
131.	Baki	Bentakan	0,34	30,33	3
132.	Kartasura	Gonilan	0,32	23,26	3
133.	Nguter	Daleman	0,32	24,49	3
134.	Sukoharjo	Joho	0,30	21,78	3
135.	Gatak	Kagokan	0,26	30,51	3
136.	Grogol	Madegondo	0,12	20,96	3
137.	Baki	Duwet	0,74	16,91	4
138.	Kartasura	Gumpang	0,73	14,68	4
139.	Weru	Jatingarang	0,72	8,06	4
140.	Tawangsari	Kateguhan	0,66	15,93	4
141.	Baki	Gedongan	0,64	15,89	4
142.	Tawangsari	Pojok	0,59	18,16	4
143.	Bulu	Puron	0,53	14,36	4
144.	Grogol	Pandeyan	0,50	13,06	4
145.	Grogol	Gedangan	0,46	18,60	4
146.	Weru	Tegalsari	0,45	18,83	4
147.	Weru	Grogol	0,45	17,06	4
148.	Nguter	Nguter	0,42	10,55	4
149.	Tawangsari	Lorog	0,41	16,62	4
150.	Mojolaban	Bekonang	0,39	16,55	4
151.	Baki	Menuran	0,37	16,80	4
152.	Sukoharjo	Gayam	0,36	17,85	4
153.	Mojolaban	Kragilan	0,35	19,57	4
154.	Polokarto	Genengsari	0,35	20,70	4
155.	Polokarto	Tepisari	0,32	19,65	4
156.	Tawangsari	Kedungjambal	0,31	18,69	4
157.	Mojolaban	Demakan	0,28	19,59	4
158.	Bendosari	Sugihan	0,27	18,13	4
159.	Polokarto	Bugel	0,26	16,35	4
160.	Sukoharjo	Bulakrejo	0,21	15,18	4
161.	Grogol	Grogol	0,19	20,16	4
162.	Bendosari	Mulur	0,19	17,84	4
163.	Tawangsari	Tangkisan	0,14	15,22	4
164.	Grogol	Langenharjo	0,13	16,02	4
165.	Nguter	Pondok	0,13	17,82	4
166.	Bendosari	Jombor	0,13	20,50	4
167.	Sukoharjo	Jetis	0,12	13,67	4

B. Lokasi Prioritas Bidang Kesehatan

Berdasarkan analisis kuadran, desa/kelurahan prioritas untuk percepatan penurunan kemiskinan ekstrem pada bidang kesehatan dapat dikonsentrasikan pada desa/kelurahan yang termasuk prioritas 1/merah, terdapat sebanyak 46 desa/kelurahan.



Keterangan:

- Prioritas 1 : Kemiskinan Ekstrem Tinggi dan Persentase Keluarga Beresiko Stunting Menurut Status Kesejahteraan 40% Terendah Tinggi
- Prioritas 2 : Kemiskinan Ekstrem Tinggi dan Persentase Keluarga Beresiko Stunting Menurut Status Kesejahteraan 40% Terendah Rendah
- Prioritas 3 : Kemiskinan Ekstrem Rendah dan Persentase Keluarga Beresiko Stunting Menurut Status Kesejahteraan 40% Terendah Tinggi
- Prioritas 4 : Kemiskinan Ekstrem Rendah dan Persentase Keluarga Beresiko Stunting Menurut Status Kesejahteraan 40% Terendah Rendah

Gambar 5.2 Grafik Desa/Kelurahan Prioritas Untuk Percepatan Penurunan Kemiskinan Ekstrem Pada Bidang Kesehatan

Selengkapnya persebaran desa/kelurahan prioritas untuk percepatan penurunan kemiskinan ekstrem pada bidang kesehatan dari sisi kemiskinan ekstrem dan keluarga beresiko stunting menurut status kesejahteraan 40% terendah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.3 Desa/Kelurahan Prioritas Untuk Percepatan Penurunan Kemiskinan Ekstrem Pada Bidang Kesehatan

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Indikator Utama	Indikator Pendukung	Prioritas
			Kemiskinan Ekstrem	Persentase Keluarga Beresiko Stunting Menurut Status Kesejahteraan 40% Terendah	
1.	Gatak	Krajan	2,88	15,56	1
2.	Gatak	Trosemi	2,87	12,73	1
3.	Grogol	Kwarasan	2,76	15,85	1
4.	Bendosari	Jagan	2,76	10,56	1
5.	Polokarto	Ngombakan	2,59	19,53	1
6.	Nguter	Gupit	2,56	14,65	1
7.	Grogol	Pondok	2,48	14,86	1
8.	Bendosari	Cabeyan	2,34	15,26	1
9.	Baki	Jetis	2,29	18,10	1
10.	Weru	Karangwuni	2,10	16,85	1
11.	Weru	Krajan	2,04	15,90	1
12.	Nguter	Pengkol	2,04	12,92	1
13.	Grogol	Parangjoro	1,98	11,68	1
14.	Weru	Alasombo	1,83	19,26	1
15.	Mojolaban	Laban	1,82	11,41	1
16.	Tawangsari	Grajan	1,73	10,32	1
17.	Kartasura	Ngemplak	1,71	12,33	1
18.	Tawangsari	Tambakboyo	1,69	13,36	1
19.	Bulu	Karangasem	1,68	22,91	1
20.	Grogol	Banaran	1,67	19,86	1
21.	Weru	Tawang	1,57	14,71	1
22.	Gatak	Jati	1,54	16,94	1
23.	Gatak	Wironanggan	1,51	15,64	1
24.	Tawangsari	Watubonang	1,48	11,83	1
25.	Grogol	Telukan	1,47	12,30	1
26.	Gatak	Trangsan	1,45	11,33	1
27.	Polokarto	Mranggen	1,40	10,20	1
28.	Nguter	Kedungwinong	1,36	17,87	1
29.	Bulu	Malangan	1,33	10,30	1
30.	Mojolaban	Plumbon	1,19	10,97	1
31.	Mojolaban	Gadingan	1,15	11,67	1
32.	Grogol	Kadokan	1,14	17,69	1
33.	Polokarto	Wonorejo	1,13	12,97	1
34.	Gatak	Sanggung	1,12	13,28	1
35.	Nguter	Plesan	1,11	17,90	1
36.	Weru	Karangmojo	1,09	12,16	1
37.	Mojolaban	Palur	1,08	18,83	1
38.	Kartasura	Ngadirejo	0,95	30,01	1
39.	Grogol	Cemani	0,90	17,66	1
40.	Nguter	Baran	0,89	15,82	1
41.	Polokarto	Godog	0,87	16,25	1
42.	Bendosari	Sidorejo	0,86	10,88	1
43.	Nguter	Kepuh	0,84	13,81	1
44.	Weru	Weru	0,81	15,47	1

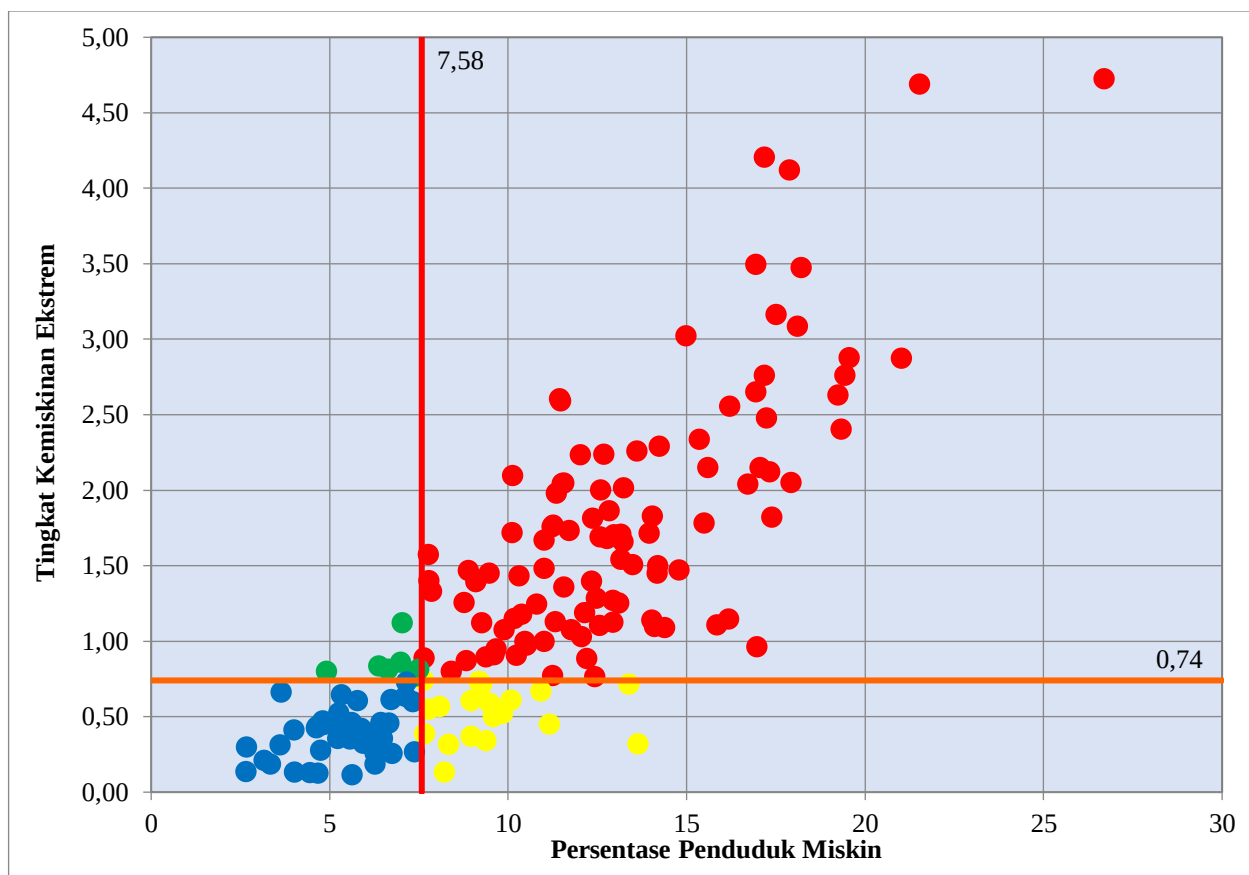
No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Indikator Utama	Indikator Pendukung	Prioritas
			Kemiskinan Ekstrem	Persentase Keluarga Beresiko Stunting Menurut Status Kesejahteraan 40% Terendah	
45.	Tawang Sari	Dalangan	0,80	12,12	1
46.	Sukoharjo	Banmati	0,80	10,12	1
47.	Bulu	Sanggung	4,73	7,01	2
48.	Bulu	Kamal	4,69	4,42	2
49.	Nguter	Jangglengan	4,21	9,76	2
50.	Polokarto	Kenokorejo	4,12	6,93	2
51.	Bulu	Kedungsono	3,50	5,74	2
52.	Nguter	Lawu	3,48	6,08	2
53.	Nguter	Celep	3,16	2,27	2
54.	Bendosari	Manisharjo	3,08	7,32	2
55.	Bendosari	Mojorejo	3,02	6,90	2
56.	Bendosari	Puhgogor	2,65	6,87	2
57.	Polokarto	Rejosari	2,63	8,19	2
58.	Tawang Sari	Majasto	2,60	6,98	2
59.	Gatak	Klaseman	2,40	4,31	2
60.	Polokarto	Karangwuni	2,26	6,96	2
61.	Nguter	Juron	2,24	2,12	2
62.	Weru	Ngreco	2,24	8,36	2
63.	Nguter	Serut	2,15	8,31	2
64.	Bendosari	Mertan	2,15	5,89	2
65.	Polokarto	Kemasan	2,12	8,60	2
66.	Baki	Ngrombo	2,05	5,37	2
67.	Bulu	Kunden	2,05	9,50	2
68.	Sukoharjo	Kriwen	2,02	1,72	2
69.	Bulu	Bulu	2,00	7,99	2
70.	Sukoharjo	Sonorejo	1,87	3,19	2
71.	Baki	Bakipandeyan	1,81	8,30	2
72.	Polokarto	Polokarto	1,78	6,53	2
73.	Sukoharjo	Combongan	1,77	5,84	2
74.	Tawang Sari	Pundungrejo	1,76	3,07	2
75.	Weru	Karakan	1,72	5,35	2
76.	Gatak	Blimbing	1,72	8,03	2
77.	Mojolaban	Tegalmade	1,70	9,90	2
78.	Grogol	Sanggrahan	1,66	5,40	2
79.	Mojolaban	Dukuh	1,50	7,03	2
80.	Sukoharjo	Dukuh	1,47	1,42	2
81.	Bulu	Tiyaran	1,45	7,73	2
82.	Sukoharjo	Begajah	1,43	1,99	2
83.	Polokarto	Bakalan	1,40	7,85	2
84.	Sukoharjo	Sukoharjo	1,40	9,71	2
85.	Baki	Kudu	1,28	8,87	2
86.	Gatak	Geneng	1,27	8,09	2
87.	Polokarto	Bulu	1,26	5,98	2
88.	Sukoharjo	Kenep	1,25	2,92	2
89.	Bendosari	Toriyo	1,24	6,29	2
90.	Kartasura	Wirogunan	1,18	1,94	2
91.	Bulu	Gentan	1,15	8,29	2
92.	Sukoharjo	Bulakan	1,13	8,52	2
93.	Baki	Waru	1,12	9,18	2

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Indikator Utama	Indikator Pendukung	Prioritas
			Kemiskinan Ekstrem	Persentase Keluarga Beresiko Stunting Menurut Status Kesejahteraan 40% Terendah	
94.	Mojolaban	Klumprit	1,10	9,66	2
95.	Grogol	Manang	1,10	7,62	2
96.	Gatak	Luwang	1,08	7,54	2
97.	Bulu	Lengking	1,03	9,37	2
98.	Mojolaban	Cangkol	1,00	9,73	2
99.	Polokarto	Jatisobo	1,00	9,56	2
100.	Kartasura	Makamhaji	0,97	4,22	2
101.	Nguter	Tanjungrejo	0,96	3,88	2
102.	Bendosari	Paluhombo	0,91	8,49	2
103.	Kartasura	Ngabeyan	0,91	5,49	2
104.	Mojolaban	Triyagan	0,89	8,61	2
105.	Kartasura	Kartasura	0,81	-	2
106.	Sukoharjo	Mandan	0,77	3,75	2
107.	Weru	Karangtengah	0,77	6,34	2
108.	Baki	Mancasan	0,77	7,99	2
109.	Kartasura	Gumpang	0,73	26,92	3
110.	Mojolaban	Joho	0,73	13,00	3
111.	Bulu	Ngasinan	0,72	10,73	3
112.	Gatak	Tempel	0,67	17,73	3
113.	Tawangsari	Kateguhan	0,66	16,81	3
114.	Baki	Siwal	0,61	19,26	3
115.	Mojolaban	Sapen	0,61	13,53	3
116.	Tawangsari	Pojok	0,59	12,24	3
117.	Polokarto	Pranan	0,47	10,62	3
118.	Tawangsari	Ponowaren	0,46	10,76	3
119.	Weru	Tegalsari	0,45	11,51	3
120.	Baki	Kadilangu	0,44	17,59	3
121.	Bendosari	Gentan	0,44	27,14	3
122.	Gatak	Sraten	0,43	14,88	3
123.	Tawangsari	Lorog	0,41	11,32	3
124.	Mojolaban	Bekonang	0,39	12,16	3
125.	Baki	Menuran	0,37	10,10	3
126.	Mojolaban	Kragilan	0,35	11,48	3
127.	Baki	Bentakan	0,34	12,99	3
128.	Tawangsari	Kedungjambal	0,31	13,61	3
129.	Gatak	Kagokan	0,26	14,03	3
130.	Polokarto	Bugel	0,26	10,66	3
131.	Sukoharjo	Bulakrejo	0,21	12,34	3
132.	Grogol	Grogol	0,19	14,07	3
133.	Bendosari	Mulur	0,19	12,54	3
134.	Tawangsari	Tangkisan	0,14	21,32	3
135.	Baki	Duwet	0,74	8,05	4
136.	Weru	Jatingarang	0,72	1,79	4
137.	Kartasura	Pucangan	0,64	-	4
138.	Baki	Gedongan	0,64	2,88	4
139.	Kartasura	Singopuran	0,63	4,89	4
140.	Nguter	Tanjung	0,61	8,66	4
141.	Mojolaban	Wirun	0,61	7,67	4
142.	Weru	Karanganyar	0,60	9,46	4

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Indikator Utama	Indikator Pendukung	Prioritas
			Kemiskinan Ekstrem	Persentase Keluarga Beresiko Stunting Menurut Status Kesejahteraan 40% Terendah	
143.	Bendosari	Bendosari	0,57	7,66	4
144.	Kartasura	Kertonatan	0,55	1,06	4
145.	Bulu	Puron	0,53	5,00	4
146.	Polokarto	Kayuapak	0,52	9,88	4
147.	Grogol	Pandeyan	0,50	6,51	4
148.	Grogol	Gedangan	0,46	5,12	4
149.	Baki	Gentan	0,46	9,86	4
150.	Weru	Grogol	0,45	4,29	4
151.	Baki	Purbayan	0,44	10,00	4
152.	Nguter	Nguter	0,42	3,26	4
153.	Gatak	Mayang	0,41	7,23	4
154.	Sukoharjo	Gayam	0,36	4,73	4
155.	Kartasura	Pabelan	0,35	5,77	4
156.	Polokarto	Genengsari	0,35	2,89	4
157.	Kartasura	Gonilan	0,32	1,88	4
158.	Polokarto	Tepisari	0,32	3,38	4
159.	Nguter	Daleman	0,32	3,57	4
160.	Sukoharjo	Joho	0,30	3,76	4
161.	Mojolaban	Demakan	0,28	4,91	4
162.	Bendosari	Sugihan	0,27	5,50	4
163.	Grogol	Langenharjo	0,13	9,88	4
164.	Nguter	Pondok	0,13	8,82	4
165.	Bendosari	Jombor	0,13	7,47	4
166.	Grogol	Madegondo	0,12	7,45	4
167.	Sukoharjo	Jetis	0,12	5,40	4

C. Lokasi Prioritas Bidang Ketahanan Pangan

Berdasarkan analisis kuadran, desa/kelurahan prioritas untuk percepatan penurunan kemiskinan ekstrem pada bidang ketahanan pangan dapat dikonsentrasikan pada desa/kelurahan yang termasuk prioritas 1/merah, terdapat sebanyak 101 desa/kelurahan.



Keterangan:

- Prioritas 1 : Persentase Penduduk Miskin Tinggi dan Kemiskinan Ekstrem Tinggi
- Prioritas 2 : Persentase Penduduk Miskin Tinggi dan Kemiskinan Ekstrem Rendah
- Prioritas 3 : Persentase Penduduk Miskin Rendah dan Kemiskinan Ekstrem Tinggi
- Prioritas 4 : Persentase Penduduk Miskin Rendah dan Kemiskinan Ekstrem Rendah

Gambar 5.3 Grafik Desa/Kelurahan Prioritas Untuk Percepatan Penurunan Kemiskinan Ekstrem Pada Bidang Ketahanan Pangan

Selengkapnya persebaran desa/kelurahan prioritas untuk percepatan penurunan kemiskinan ekstrem pada bidang ketahanan pangan dari sisi penduduk miskin dan kemiskinan ekstrem dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.4 Desa/Kelurahan Prioritas Untuk Percepatan Penurunan Kemiskinan Ekstrem Pada Bidang Ketahanan Pangan

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Indikator Utama	Indikator Pendukung	Prioritas
			Persentase Penduduk Miskin	Kemiskinan Ekstrem	
1.	Bulu	Sanggang	26,69	4,73	1

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Indikator Utama	Indikator Pendukung	Prioritas
			Persentase Penduduk Miskin	Kemiskinan Ekstrem	
2.	Bulu	Kamal	21,52	4,69	1
3.	Gatak	Trosemi	21,01	2,87	1
4.	Gatak	Krajan	19,55	2,88	1
5.	Grogol	Kwarasan	19,44	2,76	1
6.	Gatak	Klaseman	19,32	2,40	1
7.	Polokarto	Rejosari	19,24	2,63	1
8.	Nguter	Lawu	18,21	3,48	1
9.	Bendosari	Manisharjo	18,10	3,08	1
10.	Baki	Ngrombo	17,93	2,05	1
11.	Polokarto	Kenokorejo	17,88	4,12	1
12.	Nguter	Celep	17,51	3,16	1
13.	Mojolaban	Laban	17,39	1,82	1
14.	Polokarto	Kemasan	17,33	2,12	1
15.	Grogol	Pondok	17,24	2,48	1
16.	Bendosari	Jagan	17,18	2,76	1
17.	Nguter	Jangglengan	17,18	4,21	1
18.	Nguter	Serut	17,06	2,15	1
19.	Nguter	Tanjungrejo	16,96	0,96	1
20.	Bendosari	Puhgogor	16,94	2,65	1
21.	Bulu	Kedungsono	16,94	3,50	1
22.	Nguter	Pengkol	16,72	2,04	1
23.	Nguter	Gupit	16,21	2,56	1
24.	Mojolaban	Gadingan	16,18	1,15	1
25.	Nguter	Plesan	15,85	1,11	1
26.	Bendosari	Mertan	15,60	2,15	1
27.	Polokarto	Polokarto	15,48	1,78	1
28.	Bendosari	Cabeyan	15,36	2,34	1
29.	Bendosari	Mojorejo	14,98	3,02	1
30.	Sukoharjo	Dukuh	14,79	1,47	1
31.	Weru	Karangmojo	14,39	1,09	1
32.	Baki	Jetis	14,23	2,29	1
33.	Mojolaban	Dukuh	14,19	1,50	1
34.	Gatak	Trangsan	14,18	1,45	1
35.	Grogol	Manang	14,10	1,10	1
36.	Weru	Alasombo	14,04	1,83	1
37.	Grogol	Kadokan	14,03	1,14	1
38.	Gatak	Blimbing	13,95	1,72	1
39.	Polokarto	Karangwuni	13,61	2,26	1
40.	Gatak	Wironanggan	13,49	1,51	1
41.	Sukoharjo	Kriwen	13,24	2,02	1
42.	Grogol	Sanggrahan	13,23	1,66	1
43.	Gatak	Jati	13,17	1,54	1
44.	Kartasura	Ngemplak	13,15	1,71	1
45.	Sukoharjo	Kenep	13,10	1,25	1
46.	Mojolaban	Tegalmade	12,96	1,70	1
47.	Sukoharjo	Bulakan	12,94	1,13	1
48.	Gatak	Geneng	12,94	1,27	1
49.	Sukoharjo	Sonorejo	12,83	1,87	1
50.	Bulu	Karangasem	12,77	1,68	1
51.	Nguter	Juron	12,68	2,24	1
52.	Bulu	Bulu	12,59	2,00	1
53.	Tawangsari	Tambakboyo	12,57	1,69	1
54.	Mojolaban	Klumprit	12,56	1,10	1
55.	Baki	Kudu	12,48	1,28	1

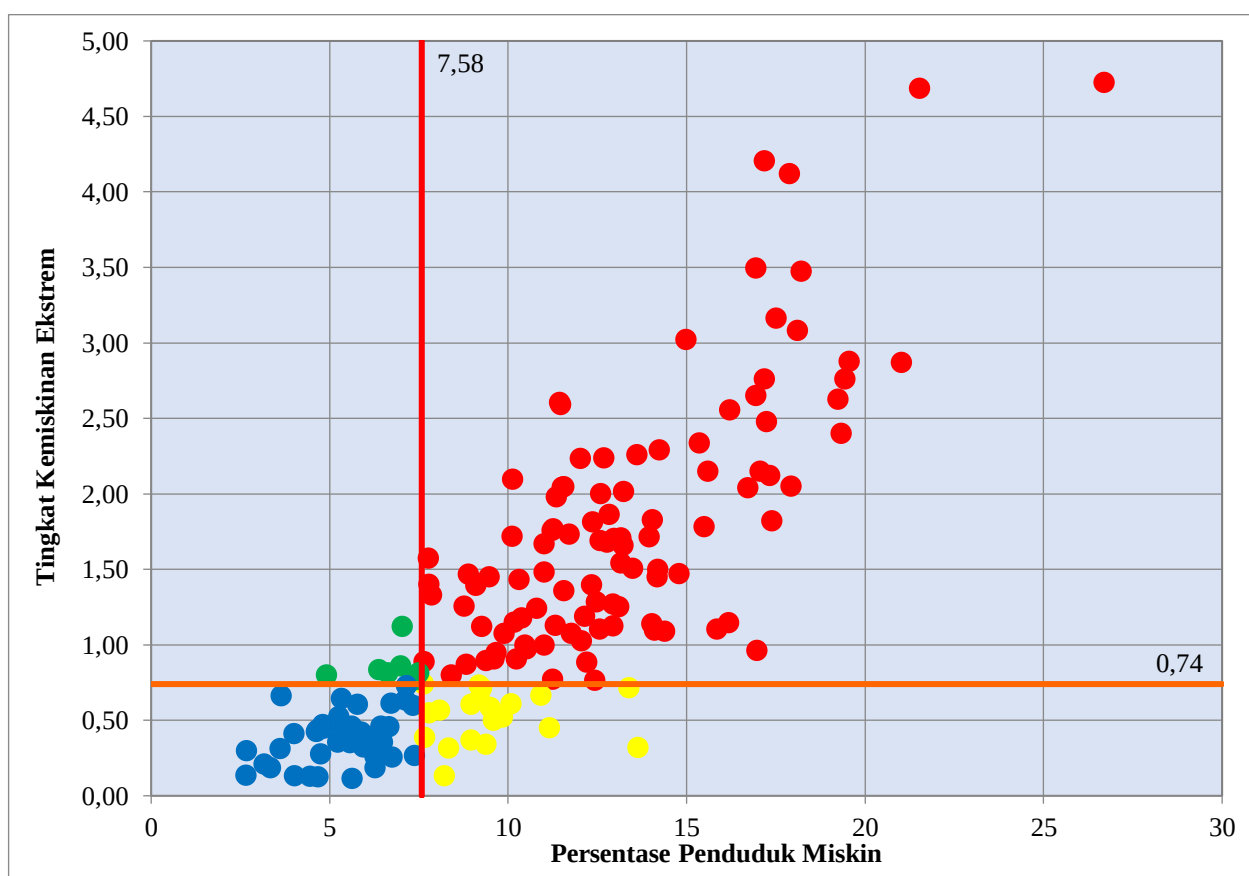
No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Indikator Utama	Indikator Pendukung	Prioritas
			Persentase Penduduk Miskin	Kemiskinan Ekstrem	
56.	Baki	Mancasan	12,42	0,77	1
57.	Baki	Bakipandeyan	12,38	1,81	1
58.	Polokarto	Mranggen	12,33	1,40	1
59.	Nguter	Baran	12,20	0,89	1
60.	Mojolaban	Plumbon	12,14	1,19	1
61.	Bulu	Lengking	12,06	1,03	1
62.	Weru	Ngreco	12,02	2,24	1
63.	Gatak	Luwang	11,78	1,08	1
64.	Tawangsari	Grajegan	11,72	1,73	1
65.	Nguter	Kedungwinong	11,56	1,36	1
66.	Bulu	Kunden	11,55	2,05	1
67.	Weru	Krajan	11,51	2,04	1
68.	Polokarto	Ngombakan	11,48	2,59	1
69.	Tawangsari	Majasto	11,44	2,60	1
70.	Grogol	Parangjoro	11,35	1,98	1
71.	Polokarto	Wonorejo	11,32	1,13	1
72.	Sukoharjo	Combongan	11,26	1,77	1
73.	Sukoharjo	Mandan	11,25	0,77	1
74.	Tawangsari	Pundungrejo	11,23	1,76	1
75.	Polokarto	Jatisobo	11,01	1,00	1
76.	Tawangsari	Watubonang	11,01	1,48	1
77.	Grogol	Banaran	11,01	1,67	1
78.	Bendosari	Toriyo	10,80	1,24	1
79.	Kartasura	Makamhaji	10,52	0,97	1
80.	Mojolaban	Cangkol	10,48	1,00	1
81.	Kartasura	Wirogunan	10,39	1,18	1
82.	Sukoharjo	Begajah	10,30	1,43	1
83.	Kartasura	Ngabeyan	10,23	0,91	1
84.	Bulu	Gentan	10,17	1,15	1
85.	Weru	Karangwuni	10,13	2,10	1
86.	Weru	Karakan	10,11	1,72	1
87.	Mojolaban	Palur	9,89	1,08	1
88.	Kartasura	Ngadirejo	9,66	0,95	1
89.	Bendosari	Paluhombo	9,61	0,91	1
90.	Bulu	Tiyaran	9,47	1,45	1
91.	Grogol	Cemani	9,39	0,90	1
92.	Gatak	Sanggung	9,26	1,12	1
93.	Sukoharjo	Sukoharjo	9,10	1,40	1
94.	Grogol	Teluk	8,89	1,47	1
95.	Polokarto	Godog	8,83	0,87	1
96.	Polokarto	Bulu	8,76	1,26	1
97.	Sukoharjo	Banmati	8,41	0,80	1
98.	Bulu	Malangan	7,86	1,33	1
99.	Polokarto	Bakalan	7,78	1,40	1
100.	Weru	Tawang	7,77	1,57	1
101.	Mojolaban	Triyagan	7,65	0,89	1
102.	Polokarto	Tepisari	13,63	0,32	2
103.	Bulu	Ngasinan	13,38	0,72	2
104.	Weru	Tegalsari	11,16	0,45	2
105.	Gatak	Tempel	10,92	0,67	2
106.	Baki	Siwal	10,08	0,61	2
107.	Polokarto	Kayuapak	9,85	0,52	2
108.	Grogol	Pandeyan	9,59	0,50	2
109.	Tawangsari	Pojok	9,49	0,59	2

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Indikator Utama	Indikator Pendukung	Prioritas
			Persentase Penduduk Miskin	Kemiskinan Ekstrem	
110.	Baki	Bentakan	9,38	0,34	2
111.	Weru	Jatingarang	9,26	0,72	2
112.	Baki	Gedongan	9,21	0,64	2
113.	Kartasura	Gumpang	9,18	0,73	2
114.	Mojolaban	Wirun	8,96	0,61	2
115.	Baki	Menuran	8,96	0,37	2
116.	Nguter	Daleman	8,34	0,32	2
117.	Nguter	Pondok	8,21	0,13	2
118.	Bendosari	Bendosari	8,08	0,57	2
119.	Kartasura	Kertonatan	7,79	0,55	2
120.	Mojolaban	Bekonang	7,66	0,39	2
121.	Baki	Duwet	7,63	0,74	2
122.	Kartasura	Kartasura	7,50	0,81	3
123.	Weru	Karangtengah	7,42	0,77	3
124.	Baki	Waru	7,04	1,12	3
125.	Bendosari	Sidorejo	6,98	0,86	3
126.	Weru	Weru	6,62	0,81	3
127.	Nguter	Kepuh	6,37	0,84	3
128.	Tawangsari	Dalangan	4,92	0,80	3
129.	Bendosari	Sugihan	7,38	0,27	4
130.	Weru	Karanganyar	7,34	0,60	4
131.	Mojolaban	Joho	7,16	0,73	4
132.	Kartasura	Singopuran	7,12	0,63	4
133.	Polokarto	Bugel	6,75	0,26	4
134.	Nguter	Tanjung	6,72	0,61	4
135.	Baki	Gentan	6,66	0,46	4
136.	Baki	Purbayan	6,50	0,44	4
137.	Kartasura	Pabelan	6,48	0,35	4
138.	Tawangsari	Ponowaren	6,43	0,46	4
139.	Gatak	Mayang	6,33	0,41	4
140.	Gatak	Kagokan	6,28	0,26	4
141.	Bendosari	Mulur	6,27	0,19	4
142.	Mojolaban	Kragilan	5,99	0,35	4
143.	Kartasura	Gonilan	5,95	0,32	4
144.	Nguter	Nguter	5,89	0,42	4
145.	Mojolaban	Sapen	5,78	0,61	4
146.	Sukoharjo	Jetis	5,64	0,12	4
147.	Grogol	Gedangan	5,62	0,46	4
148.	Polokarto	Genengsari	5,57	0,35	4
149.	Bendosari	Gentan	5,39	0,44	4
150.	Kartasura	Pucangan	5,33	0,64	4
151.	Bulu	Puron	5,25	0,53	4
152.	Sukoharjo	Gayam	5,23	0,36	4
153.	Weru	Grogol	4,82	0,45	4
154.	Polokarto	Pranan	4,82	0,47	4
155.	Mojolaban	Demakan	4,74	0,28	4
156.	Grogol	Madegondo	4,67	0,12	4
157.	Baki	Kadilangu	4,66	0,44	4
158.	Gatak	Sraten	4,63	0,43	4
159.	Bendosari	Jombor	4,45	0,13	4
160.	Grogol	Langenharjo	4,02	0,13	4
161.	Tawangsari	Lorog	4,01	0,41	4
162.	Tawangsari	Kateguhan	3,65	0,66	4
163.	Tawangsari	Kedungjambal	3,62	0,31	4

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Indikator Utama	Indikator Pendukung	Prioritas
			Persentase Penduduk Miskin	Kemiskinan Ekstrem	
164.	Grogol	Grogol	3,34	0,19	4
165.	Sukoharjo	Bulakrejo	3,16	0,21	4
166.	Sukoharjo	Joho	2,67	0,30	4
167.	Tawang Sari	Tangkisan	2,66	0,14	4

D. Lokasi Prioritas Bidang Sosial

Berdasarkan analisis kuadran, desa/kelurahan prioritas untuk percepatan penurunan kemiskinan ekstrem pada bidang sosial dapat dikonsentrasikan pada desa/kelurahan yang termasuk prioritas 1/merah, terdapat sebanyak 101 desa/kelurahan.



Keterangan:

- Prioritas 1 : Persentase Penduduk Miskin Tinggi dan Kemiskinan Ekstrem Tinggi
- Prioritas 2 : Persentase Penduduk Miskin Tinggi dan Kemiskinan Ekstrem Rendah
- Prioritas 3 : Persentase Penduduk Miskin Rendah dan Kemiskinan Ekstrem Tinggi
- Prioritas 4 : Persentase Penduduk Miskin Rendah dan Kemiskinan Ekstrem Rendah

Gambar 5.4 Grafik Desa/Kelurahan Prioritas Untuk Percepatan Penurunan Kemiskinan Ekstrem Pada Bidang Sosial

Selengkapnya persebaran desa/kelurahan prioritas untuk percepatan penurunan kemiskinan ekstrem pada bidang sosial dari sisi penduduk miskin dan kemiskinan ekstrem dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.5 Desa/Kelurahan Prioritas Untuk Percepatan Penurunan Kemiskinan Ekstrem Pada Bidang Sosial

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Indikator Utama	Indikator Pendukung	Prioritas
			Persentase Penduduk Miskin	Kemiskinan Ekstrem	
1.	Bulu	Sanggang	26,69	4,73	1
2.	Bulu	Kamal	21,52	4,69	1
3.	Gatak	Trosemi	21,01	2,87	1
4.	Gatak	Krajan	19,55	2,88	1
5.	Grogol	Kwarasan	19,44	2,76	1
6.	Gatak	Klaseman	19,32	2,40	1
7.	Polokarto	Rejosari	19,24	2,63	1
8.	Nguter	Lawu	18,21	3,48	1
9.	Bendosari	Manisharjo	18,10	3,08	1
10.	Baki	Ngrombo	17,93	2,05	1
11.	Polokarto	Kenokorejo	17,88	4,12	1
12.	Nguter	Celep	17,51	3,16	1
13.	Mojolaban	Laban	17,39	1,82	1
14.	Polokarto	Kemasan	17,33	2,12	1
15.	Grogol	Pondok	17,24	2,48	1
16.	Bendosari	Jagan	17,18	2,76	1
17.	Nguter	Jangglengan	17,18	4,21	1
18.	Nguter	Serut	17,06	2,15	1
19.	Nguter	Tanjungrejo	16,96	0,96	1
20.	Bendosari	Puhgogor	16,94	2,65	1
21.	Bulu	Kedungsono	16,94	3,50	1
22.	Nguter	Pengkol	16,72	2,04	1
23.	Nguter	Gupit	16,21	2,56	1
24.	Mojolaban	Gadingan	16,18	1,15	1
25.	Nguter	Plesan	15,85	1,11	1
26.	Bendosari	Mertan	15,60	2,15	1
27.	Polokarto	Polokarto	15,48	1,78	1
28.	Bendosari	Cabeyan	15,36	2,34	1
29.	Bendosari	Mojorejo	14,98	3,02	1
30.	Sukoharjo	Dukuh	14,79	1,47	1
31.	Weru	Karangmojo	14,39	1,09	1
32.	Baki	Jetis	14,23	2,29	1
33.	Mojolaban	Dukuh	14,19	1,50	1
34.	Gatak	Trangsang	14,18	1,45	1
35.	Grogol	Manang	14,10	1,10	1
36.	Weru	Alasombo	14,04	1,83	1
37.	Grogol	Kadokan	14,03	1,14	1
38.	Gatak	Blimbing	13,95	1,72	1
39.	Polokarto	Karangwuni	13,61	2,26	1
40.	Gatak	Wironanggan	13,49	1,51	1

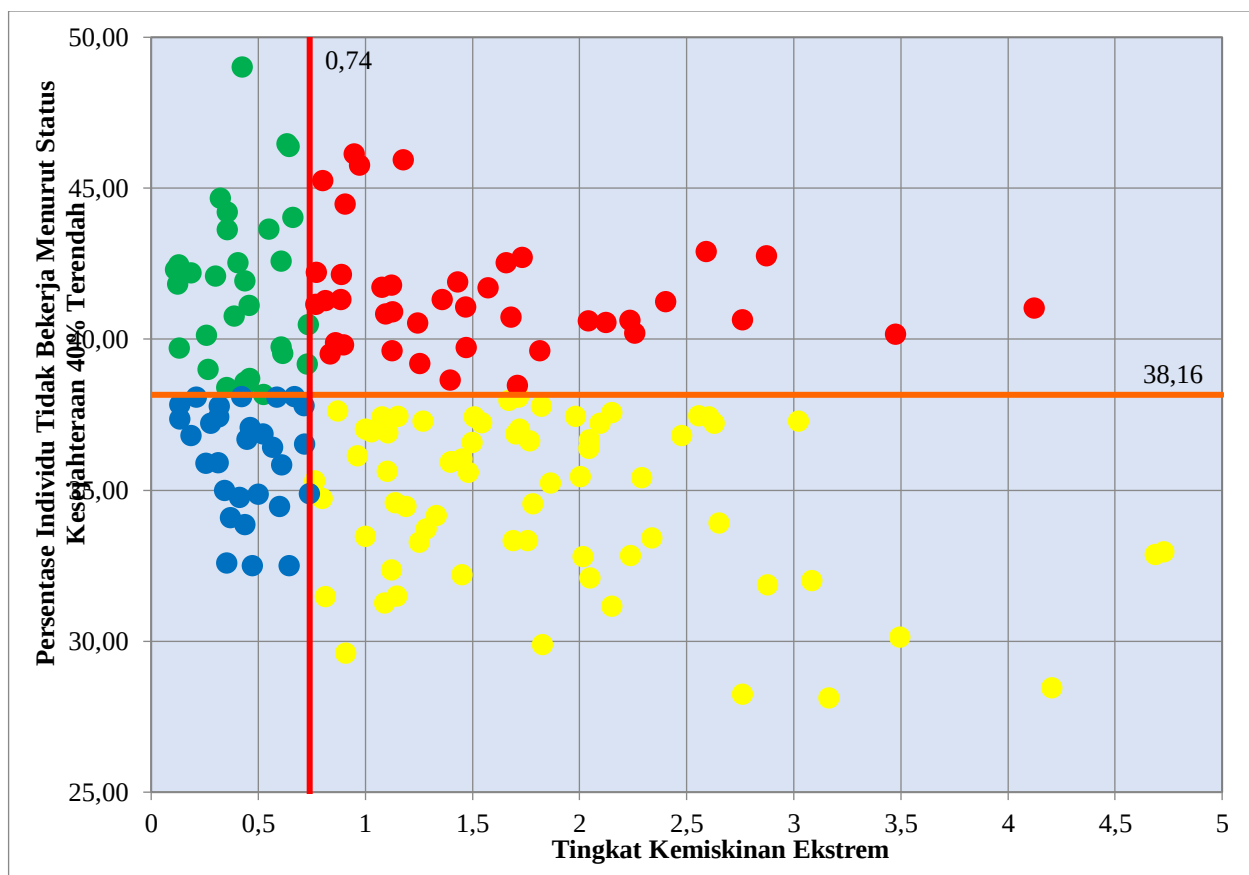
No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Indikator Utama	Indikator Pendukung	Prioritas
			Persentase Penduduk Miskin	Kemiskinan Ekstrem	
41.	Sukoharjo	Kriwen	13,24	2,02	1
42.	Grogol	Sanggrahan	13,23	1,66	1
43.	Gatak	Jati	13,17	1,54	1
44.	Kartasura	Ngemplak	13,15	1,71	1
45.	Sukoharjo	Kenep	13,10	1,25	1
46.	Mojolaban	Tegalmade	12,96	1,70	1
47.	Sukoharjo	Bulakan	12,94	1,13	1
48.	Gatak	Geneng	12,94	1,27	1
49.	Sukoharjo	Sonorejo	12,83	1,87	1
50.	Bulu	Karangasem	12,77	1,68	1
51.	Nguter	Juron	12,68	2,24	1
52.	Bulu	Bulu	12,59	2,00	1
53.	Tawangsari	Tambakboyo	12,57	1,69	1
54.	Mojolaban	Klumprit	12,56	1,10	1
55.	Baki	Kudu	12,48	1,28	1
56.	Baki	Mancasan	12,42	0,77	1
57.	Baki	Bakipandeyan	12,38	1,81	1
58.	Polokarto	Mranggen	12,33	1,40	1
59.	Nguter	Baran	12,20	0,89	1
60.	Mojolaban	Plumbon	12,14	1,19	1
61.	Bulu	Lengking	12,06	1,03	1
62.	Weru	Ngreco	12,02	2,24	1
63.	Gatak	Luwang	11,78	1,08	1
64.	Tawangsari	Grajegan	11,72	1,73	1
65.	Nguter	Kedungwinong	11,56	1,36	1
66.	Bulu	Kunden	11,55	2,05	1
67.	Weru	Krajan	11,51	2,04	1
68.	Polokarto	Ngombakan	11,48	2,59	1
69.	Tawangsari	Majasto	11,44	2,60	1
70.	Grogol	Parangjoro	11,35	1,98	1
71.	Polokarto	Wonorejo	11,32	1,13	1
72.	Sukoharjo	Combongan	11,26	1,77	1
73.	Sukoharjo	Mandan	11,25	0,77	1
74.	Tawangsari	Pundungrejo	11,23	1,76	1
75.	Polokarto	Jatisobo	11,01	1,00	1
76.	Tawangsari	Watubonang	11,01	1,48	1
77.	Grogol	Banaran	11,01	1,67	1
78.	Bendosari	Toriyo	10,80	1,24	1
79.	Kartasura	Makamhaji	10,52	0,97	1
80.	Mojolaban	Cangkol	10,48	1,00	1
81.	Kartasura	Wirogunan	10,39	1,18	1
82.	Sukoharjo	Begajah	10,30	1,43	1
83.	Kartasura	Ngabeyan	10,23	0,91	1
84.	Bulu	Gentan	10,17	1,15	1
85.	Weru	Karangwuni	10,13	2,10	1
86.	Weru	Karakan	10,11	1,72	1
87.	Mojolaban	Palur	9,89	1,08	1
88.	Kartasura	Ngadirejo	9,66	0,95	1
89.	Bendosari	Paluhombo	9,61	0,91	1
90.	Bulu	Tiyaran	9,47	1,45	1
91.	Grogol	Cemani	9,39	0,90	1
92.	Gatak	Sanggung	9,26	1,12	1
93.	Sukoharjo	Sukoharjo	9,10	1,40	1
94.	Grogol	Telukan	8,89	1,47	1

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Indikator Utama	Indikator Pendukung	Prioritas
			Persentase Penduduk Miskin	Kemiskinan Ekstrem	
95.	Polokarto	Godog	8,83	0,87	1
96.	Polokarto	Bulu	8,76	1,26	1
97.	Sukoharjo	Banmati	8,41	0,80	1
98.	Bulu	Malangan	7,86	1,33	1
99.	Polokarto	Bakalan	7,78	1,40	1
100.	Weru	Tawang	7,77	1,57	1
101.	Mojolaban	Triyagan	7,65	0,89	1
102.	Polokarto	Tepisari	13,63	0,32	2
103.	Bulu	Ngasinan	13,38	0,72	2
104.	Weru	Tegalsari	11,16	0,45	2
105.	Gatak	Tempel	10,92	0,67	2
106.	Baki	Siwal	10,08	0,61	2
107.	Polokarto	Kayuapak	9,85	0,52	2
108.	Grogol	Pandeyan	9,59	0,50	2
109.	Tawang Sari	Pojok	9,49	0,59	2
110.	Baki	Bentakan	9,38	0,34	2
111.	Weru	Jatingarang	9,26	0,72	2
112.	Baki	Gedongan	9,21	0,64	2
113.	Kartasura	Gumpang	9,18	0,73	2
114.	Mojolaban	Wirun	8,96	0,61	2
115.	Baki	Menuran	8,96	0,37	2
116.	Nguter	Daleman	8,34	0,32	2
117.	Nguter	Pondok	8,21	0,13	2
118.	Bendosari	Bendosari	8,08	0,57	2
119.	Kartasura	Kertonatan	7,79	0,55	2
120.	Mojolaban	Bekonang	7,66	0,39	2
121.	Baki	Duwet	7,63	0,74	2
122.	Kartasura	Kartasura	7,50	0,81	3
123.	Weru	Karangtengah	7,42	0,77	3
124.	Baki	Waru	7,04	1,12	3
125.	Bendosari	Sidorejo	6,98	0,86	3
126.	Weru	Weru	6,62	0,81	3
127.	Nguter	Kepuh	6,37	0,84	3
128.	Tawang Sari	Dalangan	4,92	0,80	3
129.	Bendosari	Sugihan	7,38	0,27	4
130.	Weru	Karanganyar	7,34	0,60	4
131.	Mojolaban	Joho	7,16	0,73	4
132.	Kartasura	Singopuran	7,12	0,63	4
133.	Polokarto	Bugel	6,75	0,26	4
134.	Nguter	Tanjung	6,72	0,61	4
135.	Baki	Gentan	6,66	0,46	4
136.	Baki	Purbayan	6,50	0,44	4
137.	Kartasura	Pabelan	6,48	0,35	4
138.	Tawang Sari	Ponowaren	6,43	0,46	4
139.	Gatak	Mayang	6,33	0,41	4
140.	Gatak	Kagokan	6,28	0,26	4
141.	Bendosari	Mulur	6,27	0,19	4
142.	Mojolaban	Kragilan	5,99	0,35	4
143.	Kartasura	Gonilan	5,95	0,32	4
144.	Nguter	Nguter	5,89	0,42	4
145.	Mojolaban	Sapen	5,78	0,61	4
146.	Sukoharjo	Jetis	5,64	0,12	4
147.	Grogol	Gedangan	5,62	0,46	4
148.	Polokarto	Geneng Sari	5,57	0,35	4

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Indikator Utama	Indikator Pendukung	Prioritas
			Persentase Penduduk Miskin	Kemiskinan Ekstrem	
149.	Bendosari	Gentan	5,39	0,44	4
150.	Kartasura	Pucangan	5,33	0,64	4
151.	Bulu	Puron	5,25	0,53	4
152.	Sukoharjo	Gayam	5,23	0,36	4
153.	Weru	Grogol	4,82	0,45	4
154.	Polokarto	Pranan	4,82	0,47	4
155.	Mojolaban	Demakan	4,74	0,28	4
156.	Grogol	Madegondo	4,67	0,12	4
157.	Baki	Kadilangu	4,66	0,44	4
158.	Gatak	Sraten	4,63	0,43	4
159.	Bendosari	Jombor	4,45	0,13	4
160.	Grogol	Langenharjo	4,02	0,13	4
161.	Tawangsari	Lorog	4,01	0,41	4
162.	Tawangsari	Kateguhan	3,65	0,66	4
163.	Tawangsari	Kedungjambal	3,62	0,31	4
164.	Grogol	Grogol	3,34	0,19	4
165.	Sukoharjo	Bulakrejo	3,16	0,21	4
166.	Sukoharjo	Joho	2,67	0,30	4
167.	Tawangsari	Tangkisan	2,66	0,14	4

5.2.2. Lokasi Prioritas Strategi Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Miskin (Bidang Ketenagakerjaan)

Pelaksanaan program untuk peningkatan pendapatan diutamakan bagi penduduk miskin ekstrem pada lokasi desa/kelurahan prioritas untuk percepatan penurunan kemiskinan ekstrem pada bidang ketenagakerjaan dapat dikonsentrasikan pada desa/kelurahan yang termasuk prioritas 1/merah, terdapat sebanyak 41 desa/kelurahan.



Keterangan:

- Prioritas 1 : Kemiskinan Ekstrem Tinggi dan Persentase Individu Usia 15-59 Tahun Tidak Bekerja Menurut Status Kesejahteraan 40% Terendah Tinggi
- Prioritas 2 : Kemiskinan Ekstrem Tinggi dan Persentase Individu Usia 15-59 Tahun Tidak Bekerja Menurut Status Kesejahteraan 40% Terendah Rendah
- Prioritas 3 : Kemiskinan Ekstrem Rendah dan Persentase Individu Usia 15-59 Tahun Tidak Bekerja Menurut Status Kesejahteraan 40% Terendah Tinggi
- Prioritas 4 : Kemiskinan Ekstrem Rendah dan Persentase Individu Usia 15-59 Tahun Tidak Bekerja Menurut Status Kesejahteraan 40% Terendah Rendah

Gambar 5.5 Grafik Desa/Kelurahan Prioritas Untuk Percepatan Penurunan Kemiskinan Ekstrem Pada Bidang Ketenagakerjaan

Selengkapnya persebaran desa/kelurahan prioritas untuk percepatan penurunan kemiskinan ekstrem pada bidang ketenagakerjaan dari sisi kemiskinan ekstrem dan individu usia 15-59 tahun tidak bekerja menurut status kesejahteraan 40% terendah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.6 Desa/Kelurahan Prioritas Untuk Percepatan Penurunan Kemiskinan Ekstrem Pada Bidang Ketenagakerjaan

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Indikator Utama	Indikator Pendukung	Prioritas
			Kemiskinan Ekstrem	Persentase Individu Usia 15-59 Tahun Tidak Bekerja Menurut Status Kesejahteraan 40% Terendah	
1.	Polokarto	Kenokorejo	4,12	41,03	1
2.	Nguter	Lawu	3,48	40,17	1
3.	Gatak	Trosemi	2,87	42,76	1
4.	Grogol	Kwarasan	2,76	40,64	1
5.	Polokarto	Ngombakan	2,59	42,90	1
6.	Gatak	Klaseman	2,40	41,24	1
7.	Polokarto	Karangwuni	2,26	40,20	1
8.	Weru	Ngreco	2,24	40,62	1
9.	Polokarto	Kemasan	2,12	40,56	1
10.	Nguter	Pengkol	2,04	40,61	1
11.	Baki	Bakipandeyan	1,81	39,62	1
12.	Tawangsari	Grajegan	1,73	42,71	1
13.	Kartasura	Ngemplak	1,71	38,47	1
14.	Bulu	Karangasem	1,68	40,74	1
15.	Grogol	Sanggrahan	1,66	42,54	1
16.	Weru	Tawang	1,57	41,70	1
17.	Sukoharjo	Dukuh	1,47	39,72	1
18.	Grogol	Telukan	1,47	41,07	1
19.	Sukoharjo	Begajah	1,43	41,90	1
20.	Sukoharjo	Sukoharjo	1,40	38,65	1
21.	Nguter	Kedungwinong	1,36	41,31	1
22.	Polokarto	Bulu	1,26	39,20	1
23.	Bendosari	Toriyo	1,24	40,54	1
24.	Kartasura	Wirogunan	1,18	45,95	1
25.	Polokarto	Wonorejo	1,13	40,91	1
26.	Sukoharjo	Bulakan	1,13	39,62	1
27.	Gatak	Sanggung	1,12	41,78	1
28.	Grogol	Manang	1,10	40,83	1
29.	Mojolaban	Palur	1,08	41,71	1
30.	Kartasura	Makamhaji	0,97	45,76	1
31.	Kartasura	Ngadirejo	0,95	46,14	1
32.	Kartasura	Ngabeyan	0,91	44,48	1
33.	Grogol	Cemani	0,90	39,81	1
34.	Mojolaban	Triyagan	0,89	42,15	1
35.	Nguter	Baran	0,89	41,32	1
36.	Bendosari	Sidorejo	0,86	39,89	1
37.	Nguter	Kepuh	0,84	39,51	1
38.	Kartasura	Kartasura	0,81	41,28	1
39.	Tawangsari	Dalangan	0,80	45,25	1
40.	Sukoharjo	Mandan	0,77	42,22	1
41.	Weru	Karangtengah	0,77	41,16	1
42.	Bulu	Sanggung	4,73	32,95	2
43.	Bulu	Kamal	4,69	32,88	2
44.	Nguter	Jangglengan	4,21	28,46	2
45.	Bulu	Kedungsono	3,50	30,13	2
46.	Nguter	Celep	3,16	28,13	2

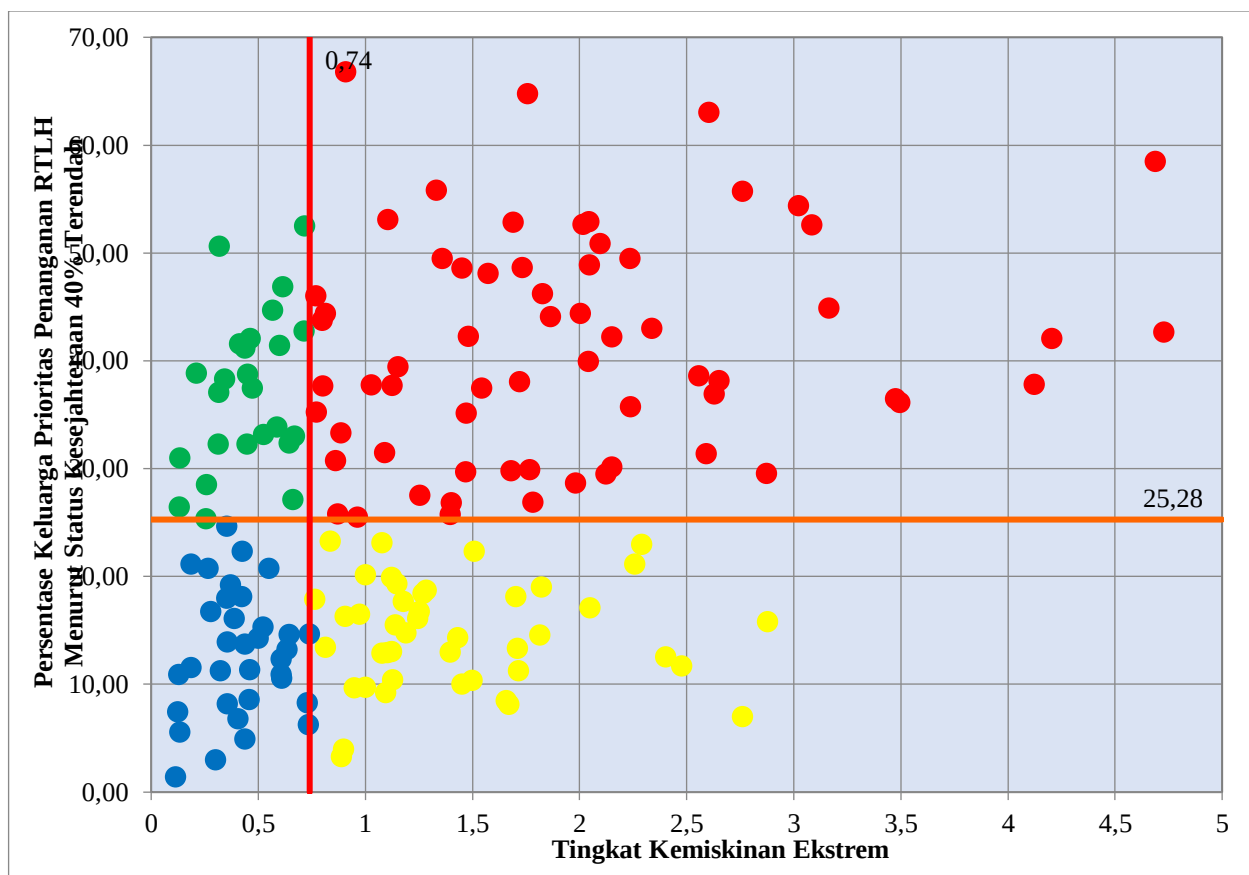
No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Indikator Utama	Indikator Pendukung	Prioritas
			Kemiskinan Ekstrem	Persentase Individu Usia 15-59 Tahun Tidak Bekerja Menurut Status Kesejahteraan 40% Terendah	
47.	Bendosari	Manisharjo	3,08	32,01	2
48.	Bendosari	Mojorejo	3,02	37,28	2
49.	Gatak	Krajan	2,88	31,87	2
50.	Bendosari	Jagan	2,76	28,25	2
51.	Bendosari	Puhgogor	2,65	33,91	2
52.	Polokarto	Rejosari	2,63	37,21	2
53.	Tawangsari	Majasto	2,60	37,43	2
54.	Nguter	Gupit	2,56	37,47	2
55.	Grogol	Pondok	2,48	36,82	2
56.	Bendosari	Cabeyan	2,34	33,42	2
57.	Baki	Jetis	2,29	35,41	2
58.	Nguter	Juron	2,24	32,84	2
59.	Nguter	Serut	2,15	37,58	2
60.	Bendosari	Mertan	2,15	31,16	2
61.	Weru	Karangwuni	2,10	37,21	2
62.	Baki	Ngrombo	2,05	32,09	2
63.	Bulu	Kunden	2,05	36,67	2
64.	Weru	Krajan	2,04	36,39	2
65.	Sukoharjo	Kriwen	2,02	32,80	2
66.	Bulu	Bulu	2,00	35,45	2
67.	Grogol	Parangjoro	1,98	37,46	2
68.	Sukoharjo	Sonorejo	1,87	35,24	2
69.	Weru	Alasombo	1,83	29,89	2
70.	Mojolaban	Laban	1,82	37,79	2
71.	Polokarto	Polokarto	1,78	34,55	2
72.	Sukoharjo	Combongan	1,77	36,64	2
73.	Tawangsari	Pundungrejo	1,76	33,33	2
74.	Weru	Karakan	1,72	37,02	2
75.	Gatak	Blimbing	1,72	38,08	2
76.	Mojolaban	Tegalmade	1,70	36,87	2
77.	Tawangsari	Tambakboyo	1,69	33,33	2
78.	Grogol	Banaran	1,67	37,98	2
79.	Gatak	Jati	1,54	37,24	2
80.	Gatak	Wironanggan	1,51	37,43	2
81.	Mojolaban	Dukuh	1,50	36,58	2
82.	Tawangsari	Watubonang	1,48	35,58	2
83.	Gatak	Trangsan	1,45	36,04	2
84.	Bulu	Tiyaran	1,45	32,20	2
85.	Polokarto	Bakalan	1,40	35,95	2
86.	Polokarto	Mranggen	1,40	35,93	2
87.	Bulu	Malangan	1,33	34,17	2
88.	Baki	Kudu	1,28	33,72	2
89.	Gatak	Geneng	1,27	37,29	2
90.	Sukoharjo	Kenep	1,25	33,29	2
91.	Mojolaban	Plumbon	1,19	34,46	2
92.	Bulu	Gentan	1,15	37,45	2
93.	Mojolaban	Gadingan	1,15	31,50	2
94.	Grogol	Kadokan	1,14	34,59	2
95.	Baki	Waru	1,12	32,36	2

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Indikator Utama	Indikator Pendukung	Prioritas
			Kemiskinan Ekstrem	Persentase Individu Usia 15-59 Tahun Tidak Bekerja Menurut Status Kesejahteraan 40% Terendah	
96.	Nguter	Plesan	1,11	36,89	2
97.	Mojolaban	Klumprit	1,10	35,62	2
98.	Weru	Karangmojo	1,09	31,26	2
99.	Gatak	Luwang	1,08	37,42	2
100.	Bulu	Lengking	1,03	36,93	2
101.	Mojolaban	Cangkol	1,00	37,03	2
102.	Polokarto	Jatisobo	1,00	33,47	2
103.	Nguter	Tanjungrejo	0,96	36,14	2
104.	Bendosari	Paluhombo	0,91	29,60	2
105.	Polokarto	Godog	0,87	37,63	2
106.	Weru	Weru	0,81	31,48	2
107.	Sukoharjo	Banmati	0,80	34,73	2
108.	Baki	Mancasan	0,77	35,30	2
109.	Kartasura	Gumpang	0,73	40,49	3
110.	Mojolaban	Joho	0,73	39,17	3
111.	Tawang Sari	Kateguhan	0,66	44,03	3
112.	Kartasura	Pucangan	0,64	46,39	3
113.	Kartasura	Singopuran	0,63	46,47	3
114.	Nguter	Tanjung	0,61	39,53	3
115.	Mojolaban	Sapen	0,61	39,75	3
116.	Mojolaban	Wirun	0,61	42,58	3
117.	Kartasura	Kertonatan	0,55	43,64	3
118.	Bulu	Puron	0,53	38,17	3
119.	Grogol	Gedangan	0,46	38,71	3
120.	Baki	Gentan	0,46	41,12	3
121.	Weru	Tegalsari	0,45	38,56	3
122.	Baki	Kadilangu	0,44	38,57	3
123.	Baki	Purbayan	0,44	41,93	3
124.	Gatak	Sraten	0,43	49,02	3
125.	Gatak	Mayang	0,41	42,53	3
126.	Mojolaban	Bekonang	0,39	40,76	3
127.	Sukoharjo	Gayam	0,36	44,21	3
128.	Kartasura	Pabelan	0,35	43,63	3
129.	Polokarto	Genengsari	0,35	38,40	3
130.	Kartasura	Gonilan	0,32	44,68	3
131.	Sukoharjo	Joho	0,30	42,08	3
132.	Bendosari	Sugihan	0,27	39,00	3
133.	Gatak	Kagokan	0,26	40,13	3
134.	Grogol	Grogol	0,19	42,20	3
135.	Nguter	Pondok	0,13	39,70	3
136.	Bendosari	Jombor	0,13	42,47	3
137.	Grogol	Madegondo	0,12	41,83	3
138.	Sukoharjo	Jetis	0,12	42,30	3
139.	Baki	Duwet	0,74	34,89	4
140.	Bulu	Ngasinan	0,72	36,54	4
141.	Weru	Jatingarang	0,72	37,80	4
142.	Gatak	Tempel	0,67	38,10	4
143.	Baki	Gedongan	0,64	32,51	4
144.	Baki	Siwal	0,61	35,84	4

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Indikator Utama	Indikator Pendukung	Prioritas
			Kemiskinan Ekstrem	Persentase Individu Usia 15-59 Tahun Tidak Bekerja Menurut Status Kesejahteraan 40% Terendah	
145.	Weru	Karanganyar	0,60	34,46	4
146.	Tawangsari	Pojok	0,59	38,08	4
147.	Bendosari	Bendosari	0,57	36,42	4
148.	Polokarto	Kayuapak	0,52	36,86	4
149.	Grogol	Pandeyan	0,50	34,86	4
150.	Polokarto	Pranan	0,47	32,50	4
151.	Tawangsari	Ponowaren	0,46	37,08	4
152.	Weru	Grogol	0,45	36,69	4
153.	Bendosari	Gentan	0,44	33,86	4
154.	Nguter	Nguter	0,42	38,10	4
155.	Tawangsari	Lorog	0,41	34,75	4
156.	Baki	Menuran	0,37	34,09	4
157.	Mojolaban	Kragilan	0,35	32,60	4
158.	Baki	Bentakan	0,34	34,99	4
159.	Polokarto	Tepisari	0,32	37,78	4
160.	Nguter	Daleman	0,32	37,43	4
161.	Tawangsari	Kedungjambal	0,31	35,91	4
162.	Mojolaban	Demakan	0,28	37,22	4
163.	Polokarto	Bugel	0,26	35,89	4
164.	Sukoharjo	Bulakrejo	0,21	38,09	4
165.	Bendosari	Mulur	0,19	36,81	4
166.	Tawangsari	Tangkisan	0,14	37,36	4
167.	Grogol	Langenharjo	0,13	37,83	4

5.2.3. Lokasi Prioritas Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan (Bidang Infrastruktur dasar)

Pelaksanaan program untuk meminimalkan kantong kemiskinan diutamakan bagi lokasi desa/kelurahan prioritas untuk percepatan penurunan kemiskinan ekstrem pada bidang infrastruktur dasar dapat dikonsentrasikan pada desa/kelurahan yang termasuk prioritas 1/merah, terdapat sebanyak 64 desa/kelurahan.



Keterangan:

- Prioritas 1 : Kemiskinan Ekstrem Tinggi dan Persentase Keluarga Prioritas Penanganan RTLH Menurut Status Kesejahteraan 40% Terendah Tinggi
- Prioritas 2 : Kemiskinan Ekstrem Tinggi dan Persentase Keluarga Prioritas Penanganan RTLH Menurut Status Kesejahteraan 40% Terendah Rendah
- Prioritas 3 : Kemiskinan Ekstrem Rendah dan Persentase Keluarga Prioritas Penanganan RTLH Menurut Status Kesejahteraan 40% Terendah Tinggi
- Prioritas 4 : Kemiskinan Ekstrem Rendah dan Persentase Keluarga Prioritas Penanganan RTLH Menurut Status Kesejahteraan 40% Terendah Rendah

Gambar 5.6 Grafik Desa/Kelurahan Prioritas Untuk Percepatan Penurunan Kemiskinan Ekstrem Pada Bidang Infrastruktur Dasar

Selengkapnya persebaran desa/kelurahan prioritas untuk percepatan penurunan kemiskinan ekstrem pada bidang infrastruktur dasar dari sisi kemiskinan ekstrem dan keluarga prioritas penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menurut status kesejahteraan 40% terendah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.7 Desa/Kelurahan Prioritas Untuk Percepatan Penurunan Kemiskinan Ekstrem Pada Bidang Infrastruktur Dasar

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Indikator Utama	Indikator Pendukung	Prioritas
			Kemiskinan Ekstrem	Persentase Keluarga Prioritas Penanganan RTLH Menurut Status Kesejahteraan 40% Terendah	
1.	Bulu	Sanggung	4,73	42,69	1
2.	Bulu	Kamal	4,69	58,48	1
3.	Nguter	Jangglengan	4,21	42,09	1
4.	Polokarto	Kenokorejo	4,12	37,80	1
5.	Bulu	Kedungsono	3,50	36,16	1
6.	Nguter	Lawu	3,48	36,49	1
7.	Nguter	Celep	3,16	44,90	1
8.	Bendosari	Manisharjo	3,08	52,60	1
9.	Bendosari	Mojorejo	3,02	54,41	1
10.	Gatak	Trosemi	2,87	29,55	1
11.	Bendosari	Jagan	2,76	55,72	1
12.	Bendosari	Puhgogor	2,65	38,15	1
13.	Polokarto	Rejosari	2,63	36,92	1
14.	Tawangsari	Majasto	2,60	63,04	1
15.	Polokarto	Ngombakan	2,59	31,40	1
16.	Nguter	Gupit	2,56	38,61	1
17.	Bendosari	Cabeyan	2,34	42,99	1
18.	Nguter	Juron	2,24	35,76	1
19.	Weru	Ngreco	2,24	49,48	1
20.	Nguter	Serut	2,15	30,17	1
21.	Bendosari	Mertan	2,15	42,24	1
22.	Polokarto	Kemasan	2,12	29,51	1
23.	Weru	Karangwuni	2,10	50,90	1
24.	Bulu	Kunden	2,05	48,88	1
25.	Weru	Krajan	2,04	52,91	1
26.	Nguter	Pengkol	2,04	39,95	1
27.	Sukoharjo	Kriwen	2,02	52,65	1
28.	Bulu	Bulu	2,00	44,38	1
29.	Grogol	Parangjoro	1,98	28,67	1
30.	Sukoharjo	Sonorejo	1,87	44,09	1
31.	Weru	Alasombo	1,83	46,22	1
32.	Polokarto	Polokarto	1,78	26,88	1
33.	Sukoharjo	Combongan	1,77	29,90	1
34.	Tawangsari	Pundungrejo	1,76	64,78	1
35.	Tawangsari	Grajegan	1,73	48,65	1
36.	Weru	Karakan	1,72	38,07	1
37.	Tawangsari	Tambakboyoy	1,69	52,85	1
38.	Bulu	Karangasem	1,68	29,82	1
39.	Weru	Tawang	1,57	48,13	1
40.	Gatak	Jati	1,54	37,46	1
41.	Tawangsari	Watubonang	1,48	42,28	1
42.	Sukoharjo	Dukuh	1,47	35,15	1
43.	Grogol	Teluk	1,47	29,70	1
44.	Bulu	Tiyaran	1,45	48,62	1
45.	Polokarto	Bakalan	1,40	26,82	1

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Indikator Utama	Indikator Pendukung	Prioritas
			Kemiskinan Ekstrem	Persentase Keluarga Prioritas Penanganan RTLH Menurut Status Kesejahteraan 40% Terendah	
46.	Polokarto	Mranggen	1,40	25,77	1
47.	Nguter	Kedungwinong	1,36	49,48	1
48.	Bulu	Malangan	1,33	55,83	1
49.	Polokarto	Bulu	1,26	27,51	1
50.	Bulu	Gentan	1,15	39,43	1
51.	Sukoharjo	Bulakan	1,13	37,73	1
52.	Nguter	Plesan	1,11	53,13	1
53.	Weru	Karangmojo	1,09	31,47	1
54.	Bulu	Lengking	1,03	37,76	1
55.	Nguter	Tanjungrejo	0,96	25,48	1
56.	Bendosari	Paluhombo	0,91	66,80	1
57.	Nguter	Baran	0,89	33,33	1
58.	Polokarto	Godog	0,87	25,81	1
59.	Bendosari	Sidorejo	0,86	30,77	1
60.	Weru	Weru	0,81	44,39	1
61.	Tawangsari	Dalangan	0,80	37,66	1
62.	Sukoharjo	Banmati	0,80	43,76	1
63.	Sukoharjo	Mandan	0,77	35,27	1
64.	Weru	Karangtengah	0,77	46,01	1
65.	Gatak	Krajan	2,88	15,81	2
66.	Grogol	Kwarasan	2,76	7,01	2
67.	Grogol	Pondok	2,48	11,73	2
68.	Gatak	Klaseman	2,40	12,55	2
69.	Baki	Jetis	2,29	23,00	2
70.	Polokarto	Karangwuni	2,26	21,13	2
71.	Baki	Ngrombo	2,05	17,08	2
72.	Mojolaban	Laban	1,82	19,02	2
73.	Baki	Bakipandeyan	1,81	14,57	2
74.	Gatak	Blimbing	1,72	11,27	2
75.	Kartasura	Ngemplak	1,71	13,36	2
76.	Mojolaban	Tegalmade	1,70	18,15	2
77.	Grogol	Banaran	1,67	8,13	2
78.	Grogol	Sanggrahan	1,66	8,48	2
79.	Gatak	Wironanggan	1,51	22,34	2
80.	Mojolaban	Dukuh	1,50	10,38	2
81.	Gatak	Trangsan	1,45	10,02	2
82.	Sukoharjo	Begajah	1,43	14,31	2
83.	Sukoharjo	Sukoharjo	1,40	12,99	2
84.	Baki	Kudu	1,28	18,75	2
85.	Gatak	Geneng	1,27	18,43	2
86.	Sukoharjo	Kenep	1,25	16,76	2
87.	Bendosari	Toriyo	1,24	16,10	2
88.	Mojolaban	Plumbon	1,19	14,75	2
89.	Kartasura	Wirogunan	1,18	17,67	2
90.	Mojolaban	Gadingan	1,15	19,30	2
91.	Grogol	Kadokan	1,14	15,54	2
92.	Polokarto	Wonorejo	1,13	10,41	2
93.	Gatak	Sanggung	1,12	19,92	2

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Indikator Utama	Indikator Pendukung	Prioritas
			Kemiskinan Ekstrem	Persentase Keluarga Prioritas Penanganan RTLH Menurut Status Kesejahteraan 40% Terendah	
94.	Baki	Waru	1,12	13,04	2
95.	Mojolaban	Klumprit	1,10	12,97	2
96.	Grogol	Manang	1,10	9,21	2
97.	Gatak	Luwang	1,08	12,90	2
98.	Mojolaban	Palur	1,08	23,13	2
99.	Mojolaban	Cangkol	1,00	9,73	2
100.	Polokarto	Jatisobo	1,00	20,15	2
101.	Kartasura	Makamhaji	0,97	16,49	2
102.	Kartasura	Ngadirejo	0,95	9,66	2
103.	Kartasura	Ngabeyan	0,91	16,30	2
104.	Grogol	Cemani	0,90	3,99	2
105.	Mojolaban	Triyagan	0,89	3,31	2
106.	Nguter	Kepuh	0,84	23,27	2
107.	Kartasura	Kartasura	0,81	13,42	2
108.	Baki	Mancasan	0,77	17,88	2
109.	Bulu	Ngasinan	0,72	52,49	3
110.	Weru	Jatingarang	0,72	42,74	3
111.	Gatak	Tempel	0,67	33,00	3
112.	Tawangsari	Kateguhan	0,66	27,16	3
113.	Kartasura	Pucangan	0,64	32,39	3
114.	Nguter	Tanjung	0,61	46,85	3
115.	Weru	Karanganyar	0,60	41,45	3
116.	Tawangsari	Pojok	0,59	33,88	3
117.	Bendosari	Bendosari	0,57	44,68	3
118.	Bulu	Puron	0,53	33,18	3
119.	Polokarto	Pranan	0,47	37,46	3
120.	Tawangsari	Ponowaren	0,46	42,07	3
121.	Weru	Tegalsari	0,45	38,75	3
122.	Weru	Grogol	0,45	32,29	3
123.	Baki	Kadilangu	0,44	41,21	3
124.	Tawangsari	Lorog	0,41	41,58	3
125.	Baki	Bentakan	0,34	38,31	3
126.	Polokarto	Tepisari	0,32	50,63	3
127.	Nguter	Daleman	0,32	37,05	3
128.	Tawangsari	Kedungjambal	0,31	32,28	3
129.	Gatak	Kagokan	0,26	28,51	3
130.	Polokarto	Bugel	0,26	25,36	3
131.	Sukoharjo	Bulakrejo	0,21	38,85	3
132.	Tawangsari	Tangkisan	0,14	31,01	3
133.	Nguter	Pondok	0,13	26,45	3
134.	Baki	Duwet	0,74	14,66	4
135.	Kartasura	Gumpang	0,73	6,29	4
136.	Mojolaban	Joho	0,73	8,29	4
137.	Baki	Gedongan	0,64	14,60	4
138.	Kartasura	Singopuran	0,63	13,26	4
139.	Baki	Siwal	0,61	10,55	4
140.	Mojolaban	Sapen	0,61	12,35	4
141.	Mojolaban	Wirun	0,61	10,94	4

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Indikator Utama	Indikator Pendukung	Prioritas
			Kemiskinan Ekstrem	Persentase Keluarga Prioritas Penanganan RTLH Menurut Status Kesejahteraan 40% Terendah	
142.	Kartasura	Kertonatan	0,55	20,77	4
143.	Polokarto	Kayuapak	0,52	15,29	4
144.	Grogol	Pandeyan	0,50	14,26	4
145.	Grogol	Gedangan	0,46	11,36	4
146.	Baki	Gentan	0,46	8,59	4
147.	Bendosari	Gentan	0,44	13,75	4
148.	Baki	Purbayan	0,44	4,92	4
149.	Gatak	Sraten	0,43	22,33	4
150.	Nguter	Nguter	0,42	18,14	4
151.	Gatak	Mayang	0,41	6,83	4
152.	Mojolaban	Bekonang	0,39	16,13	4
153.	Baki	Menuran	0,37	19,24	4
154.	Sukoharjo	Gayam	0,36	8,18	4
155.	Kartasura	Pabelan	0,35	13,92	4
156.	Mojolaban	Kragilan	0,35	24,65	4
157.	Polokarto	Genengsari	0,35	18,00	4
158.	Kartasura	Gonilan	0,32	11,27	4
159.	Sukoharjo	Joho	0,30	3,01	4
160.	Mojolaban	Demakan	0,28	16,74	4
161.	Bendosari	Sugihan	0,27	20,75	4
162.	Grogol	Grogol	0,19	11,56	4
163.	Bendosari	Mulur	0,19	21,17	4
164.	Grogol	Langenharjo	0,13	5,56	4
165.	Bendosari	Jombor	0,13	10,93	4
166.	Grogol	Madegondo	0,12	7,45	4
167.	Sukoharjo	Jetis	0,12	1,44	4

BAB VI PENUTUP

Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025–2029 disusun sebagai dokumen kebijakan strategis yang berfungsi mengarahkan, mengoordinasikan, dan mengintegrasikan seluruh upaya penanggulangan kemiskinan daerah secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan. Dokumen ini merupakan penjabaran operasional dari visi dan arah pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025–2029, sekaligus diselaraskan dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi, termasuk agenda penurunan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Dengan demikian, RPKD tidak hanya berperan sebagai dokumen perencanaan teknokratis, tetapi juga sebagai instrumen penguatan tata kelola pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Melalui Bab I hingga Bab V, dokumen ini telah menguraikan secara komprehensif landasan normatif, kondisi dan profil kemiskinan daerah, arah kebijakan serta strategi penanggulangan kemiskinan, hingga lokasi prioritas yang disusun berdasarkan pendekatan multidimensi dan berbasis bukti. Analisis kondisi kemiskinan menunjukkan bahwa permasalahan kemiskinan di Kabupaten Sukoharjo bersifat kompleks dan saling terkait antara aspek ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan, perumahan, serta akses terhadap layanan dasar dan kesempatan berusaha. Oleh karena itu, penanggulangan kemiskinan tidak dapat dilakukan melalui pendekatan sektoral semata, melainkan memerlukan strategi terpadu yang mengombinasikan program intervensi langsung, intervensi tidak langsung, dan intervensi penunjang secara simultan dan berkesinambungan.

Rencana aksi penanggulangan kemiskinan yang dirumuskan dalam dokumen ini menegaskan pentingnya penguatan peran pemerintah daerah sebagai koordinator utama, sekaligus membuka ruang kolaborasi yang luas dengan berbagai pemangku kepentingan non-pemerintah. Keterlibatan dunia usaha melalui Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP), lembaga filantropi seperti BAZNAS, serta partisipasi aktif masyarakat menjadi elemen kunci dalam memperluas jangkauan intervensi dan meningkatkan efektivitas pemanfaatan sumber daya. Pendekatan *public-private partnership* yang diintegrasikan dalam rencana aksi daerah mencerminkan komitmen Kabupaten Sukoharjo untuk membangun ekosistem penanggulangan kemiskinan yang inklusif, kolaboratif, dan adaptif terhadap dinamika sosial ekonomi daerah.

Keberhasilan implementasi RPKD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025–2029 sangat ditentukan oleh konsistensi kebijakan, sinergi lintas perangkat daerah, serta kemampuan seluruh pemangku kepentingan dalam menerjemahkan rencana aksi ke dalam program dan kegiatan yang tepat sasaran. Selain itu, pemanfaatan data terpadu dan akurat, penguatan koordinasi kelembagaan, serta penyesuaian kebijakan secara responsif terhadap perubahan kondisi sosial ekonomi menjadi prasyarat penting agar tujuan penurunan kemiskinan

dapat dicapai secara optimal. Dalam konteks ini, RPKD diharapkan menjadi pedoman bersama yang mampu menjembatani kepentingan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Dengan ditetapkannya Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025–2029, diharapkan seluruh pemangku kepentingan memiliki kesamaan arah dan komitmen dalam upaya menurunkan angka kemiskinan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. Dokumen ini menjadi landasan strategis bagi pemerintah daerah dan mitra pembangunan dalam mewujudkan Kabupaten Sukoharjo yang lebih inklusif, berkeadilan, dan sejahtera, sejalan dengan visi pembangunan daerah dan cita-cita pembangunan nasional.

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI